

- 1. MEMOGOKAN
- 2. PETANI
- 3. DISERTASI ALAPERLIK

tel.
:31.892 83471
Sia

DISERTASI

PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG PETANI DALAM PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN SUBSISTENSI



30000059731517



AN

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

3000005973151-7

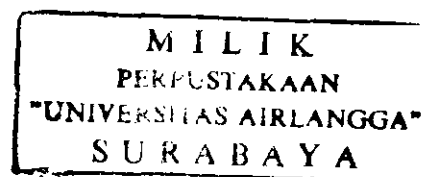
HOTMAN SIAHAAN

Disertasi / Esai / Program Sibaan

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

**PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG PETANI
DALAM
PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI
SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN
SUBSISTENSI**

300000597 3151



DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
di bawah pimpinan Rektor Universitas Airlangga**

Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr.

**telah dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga
pada hari Kamis
tanggal 25 Juli 1996
pukul 10.00 WIB**

OLEH :

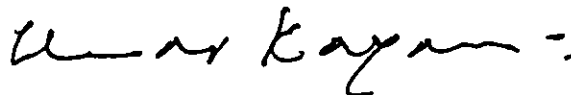
**HOTMAN SIAHAAN
NIM. 099010835 D**

Lembar Pengesahan

Disertasi ini telah disetujui
tanggal 10-10-1996

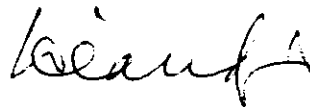
oleh

Promotor



Prof. Dr. Umar Kayam
NIP 130611439

Ko-Promotor



Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
NIP 130178043

Telah diuji pada ujian tertutup
Tanggal 20 April 1996

PANITIA PENGUJI DISERTASI

- Ketua : Prof. Dr. Loekman Soetrisno
Anggota : 1. Prof. Dr. Umar Kayam
2. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
3. Dr. Nasikun
4. Dr. Mochtar Mas' oed
5. Widodo J.P., dr., MS, MPH, Dr. PH
6. Dr. Dede Oetomo

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor: 3723/J03/PP/1996
Tanggal 30 April 1996

UCAPAN TERIMA KASIH

Disertasi ini ditulis dengan segala kendala, keterbatasan pengetahuan, kurangnya kegigihan, keuletan, kemacetan berpikir, rasa tidak percaya diri, maupun keberanian pribadi. Banyak faktor yang membuat berbagai kendala itu memerangkap penulis hingga sampai pada tahap yang hampir-hampir "apati". Sekalipun akhirnya apatisme itu cair, semua itu tak terlepas dari jasa banyak orang yang selama ini tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama ini untuk mengikuti, dan menyelesaikan pendidikan program Doktor. Kepada Prof. Dr. H. Soedijono, dr., Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga selayaknya juga disampaikan terima kasih.

Juga disampaikan terima kasih kepada mantan Rektor Universitas Airlangga, Prof. H. Soedarso Djojonegoro, dr., dan mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Soetaryadi, Apt., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Doktor.

Kepada Promotor, Prof. Dr. Umar Kayam, yang dengan segala kebijaksanaan, kearifan, serta kesabarannya menghadapi penulis selama ini, selayaknya ucapan terima kasih yang paling pertama dan utama harus disampaikan. Tak banyak orang yang mendapat peluang kearifan "Pak Ageng", dan itu sungguh merupakan berkah tersendiri bagi pribadi penulis. Juga kepada Ko-Promotor, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto MPA, dengan segala "ke-

gera menyelesaikan disertasi ini, sungguh tak terbilang rasa terima kasih.

Kepada Dr. Nasikun, orang yang sangat memahami keterbatasan kemampuan intelektual penulis selama ini, selayaknya disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang dalam. Juga kepada Prof. Dr. Loekman Soetrisno, figur yang penulis kagumi dari kejauhan, dan Dr. Mochtar Mas'ood, atas bantuan untuk beberapa bahan penting.

Kepada Dr. Kuntowidjoyo, di tengah-tengah keberadaannya masih memberi peluang kepada penulis untuk suatu bantuan yang begitu langka. Kepada Widodo J.P., dr., MS, MPH, Dr. PH, dan Dr. Dede Oetomo, juga terima kasih yang dalam layak penulis sampaikan atas segala bantuan dan koreksinya.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan di LP3 Yogya, Ashadi Siregar, Daniel Dhakidae, Masmimar Mangiang, Rondang Pasaribu, Slamet Riyadi Sabrawi, atas segala suasana perdebatan intelektual setiap kali penulis datang ke Yogyakarta.

Kepada Ibu Toety Azis, figur yang tidak mampu penulis lukiskan "kehadirannya" selama ini terhadap pribadi maupun keluarga, rasa hormat yang paling dalam menyatu dengan segala terima kasih itu.

Kepada Sdr. Tjahjo Purnomo W., sosok yang paling menentukan di tahap akhir penulisan disertasi ini dengan segala kritik dan ketidaksabarannya, kecanggihannya dalam editing, menyiasati teknik maupun rancangan bangun pengetikan disertasi ini, penulis hanya dapat menyampaikan: "Bung, Anda sungguh memahami arti sebuah persahabatan".

Terima kasih juga kepada kolega Doddy Sumbodo Singgih yang membantu pengumpulan data di lapangan dengan para mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unair, peserta kuliah lapangan "Masyarakat Desa". Demikian juga kepada Dra. Sutinah MS, dan tim yang telah membantu beberapa bahan penting, dan juga kepada Emy Susanti, Dwi Narwoko, Sudarso, Siti Norma, di Jurusan Sosiologi FISIP Unair. Kepada kolega Ramlan Surbakti.

atas bantuan beberapa bahan penting, juga kepada Samekto Hartoyo dkk., atas segala gugatannya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini, sepantasnya penulis berterima kasih.

Kepada Ayahanda (alm.) L. Siahaan, dan Ibunda T. br. Pardede, atas segala pengorbanannya yang tiada terbatas, semoga *pasu-pasunya*-lah yang membantu penulis menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, di atas segalanya itu, kepada *boru ni raja i*, Joyce Cecilia Rorimpandey, dan kedua *boru ni ampuan*, Deang Parujar Siahaan dan Gredha Sonti Rea Siahaan, yang tiap kali bertanya: "sudah halaman ke berapa, ayah?", adalah puncak dari segala terima kasih itu. Kepada merekalah sesungguhnya disertasi ini dipersembahkan.

HOTMAN SIAHAAN

RINGKASAN

Studi ini bertujuan mengetahui respons petani terhadap program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang dibentuk melalui Inpres No. 9 Tahun 1975, yang sejak diterapkan ternyata menimbulkan berbagai bentuk penolakan dan protes sosial petani, baik secara terbuka maupun terselubung.

Masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah sejauh mana realitas pembangkangan terselubung dalam program TRI merupakan reaksi yang rasional terhadap hegemoni birokrasi yang gagal mengartikulasikan kepentingan para petani dalam program TRI, dan sejauh mana pembangkangan terselubung tersebut sebagai upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi petani demi kelangsungan hidupnya.

Studi ini dilakukan di wilayah Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan menggunakan metode *field research* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara berstruktur dalam *depth interview*. Empat desa penelitian dipilih secara *purposive* dari 17 desa di wilayah Kecamatan Papar. Responden berjumlah 130 petani peserta TRI juga dipilih secara *purposive*. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, sedangkan untuk data yang bersifat diskret kuantitatif, interpretasi dilakukan dengan deskripsi skala nominal, ordinal, maupun interval.

Dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh James C. Scott, *Everyday Forms of Peasant Resistance*, dan *Rational-actors Theory* yang dikemukakan oleh Samuel Popkin, studi ini menguji empat hipotesis. Pertama, pembangkangan terselubung yang dilakukan petani dalam program TRI adalah sebagai reaksi rasional guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi dalam program TRI. Ke-

dua, pembangkangan terselubung yang dilakukan petani muncul di dalam tata hubungan produksi antara petani miskin dan petani kaya, dan antara petani dan berbagai institusi yang mendominasi tata hubungan produksi tersebut lewat aplikasi program TRI. Ketiga, dominasi jaringan birokrasi pemerintah di dalam program TRI, yang gagal mengartikulasikan kepentingan petani, merupakan faktor yang paling menentukan lahirnya realitas pembangkangan terselubung tersebut. Dan keempat, pembangkangan terselubung yang dilakukan para petani di dalam program TRI adalah sebagai upaya untuk mempertahankan batas keamanan subsistensi dengan menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi diri para petani tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan, keempat hipotesis yang diajukan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Kenyataan juga menunjukkan TRI lebih merupakan suatu usaha tani kontrak (*contract farming*) yang sarat muatan kepentingan ekonomi-politik negara guna mencapai tujuan industri gula nasional. TRI sebagai *contract farming* berlangsung di dalam konteks fragmentasi tanah, di mana intensifikasi justru menimbulkan biaya-biaya sosial tinggi.

Pembangkangan terselubung berlangsung di dalam konteks kuatnya hegemoni negara, dan hegemoni aparatur negara melalui birokrasi TRI, dan pembangkangan tersebut merupakan alternatif untuk mendapatkan *selective incentives* di dalam konteks yang hegemonik. Pembangkangan terselubung itu menimbulkan paradoks dengan Inpres No. 9/1975 yang menghendaki agar petani menjadi "tuan di atas tanahnya sendiri", namun di dalam kenyataan para petani jauh dari menjadi "tuan", sebab justru menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Akibatnya para petani melakukan pembangkangan terselubung dengan memilih keluar dari sistem produksi TRI, dan justru di sana timbul paradoks, sebab pada dasarnya pembangkangan terselubung tersebut membuka peluang efisiensi dan efektivitas dalam sistem produksi. Namun dalam kenyataan, efisiensi dan efektivitas tersebut dire-

duksi oleh tingginya regulasi dalam program TRI.

Secara teoritis studi ini mengajukan posisi teori pembangkangan terselubung dalam konteks teori-teori yang membicarakan protes-protes sosial dan tindakan kolektif petani. Kesimpulannya, teori pembangkangan terselubung petani TRI dapat dikategorikan sebagai *everyday forms of peasant resistance*, namun di dalam konteks mudarnya ikatan-ikatan tradisi desa, sehingga pembangkangan terselubung petani tersebut tidak dalam upaya untuk mempertahankan tradisi yang mengalami erosi akibat komersialisasi dan perluasan pasar. Teori Pembangkangan Terselubung merupakan tindakan rasional dan individual para petani, tapi bukan dalam kategori teori Pilihan Rasional sebagaimana dikemukakan Samuel Popkin, sebab pembangkangan tersebut tidak bersifat terbuka, berlangsung secara informal, tidak dinyatakan, dan dalam skala kecil.

Dengan demikian posisi teori Pembangkangan Terselubung yang ditemukan dalam studi ini merupakan eklektisasi yang berada di antara teori *everyday forms of peasant resistance*, dan teori Pilihan Rasional, yang dihubungkan oleh faktor kuatnya hegemoni negara, baik secara ideologis maupun material.

ABSTRACT

Key Words: Disguised resistance

The intensified smallholder sugar cane programme

Everyday form of peasant resistance

Rational choice

This study aims to find out peasants' response to the Intensified Smallholder Sugar Cane Program (TRI) set up through Presidential Instruction No. 9/1975, which has changed the relations of production in sugar cane cultivation from those in which peasants lease their land to sugar factories to those in which peasants are in control of their own land.

The problem that this study attempts to answer is how far the appearance of disguised resistance is a relational response of peasants to the TRI program in the context of mobilization and coercion instead of participation. The other problem to be answered is whether the disguised resistance is a form of individual or communal awareness to defend the security of subsistence as a result of the failure of the bureaucracy to articulate the interests of peasants vis-a-vis those of the government in the TRI program.

The study uses theoretical approaches concerning moral economy and everyday forms of peasant resistance as proposed by James C. Scott, combined with theoretical approaches concerning rational choice and political economy as put forward by Samuel Popkin. In addition, it uses theoretical approaches discussing social movements and protest from different experts, based on social class as well as individual factors.

The method used is field research with data collection techniques of

structured in-depth interviews. The research sites have been purposively selected in four villages in Papar District, Kediri Regency, East Java Province. Research population consists of TRI peasants, while the sample is selected purposively. Data have been analyzed qualitatively. Data and phenomena gathered have been interpreted hermeneutically. Insofar as data are in the form of quantitatively discrete units, quantitative interpretation has been carried out to describe them through nominal, interval as well as ordinal scales.

Research results show that disguised resistance carried out by peasants in the TRI program is a rational reaction to defend the margin of subsistence security. Disguised resistance is carried out in the context of strong state hegemony through the dominance of bureaucracy in the TRI program which gives priority to mobilization and coercion instead of participation. The disguised resistance takes place in different manners, namely non-involvement in the production process, departure from the production process avoidance (the obligation to give up land to be planted with sugar cane in turns), avoidance of the process of felling and transporting sugar cane, sugar cane milling at another factory; even cane burning.

The theoretical implication of TRI peasants' disguised resistance is that it is counterproductive with regard to peasant movements that are open, organized, and political, because the penetration achieved through the resistance is only in the context of non-ideological hegemony. As a form of opposition, the disguised resistance of these peasants is categorized as an everyday form of peasant resistance, not as unorganized rural protest or organized rural rebellion, which are rational and individual reaction on the context of the waning of traditional rural social values in relations of production. As a theory, hegemony is a factor that binds together the disguised resistance theory, which is in turn a result of the eclecticization of the theory of everyday forms of resistance and rational actors theory.

DAFTAR ISI

	halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	25
1.3 Tinjauan Pustaka dan Pendekatan Teoritik.....	25
1.3.1 Teori-teori Protes Sosial Petani.....	31
1.3.2 Teori Moral Ekonomi dan Pilihan Rasional.....	55
1.3.3 Protes Sosial Petani di Jawa dan Gerakan Ratu Adil.....	69
1.4 Hipotesis.....	73
1.5 Metodologi.....	74
1.5.1 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	74
1.5.2 Daerah/Lokasi Penelitian.....	76
1.5.3 Populasi dan Teknik Sampling.....	77
1.5.4 Teknik Koleksi Data.....	78
1.6 Prosedur Penelitian.....	78
2. PROGRAM TRI DI KECAMATAN PAPAR.....	80
2.1 Papar, Kecamatan Terbuka.....	80
2.2 TRI di Wilayah Papar.....	86
2.3 "Glebagan", Pola Tanam Bergantian.....	89
2.3.1 Maduretno, Ekstensifikasi areal.....	89

	halaman
2.3.2 Ngampel, Sistem Kooperatif.....	92
2.3.3 Jambangan, "Glebagan Pola Enam".....	93
2.3.4 Papar, Antara TRI dan Digarap Sendiri.....	96
2.4 Organisasi dan Tata Kerja.....	97
2.4.1 Gugus Kerja.....	97
2.4.2 Forum Musyawarah Pabrik Gula (FMPG).....	98
2.4.3 Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah.....	99
2.4.4 Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (K2P2G)	100
2.4.5 Kelompok Tani.....	101
2.4.6 Pola Penggarapan Penanaman.....	102
2.4.7 Kredit.....	102
2.4.8 Tebang dan Angkut.....	106
2.4.9 Bagi Hasil.....	108
2.5 TRI sebagai Usaha Tani Kontrak (<i>Contract Farming</i>).....	109
3. PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG, UPAYA MEMPER- TAHANKAN SUBSISTENSI.....	121
3.1 Menyiasati "Glebagan".....	130
3.2 Konsentrasi Tanah.....	133
3.3 Menyiasati Tebang Angkut.....	150
3.4 Menyiasati Jadwal Giling.....	164
3.5 Menyiasati Rendemen dan Bagi Hasil.....	171
3.6 Siapa yang Diuntungkan?.....	177
3.7 Alternatif Mempertahankan Subsistensi.....	181
3.8 Hubungan antara Cara Menggerakkan Program TRI dan Pembangkangan Terselubung.....	182
3.9 Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Pem- bangkangan Terselubung.....	186
3.10 Alasan Melakukan Pembangkangan Terselubung.....	190

	halaman
3.11 Kesimpulan.....	193
4. KATEGORI TEORI PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG PETANI (IMPLIKASI TEORITIK).....	197
4.1 Pembangkangan Terselubung dalam Teori Protes Sosial.	198
4.2 Pembangkangan Terselubung dalam Konteks Hegemoni Negara.....	213
4.3 Kesimpulan.....	221
5. RANGKUMAN DAN KESIMPULAN UMUM.....	224
5.1 Rangkuman.....	224
5.2 Kesimpulan Umum.....	233
5.3 Rekomendasi.....	235
DAFTAR PUSTAKA.....	242
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Data Monografi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	
Lampiran 2 Peta Wilayah Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 : Areal Hasil per Hektare dan Produksi Pabrik-pabrik Gula di Jawa 1975-1980.....	5
Tabel 1.2 : Siklus Penanaman yang Khas untuk Sawah yang Disewakan ke Perusahaan Gula di Jawa Sesudah Tahun 1900.....	14
Tabel 1.3 : Sampel Petani TRI di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.....	78
Tabel 2.1 : Laporan Pemasukan Areal TRI Musim Tanam 1995/1996 Wilayah KUD Sri Gati, Papar, Sampai Dengan Tanggal 29 April 1995.....	88
Tabel 2.2 : Glebagan di desa Maduretno, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.....	90
Tabel 2.3 : Klasifikasi Kelompok TRI K1 dan K2 di desa Ngampel Menurut Susunan Keanggotaan dan Jumlah Luas Tanah.....	93
Tabel 2.4 : Susunan Anggota Kelompok Tani TRI MTT 1993-1994 Desa Jambangan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.....	95
Tabel 2.5 : Susunan Anggota Kelompok Tani TRI MTT 1993-1994, Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.....	97
Tabel 2.6 : Biaya Kredit TRI Lahan Sawah.....	105
Tabel 2.7 : Biaya Kredit TRI di Lahan Tegal (TRIT).....	106
Tabel 3.1 : Cara Perangkat Desa Menggerakkan Petani untuk Program TRI dan Program yang Lain	122

	halaman
Tabel 3.2 : Persepsi tentang Hak dan Kewajiban Petani Peserta TRI.....	123
Tabel 3.3 : Keterlibatan Petani dalam Proses Pengelolaan Tanaman TRI.....	126
Tabel 3.4 : Jenis Lahan dan Kategori TRI yang Dikelola Petani.....	126
Tabel 3.5 : Pengawasan dan Perawatan terhadap Perkembangan TRI Sehari-hari.....	128
Tabel 3.6 : Keterlibatan Petani dalam Lembaga-lembaga TRI.	129
Tabel 3.7 : Keluarga Pemilik Tanah Luas di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.....	134
Tabel 3.8 : Daftar Kelompok dan Luas Tanah.....	135
Tabel 3.9 : Pengetahuan Petani TRI tentang Ketentuan Jumlah Imbalan Pendapatan dari Tanaman Percobaan dan Perolehan Imbalan yang Diterima.....	137
Tabel 3.10 : Perolehan Tambahan Hasil pada Tebu Percobaan..	138
Tabel 3.11 : Kategori Kebun Bibit dan Proporsi Luas Tanah yang Ditanami Selama 10 Musim.....	139
Tabel 3.12 : Pengetahuan Petani tentang Ketentuan Jumlah Imbalan Penggunaan Lahan untuk Kebun Bibit.....	140
Tabel 3.13 : Tindakan Bila Terjadi Keterlambatan Tebang pada Tanaman Tebu Bibit.....	141
Tabel 3.14 : Sumber Informasi Teknik Penanaman Tebu TRIS I dan II.....	142
Tabel 3.15 : Sumber Informasi Teknik Pemupukan Tebu TRIS I dan II.....	143

	halaman
Tabel 3.16 : Pengetahuan Petani terhadap Kemasakan Optimal dan Jadwal Tebang.....	151
Tabel 3.17 : Pemberitahuan KUD tentang Jadwal Tebang kepada Petani.....	155
Tabel 3.18 : Tindakan Petani Menghadapi Tebu yang Terlambat Tebang.....	156
Tabel 3.19 : Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Tebang.....	158
Tabel 3.20 : Biaya Tebang TRI Selama Lima Musim Tanam.....	160
Tabel 3.21 : Alat Angkut yang Digunakan, Pihak yang Menentukan dan Proses Pengadaan.....	161
Tabel 3.22 : Biaya Angkut Tebu TRI Selama Lima Tahun Musim Tebang.....	162
Tabel 2.23 : Keterlibatan Petani dalam Proses Penimbangan Tebu.....	164
Tabel 3.24 : Sikap Petani Bila Terjadi Penundaan Penimbangan Tebu TRI Miliknya.....	165
Tabel 3.25 : Pemberitahuan Hasil Penimbangan kepada Petani yang Tak Tahu Terjadi Penundaan Penimbangan Tebu Miliknya.....	166
Tabel 3.26 : Asal Perolehan Modal untuk Proses Produksi TRI..	167
Tabel 3.27 : Keterlibatan Petani dalam Proses Perhitungan Rendemen.....	171
Tabel 3.28 : Pemberitahuan Hasil Perhitungan Rendemen kepada yang Tidak Terlibat Proses Perhitungan.....	172
Tabel 3.29 : Pengetahuan Besarnya Bagian yang Diterima PG dan Petani dalam Bagi Hasil TRI.....	173
Tabel 3.30 : Perolehan Bagian Hak Petani TRI Di Luar Bagian Sisa Hasil Usaha.....	174

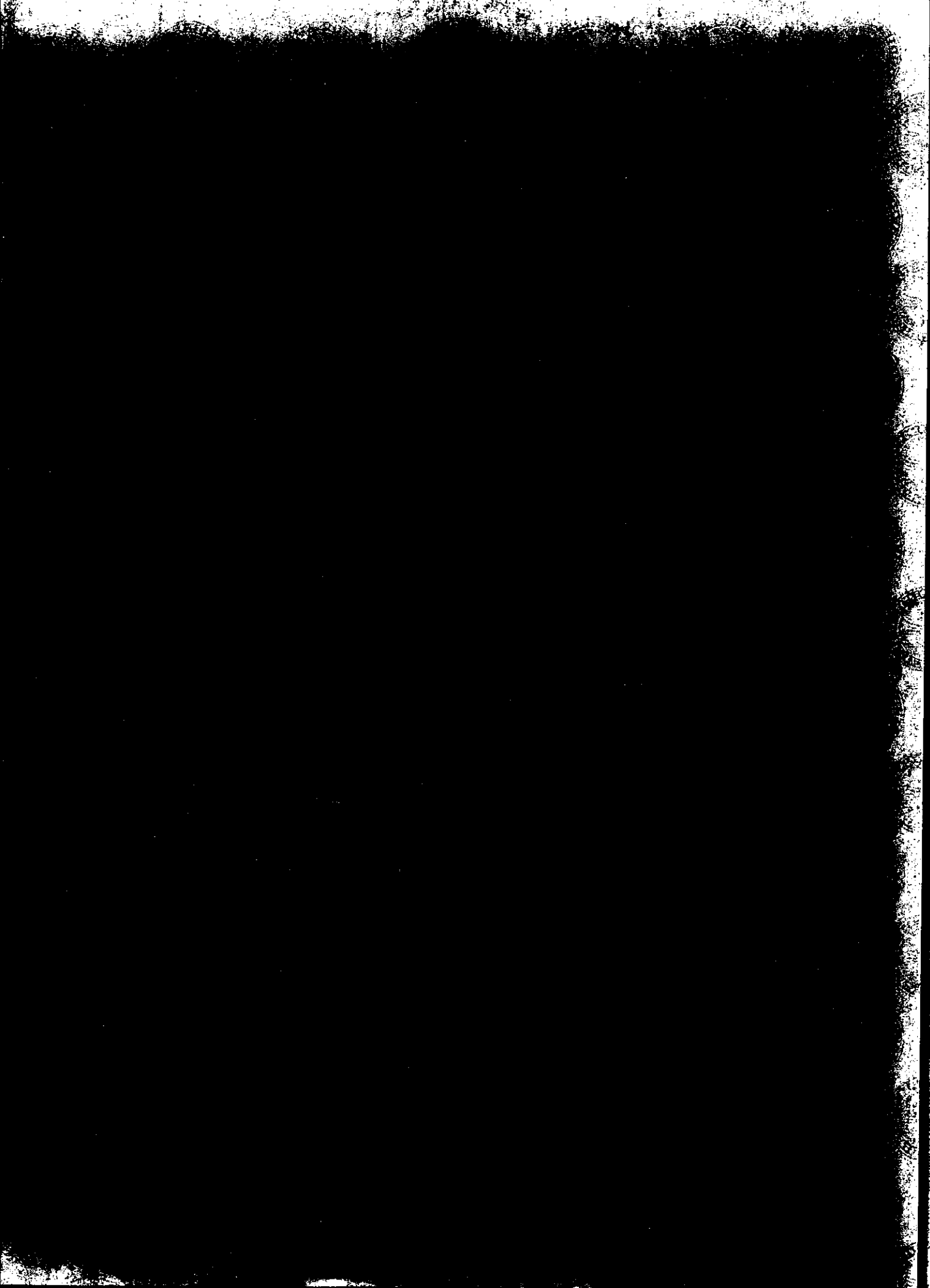
Tabel 3.31 : Pengeanaan Pungutan pada Gula Bagian Petani TRI.....	176
Tabel 3.32 : Pihak-pihak yang Lebih Diuntungkan dalam Program TRI.....	177
Tabel 3.33 : Perbandingan Keuntungan TRB dan TRI.....	178
Tabel 3.34 : Sumber Informasi Teknik Budi Daya Tebu Petani TRB yang Dikelola Sendiri.....	179
Tabel 3.35 : Pengelolaan Tanaman TRB.....	179
Tabel 3.36 : Jenis, Tempat, dan Waktu Bekerja sebagai Sumber Nafkah Lain.....	181
Tabel 3.37 : Hubungan antara Cara Menggerakkan Petani dan Keterlibatan dalam Proses Produksi.....	183
Tabel 3.38 : Hubungan antara Cara Menggerakkan Petani dan Tindakan Menyiasati Glebagan.....	184
Tabel 3.39 : Hubungan antara Cara Menggerakkan Petani dan Tindakan Menghadapi Tebu Terlambat Tebang.....	185
Tabel 3.40 : Hubungan antara Cara Menggerakkan Petani dan Tindakan Apabila Penundaan Timbang/Giling.....	186
Tabel 3.41 : Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Keterlibatan dalam Proses Produksi.....	187
Tabel 3.42 : Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Tindakan Menyiasati Glebagan.....	188
Tabel 3.43 : Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Tindakan Menghadapi Tebu Terlambat Tebang.....	189
Tabel 3.44 : Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Tindakan Apabila Penundaan Timbang/Giling.....	190

halaman

Tabel 3.45 : Hubungan antara Cara Menggerakkan Petani dan Alasan Melakukan Pembangkangan Terselubung..	191
Tabel 3.46 : Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Alasan Melakukan Pembangkangan Terselubung..	192

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 : The Effects of Principal Source of Income on the Economic and Political Behavior of Noncultivators	52
Gambar 4.2 : The Effects of Principal Source of Income on the Economic and Political Behavior of Cultivators.....	54



BAB 1

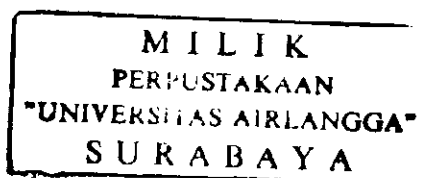
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai masalah yang dihadapi petani dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) banyak disorot para ahli, antara lain meliputi, ruwetnya perkreditan, banyaknya pungutan oleh berbagai lembaga, serta berbagai paksaan oleh aparat birokrasi yang terkait dalam memobilisasi petani supaya ikut dalam program TRI.

Program TRI dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 1975 yang memuat, antara lain:

1. Mengambil langkah-langkah untuk mengalihkan pengusaha tanaman tebu untuk produksi gula diatas tanah sewa, ke arah tanaman tebu rakyat dengan tetap meningkatkan produksi gula.
2. Melaksanakan program intensifikasi tanaman tebu rakyat dengan sistim Bimas secara bertahap, sehingga tercapai maksud pada diktum pertama, dengan menempuh langkah-langkah berikut:
 - a. Intensifikasi pada tanaman tebu yang sudah biasa diusahakan oleh rakyat, dan intensifikasi pada tanaman tebu yang diusahakan oleh petani dari pengalihan tanah sewa, untuk selanjutnya dibina supaya menjadi petani penanam tebu di atas tanahnya sendiri.
 - b. Agar pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat berjalan dengan sebaik-baiknya, pabrik gula supaya bertindak sebagai pemimpin kerja para petani, melakukan penyuluhan/bimbingan teknis pengusaha tanaman tebu rakyat, menyediakan bibit unggul, menyediakan dan melayani kebutuhan sarana produksi, serta membantu memberikan petunjuk dan pelayanan dalam memberikan kredit kepada para petani dengan memanfaatkan tenaga-tenaga tetap yang ada di pabrik-pabrik gula.
 - c. Memenuhi kebutuhan dan melayani permintaan kredit untuk usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat bagi para petani yang memerlukan.
 - d. Untuk melindungi tebu rakyat dari kemungkinan ijon yang merugi-



kan dan untuk tertibnya pemasaran gula maka bagian hasil yang menjadi hak petani dari hasil tebu miliknya yang digilingkan di pabrik gula, diberikan dalam bentuk uang yang nilainya ditetapkan sedemikian rupa sehingga menggairahkan usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat.

- e. Agar dari semula, koperasi (BUUD/KUD) diikutsertakan dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani tebu rakyat dalam usahanya meningkatkan produksi gula dan meningkatkan penghasilannya.
3. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat di dalam satu wadah bersama dengan intensifikasi, tanaman pangan yang sudah ada, dengan menambah unsur-unsur yang dibutuhkan. (Inpres No. 9/1975, Puskud Jatim).

Kebijakan Inpres No 9/1975 itu sendiri melibatkan petani dan aparat pemerintah melalui intensifikasi, dengan harapan terwujudnya sasaran meningkatnya pendapatan petani, di samping meningkatnya produksi gula. Dalam intensifikasi itu juga dijanjikan posisi petani dikembalikan dari lahan perkebunan tebu yang dikuasai oleh pabrik gula (PG) secara sewa kepada petani, sehingga diharapkan produktivitas tebu dapat ditingkatkan karena petani menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.

Keikutsertaan petani bukan sekadar menyerahkan lahannya untuk ditanami budi daya tebu, tapi keikutsertaan tersebut secara langsung dan proporsional memperoleh keterampilan budi daya tebu, serta mendapat pelayanan yang baik dan terbuka dari semua lembaga yang terkait dalam program TRI demi memperoleh keuntungan dari hasil panen.

KUD berfungsi langsung sebagai pengelola tebu rakyat. Petani sebagai anggota KUD menyerahkan lahan dalam bentuk penyertaan kerja sama kepada KUD untuk TRI. Kemudian pada tahap tertentu petani memperoleh pinjaman yang akan diperhitungkan dengan hasil produksi kristal gula. Inilah sebenarnya ide dasar dari sistem bagi hasil itu, di mana selaku pengelola, KUD memperoleh ongkos pengelolaan (*management fee*), yang berarti semua pengeluaran, termasuk biaya administrasi dan gaji karyawan

diambil dari *management fee*, sedangkan biaya pengolahan tanah, bibit, pemeliharaan, pemupukan, pemberantasan hama, tebang angkut, dan sebagainya dibebankan pada biaya produksi tanaman tebu.

Untuk keperluan ini, setiap tahun KUD harus menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB), setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) yang terdiri atas bupati selaku ketua Satpel dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Kemudian pengesahan dilakukan oleh bupati, serta bank sebagai pemberi kredit. Modal kerja yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada KUD bukan dalam bentuk paket, melainkan berbentuk modal kerja seperti yang berlaku di PG, di mana pencairannya bertahap sesuai RAB, serta jadwal penggunaan modal kerja. Pembukuannya seperti sebelumnya, dipertanggungjawabkan di depan FMPG dan rapat komisaris.

Petani yang menyerahkan tanahnya memperoleh seluruh keuntungan koperasi, berdasarkan luas tanah yang disertakan setelah dikurangi ongkos pengelolaan dan cadangan pengembangan sarana, serta prasarana sebagai investasi petani. Di dalam proses pencarian lahan dan penentuan areal, KUD menerima limpahan wewenang dari bupati setelah sebelumnya bermusyawarah dengan FMPG. Dari sini penanaman tebu di luar areal yang ditentukan harus dilarang, dan ini merupakan wewenang bupati sesuai Undang-Undang No. 5/1974, serta Undang-Undang No. 20/1960. Sebaliknya bila terdapat Tebu Rakyat Bebas (TRB) di luar jangkauan pengawasan bupati, PG seharusnya menolak. Penolakan itu dirumuskan dalam kontrak antara PG dan KUD yang disaksikan oleh bupati (*Surabaya Post*, 13 Desember 1988).

Di dalam program TRI, secara konsepsional petani selaku pemilik tanah harus diikutsertakan sebagai tenaga pelaksana dalam proses pengolahan tanah, penanaman bibit, pemeliharaan, pemupukan, pemberantasan hama, tebang angkut, dan berbagai kegiatan lainnya. Sedangkan KUD bersama PG berkewajiban melakukan fungsi pendidikan, penyuluhan, terapi,

serta dinamisasi petani.

Setiap tahun musim tanam oleh Satpel Bimas --melalui tahapan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang dijabarkan melalui Surat Keputusan Gubernur, dan kemudian Surat Keputusan Bupati-- ditetapkan target areal luas lahan penanaman tebu. Masalah target areal dalam tahun musim tanam ternyata tak dapat dicapai maksimal sebagaimana terjadi misalnya, di daerah Ponorogo, dalam kurun waktu lima tahun sejak 1984/1985 sampai 1988/1989, tercatat target senantiasa meningkat, namun realisasinya ternyata hanya mampu memenuhi antara 50% - 90%. Hanya pada musim tanam 1987/1988 realisasi areal itu sedikit mendekati luas yang ditetapkan, yaitu musim tanam 1987/1988 --di mana target areal tanaman tebu untuk TRIS I dan II dari PG Pagotan, Kanigoro dan Redjosari seluas 3.862,795 hektare dapat terealisasi 3.008,548 hektare atau 77,89 %. Sementara tahun 1984/1985 dengan target 3.990,656 hektare, terealisasi 2.004,381 hektare atau 50,23 %; tahun 1985/1986 dengan target 3.863,913 hektare, terealisasi 2.212,454 hektare. Sedang untuk tahun 1986/1987, persentase yang dicapai cukup tinggi, yakni 67,07 % dari target 4.572,506 hektare, dengan realisasi 3.006,903 hektare. Pada 1988-1989, persentase realisasi areal melampaui jumlah 1986/1987, yaitu sebesar 68,44% dari target seluas 3.841,00 hektare, yang terealisasi 2.628,614 hektare (*Surabaya Post*, 4 Agustus 1989).

Sulitnya mencapai target areal juga diikuti oleh makin menurunnya produktivitas kandungan gula secara konsisten. Kalau upaya mengalihkan sistem pengusahaan tebu dari sistem sewa ke sistem TRI semata-mata untuk meningkatkan produksi gula, kenyataannya hasil kuintal gula per hektare tebu rakyat selalu lebih rendah daripada tebu pabrik. Tabel berikut menunjukkan angka-angka selama 1975-1980 dalam hal areal luas tanaman hasil per hektare dan jumlah produksi total.

TABEL 1.1
AREAL HASIL PER HEKTARE DAN PRODUKSI PABRIK-PABRIK GULA DI JAWA
1975 - 1980

Tahun	Area		Hasil per hektare (kuintal)		Produksi Total (ton)	
	Luas (hektare)	Persen Perubahan	Hasil	Persen Perubahan	Produksi	Persen Perubahan
1975	104.037	8,4	97,9	-6,0	1.031.014	1,2
1976	112.813	5,5	92,1	-1,8	1.043.728	5,0
1977	118.845	20,5	90,5	-14,6	1.095.520	1,6
1978	142.584	16,6	77,3	-3,4	1.112.574	12,0
1979	166.263	10,3	74,7	-7,8	1.245.740	4,8
1980	172.070	68,2	-	-	1.186.349	-
Persen rata-rata perubahan		12,2	-	-6,7	-	3,0

Sumber: BP3G yang dikutip oleh Mubyarto dalam Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.

Tabel di atas menunjukkan hasil rata-rata per hektare menurun secara konsisten 6,7% setiap tahun, walau produksi total gula naik 3% per tahun, yang semata-mata karena perluasan areal tanaman tebu yang naik secara konsisten sebesar 12,2% setiap tahun selama periode 1975-1980. Perluasan areal tanaman tebu sebesar 12,2% per tahun itu mencakup tanah kering dan tanah tegalan yang mutunya makin rendah (Mubyarto, 1987:82).

Sulitnya mencapai target areal tiap tahun mendorong pabrik-pabrik gula mulai memanfaatkan lahan-lahan kering, dan juga lahan-lahan tegalan, karena produksi gula per pabrik harus meningkat walaupun tanah-tanah sawah terbaik sudah menjadi areal TRI. Seperti yang dilakukan oleh PTP XXI-XXII yang membuka lahan kering untuk menanam tebu di Bangkalan dan Sampang, Madura. Dalam membuka lahan kering tersebut, pihak PTP memberikan imbalan disesuaikan harga gula Bulog, per kuintal Rp 60.000,-. Ini menguntungkan petani, karena kalau lahan itu ditanami padi atau palawija hanya bisa menghasilkan uang Rp 350.000,- sampai Rp

400.000,- --bahkan menurut pengakuan seorang petani yang menggarap sawah satu hektare dengan modal Rp 463.000,- ketika panen hanya dapat menghasilkan Rp 360.000,- (*Jawa Pos*, 9 Oktober 1989).

Apa yang terjadi di Madura tersebut berbeda dengan gambaran petani yang berada di Jawa, akibat perbedaan tingkat kesuburan tanah. Meskipun dapat dikatakan, prinsip subsistensi selalu berlaku bagi semua petani, namun pengambilan keputusan maupun cara-cara untuk mempertahankan keamanan subsistensi bagi masing-masing petani akan berbeda. Bagi petani di Madura dengan tanah yang kurang subur, menanam padi atau palawija dirasa lebih rugi daripada menanam tebu. Karenanya, masuk akal apabila jalan yang ditempuh untuk mempertahankan subsistensi itu adalah menyerahkan tanahnya kepada pabrik-pabrik gula untuk ditanami tebu, yang ternyata lebih menguntungkan.

Lain halnya dengan petani di Jawa yang tanahnya lebih subur, sering hasil yang diperoleh dari tanaman palawija maupun padi lebih tinggi dibanding tebu, ataupun kalau sesekali hasil panen dari palawija itu menurun dan lebih rendah dibandingkan tebu, namun hasil tanaman palawija itu dapat dinikmati dalam waktu relatif singkat dibandingkan tebu yang harus menanti dalam waktu lebih lama. Karena itu, dilihat dari konteks subsistensi, bila para petani mengambil keputusan menanam tebu, yang dianggap tidak memiliki kepastian menjamin keamanan subsistensi, adalah tidak rasional.

1.1.1 Potensi Konflik dalam TRI

Menanam tebu bagi petani sering tak dapat dihindari, semua risiko harus mereka hadapi. Sekalipun sering kenyataan itu mendorong petani setiap kali melakukan protes menolak program TRI. Tindakan ini mereka lakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kesulitan akibat banyaknya masalah dan aturan yang ada dalam program TRI yang secara langsung maupun tidak, membebani petani tersebut.

Protes itu, misalnya, dilakukan oleh petani di desa Sidomukti, Kabupaten Jember, yang menolak TRI di wilayah PG Semboro, walaupun Pemda Jember telah berupaya meyakinkan petani agar mereka tak keberatan lahannya digarap oleh PG Semboro, namun para petani tetap bersikeras menolaknya, dengan alasan kecilnya imbalan keuntungan. Penanaman tebu yang dilakukan oleh PG Semboro didasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang diperkuat dengan SK Bupati No. 525.24/1198/436.02/89. Namun apa pun dasar hukumnya, petani tetap menolak kehadiran PG Semboro, bahkan masyarakat desa Sidomukti juga menempuh lewat jalur hukum. Penyewaan lahan kering yang dilakukan oleh PG Semboro terhadap tanah petani tersebut adalah upaya rintisan awal dalam menunjang proses alih tanam dari lahan sawah ke lahan kering. Kemudian PG dilibatkan secara langsung, dengan istilah "kerja sama", agar petani tak mengalami kerugian terlalu besar (*Jawa Pos*, 27 September 1989).

PG Semboro atas petunjuk pemerintah menargetkan seluas 1.050 hektare lahan kering, yang ternyata baru terealisasi 30%, yaitu seluas 365 hektare. Ini berarti masih jauh dari target, sementara pabrik gula juga dituntut oleh waktu, sedangkan pencapaian areal TRI pun baru 8,11 ribu hektare, dari target yang direncanakan seluas 10,73 ribu hektare. Keberanian PG Semboro untuk proses tanam di lahan kering itu sebenarnya tidak lepas dari keinginan pemerintah, khususnya untuk menutupi kekurangan pencapaian target TRI (*Jawa Pos*, 28 September 1989).

Program TRIT atau TRI di lahan kering di Kabupaten Jember untuk musim tanam 1989/1990 ditargetkan 1.000 hektare. Program tersebut baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Jember, sehingga pelaksanaannya ditangani oleh PG Semboro berdasarkan SK Gubernur No. 525.24/2048/22/1989, tanggal 5 Agustus 1989. Dalam SK tersebut, PG Semboro ditunjuk sebagai pengelola TRIT akan menyewa tanah tegal petani dengan harga sewa per hektarenya Rp.330.000,- sampai dengan Rp. 375.000,- sekali musim. Pabrik menyewa tanah petani karena merintis menanam te-

bu di lahan kering membutuhkan dana cukup besar. Karena itu, setelah petani memperoleh pengetahuan alih teknologi bertanam tebu di lahan kering, pada musim tanam berikutnya sistem sewa dihapuskan, dan petani menggarap lahannya sendiri. Kesulitan-kesulitan dalam menanam tebu di lahan kering itu, antara lain, adalah rentang tanah erosi, kekurangan unsur hara, kekurangan air, dan topografi tanah yang tidak rata.

"Benih keluhan petani karena cara-cara yang dilakukan aparat tidak manusiawi, bahkan sering menggunakan tekanan dan kekerasan. Beberapa petani ada yang ditakuti senjata, dan dipaksa datang ke balai desa. Tanpa melalui penyuluhan yang matang, petani didatangi dari rumah ke rumah untuk membubuhkan cap jempol pada blangko sewa-menyewa yang disodorkan aparat. Keluhan sebagian petani makin memuncak ketika menerima uang sewa disunat aparat dengan dalih sumbangan segala macam. Selain dikenai dana PMI Rp 100,- per orang juga dikenai karcis nonton film *Operasi Trisula* yang diputar di desa, satu keluarga ada yang menerima tiga karcis masing-masing harga Rp 750,-. Di samping itu uang sewa tanah petani itu langsung dipotong pihak desa dengan dalih 'uang titipan pembayaran PBB' untuk tahun yang akan datang. Masing-masing keluarga ada yang dipotong Rp 5.000,- ada juga yang Rp 10.000,- sebagai 'uang titipan'. Alasan desa ini agar nantinya petani tidak kerepotan membayar uang PBB-nya". (*Surabaya Post*, 23 September, 1990).

Keluhan petani dalam menanggapi program TRI disebabkan pula oleh proses penjualan tebu yang dalam prakteknya justru banyak merugikan petani. Penjualan tebu petani melalui tiga proses, yaitu tebang angkut, penimbangan, dan rendemen. Praktek ketiga proses ini selalu merugikan petani. Tebu bisa panen rata-rata dalam usia 12-14 bulan. Proses tebang angkut yang ditangani KUD merugikan petani akibat permainan oknum KUD yang menyunat ongkos tebang angkut, sesuai ketentuan ongkos angkut Rp 209,- per kuintal, namun dalam praktek KUD hanya membayar Rp 175,-. Karena hak penebang disunat, maka mereka menebang seenaknya. Penebangan yang baik seharusnya di bonggol tanaman tebu, karena sekitar sepuluh sentimeter dari akar inilah yang kadar gulanya tinggi. Dalam kenyataannya penebangan justru dilakukan di atas "buntut tikus", sehingga pe-

tani mengalami kerugian pasca-panen yang pertama.

Berikutnya petani mengalami kerugian di pabrik dalam proses penimbangan. Seharusnya pabrik menyediakan penimbangan bersama truk yang masuk ke pabrik setelah proses pengangkutan. Tapi, beberapa pabrik kekurangan alat timbang, sehingga tebu dibongkar dulu dari truk baru dimasukkan ke lori. Petani dikenakan ongkos bongkar, dan ongkos angkut lori. Selain itu proses rendemen juga membingungkan, sebab petani sama sekali tak mengerti ketentuannya, sehingga mereka sulit mendapat kepastian, karena tidak ikut dalam pemeriksaan hasil rendemen (*Surabaya Post*, 28 Juli 1989). Soal rendemen ini selalu menjadi bahan kecurigaan di kalangan petani, terutama angka rendemen yang berbeda antar-PG.

Hal lain yang juga jadi beban berat petani dalam mengejar rendemen tinggi adalah adanya sejumlah permainan uang pelicin, misalnya uang untuk sopir-sopir truk yang biasanya disebut "uang lemek". Di Lumajang, pada awal tebang, "uang lemek" ini mencapai Rp 2.000,- tiap truk, dan uang ini naik menjadi Rp 5.000,- tiap truk kalau sudah menjelang pertengahan giling. Selain itu, masih ada lagi uang pelicin untuk merangsang para penebang yang sulit dicari. Kesulitan mencari penebang ini karena keterlambatan datangnya armada angkutan, sehingga memperlambat penyebaran upah tebang. Akibat adanya pungutan dana lewat ongkos tebang, muat, dan angkut itu, maka beberapa tukang tebang di Lumajang beralih ke pekerjaan lain, sehingga truk menjadi jarang datang karena jumlah penebang sangat kurang. Petani terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk "uang lemek" bagi sopir truk, dan uang tambahan untuk makan bagi penebang.

Sementara "uang lemek", penjualan SPA, dan tambahan uang makan bagi penebang, belum bisa dipecahkan, petani masih dirugikan oleh PG pembinanya, karena PG tersebut memberikan pelayanan yang istimewa kepada Tebu Rakyat Bebas (TRB) dari luar daerah. Seperti yang dialami petani TRI di wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Kediri. Bahkan beberapa PG di wilayah PTP XXIV-XXV memberikan tambahan bagi hasil pada tebu

yang berasal dari Malang, yaitu dari 62% rendemen ditambah subsidi Rp 600-Rp 700 per kuintal. Jika rendemen 8%, bagian petani menjadi 75%, sedang PG 25 %. Menurut ketentuan, seharusnya bagian petani 62% dan PG 38%. Ini juga terjadi di PG Ngadirejo yang menjanjikan rendemen minimal 8% dengan subsidi Rp 600 per kuintal tebu bagi tebu dari luar wilayahnya.

Pemberian pelayanan istimewa terhadap tebu-tebu dari luar daerah yang notabene TRB, menjadi sumber prasangka di kalangan petani TRI. Perlakuan ini tak sesuai dengan ketentuan, sebab TRB hanya boleh masuk PG pada awal atau akhir musim giling, ternyata dalam pertengahan musim giling sudah berada di tengah antrean TRI. Faktor lain yang menjadi kendala dalam TRI adalah perhitungan rendemen. Wakil kelompok petani, apalagi petani, yang turut mengawasi rendemen ternyata banyak yang tidak tahu cara perhitungan tersebut. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud nira perahan pertama (NPP), bagaimana menentukan faktor rendemen (FR), apabila *Brix*. Memahami SK Menteri Pertanian No. 126/80 yang menentukan rendemen minimal 0,69 saja, belum cukup bagi petani untuk bisa memahami proses mendapatkan rendemen riil sesuai dengan tebunya. Lebih sulit lagi adalah proses perhitungan rendemen yang dilakukan bertahap dari rendemen sementara (RS) menjadi rendemen koreksi (RK), yang semuanya menggunakan rumus kimiawi atau matematika yang hanya dipahami oleh petugas PG dan KUD. Tapi di dalam praktek, tim rendemen ini mampu berbuat banyak, sebab mereka lebih berfungsi sebagai aparat yang tidak membela kepentingan petani TRI --yang memang tidak memberi keuntungan baginya. Bahkan mereka tidak berperan sebagai pengawas, sehingga tinggi rendahnya angka rendemen sangat tergantung dari kejujuran petugas. (*Surabaya Post*, 19 Agustus 1989).

Sekalipun demikian, tak dapat dikatakan petani TRI selalu mengalami kerugian. Ada beberapa daerah di mana petani TRI diuntungkan sekalipun tidak besar, misalnya di Sumberpucung Malang, tebu bisa panen dalam waktu 10-11 bulan yang tiap hektarenya bisa menghasilkan 800

kuintal tebu. Jika rendemennya rata-rata 7% dengan bagi hasil 26%, dan harga per quintal tebu Rp 2.300,- maka tiap hektare mencapai Rp 1,8 juta. Jumlah ini dikurangi biaya total, yang meliputi tebang, angkut dan biaya-biaya lainnya Rp 1.224.000 per hektare, maka masih untung sekitar Rp 576.000,- per hektare untuk TRIT II.

Di Lumajang, keuntungan demikian ini ternyata dinikmati petani yang menggarap lahan datar. Itu pun bisa bervariasi melihat rayon dan klasifikasi TRI yang diikuti, apakah TRIS I, II, dan III, atau TRIS serta TRIT. Keuntungan itu diproyeksikan paling tinggi Rp 671.755,- per hektare untuk TRISUS II. Sedangkan petani di lahan berat rata-rata merugi maksimal Rp 375.685,- per hektare. Kerugian itu kian meningkat bila petani tak dapat mencapai produksi tebu hingga titik impas, seperti yang diatur SK Bupati 85, di mana petani TRI harus mampu menghasilkan tebu untuk lahan berat sesuai klasifikasinya.

Adapun rincian klasifikasi itu untuk rayon I: TRISUS I, 1.044 quintal per hektare; TRISUS II, 671 quintal per hektare; TRIT-K/I, 638 quintal per hektare; TRIT-K/II, 437 quintal per hektare; TRIS-K/I, 834 quintal per hektare; dan TRIS K/II, 538 quintal per hektare. Sedangkan untuk rayon II: TRISUS I, 693 quintal per hektare; TRIT-K/I, 660 quintal per hektare; dan TRIS-/II 556 quintal per hektare. Untuk rayon III: TRISUS I, 1.160 quintal per hektare; TRISUS II, 719 quintal per hektare; TRIT-K/I 683 quintal per hektare; TRIT-K/II, 469 quintal per hektare; TRIS-K/I dan II masing-masing 897 dan 577 quintal per hektare (*Surabaya Post*, 12 Agustus 1989).

Kerugian petani TRI bisa disebabkan musim yang tidak menguntungkan, sehingga tebang terlambat dan rendemen menjadi rendah. Atau dapat pula disebabkan petani sendiri yang tak mampu melaksanakan kultur teknis menanam tebu secara benar, baik karena kurang ataupun tidak adanya penyuluhan. Bahkan tak jarang petani yang tidak mampu membeli bibit dari pabrik gula membibit sendiri atau mengepras tebunya hingga berkali-kali. Di samping itu juga sulit menemukan catatan yang mengidentifikasi-

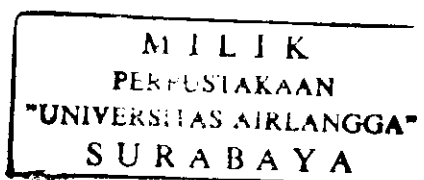
kan lahan tertentu cocok untuk varietas tertentu saja. Kondisi ini memberi peluang untuk memilih bibit yang tak cocok, sehingga produksi merosot.

Prosedur Pusat Penelitian Produksi Gula Indonesia (P3GI) juga harus diikuti mengenai pengelolaan kebun bibit, yakni Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI), dan Kebun Bibit Dasar (KBD) yang perlu berada di satu tangan, yaitu PG. Prosedur ini untuk memudahkan perencanaan komposisi varietas yang akan di tanam di Kebun Tanam Giling (KTG). Untuk menyesuaikan dengan optimalisasi areal tanaman KTG, luas areal KBD perlu ditata dengan proporsi persentase tertentu (*Surabaya Post*, 12 Desember 1989). Hal-hal demikian itu merupakan kultur teknis tebu, yang harus diikuti apabila petani ingin memperoleh hasil produksi yang tinggi.

Dengan semua uraian ini, tersirat banyak kendala di dalam program TRI yang mendorong petani melakukan "pembangkangan" terhadap program TRI --yang dalam beberapa tahun terakhir semakin fenomenal, terutama di Jawa Timur. Cara-cara perlawanan itu mewujud, baik secara terang-terangan maupun diam-diam.

"Hal itu tersirat dari keterangan petani-petani yang dipanggil ke kantor Camat Kencong, Jember tahun lalu. Mereka harus berhadapan dengan Muspika karena menolak program TRI. Alasannya sederhana, selama terkena 'glebagan' TRI selalu mengalami kerugian. Bahkan seorang petani, Ahmad Shaleh menyatakan, sawahnya mampu menghasilkan Rp 1,7 juta bila ditanami padi atau palawija. Namun saat mengikuti program TRI, untuk kurun waktu yang sama dengan tanaman padi dan palawija hanya menerima Rp 900.000,- Alasan serupa kembali dipertahankan 31 petani TRI Mlokorejo yang merasa keberatan pentraktor paksa di lahannya. Mereka mengatakan, sebenarnya tak bermaksud menolak program TRI asal ada kejelasan soal untung rugi. Program intensifikasi itu tidak mungkin dihindari, namun palawija yang ditraktor harus diperhitungkan" (*Surabaya Post*, 12 Desember 1988).

Pembelotan juga terjadi di daerah Kudus, ratusan hektare lahan TRI diolah petani menjadi "gula tumbu" (gula jawa). Keberanian petani melakukan ini, karena pelayanan KUD mengenai jatah lori sering diperjualbeli-



kan kepada tengkulak, sehingga petani enggan menyetor tebuinya ke KUD. Berbagai kasus pembakaran tebu saat menjelang musim giling di daerah Magetan misalnya, merupakan salah satu indikasi "pembelotan kultural" petani. Bahkan pembunuhan yang dilakukan seorang petani TRI terhadap kepala desa di Pasuruan, disebabkan penolakan petani terhadap perintah kepala desa untuk mengikuti program TRI (*Surabaya Post*, 7 Juli 1989).

Perlawanan petani terhadap program budi daya tebu sesungguhnya telah terjadi sejak zaman kolonial, ketika budi daya tanaman ini diperkenalkan, khususnya bagi petani di Jawa. Bahkan jika disimak lebih teliti, banyak fenomena yang terjadi dalam penanaman budi daya tebu melalui program TRI merupakan pengulangan fenomena yang terjadi pada masa kolonial tersebut, termasuk fenomena gerakan-gerakan sosial petani untuk menentanginya. Petani pada umumnya selalu berupaya menolak penetrasi kekuatan dari luar desa yang memaksakan keinginan menanam tebu. Gambaran bagaimana petani tebu pada zaman kolonial tidak dapat membendung penetrasi kekuatan-kekuatan dari luar, dipaparkan Clifford Geertz:

"Gula yang tetap merupakan hasil bumi ekspor Indonesia yang paling penting sampai tahun tiga puluhan, terus melanjutkan hubungannya yang timbal balik dengan padi dengan samaran yang berubah sedikit saja. Karena tebu tidak lagi ditanam tanah rakyat --sebagai akibat keputusan pemerintah-- dan tanah *bera* yang luas-luas yang sesuai dengan penanaman tebu itu sangat langka --karena Jawa telah menjadi sangat penduduknya-- maka dikembangkanlah satu kompleks sistim sewa-menyewa tanah untuk memperoleh hak menggunakan sawah. Suatu onderneming mengadakan perjanjian menyewa tanah untuk jangka waktu 21,5 tahun dengan satu desa --yang kadang-kadang melakukannya dengan senang hati, kadang-kadang dengan dipaksakan oleh orang terkemuka dan pejabat-pejabat pamong praja setempat. Onderneming itu lalu menanami sepertiga sawah desa itu dengan tebu. Sawah itu dipakai untuk tanaman tebu selama 15 bulan; sesudah 18 bulan sawah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan sepertiga sawah desa yang lain ditanami tebu, demikian seterusnya sepanjang siklus. Tetapi karena tebu yang baru biasanya sudah ditanam sebelum yang lama ditebang, maka sawah itu biasanya ditanami tebu selama setengah masa siklus penanaman, bukan hanya sepertiganya. Atau kalau kita katakan secara agregatif, rata-rata dari kurang lebih setengah sawah desa

--kadang-kadang sepertiga, kadang-kadang dua per tiga ditanami tebu, sedangkan yang lainnya ditanami tanaman rakyat-- atau padi atau palawija. misalnya kedelai atau kacang. Jadi satu siklus penuh berlangsung selama satu masa perjanjian sewa menyewa tanah. Contoh model siklus seperti itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
SIKLUS PENANAMAN YANG KHAS UNTUK SAWAH YANG DISEWAKAN
KE PERUSAHAAN GULA DI JAWA SESUDAH TAHUN 1900

Musim	Sepertiga sawah yang pertama	Sepertiga sawah yang kedua	Sepertiga sawah yang ketiga
Musim kemarau tahun 1	tebu yang baru ditanam	tebu yang sudah dapat dipanen	palawija
Musim hujan tahun 1	tebu tumbuh	padi	padi
Musim kemarau tahun 2	tebu yang sudah dapat dipanen	palawija	tebu yang baru di tanam
Musim hujan tahun 2	padi	padi	tebu tumbuh
Musim kemarau tahun 3	palawija ditanam	tebu yang baru	tebu yang dapat dipanen
Musim hujan tahun 3	padi	tebu tumbuh	padi
Musim kemarau tahun 4	sama dengan musim kemarau dalam tahun 1		

Sumber: Menurut Koningsberger, v.j. "De Eurapase Suikterriet-cultuur en Suikerfabricatie", dalam Van Hall, C dan C. Van de Koppal, De Landbouw inde Indesche Archipel,s'. Gravenhage: Van Hoeve Bagian II A, P. 326. Dikutip oleh Clifford Geertz dalam buku Involusi Pertanian, halaman 97.

Menurut Geertz, hasil hubungan yang kompleks dan erat antara irama penanaman yang kaku dari pertanian korporasi besar-besaran dengan

irama yang lebih lemah dari pertanian rumah tangga yang tradisional itu adalah suatu kesatuan sosial berbentuk *centaur* (makhluk setengah manusia setengah kuda) yang aneh. Kesatuan sosial yang baru ini berbeda dari keduanya. Kepala *centaur* adalah pabrik, yang untuk mendirikan diperlukan modal sangat besar (rata-rata modal yang ditanam untuk satu perusahaan gula dalam tahun tiga puluhan kira-kira sampai satu juta dollar).

Pabrik yang berada di tengah-tengah persawahan, dengan mesin penggilingan yang digerakkan oleh tenaga listrik atau uap, mesin penyaring, mesin sentrifugal, mesin penguap serta mesin pemasak yang hampa udara, itu semua dijalankan oleh suatu staf manajer kira-kira dua puluh orang berbangsa Eropa --yang bersama-sama keluarga mereka masing-masing tinggal di rumah-rumah bungalow mungil, mengelompok di dekat dinding pabrik, yang setiap tahunnya mengolah produksi tebu dari sawah yang kira-kira 1.000 hektare.

Sebagai tubuh *centaur* tersebut adalah massa petani, tapi juga memperoleh tenaga kerja tak tetap yang diperlukan untuk membersihkan tanah, menggali lubang, menanam, menebang, dan mengangkut tebu ke pabrik, serta melakukan tugas-tugas tak tetap lainnya yang menyangkut usaha industri itu, yang tak terbilang banyaknya dari musim ke musim. Buruh tebu ke Jawa adalah tetap petani yang sekaligus juga menjadi kuli, tetap petani yang berorientasi komunitas dan sekaligus juga menjadi buruh upahan. Kakinya yang sebelah tertancap di lumpur sawah, yang sebelah lagi menginjak lantai pabrik. Dan agar petani dapat mempertahankan kedudukannya yang serba ringkih dan sulit itu, maka bukan hanya onderneming saja yang harus menyesuaikan diri dengan dasar, yaitu melalui sistem sewa tanah dan berbagai cara "untuk melindungi pribumi" lainnya yang dipaksakan oleh pemerintah, tapi desa itu pun harus menyesuaikan diri, secara lebih menyeluruh pada onderneming (Geertz, 1976:95-98).

Sejarah tebu-gula (*suikerriet*) yang gemilang baru terjadi sejak dilakukan reorganisasi pertanian selama abad ke-19. Pembudidayaan tanaman

tersebut dalam dua abad sebelumnya --di *Ommelanden Batavia*-- mengalami pasang-surut yang tak pernah memantapkan posisinya sebagai komoditas andalan. Sejak pemerintah Belanda turun tangan langsung mengelola Jawa pada pertengahan tahun 1830, gula berkembang menjadi komoditas primadona yang mencuat meninggalkan tanaman ekspor lainnya. Gula muncul sebagai komoditas utama Hindia Belanda, atau dengan kata lain menjadi tulang punggung perekonomian negeri kolonial maupun negeri induk, yang sering diungkapkan dengan *De kurk waarcp de Java/Nederland blijft*. Karena, gula merupakan tigaperempat produksi ekspor Jawa, dan menjadi seperempat pendapatan negara Belanda. Keberhasilan gula sebagai kekuatan ekonomi utama Hindia Belanda, tak terlepas dari pencetus ide brilian Sistem Tanam Paksa (*cultuurstelsel*), Johannes Van den Bosch (1830-1834) yang meletakkan dasar-dasar organisasi perkebunan pemerintah dalam tahun 1830, yang berlaku efektif hingga 1879 (*Suikerwet 3*).

Pertimbangan pemerintah kolonial yang terpenting dalam budi daya tebu ini adalah penggunaan tenaga kerja berdasarkan wajib kerja "tradisional" yang dikerahkan dengan melembagakan *heerendienst* maupun *cultuurdienst*, yang secara harfiah artinya sama dengan kerja bakti --yakni dengan melibatkan lapisan pemuka pribumi seperti lurah, wedana maupun bupati untuk menggunakan pengaruhnya mengerahkan para petani bekerja bagi pemerintah.

"Untuk itu khususnya dapat dimanfaatkan kekuasaan dan pengaruh para Bupati terhadap penduduk. Adalah tidak dapat dibantah, hal itu dalam tahun-tahun terakhir terlalu sedikit diperhatikan ... Kepastian memiliki pulau ini (Jawa) hanya dapat didasarkan atas suatu golongan bangsawan yang teguh kedudukannya, dan hanya dengan pengaruh mereka rakyat yang berjuta-juta jumlahnya dapat ditaklukkan kepada kita. Dan golongan bangsawan itu tidaklah harus kita ikat pada pihak kita, tetapi harus dilengkapi dengan sarana-sarana, untuk dapat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kita." (Schrieke, 1974:83).

Pemerintah kolonial, selain memberikan gaji tetap terhadap "jasa" kepala-kepala pribumi tersebut, juga memberikan insentif tambahan se-

bagai perangsang mereka mendukung berjalannya proses penanaman, yang disebut *cultuur-procent*. Pengerahan kerja bagi pemerintah ini di masa pra-kolonial dikenal dengan istilah *kriegandienst* (kerja bagi negara). Pengerahan tenaga tersebut dilakukan dengan "penghadiahan" tanah yang diikuti serangkaian kewajiban kerja. Setiap petani yang bersedia bekerja bagi gubernemen akan mendapat tanah seluas dua *bau* (1,4 hektare).

Di atas tanah tersebut seperlima (atau sepertiga) ditanami tanaman komoditas pemerintah. Bagi yang tak mendapat tanah dikenakan kerja wajib 66 hari dalam setahun. Pembagian tanah tersebut dimungkinkan karena seluruh tanah "liar" yang ada, diklaim sebagai milik negara (*domein*). Terbentuklah organisasi yang dipakai demi kepentingan pemerintah kolonial untuk menghasilkan komoditas dengan biaya murah. Dengan cara itu petani tak merasakan transformasi drastis. Paling banter petani hanya merasakan, jam kerjanya bertambah panjang.

Praktek-praktek penekanan dapat ditemui dalam desa-desa, misalnya pada saat melakukan kontrak sewa tanah untuk kebun tebu.

"Setelah selesai perundingan dengan pemerintah desa mengenai jumlah baru serta harga sewanya, pada waktu tertentu semua petani yang berminat menyewakan tanahnya, kadang sampai seratus orang, datang ke pabrik di bawah pimpinan kepala desa. Dengan dihadiri oleh administrasi dan pegawai perkebunan terjadilah pertunjukan sandiwara sebagai berikut: Di atas tanah duduklah kerani perkebunan menghadapi kertas kontrak. Kontrak yang berisi daftar semua yang berminat menyewakan dan bagian masing-masing yang disewakan serta harga sewanya, dibacakan. Setelah dinyatakan apakah ada yang keberatan terhadap hal itu, maka mulailah dilakukan pembayaran. Bergantian setiap orang yang berkepentingan dipanggil ke depan, dan bagiannya dibayarkan. Sebelum itu ia harus menandatangani kontrak. Hal itu dilakukan dengan menyentuh jari-jari kerani yang sedang memegang pena, dan si kerani kemudian membubuhi tanda silang di belakang nama orang itu.

Hal seperti itu pun tidak dapat dilakukan oleh si pribumi. Orang menyangka, kini orang itu bisa mengambil uang yang menjadi haknya dan lalu pergi. Tapi persangkaan itu meleset sama sekali. Petani itu hanya sempat melihat bagaimana kepala desa yang duduk di samping kerani menerima

uang itu, dan melemparkannya pada sehelai kain besar yang terbentang di hadapannya. Petani itu sekarang boleh pergi. Selesailah sandiwara itu, kepala desa mengantar uang sewa itu ke jawatan pajak, sementara wedana berusaha agar kepala desa itu tidak mengambil jalan yang berputar-putar". (Yasuo, 1986:45).

Penipuan-penipuan seperti itu menggilas petani kecil menjadi petani *gurem*. Sementara lapisan petani kaya bisa sedikit lebih bebas jika mengusahakan tebu sendiri, untuk kemudian dijual ke pabrik.

"...keuntungan yang paling besar diperoleh mereka yang menanam tebu atas kemauannya sendiri dan kemudian menjualnya. Juga mereka yang menanam tebu dengan kontrak. Tetapi mereka yang hanya menyewakan sawah mereka kepada pemilik pabrik akan menderita rugi, dan mereka hanya melakukannya karena butuh uang tunai. Namun hal tersebut tak berarti para petani kaya dalam posisi ekonomi menguntungkan ketika berhadapan dengan pabrik gula. Perjanjian kontrak sewa tanah ataupun penjualan tebu 'bebas' memang memberikan sejumlah uang kepada petani bertanah. Tapi uang tersebut sering habis untuk menutup utang-utang mereka kepada para lintah-darat yang meminjamkan uang dengan bunga mencapai 300% setahun". (Yasuo, 1986:51-52).

Bentuk pembangkangan petani terhadap penanaman tebu di masa kolonial diuraikan Jan Breman:

"Sampai berakhirnya kekuasaan kolonial, kekuasaan dan pemahaman para pejabat terhadap keadaan setempat tetap sangat terbatas. Perlawanan kaum tani dinyatakan dalam kemampuannya yang cerdas untuk melumpuhkan atau membelokkan setiap tujuan yang tak sejalan dengan kepentingan mereka sendiri: menjalankan perlawanan tak kentara bilamana mungkin, menunda-nunda dan mengelak, menyerah kalah apabila memang tidak terelakkan, tetapi secara lahiriah dan untuk sementara waktu saja. Para pejabat tinggi akan bertempur sia-sia bila hendak memaksa kaum tani di dalam suatu kerangka yang mereka sendiri tidak menginginkannya dan memang tidak sesuai dengannya. Konfrontasi akan menjadi ibarat peperangan yang melelahkan kedua belah pihak, dengan akibat pada umumnya pemerintah harus menghadapi sikap 'bermalas-malás', 'dingin', 'kurang pengertian' dan 'masa bodoh' pada kaum tani". (Breman, 1986:168).

Besarnya peran negara dalam campur tangan penetrasi kapitalistik

dalam perkebunan tebu ternyata juga menimbulkan demoralisasi sosial sebagaimana dikemukakan Boeke:

"Dalam basis masyarakat kolonial ini kita dapat menerima kenyataan adanya dua lapisan, yaitu golongan tani pribumi pada lapisan bawah dan golongan pengusaha yang orang asing pada lapisan atas, yang menghasilkan dan menunjang kesejahteraan yang ada. Antara kedua lapisan tersebut pada hakikatnya tidak ada hubungan satu sama lain, kecuali lapisan yang di atas menindas yang di bawah dan menghisap darah kehidupannya.... Perkebunan-perkebunan besar menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku, semuanya mengorganisasi diri sedemikian rupa, sehingga mereka tidak memerlukan apa pun dari koloni, kecuali tanah dan tenaga kerja yang murah." (Breman, 1986:184).

Menurut Breman, pernyataan Boeke ini merupakan kesimpulan yang sangat radikal yang diberikan oleh pendiri teori dualisme, kesimpulan yang dilengkapinya dengan mengatakan, tak akan pernah ada masalah kerja sama yang serasi antara lapisan atas yang kecil itu dan rakyat. Diferensiasi yang sedang tumbuh memang terjadi di kalangan penduduk, tapi bersama diferensiasi ini terbawa serta juga pengkotakan masalah dan kepentingan. Karenanya, manakala individualisme menjadi mendalam, jiwa komunal yang harus merupakan penyangga otonomi desa itu pun menjadi melemah. Sebab lembaga-lembaga desa tradisional telah dirusakkan, dan daya upaya baru yang dilakukan pemerintah pun terbukti gagal, maka prakarsa lebih lanjut harus diserahkan kepada rakyat.

Swadaya ini bukannya dipusatkan pada perseorangan, tapi dimaksudkan untuk membangkitkan bentuk-bentuk organisasi yang akan merangsang solidaritas di kalangan rakyat. Tentang hal ini Boeke tak terlalu berharap. Salah satu perintang untuk pelaksanaannya, karena para pejabat desa bekerja selaku instrumen penguasa kolonial.

"Kekuasaan (kepala desa) bukanlah kekuasaan komunal yang berasal dari dan didukung oleh jiwa komunal dari para anggota desa, tapi kekuasaan administratif yang ditiupkan dari atas dan dari luar; ialah kekuasaan asing di atas jiwa komunal yang tidak bisa lain kecuali menjadi merana. Dan selama jalan satu-satunya menuju desa hanya bisa melalui ke-

pala desa, maka tidak ada sesuatu apa pun yang bisa diubah di dalamnya. Maka di dalam organisasi desa tak ada tempat bagi corak jiwa komunal yang menjunjung nilai berdikari, dan yang bisa membebaskan diri dari pemaksaan dan campur tangan administratif dari luar". (Breman, 1986:185).

R.E. Elson, dalam karyanya yang bagus tentang *Industri Gula di Jawa* menunjukkan bagaimana perlawanan rakyat (di daerah Pasuruan) terhadap industri gula, di mana terjadi penyusutan penduduk di wilayah Gending dalam dekade 1845, akibat petani melarikan diri dari sistem yang ditimbulkan oleh sistem pengelolaan gula. Tahun 1853 di wilayah Ngempit terjadi insiden kecil ketika para petani sedang merayakan berakhirnya perjanjian sistem gula dengan pabrik setempat. Aksi ini kemudian disusul insiden-insiden kecil menentang peraturan-peraturan pemerintahan kolonial. Bahkan tak sampai di situ saja, mereka juga mengadakan pemberontakan dalam skala besar dan terorganisir.

"Tindakan spektakuler (pembakaran perkebunan tebu) ini sebenarnya sulit dicegah, dan tak mungkin ditertibkan, karena hal ini merupakan ungkapan kebencian petani. Kerugian yang dialami petani akibat terbakarnya tebu lebih kecil bila dibandingkan kerugian yang diderita pabrik. Namun layak dicatat laporan tahunan Kabupaten Probolinggo pada pertengahan tahun 1840. Pada tahun 1846 sendiri tercatat ada 144 kasus pembakaran tebu di Kabupaten tersebut yang merupakan protes terhadap ketidakpuasan pelaksanaan rezim gula." (Elson, 1984:78).

Di bagian lain, Elson menguraikan:

"Tak dapat diragukan lagi, sistem gula merupakan pusat kehancuran. Daripada memindahkan seluruh sawah ke industri gula, petani memilih sebagian tanahnya untuk ditanami bahan makanan. Selama masa tanam tebu, petani juga berusaha menanam tanaman sampingan, sekalipun luas lahan yang ada lebih banyak ditanami tebu akibat adanya pengurangan air pada lahan sawah, sebab air digunakan untuk penanaman tebu. Secara teoritis, diharapkan pengolahan gula dapat sejajar dengan penanaman padi, tapi pada prakteknya tidak demikian. Petani tidak hanya harus memanen padi sebelum waktunya, tapi masa panen tebu menghalangi mereka untuk menanam tanaman sampingan. Petani telah menjadi mesin, tidak berani melakukan sesuatu kalau bukan perintah dari *petinggi* atau kepala desa." (Elson, 1984:85-86).

Selanjutnya Elson mengatakan, pada periode ini pemerintah Belanda melaporkan adanya kesan timbulnya kriminalitas dan pelanggaran hukum, seperti pembunuhan dan pencurian di mana-mana. Anehnya, hal yang menarik perhatian dan penderitaan ini, kebakaran tebu bukan merupakan hal baru, dan merupakan hal biasa bagi masyarakat Pasuruan. Kejadian ini mulai berkurang setelah munculnya pemberontakan di Probolinggo pada pertengahan tahun 1840, tapi kebakaran ini tak sepenuhnya musnah. Penyelidikan yang dilakukan pemerintah Belanda di Kraksaan, hampir 50 ha tanaman tebu musnah akibat 48 kali kebakaran dalam tahun 1881. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama hanya ada 5 peristiwa kebakaran di *afdeling* Probolinggo. Pada tahun 1885, dilaporkan ada 116 peristiwa kebakaran, dan jumlah ini masih di bawah jumlah setiap lima tahunnya.

Pada tahun 1891 dilaporkan 171 kebakaran, dan tahun 1895 terjadi 258 kali kebakaran. Paiton merupakan pabrik yang rawan kebakaran, rata-rata dilaporkan 2 kali sehari. Selanjutnya menyebar ke daerah pabrik gula lainnya di Pasuruan. Hanya terjadi 19 kebakaran di *afdeling* Probolinggo pada tahun 1885, yang meningkat menjadi 52 peristiwa kebakaran pada tahun 1891; sedangkan di Lumajang terjadi 25 kali peristiwa kebakaran pada tahun 1903, sementara di daerah Pasuruan jumlah peristiwa kebakaran meningkat dari 8 kali kebakaran pada tahun 1887 menjadi 173 kali peristiwa kebakaran tebu pada tahun 1903, yang semuanya terjadi di daerah utara; dan pada tahun 1905 di daerah Malang juga terjadi peristiwa yang sama .

Mengapa kebakaran hanya terjadi di masa-masa tertentu di Probolinggo sekitar tahun 1840, dan meluas ke seluruh daerah Pasuruan pada akhir dekade 1880? Catatan para penguasa Kolonial tidak memberikan keterangan mengenai masalah ini. Dalam laporan-laporan kebakaran, pemerintah daerah berusaha menjelaskan hal ini dari keterangan-keterangan perorangan, atau langsung dalam penyelidikan. Pada tahun 1896, P. Arends (wakil pemerintah Kraksaan pada 1882-1886) menjelaskan masalah ini.

Kadangkala peristiwa kebakaran tersebut dilatarbelakangi motif-motif ekonomi, seperti seseorang yang menyewakan tanahnya kepada pabrik namun menginginkan tanahnya agar kembali untuk ditanami tanaman subsisten (palawija -*hms.*) di musim kemarau, sebelum permulaan penanaman padi pada musim hujan. Ada pula alasan, lahan tebu tidak lagi berfungsi untuk meringankan tugas para penebang dan pemanen tebu. Kebakaran ini juga akibat dari kesengsaraan, kecerobohan petani, keinginan agar desa-desa ditinggalkan dan memudahkan orang lain untuk mengambilnya, bahkan keinginan untuk mendapatkan pekerja yang diperlukan pengusaha pabrik gula yang menginginkan panen secepatnya dari lahan tebu yang ada.

Semua penjelasan itu tak cukup memuaskan untuk memahami latar belakang yang sebenarnya dari kebakaran tersebut. Namun ada penjelasan lain, misalnya, jika suatu wilayah dibebani untuk mengontrol masyarakat dengan menghukum mereka karena terjadi kebakaran tebu di wilayahnya, justru di wilayah tersebut jumlah kebakaran meningkat karena masyarakat merasa dipermalukan dan dihukum (Elson, 1984:148-153).

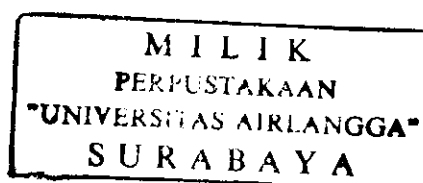
- Tebu ditanam oleh para petani di kabupaten-kabupaten sekitar pabrik gula atas perintah Residen Belanda, dan para kontrolir bawahannya (dalam praktek, pejabat-pejabat kabupaten). Perintah-perintah tersebut disampaikan kepada para penanam tebu melalui para *priyayi*, yaitu pejabat kaum ningrat Jawa, yang selama pertengahan abad ke-19 berada dalam proses pernyataan ke dalam birokrasi kolonial Belanda (Sutherland, 1979:3-18).

G.R. Knight dalam tulisannya, *Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad ke-19*, menguraikan, mutu dan jumlah bahan baku yang tersedia bagi industri gula sebagian besar bergantung pada kenyataan seberapa jauh para pejabat Karesidenan sanggup mempengaruhi, membujuk, atau memaksa kaum tani menanam tebu dan menghasilkannya dengan baik. Tentang bagaimana cara melakukan hal ini, ada tiga penjelasan yang diajukan para sejarawan modern pulau Jawa abad ke-19, pertama, para arsi-

tek Belanda dari industri gula memanfaatkan jalur-jalur wewenang "tradisional" di wilayah pedesaan untuk mendapatkan kesediaan para petani. Kedua, kesediaan ini "dibeli" dengan sistem pembayaran teratur para petani produsen, berdasarkan hasil produksi pabrik mereka. Ketiga, kaum petani pasrah dalam menghasilkan tebu untuk industri yang mulai mekar, karena tuntutan-tuntutannya tidak merusak ekonomi dan masyarakat pedesaan, daripada yang mungkin dibayangkan.

Argumen pertama telah dikemukakan secara sangat singkat oleh Elson, yang menulis, faktor kunci bagi sukses Sistem Tanam Paksa adalah "keputusan untuk menggunakan jalur-jalur tradisional dari hubungan-hubungan pejabat" dalam usaha memperluas produksi bagi pasaran dunia (Elson, 1978:11). Begitu pula Van Niel telah menarik kesimpulan yang sama: "perangsang untuk menggalakkan hasil budi daya pemerintah adalah pemenuhan keinginan dan perintah penguasa di atas tingkat desa" (Van Niel, 1981:40-41). Sementara itu, Fasseur menekankan arti penting tidak saja kaum *priyayi*, tapi juga para kepala desa atau lurah sebagai "sumbu tempat Sistem Tanam Paksa berputar". Ia menarik kesimpulan, "sistem tersebut tidak mungkin berjalan tanpa kerjasama golongan elite desa yang terkemuka" (Fasseur, 1981:7-8)

Bagaimanapun studi-studi tentang industri tersebut belakangan ini telah menggarisbawahi arti pentingnya pembayaran tunai --dan "kesejahteraan" yang diakibatkannya-- sebagai cara untuk mendorong para petani menghasilkan tebu (atau setidaknya menjadikan mereka pasrah menghadapi produksi yang "dipaksakan" itu). Dalam tulisannya mengenai Pasuruan, misalnya, Van Niel mengatakan, "adalah salah untuk beranggapan tekanan yang diadakan melalui golongan elite pribumi tradisional merupakan satu-satunya (dorongan untuk bekerja) tetapi perangsang uang yang disediakan juga penting sekali" (Van Niel, 1964:4). Menilai keadaan sebagaimana telah berkembang sekitar pertengahan abad ke-19, Elson dalam istilah-istilah kuat mengatakan, "faktor terpenting dalam sikap pasrah ka-



um petani... adalah kesejahteraan yang timbul bagi mereka" (Elson, 1978:46-47). Sedangkan Fasseur berulang kali meminta perhatian akan peran upah tanam (*plantloon*) untuk mempermanis pil pahit "kerja paksa", dan mengamankan kerja sama kaum petani dalam produksi gula.

Penjelasan penting ketiga berkenaan kesediaan petani terhadap tuntutan industri gula selama periode Sistem Tanam Paksa adalah budi daya tebu tak semena-mena merusakkan pola-pola kehidupan desa yang ada. Sekalipun tekanan argumentasi diletakkan pada kesinambungan aturan-aturan sosial dan ekonomi di kalangan kaum tani di kecamatan-kecamatan yang menghasilkan gula, hal ini sama sekali bukan merupakan perbaikan dari hipotesis "involusi". Malah sebaliknya terbukti, berkembangnya masyarakat petani sangat berbeda-beda menurut garis sosial dan ekonomi, dan jauh dari terpadu, telah diketahui secara luas, dan argumen-argumen bersejarah kontra Geertz telah diajukan. Apa yang dinyatakan oleh argumentasi ini, bagaimanapun, masyarakat petani pada permulaan abad ke-19 di pulau Jawa cukup fleksibel untuk menahan tuntutan-tuntutan bangsa Belanda sesudah tahun 1830 tanpa mengalami lebih dari sekadar kerusakan. Elson misalnya, mengatakan, sekalipun sesudah tahun 1830 terdapat perluasan industri gula di Pasuruan, "para petani tetap berpegang erat pada pola produksi tradisional" (Elson, 1978:11). Bahkan Elson telah meminta perhatian bagi menguatnya grup elite desa yang melingkari lurah, sebagai akibat kebutuhan para pejabat Residensi akan tenaga "manajer" desa yang dapat mereka andalkan (Elson, 1978:28-29; Knight, dalam Anne Booth, Ed., 1988:74-98).

Dengan gambaran sejarah sedemikian ini, apa yang terjadi dalam kehidupan petani TRI pada dasarnya "tidak berubah" banyak dilihat dari tekanan-tekanan terhadap subsistensinya, maupun upaya yang dilakukan petani untuk mencari jalan keluar menyelamatkan diri dari ancaman subsistensi tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut, masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah:

1. Apakah *realitas pembangkangan terselubung di dalam kehidupan petani merupakan reaksi yang rasional terhadap program TRI yang lebih mengutamakan mobilisasi daripada partisipasi?*
2. Apakah *realitas pembangkangan terselubung di kalangan tani terhadap program TRI muncul sebagai kesadaran individual ataukah merupakan sebuah kesadaran komunitas akibat pengalaman yang sama di dalam kehidupan petani tersebut dalam menanggapi program TRI?*
3. Apakah *realitas pembangkangan terselubung petani dalam program TRI terjadi karena kegagalan birokrasi mengartikulasikan kepentingan petani dengan kepentingan pemerintah di dalam program TRI?*
4. Sejauh mana *realitas pembangkangan terselubung di kalangan masyarakat petani tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan subsistensi akibat kegagalan birokrasi dalam mengartikulasikan kepentingan para petani dalam program TRI?*

1.3 Tinjauan Pustaka dan Pendekatan Teoritik

Di bawah pemikiran Geertz, kehidupan petani khususnya di Jawa, ditandai oleh sebuah tertib sosial atau harmoni sosial yang tidak menyuburkan munculnya pertentangan kelas sosial akibat memburuknya hubungan pemilikan tanah. Di dalam bukunya yang terkenal, *Involusi Pertanian*,

Geertz mengatakan:

"Akan tetapi, di bawah tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat dan sumber daya yang terbatas itu, masyarakat desa Jawa toh tidak belah menjadi dua --seperti yang banyak terjadi di negara-negara yang 'belum berkembang'-- yaitu menjadi golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak yang diperas, melainkan tetap mempertahankan tingkat homogenitas sosial dan ekonomis yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagikan rezeki yang ada, hingga makin lama makin sedikit sekali yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat --suatu proses yang dalam sebuah karangan yang lain telah saya namakan '*shared poverty*' (kemiskinan yang dibagi rata: memiskinkan bersama)." (Geertz, 1976:106).

Yang terjadi, di dalam kehidupan petani Jawa, kata Geertz, adalah sebuah proses "penjlimetan", sebab:

"Persawahan, dengan kemampuannya yang luar biasa untuk tetap mempertahankan tingkat produktivitas karya yang marginal selalu berhasil mempertahankan seseorang lagi tanpa menyebabkan kemerosotan pendapatan per kapita dengan serius, telah menyerap hampir seluruh tambahan penduduk yang terjadi karena penyusupan orang-orang Barat, sekurang-kurangnya secara tidak langsung. Namun bagaimanapun proses itu pada akhirnya pasti menimbulkan kemerosotan. Proses inilah yang saya sebut *involusi pertanian*" (Geertz, 1976:87).

Proses "penjlimetan" yang oleh Geertz disebut dengan "involusi" itu menjadi sebuah istilah yang sangat terkenal di kalangan para akademisi yang mengulas kehidupan petani Jawa. Di bawah konsep "involusi" dan *shared poverty* sebagaimana diuraikan Geertz itu, kehidupan petani Jawa tidak akan mengalami konflik akibat tekanan kemiskinan dan fragmentasi tanah. Konsep "harmoni sosial budaya" di dalam kehidupan petani tersebut dapat meredam seluruh potensi konflik, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang serius di dalam kehidupan masyarakat petani.

Banyak pendapat yang meragukan tesis Geertz tentang involusi pertanian. Salah satu dari banyak kritik mendasar terhadap Geertz, dia lupa dan terlalu mengabaikan adanya tuan-tanah-isme, dan polarisasi desa. Kedua, dia juga gagal memberikan tekanan pada adanya bermacam-macam

bentuk penghisapan kecil-kecilan terhadap petani-petani miskin oleh tetangga-tetangganya yang lebih kaya. Dan ketiga, yang lebih penting lagi, dia gagal memahami bagaimana bentuk-bentuk penghisapan tadi bisa berkembang menjadi pusat-pusat konflik sosial di bawah pengaruh perubahan politik dan teknologi (Mortimer, 1984:94).

Kritik lain seperti oleh Collier (Collier, 1978), dan juga Collier dengan Birowo (Collier & Birowo, 1973). D. Montgomery (Montgomery, 1976). Rudolf Sinaga (Sinaga, 1976) menunjukkan, tesis involusi diragukan kebenarannya, terutama bila dilihat dari dampak *Revolusi Hijau* di daerah pedesaan Jawa, di mana masuknya teknologi baru di bidang pertanian tradisional mengakibatkan rendahnya potensi penyerapan tenaga kerja di sektor tradisional.

Karena penggunaan teknologi baru di sektor pertanian tradisional berjalan seiring dengan proses pencapaian keuntungan, operasi pertanian yang lebih besar yang telah mengakibatkan penurunan dalam pembayaran setiap unit tenaga kerja yang digunakan, maka *ceteris paribus*, pengangguran terbuka, dan buruh-buruh tani yang dapat diserap akan mengalami penurunan tingkat kehidupan yang akhirnya menuju kemiskinan yang parah.

Proses akumulasi tanah oleh unit-unit pertanian yang beruntung akan berlangsung dengan intensitas yang tinggi, yang mengakibatkan makin banyak orang yang tak bertanah dan unit-unit pertanian yang kecil akan hilang dimakan oleh unit-unit pertanian yang relatif besar. Orang-orang ini akan menambah barisan proletariat desa dengan ciri kehidupan miskin yang parah. Di dalam situasi proletarisasi desa sedemikian itu, maka hubungan kerja antara majikan dan buruh di desa-desa akan menjadi hubungan kerja perbudakan, di mana budak-budak menerima apa saja yang dibayar si majikan dan menerima apa saja yang dilakukan si majikan terhadapnya (Arief, 1979).

Kritik lebih rinci terhadap tesis "involusi" dan *shared poverty*-nya

Geertz dikemukakan oleh Arthur van Schaik, *Colonial Control and Peasant Resources in Java*, melalui studi di Pasuruan, Jawa Timur, dan Tegal, Jawa Tengah. Schaik mengemukakan, analisis secara regional dari korelasi yang disajikan Geertz antara kepadatan penduduk, persentase sawah-sawah dari jumlah besar tanah pertanian, persentase sawah yang ditanami tebu dengan penghasilan padi setiap hektare, terbukti, cara Geertz menghitungnya salah. Juga menjadi jelas, penghasilan yang tinggi, terutama terdapat di Jawa Timur, di mana keadaan alam untuk tanah pertanian mempunyai irigasi lebih menguntungkan daripada daerah lain di Pulau Jawa. Industri-industri gula di Jawa menempati daerah-daerah sangat subur, dan memenuhi syarat untuk pertanian padi. Justru di tempat yang terbaik ini penduduk dipaksa untuk melepaskan tanahnya supaya tebu dapat ditanam di atas lahan subur tersebut. Karenanya, penjelasan akan kehadiran pabrik gula dan pemaksaan penanaman tebu lebih gampang dimengerti untuk menjelaskan kemiskinan petani di Jawa daripada dalil-dalil involusi pertanian (Schaik, 1986).

Rangkaian kritik terhadap Geertz tersebut setidaknya menggambarkan, sesungguhnya proses kemiskinan petani di Jawa berlangsung bukan tanpa berkembangnya potensi konflik, terutama di dalam kehidupan petani. Homogenitas petani sebagaimana dikatakan Geertz itu justru merupakan kekhilafannya (Mubyarto, 1978), dan lebih-lebih lagi, ketika kehidupan petani dilanda *Revolusi Hijau*, maka sesungguhnya gambaran Geertz tentang homogenitas itu semakin sulit dibayangkan. Sebab akibat ekonomis dari *Revolusi Hijau* di daerah pedesaan menyebabkan perubahan besar bagi kehidupan petani, yaitu timbulnya komersialisasi dan pengambilan keputusan terutama dalam bidang produksi. Hal ini karena pengaruh penggunaan sarana produksi yang harus dibeli dari luar desa. Komersialisasi itu muncul bukan dari hubungan harga, melainkan dari kenaikan hasil-hasilnya yang besar sekali, di mana kenaikan ini menyebabkan surplus yang besar bagi tuan tanah. Para petani kaya dengan kelebihan surplus yang mereka per-

oleh dari *Revolusi Hijau*, telah mengumpulkan sebagian besar tanah di tangan mereka dan kemampuan yang lebih besar lagi untuk menanam lebih intensif dalam memperbesar surplus mereka.

Pendeknya, *Revolusi Hijau* telah melahirkan suatu bentuk mobilisasi kaum tani. Perubahan pada hubungan dan tata nilai di pedesaan sebagai akibat langsung dari *Revolusi Hijau* tersebut menyebabkan yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Ketegangan sosial di desa menjadi semakin runcing. Hampir tiap tahun, satu atau dua orang pemilik sawah yang kaya di setiap lima desa mengalami serbuan panen di sawah-sawah mereka. "Serobotan", yang secara harfiah berarti serbuan panen, atau menuai sepotong sawah meskipun tidak ada perintah pemiliknya, merupakan gejala umum pada musim panen. Orang-orang yang menuai padi baik penduduk desa yang miskin maupun terutama buruh-buruh pendatang musiman adalah mereka yang kelaparan di musim paceklik. Musim panen telah menjadi musim bertengkar antara penduduk desa yang miskin, para pekerja perantau, pemilik tanah dan para pejabat (Mortimer, 1984:103-104)

Komersialisasi dalam hubungan produksi yang mengakibatkan banyaknya lapisan miskin para buruh tani dan petani gurem lainnya tersingkir dari proses produksi, serta berkurangnya kemampuan pertanian untuk menampung tenaga kerja mengakibatkan orang-orang yang tersingkir ini kehilangan satu lagi hak-hak subsistensi mereka yang masih tersisa. Sementara menciptakan suatu angkatan kerja yang jumlahnya kecil tapi mempunyai privelese-privelese, sistem baru itu juga meniadakan sumber pangan yang utama bagi sejumlah orang yang lebih besar, yakni orang-orang Jawa yang tidak punya tanah. Potensi bagi polarisasi dan konflik antar-kelas sudah tampak mengancam. *Revolusi Hijau* lebih besar kemungkinannya akan mempergawat konflik kelas daripada memberikan jalan damai menuju pembangunan. Meskipun ini tidak perlu merupakan suatu resep bagi pemberontakan, namun implikasinya, konsekuensi-konse-

kuensi sosial dan ekonomi dari *Revolusi Hijau* bukannya meredakan ketegangan antar-kelas di pedesaan, melainkan dapat mengabaikan tingkat-tingkat paksaan dan penindasan yang lebih tinggi (Scott, 1976: 326).

Gambaran memburuknya hubungan kelas agraris ini sesungguhnya telah berlangsung sejak zaman kolonial, terutama memburuknya "perimbangan pertukaran" (*balance of exchange*) antara pemilik dan penyewa. Apabila dalam jangka waktu tertentu kita meneliti barang dan jasa yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa, dan sebaliknya yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik, akan kita lihat satu pergeseran yang pasti dalam pertukaran itu, yang merugikan penyewa. Pada umumnya para pemilik tanah memberikan jasa-jasa yang lebih sedikit sementara ia menuntut jasa-jasa yang sama besarnya atau lebih dari penyewa atau buruh. Dalam pengertian ini, tata hubungan itu secara objektif menjadi lebih eksploitatif.

Penjelasan mengenai keburukan ini bisa dicari dalam suatu gabungan faktor-faktor demografis dan politis yang terus menerus merongrong kemampuan menawar yang relatif dari para petani penggarap. Selama masa kolonial, perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan agraria menghasilkan suatu kelas penggarap yang semakin besar, yang kelangsungan hidup dan ketenteramannya semakin tergantung pada belas kasihan pemilik tanah. Munculnya pasar serta sistem pembayaran kontan berarti guncangan baru bagi pendapatan para penggarap berhubungan dengan adanya fluktuasi harga. Pada saat yang sama, desakan-desakan untuk membagi kembali di lingkungan desa-desa menjadi bentuk kelangsungan hidup yang semakin tidak bisa dipercaya, karena semakin banyak tanah yang dimiliki tuan-tuan tanah yang tidak tinggal di desa, yang bisa mengabaikan norma-norma setempat tanpa menerima hukuman apa-apa (Scott, 1981:101).

Namun kritik terhadap tesis Geertz harus dipahami dalam konteks perubahan sosial yang sudah terjadi sejak Geertz menemukan datanya. Perubahan sosial telah terjadi di desa-desa Jawa, terutama sejak program *Revolusi Hijau* dicanangkan pemerintah pada awal 1970-an. Sebab itu, ter-

lepas dari kelemahan tesis Geertz, namun selayaknya dipahami, pada konteks realitas sosial pada masa itu, tesis Geertz tersebut menjelaskan, kehidupan para petani dapat mempertahankan subsistensi mereka dari berbagai ancaman makin sempitnya tanah, dan menurunnya produksi dengan kemampuan melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Di dalam konstelasi sedemikian itu semua kritik terhadap Geertz juga tidak lepas dari kelemahannya, karena kritik tersebut datang dari realitas masyarakat desa yang sudah berubah dibanding konteks realitas sosial ketika Geertz mengajukan tesisnya.

Dengan demikian, pada dasarnya tesis Geertz masih dapat dipertahankan dengan asumsi, realitas sosial petani di beberapa bagian tertentu tidak mengalami perubahan berarti akibat program pembangunan, khususnya dalam budi daya tebu. Dengan kata lain, realitas sosial kehidupan petani yang sedang mengalami proses perubahan itu, lebih mengandung potensi konflik daripada sebagai suatu situasi tertib sosial yang meredusir konflik. Hubungan antar kelas dalam kehidupan petani dan hubungan petani dengan struktur kekuasaan pemerintah dalam proses pembangunan, melahirkan sebuah proses sosial yang tidak selalu harmonis, terutama di dalam menanggapi program-program pembangunan di daerah pedesaan. Khususnya yang menyangkut kehidupan petani tebu, beberapa hal dapat dikatakan merupakan sumbangan Geertz dalam memahami realitas petani tebu dewasa ini, meskipun program tanaman budi daya tebu dewasa ini berbeda dengan ketika Geertz melakukan penelitiannya. Proses sosial akibat pembangunan tersebut terjadi di dalam banyak program pembangunan, tidak saja dalam program *Revolusi Hijau* yang telah berlangsung dalam dua dekade lebih, tapi juga terjadi di dalam program TRI.

1.3.1 Teori-teori Protes Sosial Petani

Teori-teori yang menguraikan gerakan sosial petani, dan perilaku perlawanan petani telah berkembang sedemikian luas baik dalam perdebatan

maupun latar belakang penyebabnya. Beberapa pendapat dan perdebatan teoritis itu pada dasarnya dapat dibedakan atas asumsi masing-masing. Berikut ini diuraikan beberapa perdebatan tersebut dalam upaya mendekati permasalahan studi ini.

Mark Lichbach dalam artikelnya, *What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dilemma, Paradox, and Irony in Peasant Collective Action*, (1994) mengemukakan, asumsi-asumsi yang menjelaskan terjadinya revolusi agraris yang disebabkan petani menolak komersialisasi pertanian dikemukakan oleh Henry Landsberger dan Theodor Shanin. Sementara yang berasumsi revolusi tersebut disebabkan berkembangnya pasar yang mendorong munculnya kepentingan pribadi melalui makin mengerasnya dasar dan paham kesejahteraan sebagai norma-norma resiprositas dan hak-hak subsistensi, dan melihat revolusi agraris berakar pada proses imperialisme dan kapitalisme global dikemukakan oleh Eric Wolf.

Pendapat yang berargumen revolusi agraris adalah akibat dari runtuhnya keamanan ekonomi petani, dan melemahnya dasar-dasar kehidupan masyarakat pedesaan akan diikuti oleh radikalisme, dikembangkan oleh Eric J. Hobsbawm. Asumsi yang berdasarkan pertumbuhan pasar dan kekuatan para tuan tanah untuk mengekstraksi surplus dari petani-petani miskin. Tingginya derajat eksploitasi sedemikian itu akan mendorong lapisan tradisional untuk memberontak dikemukakan secara panjang lebar oleh Barrington Moore Jr. Akhirnya, yang berasumsi revolusi agraris diakibatkan proses perluasan pasar yang menciptakan strata sosial baru, dan khususnya akan mendorong revolusi, dikembangkan oleh Jeffrey Paige. Pada dasarnya, pendapat-pendapat sedemikian ini menekankan betapa kapitalisme dan imperialisme membuat para petani menjadi revolusioner.

Rational-actor theories, mengkritik berbagai argumen tersebut. Mancur Olson Jr. dalam karyanya *The Logic of Collective Action* adalah yang pertama menolak kebenaran yang menyatakan, pergolakan petani menentang kekuatan pasar tidaklah selalu mendorong terjadinya pemberontakan pe-

tani. Samuel Popkin dalam *Rational Peasant* adalah yang paling banyak mengutip konsep Olson untuk menerapkan argumennya pada perjuangan petani. (Lichbach, 1994:384-385).

Sementara itu, Susan Eckstein dalam bukunya *Power and Popular Protest* (1989) mengemukakan faktor-faktor yang mendorong orang melakukan pemberontakan. Eckstein mengemukakan, struktur sosial merupakan konsekuensi ketimpangan distribusi kekuasaan, kekayaan dan prestise, yang menimbulkan perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dalam jenjang. Mereka yang menguasai sarana pemaksa fisik dan sarana produksi kekayaan akan memiliki kekuasaan untuk menguasai mereka yang tidak memilikinya. Kekuasaan itu mencakup baik idea maupun penguasaan atas sumber daya material. Apabila kaum buruh dan orang-orang miskin memberontak, itu tidak berarti mereka secara intrinsik pada dasarnya dilahirkan untuk membuat kerusuhan. Mereka memberontak karena terbatasnya berbagai sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan (Eckstein, 1989:3).

Selanjutnya menurut Eckstein, pendekatan struktural historis dari banyak pengarang menggunakan analisis yang berbeda untuk menjelaskan tindakan kolektif pada individual. Beberapa pakar menguraikan penjelasan sikap individu dengan kepribadian otoriter sebagai akar penyebab seseorang untuk memberontak, dijelaskan oleh Hoffner (1951), dan Lipset (1981); orang yang mengalami keterasingan dan anomie oleh Kornhauser (1959); mereka yang frustrasi dan mengalami pengurangan relatif dengan orang lain dibanding diri sendiri dikembangkan oleh Davies (1962), Feirabend & Feirabend (1971), Gurr (1970); mereka yang menginginkan norma dan nilai-nilai baru dikemukakan Smelser (1963). Beberapa dari perilaku penentang itu digambarkan sebagai non-rasional maupun yang rasional.

Teori Pilihan Rasional dikembangkan oleh Olson (1965) dan Popkin (1979) menjelaskan perilaku penentang pada tingkat individual. Namun

mereka juga menyatakan, mobilisasi juga layak diperhitungkan didasarkan pada perhitungan individu atas untung rugi yang akan ditanggungnya dari ketidakpuasannya atas keadaan status quo. Teori Pilihan Rasional tak dapat dimasukkan ke dalam mereka yang memiliki solidaritas kelompok, komitmen moral kepada kelompok, dan nilai-nilai non-rasional lainnya yang memobilisasi rakyat untuk bertindak lepas dari kepentingan pribadi. Apa yang rasional bagi individu tidak selalu konsisten dengan pilihan-pilihan yang memberi inspirasi kelompok baik secara politik maupun secara budaya (Eckstein, 1989:4).

Kelemahan teori Pilihan Rasional, menurut Eckstein, teori ini tak mengingatkan pada bentuk-bentuk perlawanan terselubung ketika bentuk perlawanan terbuka tak dimungkinkan akibat kuatnya tekanan rezim negara. Konflik antara pemilik modal dan buruh misalnya, yang dapat diselesaikan dengan melakukan pemogokan, tapi ketika pemogokan dianggap sebagai melawan hukum, para pekerja bisa melakukan berbagai tindakan untuk menentangnya secara bersama-sama yang tidak dapat dijelaskan pada tingkat individual, di mana teori Pilihan Rasional bertumpu.

"While strike reflects underlying conflicting interests between labor and capital, its absence does not necessarily imply worker satisfaction. Discontent is least likely to be expressed in overt, coordinated work stoppages under nondemocratic regimes where strike activity is outlawed and so likely to be repressed that the costs are often perceived to outweigh possible gains. This cost/benefit interpretation of strike activity is consistent with rational-choice theory. Where strikes are outlawed, workers who strike may even run the risk of being fired. Yet rational-choice theory does not sensitize us to the variety of ways in which workers might. Under the circumstances, undermine elite interests without directly confronting the powers that be: for example, through footdragging, absenteeism and pilferage. Such quiet defiance will minimally undermine employer's ability to generate surplus, and will possibly also bring some material gains to workers as well. The varied expressions of defiance cannot be explained at the level of the individual, on which rational-choice theory is premised". (Eckstein, 1989:13- 14).

Di bagian lain, dengan mengutip pendapat Jenkins (1983), McAdam, McCarthy, and Zald (1987), Eckstein mengemukakan, teori Mobilisasi Sumber Daya barangkali merupakan teori non-Marxian yang paling baik menjelaskan gerakan sosial pada tingkat organisasi maupun pada tingkat individual. Keresahan atau keluhan dan kekecewaan adalah endemis pada struktur sosial, dan keresahan, serta keluhan atau kekecewaan itu tak dapat mereka perhitungkan bagi pertumbuhan gerakan sosial. Seperti teori Pilihan Rasional, penganut aliran ini melihat tindakan gerakan sebagai respons rasional atas biaya dan ganjaran dari berbagai jalur tindakan yang berbeda. Tapi mereka melihat gerakan merupakan kesatuan, di atas semua sumber daya, organisasi kelompok, dan peluang bagi tindakan kolektif (Eckstein, 1989:6).

Eckstein dengan mengutip pendapat Piven dan Cloward (1979) juga menjelaskan proses sosial pada tingkat struktural, bukan pada tingkat individual. Mereka juga tidak setuju pada pendapat penganut teori Mobilisasi Sumber Daya yang menyebutkan potensi terpenting dari gerakan sosial adalah bentuk organisasi, dan sumber daya organisasi. Mereka melihat, organisasi, terutama setelah lewat waktu, mengalami kemerosotan peluang untuk membawa perubahan bagi lapisan bawah. Mereka berpendapat, rakyat miskin lebih suka mengadakan perubahan melalui kelompok-kelompok yang terpisah, dan pemisahan sedemikian ini dapat dimobilisasi tanpa organisasi formal. Di dalam pandangan mereka, organisasi sangat rentan akan terjadinya oligarki internal dan kooptasi eksternal, serta organisasi cenderung tumpul untuk memelihara sumber pengaruh gerakan dan militansi. Kebanyakan organisasi di mana pun cenderung konservatif, meski organisasi dapat juga membawa orang bersama-sama dan mengemukakan nilai-nilai perlawanan mereka secara intensif atau tidak (Eckstein, 1989:6-7).

Studi lain yang dikutip Eckstein, menyangkut gerakan sosial yang dapat dicatat yang menyatakan, dasar dan hasil akhir dari gerakan sosial tak dapat dimengerti hanya pada tingkat organisasi dan tingkat individual,

yang terpenting, misalnya dikemukakan Skocpol (1979) dan Walton (1984), yang mencatat bagaimana struktur negara dan pengaruh ekonomi makro membentuk pemberontakan. Kekuatan-kekuatan makro sedemikian itu dapat membentuk protes di dalam cara-cara yang tak membutuhkan keterlibatan rakyat secara jelas (Eckstein, 1989:7).

Menurut Eckstein, sekalipun petani tampaknya pasif, sungkan, dan diam, mereka dapat saja menolak kondisi-kondisi yang tidak mereka sukai melalui cara mengurangi produksi, atau tidak mengindahkan informasi-informasi penting dari para penindasnya. Bentuk perlawanan secara diam-diam, atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum dilakukan daripada melawan secara terang-terangan. Para petani biasanya bersedia mengambil risiko dengan mengadakan konfrontasi langsung bila mereka menganggap ketidakadilan tidak lagi dapat ditoleransi, dan bila tuntutan akan kebutuhan mereka melonjak tiba-tiba, serta bila institusi lokal dan nasional dan kondisi kultural cenderung meminta mereka untuk menggunakan jubah kolektif (Eckstein, 1989:15).

Selanjutnya Eckstein mengemukakan, pernyataan kecewa dan keluhan disampaikan melalui berbagai hubungan kerja dan pemilikan kekayaan. Kekecewaan dan keluhan petani penyewa, petani bagi hasil dan buruh tani, disampaikan secara berbeda. Para buruh tani sibuk dengan tingkat upah dan kondisi kerja, petani pemilik tanah sibuk dengan harga-harga pasar hasil produksi mereka dan barang-barang serta jasa yang mereka konsumsi, sedangkan petani penyewa dan petani bagi hasil dengan tuntutan pada kerja dan hasil kerja mereka.

Dampak dari hubungan kerja pertanian pada pemberontakan petani merupakan perdebatan utama. Wolf (1969) menyatakan, ekonomi global telah membinasakan moral ekonomi para petani dan membuat radikalisme petani kelas menengah. Paige (1975) menentang pendapat Wolf dengan berpendapat, petani penggarap dan tenaga kerja migran adalah dasar terpenting dari gerakan revolusioner yang mempunyai kondisi khusus yang ber-

akar pada hubungan mereka dengan petani non-penggarap (tuan tanah). Menurut Paige, pemberontakan agraria merupakan protes pembaharuan yang menyangkut harga-harga komoditas dan kondisi kerja dari gerakan-gerakan revolusioner nasionalis dan sosialis bergantung pada perpaduan khusus dalam organisasi tanah, modal dan upah. Bila penghasilan penggarap tanah tergantung pada upah, dan penghasilan non-penggarap bergantung pada pendapatan dari hasil tanah, maka konflik sering menimbulkan gerakan-gerakan revolusioner (Eckstein, 1989:16)

Struktur sosial desa yang berbeda, kata Eckstein, menghasilkan respons yang berbeda pula terhadap penindasan dan eksploitasi sebagaimana dikemukakan Scokpol, Migdal, dan Wolf. Konteks struktur desa-desa di Amerika Latin pada umumnya menopang gerakan-gerakan revolusioner, dan mempengaruhi bagaimana keluhan masyarakat desa untuk dihubungkan dengan "situasi revolusioner". Pemberontak petani Zapata menempatkan markas mereka di desa-desa Meksiko, di mana kehidupan masyarakat desa memiliki kerja sama yang kuat dan berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak atas tanah mereka. Namun desa-desa Meksiko pasca-revolusi tak mendukung perlawanan petani yang keadaan ekonominya terindas, karena komunitas lokal kehilangan banyak hak otonominya disebabkan penyatuan ke dalam pemerintahan nasional dan lembaga-lembaga partai, dan pemimpin-pemimpin lokal dikooptasi melalui patronase ke dalam struktur institusi-institusi nasional. Pengalaman di Meksiko dan Bolivia ini menunjukkan, revolusi agraris ditentukan oleh ikatan-ikatan desa dan otonomi institusi-institusi lokal dan tak terlampau menonjolkan dasar mobilitas pedesaan (Eckstein, 1989:34-35).

Penjelasan lain mengenai revolusi petani dikemukakan oleh Charles D. Brockett dalam bukunya, *Land, Power and Poverty* (1990), yang berupaya menjelaskan sumber-sumber mobilisasi petani telah didorong oleh hasil dialog dari banyak ahli. Menurut Brockett, masing-masing para ahli tersebut memiliki perbedaan penekanan pendapat, namun semuanya dapat diba-

gi menjadi tiga bentuk faktor utama dalam melihat mobilisasi petani. Pertama, menitikberatkan pada meluasnya komersialisasi pertanian yang mengakibatkan merosotnya keamanan ekonomi petani, terbongkarnya hubungan-hubungan sosial pedesaan, dan melemahnya nilai-nilai tradisional. Penekanan pada faktor sedemikian ini diketemukan pada pendapat Paige (1975), Scott (1976), dan Wolf (1969).

Kedua, pendapat yang melihat faktor pembentukan organisasi politik yang berasal dari luar masyarakat petani yang mengembangkan tuntutan bantuan sumber daya ekonomi, perlindungan, keahlian berorganisasi, dan sistem nilai baru. Yang menekankan faktor-faktor sedemikian ini adalah Migdal (1974), Singelman (1981), dan White (1977). Ketiga, respons negara, khususnya perpaduan dari pilihan antara reformasi dan penindasan, menimbulkan dampak penting pada lingkup dan intensitas mobilisasi petani. Pendapat ini dikemukakan McClintock (1984), Skocpol (1982), dan Tilly (1978).

Masing-masing faktor yang dikemukakan tersebut merupakan faktor penting dalam memahami masyarakat Amerika Tengah kontemporer. Pada awalnya transformasi agraria di wilayah ini ditentang para petani, khususnya masyarakat petani Indian, tapi akhirnya berhasil dengan sukses kecil. Kemudian pada periode sekarang faktor penting dari perlawanan mereka adalah serbuan pada keamanan ekonomi mereka. Sebagai salah satu faktor, "krisis subsistensi" ini sangat dekat dengan pemahaman Scott yang menjelaskan perlawanan petani di Asia Tenggara, tapi tak cukup untuk memahami meluasnya mobilisasi petani dalam beberapa dekade di Amerika Tengah. Apa yang membedakannya pada periode sekarang adalah peran penting yang dimainkan oleh faktor-faktor politik, khususnya aktivitas yang berada di luar organisasi dan kebijaksanaan pemerintah.

Peran paling penting dari kekuatan politik baru di pedesaan Amerika Tengah dimainkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh gereja. Dengan kemudahan akses dan besarnya legitimasi dibanding aktor-aktor lainnya, ka-

rena masyarakat memiliki keyakinan agama yang sama (dan untuk beberapa kasus tertentu, para pastor), pekerja gereja di tiap-tiap negara memainkan peran sentral dalam mobilisasi petani. Terutama yang dapat dicatat, pengaruh *Catholic Action* dan misionaris luar negeri di Guatemala; program kursus radio gereja di Honduras, yang berbasis masyarakat di El Salvador, aktivis Jesuit dan Capuchin di Nikaragua.

Di seluruh wilayah itu upaya-upaya para aktivis ini berhasil meruntuhkan nilai-nilai dan hubungan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat petani pasif --baik melalui upaya-upaya yang secara langsung bersifat keagamaan, upaya-upaya pembangunan, ataupun yang bersifat politis, mereka sering berhasil melayani untuk mengubah sikap-sikap yang fatalistik menjadi sikap yang aktif, menciptakan organisasi-organisasi baru, dan memelihara, serta memfasilitasi transformasi tersebut dalam mengekspresikannya. Hasilnya, para petani di tiap-tiap negara berubah dan didukung oleh proses sedemikian itu, mereka memelopori tuntutan akan hak-hak hidup mereka secara lebih baik, berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi, membentuk batas-batas wilayah tanah dan melakukan penyerbuan atas tanah-tanah (Brockett, 1990:192).

Selanjutnya Brockett mengemukakan, upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja itu diperkuat oleh tokoh-tokoh sekuler. Di Guatemala selama periode ini organisasi-organisasi petani yang penting didukung oleh upaya aktivis-aktivis organisasi radikal dan aktivis partai politik. Di El Salvador, peran penting dimainkan oleh para organisator yang berasal dari organisasi-organisasi rakyat, dan di Nikaragua oleh Sandinista. Seperti halnya tokoh-tokoh gereja, para aktivis sekuler ini membawa pesan-pesan dan dukungan untuk memperkuat hubungan wewenang tradisional, serta membantu pembentukan organisasi rakyat. Apabila upaya-upaya sedemikian ini dipadukan dengan krisis subsistensi yang melanda banyak wilayah pedesaan, hasilnya adalah mobilisasi maha penting oleh para petani dalam upaya mempertahankan dan memperbaiki posisi hidup mereka. Namun ha-

sil nyata dari semua itu adalah sangat tergantung pada bentuk-bentuk respons dari masing-masing pemerintahan terhadap ancaman rakyat pada status quo. Nyatanya sikap masing-masing pemerintahan tersebut memiliki banyak spektrum, ada yang secara aktif mendukung, bersifat permisif, fasilitatif, netral, preventif, represif, dan penindasan secara sistematis.

"In the traditional agrarian structure, the passivity of the peasantry was maintained through patron-client relationships and fatalistic value systems. Power was concentrated, and peasants had few alternatives, if any. Behind this stratified network stood the state. Should its coercive capability be required, it was ready to harass and intimidate potential rural leaders." (Brockett, 1990 :193)

Sementara itu, Ted Gurr, dalam bukunya, *Why Men Rebel*, mengembangkan suatu teori umum yang didasarkan atas teori psikologi terhadap jarak dan bentuk "kekerasan politik" yang didefinisikannya sebagai:

"Semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, para aktor politiknya termasuk kelompok-kelompok politik yang bersaing, maupun para pejabat atau kebijakan-kebijakannya. Konsep itu menggambarkan adanya seperangkat peristiwa, penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan secara bersama. Konsep itu termasuk revolusi... termasuk juga perang gerilya, kudeta, pemberontakan, dan kerusuhan". (Gurr, 1970:3-4).

Gurr membedakan tiga bentuk kekerasan politik yaitu:

1. Turmoil: *Relatively spontaneous, unorganized political violence with substantial popular participation, including violent political strikes, riots, political clashes, and localized rebellions.*
2. Conspiracy: *Highly organized political violence with limited participation, including organized political assassinations, small-scale terrorism, small-scale guerrilla wars, coups d'etat, and mutinies.*
3. Internal War: *Highly organized political violence with widespread popular participation, designed to overthrow the regime or dissolve the state and accompanied by extensive guerrilla wars, civil wars, and revolutions.* (Gurr, 1970:11).

Bagi Gurr, kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik. Orang akan menjadi marah bila terdapat jurang pemisah antara barang-barang berharga, dan kesempatan yang mereka anggap sebagai haknya yang sebenarnya --suatu kondisi yang dikenal sebagai deprivasi relatif-- Gurr menawarkan model khusus untuk menjelaskan berbagai bentuk kekerasan politik yang utama. Ia membedakan antara kekacauan (*turmoil*), persekongkolan (*conspiracy*), dan perang saudara (*internal war*) sebagai bentuk-bentuk utama. Revolusi termasuk kategori *internal war*, bersama-sama dengan terorisme kelas kakap, perang, serta perang sipil. Satu hal yang menyebabkan *internal war* dibedakan dari bentuk lain, dia lebih terorganisir dibandingkan *turmoil*, dan lebih berbasis massa rakyat dibanding bentuk *conspiracy*. Karena itu, logis kalau revolusi harus diterangkan dari adanya deprivasi relatif yang hebat, meluas, dan menyangkut berbagai segi kehidupan (*multifaceted*) yang menyentuh baik para calon elite maupun massa rakyat (Skocpol, 1991:7; Gurr, 1970:334-347)

Teori lain dikemukakan oleh Charles Tilly, dalam karyanya, *From Mobilization to Revolution*, yang menggambarkan, katakanlah suatu puncak pernyataan teoritis bagi pendekatan konflik-konflik yang dilahirkan sebagai lawan bagi teori frustrasi-agresi dalam kekerasan politik, seperti teori Gurr. Argumen dasarnya amat meyakinkan, dan mudah dipahami. Para pakar teori konflik-politik mengatakan, bagaimanapun ketidakpuasan rakyat, mereka tak dapat ikut campur tangan dalam aksi politik (termasuk aksi kekerasan), kecuali bila mereka menjadi bagian dari suatu kelompok yang terorganisir yang mempunyai beberapa sumber daya. Bahkan sekalipun kemudian mereka atau kelompok-kelompok yang bersaing mungkin berhasil menekan kemauan untuk ikut campur dalam aksi kolektif dengan cara mempertinggi risiko yang harus ditanggung. Selanjutnya, para pakar teori konflik-politik berkata seperti yang dikemukakan Tilly:

"Revolusi dan kekerasan kolektif itu lebih cenderung muncul secara langsung dari pusat proses-proses politik dalam suatu masyarakat, ketimbang mencerminkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam masyarakat... klaim-klaim dan klaim-klaim balasan tertentu terhadap pemerintah yang ada yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang termobilisir adalah lebih penting dibanding ketidakpuasan umum atau kekecewaan dari kelompok-kelompok itu, dan tuntutan (klaim) untuk mendapat tempat yang mapan dalam struktur kekuasaan adalah sangat menentukan". (Tilly, 1978:436)

Menurut Skocpol, dalam kenyataan, Tilly menolak memakai kekerasan sebagai objek analisisnya, karena ia berketetapan, insiden kekerasan kolektif sesungguhnya hanya merupakan akibat proses normal dari persaingan kelompok untuk memperebutkan kekuasaan dan tujuan tertentu. Maka dari itu, objek analisisnya adalah "aksi kolektif" yang diartikan sebagai "aksi sekelompok orang secara bersama dalam mencapai kepentingan bersama". Dalam menganalisis aksi kolektif ini, Tilly menggunakan dua model umum, "model masyarakat politik" dan "model mobilisasi". Unsur pokok model masyarakat politik adalah pemerintah (organisasi yang mengendalikan sarana-sarana kekerasan utama dalam masyarakat), dan kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan, termasuk anggota (pesaing yang mempunyai akses rutin terhadap sumber daya pemerintah, dan penentang (semua pesaing lainnya). Model mobilisasi termasuk variabel yang dirancang untuk memperjelas pola aksi kolektif yang dilakukan oleh pesaing tertentu. Variabel ini mengacu pada kepentingan kelompok, tingkat pengorganisasian, besarnya sumber daya yang ada di bawah kendali kolektif, serta pada kesempatan dan ancaman yang dipakai oleh pesaing-pesaing tertentu dalam hubungannya dengan pemerintah dan kelompok pesaing lainnya (Skocpol, 1991:7-8).

Selain itu, Skocpol juga mengutip pendapat Wolf, yang mengatakan pada akhirnya faktor penentu yang dapat memungkinkan terjadinya pemberontakan petani terletak pada hubungan kaum tani dengan lingkup kekuasaan yang ada di sekitarnya. Suatu pemberontakan tak akan dapat me-

letus dalam situasi yang benar-benar impoten. *"A rebellion cannot start from a situation of complete impotence; the powerless are easy victims"* (Wolf, 1969:290). Jika para petani berniat bertindak, bukannya diam dengan segala keluhannya, tapi mereka harus mempunyai "pengaruh internal" --yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan kolektif yang terorganisasi terhadap orang-orang yang memeras mereka. Pengaruh internal yang dimiliki petani, dapat diterangkan dengan kondisi-kondisi struktural dan situasional yang mempengaruhi: (1) tingkat dan jenis solidaritas masyarakat petani; (2) tingkat otonomi petani terhadap pengawasan dan kontrol sehari-hari dari para tuan tanah dan kaki tangannya; dan (3) pengendoran sanksi-sanksi kerja paksa dari negara terhadap pemberontakan petani (Skocpol, 1991:125).

Dua faktor pertama, kata Skocpol lebih lanjut, yaitu solidaritas dan otonomi petani, harus diselidiki melalui analisis struktur-struktur agraris rezim prarevolusi. Struktur kelas dan struktur politik lokal mempunyai arti tersendiri. Untuk meneliti hubungan kelas di pedalaman, tak cukup hanya mengidentifikasi perbedaan lapisan pemilikan kekayaan terpisah dari konteks institusionalnya. Pendekatan sedemikian ini yang digunakan Paige, yang mencoba untuk menarik kecenderungan politik dan organisasi sosial para petani penggarap dan non-penggarap dari segi pemilikan dan sumber pendapatan masing-masing kelas. Dalam penjelasan teorinya, dan bahkan dalam analisis kasusnya, Paige sebenarnya hanya menyajikan kembali semua faktor struktural-sosial dan organisasional-politis yang penting, yang diperlukan untuk menjelaskan politik di daerah agraris (Skocpol, 1991:168).

Hubungan antara pasar komoditas pertanian dengan revolusi juga menjadi ajang studi. Wolf melakukan perbandingan dari enam revolusi yang melibatkan partisipasi petani --di Meksiko, Rusia, Aljazair, Vietnam, dan Kuba-- serta adanya usaha untuk mengisolasi unsur-unsur umum dari revolusi petani. Seperti halnya Steward dan Stinchcombe, Wolf juga melihat pasar dunia yang disebutkannya seperti "Kapitalisme Atlantik Utara" yang

menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan revolusioner. Dalam kesimpulannya, Wolf menunjukkan banyaknya bentuk organisasi yang menyebabkan revolusi. Dari enam revolusi yang terjadi di dalamnya terdapat bermacam-macam organisasi pertanian seperti bentuk ekonomi *hacienda* atau *manorial* di Meksiko dan Rusia, bentuk ekonomi bagi hasil panen di Cina dan Vietnam, bentuk ekonomi perkebunan di Kuba, dan perekonomian dengan perpindahan tenaga kerja di Aljazair.

Menurut Wolf, tidak satu pun dari sistem tersebut yang mendorong terjadinya revolusi. (Pendapat ini bertolak belakang dengan teori strata sosial yang ada sebelumnya. -*hms*). Menurut Wolf, petani kelas menengahlah yang menjadi massa utama pendukung gerakan revolusi. Kesimpulan ini jelas bertolak belakang dengan hasil pengamatan Steward dan Stinchcombe, yang melihat konservatisme dan inefektivitas tindakan politik petani pemilik lahan kecil. Wolf mengatakan, petani kelas menengah paling mudah terkena dampak penyitaan tanah, fluktuasi pasar, tingginya tingkat bunga dan perubahan-perubahan lain yang diakibatkan pasar dunia. Akibatnya, petani kelas menengah mudah menerima gerakan revolusioner yang menjanjikan restorasi peraturan politik dan stabilitas ekonomi. Petani kelas menengah juga memiliki basis ekonomi yang independen dan sumber daya politik taktis yang tak dimiliki petani bagi hasil dan buruh perkebunan, hingga petani kelas menengah memiliki alasan dan sumber untuk mendukung suatu gerakan revolusioner. Wolf melihat petani kelas menengah marginal sebagai pendukung revolusi Cina, dan pendukung utama revolusi Vietnam. Dalam kasus Cina, Wolf menentang pendapat Stinchcombe yang menyatakan, penyewa lahan di Cina Selatan, bukan pemilik lahan kecil di Cina Utara, yang menjadi pendukung utama revolusi (Wolf, 1969:192).

Teori Wolf ini merupakan terobosan terhadap teori struktur sosial pertanian secara paradoks. Kelompok masyarakat pedesaan yang menurut sebagian besar ahli antropologi sebagai penopang tradisi budaya konservatif, ternyata menurut Wolf, merupakan pendukung utama perubahan revolu-

sioner. Rangkaian tipologi teoritis ini menghasilkan prediksi berbeda, tentang kondisi bagaimana yang mengarah kepada revolusi dan konflik antar-kelas di pedesaan. Secara terpisah terlihat masing-masing studi disertai bukti-bukti empiris yang berbeda. Di Puerto Rico tak ada sistem bagi hasil panen, jadi tak adil menyalahkan Julian Steward, karena tidak mengantisipasi bentuk konsekuensi sosial yang terdapat di sana (Skocpol, 1991:147).

Namun Jeffery Paige dalam bukunya yang terkenal, *Agrarian Revolution*, menolak pendapat Wolf, Steward, Sidney Mintz, dan lainnya, yang tak melihat adanya tanda-tanda konflik di *hacienda-hacienda*, sebab mereka menggambarkan hubungan antara pemilik lahan perkebunan dan buruh yang diberi hak untuk menggarap sejumlah kecil lahan untuk menopang kehidupannya. Hubungan ini menurut Wolf, Steward, dan Mintz, semata-mata didasari kepercayaan dan rasa saling membutuhkan. Padahal yang terjadi sesungguhnya, meski para buruh tersebut dibayar dengan upah minimal, sesungguhnya mereka adalah budak pemilik lahan, di mana pemilik lahan ini menegakkan peraturan yang merupakan kombinasi paksaan, perbudakan lewat utang, dan balas jasa secara periodik. Perbudakan yang samar-samar dengan kuatnya kontrol pemilik perkebunan terhadap lahan kecil yang ditanami buruh untuk kehidupannya tersebut dapat berlangsung dengan mudah, karena pemilik lahan mengontrol semua tindakan politik para budaknya (Paige, 1975:4-5).

Selanjutnya Paige mengemukakan, pada perkebunan milik pribadi atau kelas pengusaha swasta, di mana dasar pengaturannya adalah kekuasaan, konflik kelas sering muncul antara buruh upahan dan administrasi perkebunan, serta susah menjalin saling pengertian antara kedua belah pihak. Kendati kesadaran kelas makin tinggi, dan banyaknya organisasi politik dalam perusahaan perkebunan, tak terdapat tanda-tanda revolusi, tuntutan akan perubahan dan aksi yang didasari atas kelas. Dari tiga tipe utama organisasi sistem pertanian komersial --*hacienda*, *small holding*, dan *plantation*-- hanya yang terakhir ini yang menunjukkan tingkat konflik

antar-kelas (Paige, 1975:6).

Masih menurut Paige, Stinchcombe, seperti juga Wolf dan Mintz, menganggap perbudakan pada sistem *hacienda* sebagai sistem yang menimbulkan apatisme politik dan ketidakberdayaan, serta dominasi yang kuat dari dan dengan segala bentuk kelicikan pemilik lahan. Perekonomian internal *hacienda* didasarkan pada upah buruh dan pertanian subsisten, karena itu upah merupakan isu sensitif untuk menjadi isu politik. Dominasi kekuasaan para pemilik lahan menyebabkan mereka dapat mengontrol secara menyeluruh budak-budak mereka. Pemilik lahan kecil dalam analisis Stinchcombe memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi karena pengaruh politik dan organisasi, tapi karena mereka terpencil dalam pemukiman yang tersebar, serta terbatasnya sumber daya, membuat mereka sulit melakukan tindakan politik. Kalaupun ada perkumpulan politik sedemikian itu umumnya berusia singkat, dan mudah didominasi oleh pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap organisasi mereka.

Menurut Paige, Stinchcombe menggambarkan perilaku politik pekerja perkebunan yang berbeda dengan yang ditulis Steward tentang perilaku politik para pekerja perkebunan gula di pesisir selatan Puerto Rico. Menurut Stinchcombe, pekerja perkebunan memiliki karakteristik: perilaku politik yang apatis, miskinnya perkumpulan, dan dominasi tuan tanah yang kuat terhadap pengaturan para buruh, serta jarang muncul ekstrimitas politik. Di Puerto Rico, kehidupan buruh menunjukkan rasa solidaritas kelompok, perkumpulan yang banyak, keterikatan yang tinggi terhadap serikat buruh, dan aktif berpartisipasi dalam partai. Pendeknya, pandangan kedua orang ini sangat kontras.

Buruh perkebunan gula memiliki kesadaran golongan dan aktif melakukan tindakan politik dibanding buruh pertanian lain, kata Steward, tapi menurut Stinchcombe, para buruh tersebut sebenarnya sama sebagai budak di dalam *hacienda* komersial. Besarnya keluarga penyewa lahan perkebunan sering menimbulkan konflik dalam tipologi Stinchcombe. Konflik

berkembang karena proses bagi hasil antara petani dan pemilik lahan, serta meluasnya kesenjangan di antara mereka, kemampuan teknik petani, dan kepemimpinan petani kaya yang mengkombinasikan sensitivitas politik dan kepemimpinan yang efektif. Besarnya keluarga petani penyewa lahan tak hanya mengintensifkan konflik antar-kelas, tapi juga menghasilkan tindakan-tindakan revolusioner (Paige, 1975:6-7).

Selanjutnya Paige mengatakan, perbedaan lainnya adalah perbedaan yang mendasar tentang akibat bentuk usaha pertanian terhadap timbulnya konflik antar-kelas di pedesaan. Di Puerto Rico, tuan tanah perkebunan cenderung menghasilkan kesadaran kelas dan organisasi politik yang kuat, dan perilaku politik pemilik lahan kecil umumnya konservatif. Stinchcombe setuju, pemilik lahan kecil bersifat konservatif, tapi juga menyatakan sebenarnya buruh perkebunan tak peduli dengan tindakan politik, dan petani bagi hasil panen merupakan kelas revolusioner terpenting. Wolf menyatakan baik petani bagi hasil yang tak memiliki tanah maupun buruh perkebunan, sebenarnya kekurangan sumber daya politik --koordinasi secara politik-- independen yang diperlukan untuk suatu revolusi, dan ternyata pemilik lahan kecil yang selalu disebut konservatif itu merupakan kelas yang paling revolusioner (Paige, 1975:8).

Akhirnya, Paige mengatakan, kesimpulan yang berbeda ini menghasilkan teori yang berbeda mengenai hubungan antar-kelas di pedesaan. Dan sayangnya, kata Paige, tak satupun dari analisis tersebut yang menjabarkan hubungan antar-kelas di pedesaan yang sesungguhnya, dan kenyataannya tak ada yang telah mengembangkan teori tersebut. Masing-masing studi tersebut telah mengidentifikasi tipologi usaha pertanian dan hubungan antar-kelas, tapi bukan teori hubungan antar-dua variabel. Di samping itu studi tersebut telah mengidentifikasi suatu keteraturan penting dalam struktur organisasi pertanian dan sifat-sifat konflik kelas di pedesaan, sementara identifikasi kejekan empiris merupakan langkah awal yang penting dalam pembentukan teori, sehingga dengan sendirinya studi-

studi tersebut tak dapat menghasilkan teori.

Sebuah teori mengenai dampak organisasi pertanian pada gerakan sosial petani membutuhkan abstraksi dari prinsip umum keajekan empiris yang diidentifikasi dalam tipologi-tipologi (tipe-tipe). Proses ini membutuhkan dua langkah yang berbeda. Pertama, variabel kausal, yaitu yang mendasari struktur organisasi --pengaturan pertanian-- yang harus lepas dan didefinisikan terpisah. Kedua, variabel akibat dan terpengaruh yang juga harus dibedakan dengan jelas. Variabel bebas yang menggambarkan organisasi ekonomi harus dipisahkan dari variabel terpengaruh yang menggambarkan gerakan sosial politik sebelum proposisi kausal yang menghubungkan keduanya dinyatakan. Tipologi empirik sering menggabungkan dua perangkat variabel, mengacaukan hubungan sebab-akibat. Hanya ketika variabel yang ditipologikan telah dipisahkan, baru dimungkinkan untuk membentuk suatu proposisi khusus mengenai sebab-sebab gerakan sosial di pedesaan (Paige, 1975:9).

Dengan berbagai catatan itu, Paige mengembangkan teorinya yang menyangkut konflik kelas pedesaan. Pertama-tama dia menguraikan, pada tingkat yang paling umum tipe-tipe usaha pertanian menunjukkan, gerakan sosial merupakan konsekuensi hubungan antar-kelas yang membentuk adanya kerja fisik para penggarap tanah, dan menyediakan suatu basis massa dari gerakan agraris, dan kelas-kelas non-petani yang menggantungkan pendapatan mereka dari pertanian, sering menjadi target dari protes agraris, bukannya pendorong dari protes agraris. Misalnya dalam model Wolf, petani kelas menengah didesak oleh golongan menengah, bank, dan pajak yang mengancam pemilikan lahannya, yang menyebabkan kelas menengah petani mudah menerima politik radikal. Dalam teori Stinchcombe, penyewa lahan kecil terlibat konflik dengan tuan tanahnya karena masalah pembagian hasil panen pertanian yang merupakan bentuk pembayaran sewa lahan. Tipologi pertanian tersebut dalam kenyataannya merupakan ekspresi dpengulangan pola konflik antar-strata di pedesaan --yaitu bentuk

hubungan ekonomi politik kelas pemilik tanah di satu pihak, dan kelas yang tak memiliki tanah di pihak lain.

Paige mengemukakan suatu usaha untuk mengajukan teori konflik antar-kelas di pedesaan yang didefinisikannya sebagai pola konflik dalam hubungan antara tingkah laku sosial politik para pemilik lahan dan yang bukan pemilik lahan, serta memperkirakan kondisi seperti apa dari konflik tersebut yang membawa pemilik lahan ke dalam gerakan sosial dan revolusi sosial masyarakat petani. Variabel sebab yang mendasar dalam teori ini adalah hubungan pemilik lahan dan yang bukan pemilik lahan, di mana faktor-faktor produksi pertanian yang ditunjuk sebagai sumber penghasilan utama. Karena itu, teori ini didasarkan pada definisi kelas yang ditinjau dari sudut pemilikan lahan, bangunan, mesin, neraca perdagangan komoditas, dan kredit pertanian yang diberikan. Pemilik tanah maupun bukan pemilik tanah mendapatkan penghasilan mereka dari sumber yang berbeda, tergantung pada pengaturan budaya dan hubungannya pada komoditas pasar. Namun untuk memahami tingkah laku politik, ditinjau dari perbedaan pendapatan para pemilik dan bukan pemilik tanah.

Kelas atas cenderung tidak ditemukan dalam organisasi pertanian seperti *hacienda* komersial yang disebutkan Steward, atau di dalam sistem pertanian bagi hasil yang digambarkan Stinchcombe, atau perkebunan yang tergantung pada buruh migran seperti yang digambarkan Wolf. Kelas atas pemilik tanah bergantung pada teknologi pertanian primitif yang membuatnya tidak efisien, sering kacau, memakai tenaga kerja paksa, dan menggarap lahan dengan sembarangan tanpa memperhatikan nilai pasar. Kekuatan dan kemakmuran kelas atas yang memiliki tanah bergantung pada wilayah tanah yang dikuasai bukan pada efisiensi tanahnya. Semakin luas wilayah tanah, makin tinggi standar kehidupan pemilik tanah, dan makin besar pengaruh sosial politik mereka. Kelas atas pemilik tanah dapat memperluas wilayah tanahnya dengan memiliki tanah baru, dan dapat menjadi miskin bila kehilangan tanahnya. Karena pendapatan kelas atas pemilik ta-

nah tidak dapat didukung tanpa pemilikan tanah yang luas, maka eksistensi kelas atas pemilik tanah bertumpu pada konsentrasi tanah dan dominasi ekonomi dari beberapa pusat perkebunan.

Perluasan lahan oleh pemilik tanah luas, mau tak mau, menyita tanah petani berlahan sempit, sehingga menimbulkan konflik di antara mereka. Pemilik lahan sempit sering melanggar hak petani berlahan luas, karena petani berlahan sempit tersebut kekurangan sumber politik dan sosial yang berhubungan dengan pemilikan tanah. Hasilnya, kelas atas cenderung membuat petani pemilik lahan sempit tergantung. Mereka yang dahulunya pemilik tanah menjadi buruh perkebunan yang terikat, buruh upahan yang migrasi karena tanahnya kurang subur, bagi hasil panen, sehingga penyewa kehilangan semua haknya atas tanah, atau petani kecil yang kehilangan tanahnya untuk mendukung petani kaya, juga untuk mendukung produksi mereka sendiri.

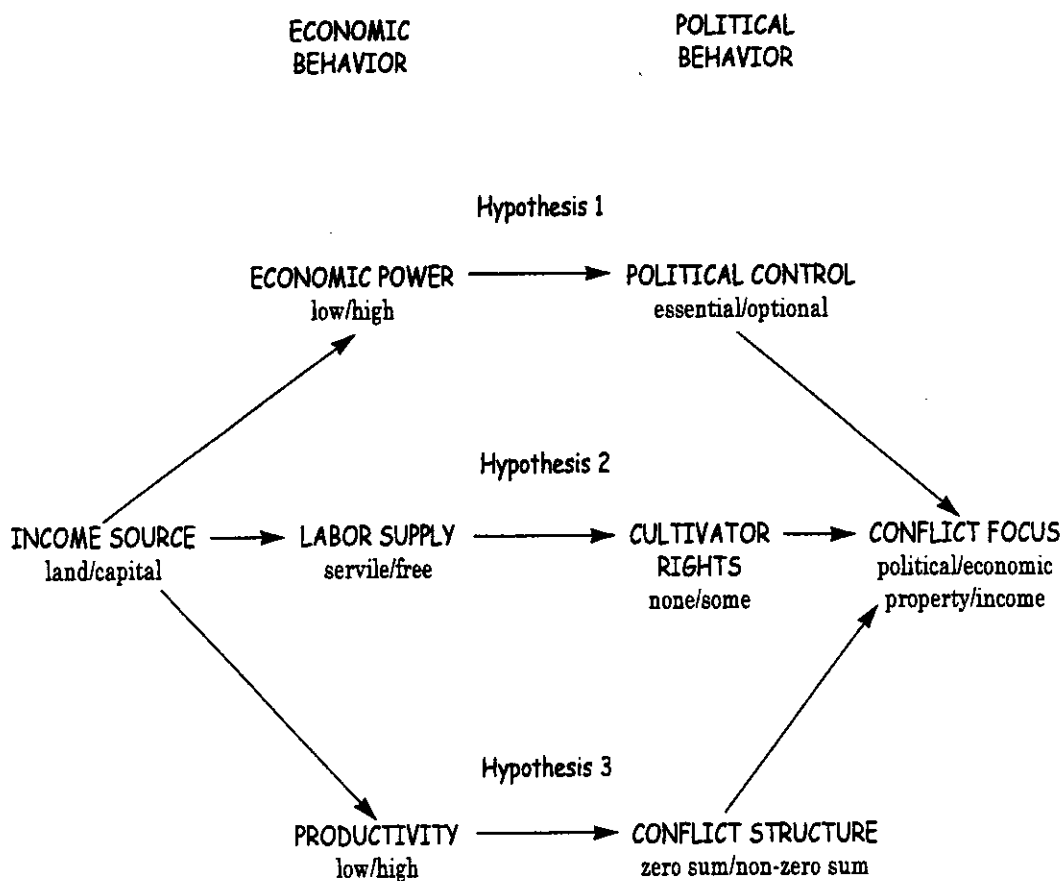
Banyak petani berlahan kecil yang sesungguhnya hidup dari memproduksi tanaman siap jual sebagai sambilan. Pemrosesan, transportasi, ekspor, dan juga manufaktur, serta penjualan komoditas akhir pertanian, semuanya dikontrol oleh pihak lain, bukan oleh para petani tersebut (bandingkan dengan proses tanam tebang-angkut, giling, dan jual dalam *TRI-hms*). Contoh ini menunjukkan, pemilik lahan kecil dalam ekspor komoditas pertanian dipandang sebagai buruh yang kebetulan memiliki sebidang kecil tanah sebagai bentuk "upah" mereka. Kelas atas itu diwakili oleh pamong, pemilik modal --tengkulak-- yang mengontrol pemasaran hasil panen. Pemilik lahan kecil maupun buruh perkebunan didominasi kelas atas yang kekayaannya didasarkan pada modal uang atau industri. Kekuatan ekonomi kelas atas pemilik tanah dan perdagangan ekspor pertanian menimbulkan tiga perbedaan mendasar dalam tingkah laku, yang membawa konsekuensi kritis bagi hubungan mereka dengan kelas pemilik tanah.

Dari argumen sedemikian itu, Paige mengajukan tipologi teori konflik antar-kelas di pedesaan:

Kelas Non-Pengolah Tanah (*Non-Cultivator*)

1. Kelas non-pengolah tanah yang menggantungkan pendapatannya dari hasil tanah, adalah lemah secara ekonomi sehingga harus bertumpu pada pembatasan politik pemilik tanah. Pembatasan ini cenderung menimbulkan konflik, karena penguasaan dan distribusi kepemilikan tanah. Kelas non-pemilik tanah memperoleh pendapatannya dari modal industri perdagangan, yang biasanya membutuhkan pembatasan politik terhadap pemilik lahan yang lebih sedikit, karena itu konflik cenderung berfokus pada distribusi pendapatan dari kekayaan --hak milik-- bukan kepemilikan kekayaan itu sendiri (Paige, 1975:18).
2. Kelas non-pengolah tanah yang memperoleh pendapatan dari tanah, biasanya tergantung pada budak atau buruh semi-budak, dan tidak memberikan keleluasaan hak politik, ekonomi pada pemilik tanah, sehingga konflik buruh sering cenderung dipolitisir. Kelas non-pengolah tanah yang memperoleh pendapatannya dari modal industri atau komersial, biasanya tergantung pada buruh bebas dan lebih mudah mentoleransi hak-hak ekonomi dan politik pemilik tanah. Hasilnya, konflik buruh cenderung lebih ekonomi daripada politik (Paige, 1975:21).
3. Kelas atas menarik pendapatan dari tanah yang diasosiasikan dengan produk pertanian yang baku, dan ini menciptakan konflik *zero sum* --seseorang dinyatakan menang bila orang lain kalah-- antara pemilik tanah dan non-pemilik tanah, sehingga kompromi dalam konflik ekonomi sulit dilakukan. Kelas non-pengolah tanah yang memperoleh pendapatan dari modal industri atau komersial, yang dapat meningkatkan produksi melampaui investasi modal --karenanya perluasan dan pendapatan hasil pertanian harus dibagi dengan petani-- maka konflik yang terjadi bersifat *non-zero sum*, se-

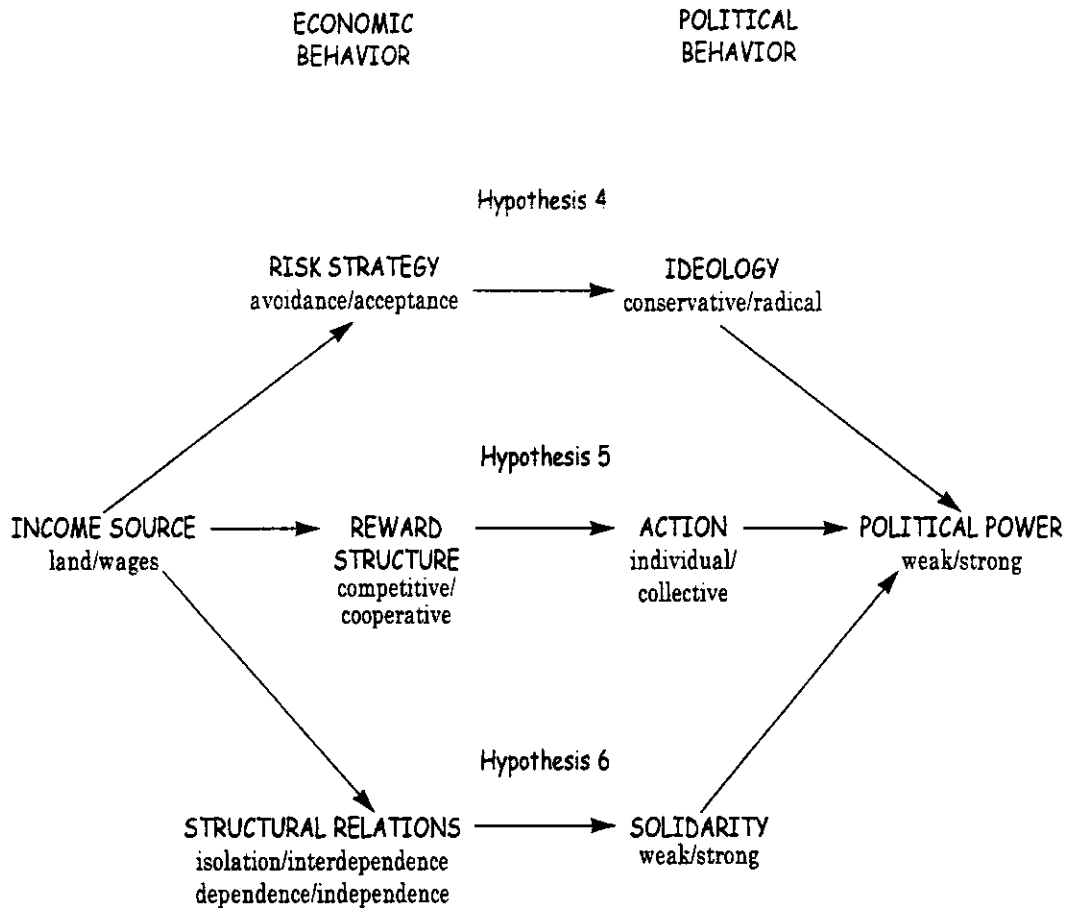
hingga kompromi dalam konflik ekonomi dimungkinkan (Paige, 1975:23).



GAMBAR 4.1 *The Effects of Principal Source of Income on the Economic and Political Behavior of Noncultivators. Sumber: Paige, 1975:21.*

Kelas Pengolah/Penggarap Tanah (*Cultivator*)

4. Makin penting nilai tanah sebagai sumber pendapatan bagi penggarap tanah, semakin mereka menghindari risiko, dan makin menentang gerakan politik revolusioner. Berkaitan dengan itu, semakin penting upah dengan uang atau yang sejenisnya, semakin besar kesediaan menanggung risiko, dan kesediaan menerima imbauan-imbauan revolusioner.
5. Makin penting tanah sebagai sumber pendapatan bagi penggarap tanah, semakin intensif kompetisi ekonomi, dan semakin lemah dorongan untuk gerakan/organisasi politik. Semakin penting upah sebagai sumber pendapatan, semakin lemah kompetisi ekonomi, dan semakin besar dorongan untuk gerakan/organisasi politik (Paige, 1975:30).
6. Makin penting tanah sebagai sumber pendapatan, semakin besar isolasi struktural dan ketergantungan penggarap tanah, dan semakin lemah tekanan bagi solidaritas politik. Semakin penting upah, semakin besar saling ketergantungan struktural para penggarap tanah, dan semakin kuat tekanan untuk solidaritas politik (Paige, 1975:35).



GAMBAR 4.2 *The Effects of Principal Source of Income on the Economic and Political Behavior of Cultivators. Sumber: Paige, 1975:29.*

1.3.2 Teori Moral Ekonomi dan Pilihan Rasional

Pendekatan teoritis lain yang mencuat sebagai pertentangan dalam memahami realitas protes sosial petani di pedesaan adalah teori yang dikemukakan oleh James C. Scott dalam bukunya *Moral Economy of the Peasant* (1976), dan pendapat yang dikemukakan oleh Samuel L. Popkin dalam bukunya, *The Rational Peasant* (1979). Bahkan ada pendapat yang mengatakan, buku Popkin lebih merupakan sebuah *anti-dote* terhadap Scott di dalam memahami kehidupan petani.

Tesis Scott pada dasarnya mengatakan, kehidupan petani ditandai oleh hubungan moral yang melahirkan suatu moral ekonomi yang lebih mengutamakan "dahulukan selamat" (*safety first*), dan menjauhkan diri dari garis bahaya (*danger line*). Etika subsistensi dan sosiologi subsistensi di kalangan petani, menurut Scott, merupakan sesuatu yang khas dalam kehidupan petani-petani di Asia. Scott menyatakan, petani menganut gaya hidup gotong royong, tolong menolong, dan melihat persoalan sebagai persoalan yang kolektif. Sikap ini disebabkan struktur kehidupan petani yang terjepit, dan harus menyelamatkan diri. Selain itu, para petani juga menganut asas pemerataan, dengan pengertian membagikan secara sama rata apa yang terdapat di desa, karena percaya pada hak moral para petani untuk dapat hidup secara cukup. Karena itu dikenal sistem bagi hasil, hubungan patron-klien, *selamatan* yang dilakukan oleh petani kaya sebagai tanda membagi rezeki dengan komunitas desa. Intensifikasi pertanian, komersialisasi hasil-hasil agraria dianggap sebagai ancaman oleh para petani. Pendekatan ini berlangsung dalam fenomena etika subsistensi petani yang lebih meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit, di mana petani dengan lahan yang relatif sempit merupakan tumpuan hidup satu-satunya dalam pemenuhan subsistensi. Karena itu, apabila mereka harus menunggu hasil tanaman tebu dalam waktu yang panjang tanpa kepastian, hanya situasi sulitlah yang mereka hadapi, sebagaimana kata

Scott:

"Petani-petani yang rumus-rumus subsistensinya sedang mengalami disintegrasi akibat iklim, kekurangan tanah atau sewa-sewa yang meningkat akan berbuat apa saja untuk mempertahankan kehidupan mereka -- mereka mungkin beralih ke tanaman komersial, membuat hutang baru dan menanam padi ajaib yang banyak resikonya. bahkan mungkin juga mereka jadi perampok" (Scott, 1983:7).

Pemikiran Scott itu oleh Popkin disebut sebagai romantisme, karena menurut Popkin, tak sebagaimana yang digambarkan oleh Scott, sesungguhnya apa yang berperan terhadap perubahan-perubahan di desa bukanlah kolektivitas penghuni desa, melainkan pribadi para petani itu sendiri. Popkin berpendapat, Scott terlalu meromantisir aspek kehidupan gotong royong dan hubungan patron-klien. Ia menunjukkan adanya *free-riders* di desa, yaitu orang-orang yang tidak mau bekerja sama tapi menikmati hasil-hasil kerja kolektif itu. Dan sistem bagi hasil, menurut Popkin, lebih disebabkan keengganan pemilik tanah membiarkan petani menjual hasilnya sendiri ke pasar. (Popkin, 1979:245).

Scott dan Popkin berbeda pendapat tentang peran *Revolusi Hijau* di dalam kehidupan petani. Scott lebih pesimistis, dan melihat *Revolusi Hijau* lebih banyak menghasilkan marginalisasi bagi kelompok petani miskin, dan lebih menguntungkan yang kaya. Sementara Popkin melihat, pandangan yang pesimistis tentang *Revolusi Hijau* itu lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran tentang mitos-mitos agung mengenai feodalisme dan komersialisasi. Menurut Popkin, *Revolusi Hijau* lebih banyak menghasilkan dampak positif daripada dampak negatif. Ia menolak pendapat yang mengatakan, *Revolusi Hijau* menyebabkan petani meninggalkan desa, dan menuju kota, mengakibatkan naiknya pengangguran di kota, serta tumbuhnya kelompok miskin di kota.

Petani, kata Popkin, petani adalah orang-orang yang rasional, mereka seperti halnya kebanyakan orang ingin menjadi kaya. Dan kesempatan ini bisa didapatkan seandainya petani memiliki akses yang lebih leluasa ter-

hadap pasar. Karena itu, Popkin mengajukan suatu pemikiran untuk menghapuskan pengelolaan pemerintah terhadap fasilitas-fasilitas yang menyangkut hidup orang banyak seperti transportasi, pasar, sehingga petani dapat menjual hasil pertaniannya sendiri ke pasar tanpa perantara. Pendapat yang mengatakan, komersialisasi pertanian akan menyebabkan sebagian orang saja menjadi kaya, ditolak oleh Popkin. Komersialisasi pertanian akan memperbaiki harkat hidup orang banyak. Dahulu para pemilik tanah melarang petani menjual hasilnya ke pasar, karena mereka takut petani akan menguasai pasar, dan hilanglah hubungan petani dengan pemilik tanah. (Popkin, 1979:79-80).

Perbedaan pendapat antara Scott dan Popkin ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perbedaan antara aliran pendekatan "moral ekonomi" dan pendekatan *political economy*. Scott menganut pendekatan moral ekonomi yang menganggap, satu-satunya jalan untuk keluar dari dominasi yang ada, dengan tetap mengamankan batas subsistensinya, atau prinsip "dahulukan selamat". Prinsip ini bertujuan meminimalkan risiko, di mana upaya untuk mengamankan batas subsistensi itu tetap saja dalam konteks untuk bertahan dalam sistem yang ada, bukan untuk mengubah dominasi. Itulah sebabnya Scott mengatakan, pendapatnya tentang perlawanan dalam konteks moral ekonomi petani bukan bertujuan untuk menjelaskan revolusi petani. Studi mengenai moral ekonomi petani dapat menjelaskan apa yang membuat mereka marah, dalam hal faktor-faktor lainnya sama, apa yang mungkin dapat menimbulkan situasi yang eksplosif. Tapi andaikata "marah" yang ditimbulkan oleh eksploitasi sudah cukup untuk mencetuskan pemberontakan, maka bagian terbesar Dunia Ketiga (dan bukan hanya Dunia Ketiga saja) tentunya sudah terbakar (Scott, 1984:6).

Di lain pihak, Popkin dengan pendekatan *political economy*, beranggapan, semua bentuk perlawanan petani bukan untuk menentang *Revolusi Hijau*, atau menentang perubahan, tapi untuk menentang kekuasaan para elite desa, petani kaya, yang mengatasnamakan komunitas tradisionalnya

demikian mempertahankan institusi yang lebih menguntungkan mereka (para petani kaya) dan justru lebih cenderung menghimpit kehidupan petani miskin. Dengan kata lain, Popkin menolak anggapan penganut pendekatan moral ekonomi yang mengatakan, semua protes dan gerakan petani sebagai reaksi defensif, tindakan akhir yang dilakukan untuk mempertahankan institusi tradisional mereka --mempertahankan status elite feodal-- dan norma-norma resiprositas mereka dari ancaman kapitalisme dan kolonialisme.

Popkin memasukkan Scott, Eric Wolf, dan Joel Migdal dalam kubu pendekatan moral ekonomi dengan menyatakan, pendekatan itu melihat protes, perlawanan, bahkan revolusi petani, sebagai suatu tindakan defensif melawan kapitalisme yang mengancam keamanan subsistensinya. Menurut Popkin, pendekatan moral ekonomi menyatakan, perlawanan para petani terhadap komersialisasi, dan makin terbukanya pasar yang kapitalistis adalah dalam upaya mempertahankan tradisi mereka demi menjaga keamanan subsistensi. Pendekatan moral ekonomi terlalu menekankan norma-norma dan prosedur masyarakat petani yang dilingkupi kesadaran untuk mempertahankan hidup dengan melihat desa sebagai unit ritual dan kultural, dan juga bagian penting bagi kehidupan perekonomian petani sebagai sumber hak dan sumber daya mereka.

Selanjutnya menurut Popkin, pendekatan moral ekonomi sesungguhnya telah meninggalkan banyak pertanyaan penting yang tak terjawab dilihat dari pendekatan ekonomi politik (*political economy*), yaitu bagaimana norma-norma itu berasal? Apa yang menentukan perbedaan tingkat subsistensi? Bagaimana sumber daya desa dialokasikan? Bagaimana persaingan tuntutan akan kebutuhan diterapkan, dan bagaimana sumber daya kehidupan didistribusikan? Apakah sama bagi seseorang yang hasil pertaniannya merosot di tahun berikutnya dengan mereka yang tak dapat meningkatkan hasil pertaniannya? (Apakah peningkatan pendapatan diperbolehkan?). Ketika ada suatu tekanan pada sumber-sumber alam dan keha-

rusan kerja gotong royong, bagaimana dan oleh siapa hal ini ditentukan, siapa yang akan melimpahkan kerja pada yang lain? Apakah kebutuhan dan ketidakmampuan untuk membayar itu sama? Dalam kasus kegagalan pertanian yang menyerang petani, bagaimana bisa membedakan antara petani-petani yang malas dan petani yang gagal karena nasib? Dengan kata lain bagaimana tingkatan-tingkatan kebutuhan itu? Lebih jauh lagi, kapan diterapkan tanggung jawab desa sebagai perwujudan dari tanggung jawab keluarga, rekan, anak-anak, patron. Mengapa petani tak melepaskan diri saja dari ikatan patron-klien untuk mengatasi kegagalan panen, dan mengapa mereka tetap menyukai hubungan tersebut? Jika hal itu merupakan etik komunal yang efektif dalam menjalankan mekanisme kehidupan desa, mengapa para tuan tanah masih menganggap penting untuk tawar menawar kekuasaan terhadap petani untuk meningkatkan sewa? Pendeknya, banyak pertanyaan yang tak terjawab melalui pendekatan moral ekonomi dalam memahami gerakan dan tindakan kolektif petani, hingga membutuhkan pendekatan baru, yaitu ekonomi politik. (Popkin, 1979:16-17).

Dengan rumusan lain, menurut Popkin:

"Whereas moral economy views of peasant protest and rebellion emphasize defensive reactions against threats to subsistence guarantees, loss of legitimacy for traditional elites, and moral outrage, I emphasize political entrepreneurs, incentive systems, free riders, and risk. The contrast is between moral propulsion and political competence". (Popkin, 1979:245).

Pembuktian Popkin melalui penelitian di kalangan petani Vietnam menghasilkan tiga argumen, pertama, gerakan yang dilakukan para petani tersebut adalah gerakan anti-feodal, bukan gerakan restorasi untuk mengembalikan tradisi lama, tapi bertujuan untuk membangun tradisi yang baru, bukan untuk menghancurkan ekonomi pasar, tapi untuk mengontrol kapitalisme. Kedua, tak ada hubungan yang jelas antara ancaman terhadap subsistensi dengan tindakan kolektif. Ketiga, isu yang berkembang bukan ancaman pada kelas, tapi pada risiko individual yang ikut berpartisipasi-

pasi. Pendeknya, ada perbedaan yang jelas antara rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok atau kelas (Popkin, 1979:245-246).

Popkin juga mengemukakan penjelasan lain dalam melihat revolusi petani melalui asumsinya, petani pada dasarnya bersifat rasional individual, memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan, Popkin menekankan unit analisisnya pada keluarga petani, bukan pada komunitas desa sebagaimana ditekankan Scott, atau pada struktur kelas sebagaimana dikemukakan Paige. Popkin, dan juga Jeffery Race berargumentasi, sangat penting untuk menguji peran yang dimainkan oleh organisasi politik di luar desa dalam memahami pemberontakan petani --sebagaimana juga dikemukakan Race yang melihat gerakan-gerakan revolusioner sebagai suatu sistem kooperatif, namun pada saat yang sama dia merupakan struktur formal termasuk pada struktur wewenang. Selain itu, Popkin menjelaskan masalah yang menyangkut logika tindakan kolektif, dan pengambilan keputusan secara rasional dari para petani. Mereka mengkalkulasi prospek kembalinya investasi dan kualitas organisasi di mana mereka memberikan kontribusinya:

"When a peasant makes his personal cost-benefit calculations about the expected returns on his own inputs, he is making subjective estimates of the credibility and capability of the organizer, 'the political entrepreneur', to deliver.... Whether the entrepreneur is directly exchanging immediate individual benefits for peasant inputs or trying to convince the peasant that his actions can have a perceptible and profitable impact on the collective good, he must be concerned with increasing the peasant's estimates of the efficacy of his contribution to secure the promised returns". (Popkin, 1979:259).

Bagi Race maupun Popkin, campur tangan organisasi politik di luar masyarakat petani merupakan faktor yang bisa mendorong tumbuhnya kesadaran tindakan revolusioner petani, atau dalam istilah Popkin disebut *political entrepreneur*.

Namun di dalam bukunya *Weapons of The Weak*, Scott berhasil menunjukkan, akibat meluasnya peran negara di dalam proses transformasi

pedesaan melalui *Revolusi Hijau*, telah mengubah hubungan antara petani lapisan kaya dan lapisan miskin, di mana yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin tetap tinggal miskin, bahkan menjadi lebih miskin. Perubahan sedemikian ini ternyata melahirkan berbagai bentuk perlawanan kaum lemah di dalam menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara. Studi Scott di Sedaka, Malaysia, itu menunjukkan, pada kenyataannya, petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap hegemoni negara lewat penetrasi negara di dalam proses transformasi hubungan-hubungan produksi dengan proses mekanisasi pertanian dan modernisasi pertanian. Akibatnya, muncul berbagai perlawanan petani terhadap hegemoni sedemikian itu. Atau dalam istilah Scott: *everyday forms of repression* yang dihadapi dengan *everyday forms of resistance* (Scott, 1985:241).

Weapons of The Weak --senjata kaum lemah-- setidaknya menunjukkan, akibat dari perubahan sosial, terutama transformasi kultural lewat penetrasi negara ke dalam kehidupan desa, lahir sebuah realitas dari kaum miskin untuk membentuk kesadaran melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang merupakan pembelotan kultural.

"The Struggle between rich and poor in Sedaka is not merely a struggle over work, property rights, grain, and cash. It is also a struggle over the appropriation of symbols, a struggle over how the past and present shall be understood and labeled, a struggle to identify causes and assess blame, a contentious effort to give partisan meaning to local history. The details of this struggle are not pretty, as they entail backbiting, gossip, character assassination, rude nicknames, gestures, and silences of contempt which, for the most part, are confined to the backstage of village life" (Scott, 1985:xvii).

Realitas sosial perlawanan petani terhadap hegemoni kaum kaya maupun negara sebagaimana digambarkan Scott itu, setidaknya menguatkan pendapat, *Revolusi Hijau* masih lebih banyak menghasilkan dampak negatif daripada positif. Lebih dari itu, *Weapons of The Weak* menunjukkan, kaum lemah juga memiliki senjata di dalam membangun perlawanan menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara, senjata dengan caranya

sendiri, seperti pengrusakan, berlaku tidak jujur, mencopet, masa bodoh, membuat skandal, membakar, sabotase, yang mengakhiri pertentangan secara kolektif (Scott, 1985:241).

Selanjutnya Scott mengemukakan adanya perbedaan perspektif antara perlawanan sungguh-sungguh di satu pihak dengan "tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental bahkan epifenomenal di pihak lain". Perlawanan yang sesungguhnya bersifat (a) terorganisasi, sistematis dan kooperatif; (b) berprinsip atau tanpa pamrih; (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner; dan/atau (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sebaliknya, "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental atau epifenomenal adalah (a) tidak terorganisasi; tidak sistematis dan individual; (b) bersifat untung-untungan dan "berpamrih" (nafsu akan kemudahan); (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner; dan/atau (d) dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada (Scott, 1993:305).

Betapa pun, kata Scott, tujuan sebagian besar perlawanan petani bukannya secara langsung menggulingkan atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah kepada upaya untuk tetap hidup dalam sistem itu --sekarang, minggu ini, musim ini. Biasanya tujuan kaum tani, sebagaimana dikatakan oleh Hobsbawm dengan tepat adalah menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi dirinya.

"Perlawanan kaum tani ialah tiap aksi yang dilakukan oleh seorang atau lebih petani yang dimaksud untuk mengurangi atau menolak berbagai tuntutan (misalnya, sewa, pajak, kerja paksa, kepatuhan) dari kelas-kelas orang berada (misal, tuan tanah, negara, rentenir) atau untuk mengajukan tuntutan kaum tani (misal, atas tanah, sumbangan, penghargaan) terhadap kelas-kelas orang berada ini." (Scott, 1993:316)

Menurut Scott, bagi kaum tani yang terpecar di seluruh daerah pedesaan dan menghadapi rintangan-rintangan yang lebih berat dari tindakan kolektif yang teratur, tampaknya bentuk "perlawanan sehari-hari"

sangat penting. Karena itu penekanan pada pemberontakan petani tidak pada tempatnya. Tampaknya, lebih sesuai untuk mengerti apa yang mungkin dapat dinamakan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari dari para petani --pergulatan yang prosais namun tetap antara kaum tani dan mereka yang berusaha menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa dan kepentingan mereka. Kebanyakan bentuk-bentuk perjuangan ini menghentikan aksinya jauh sebelum seluruh tuntutan mereka terpenuhi.

"Yang saya pikirkan di sini ialah senjata-senjata 'biasa' yang dimiliki kelompok-kelompok yang relatif tanpa kekuatan: menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, mencopet, pura-pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya" (Scott, 1993:271-274).

Bentuk-bentuk perjuangan kelas gaya Brechtian ini mempunyai kesamaan dalam segi-segi tertentu. Semua itu hanya membutuhkan koordinasi atau perencanaan yang sedikit atau tidak sama sekali; sering merupakan bentuk menolong diri pribadi; dan secara tipikal menghindari tiap konfrontasi yang bagaimanapun dengan penguasa atau norma-norma elite. Untuk mengerti kesamaan dalam bentuk perlawanan ini, perlu dimengerti apa yang dilakukan kaum tani di antara "pergolakan-pergolakan" untuk melindungi kepentingannya sebaik mungkin. Akan merupakan kesalahan yang serius, sebagaimana halnya dengan pemberontakan petani, untuk membesar-besarkan segi romantika dari "senjata-senjata kaum lemah" ini. Tidak mungkin senjata ini dapat mempengaruhi pelbagai bentuk eksploitasi yang dihadapi para petani lebih dari sekadar marginal (Scott, 1993:271-274).

"Dengan demikian, sejarah atau teori apa pun tentang politik pedesaan yang berusaha berbuat adil terhadap kaum tani sebagai pelaku sejarah, terpaksa harus sampai pada pegangan-pegangan yang saya gunakan untuk memilih nama 'bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari'" (Scott, 1993:275).

Scott tak berambisi menyatakan semua itu dengan perlawanan kelas sebagaimana yang digunakan Paige. Sebab bagi Scott, bagaimana kegiatan-

kegiatan yang dilakukan para petani itu dapat dilihat sebagai perlawanan. Dapatkah suatu boikot yang tak pernah diumumkan dinamakan perjuangan kelas? Mengapa pencurian beberapa karung padi harus disebut sebagai suatu bentuk perlawanan kelas? Di situ tak ada saksi bersama, pun tidak ada tantangan terbuka terhadap sistem kepemilikan tanah dan dominasi.

Sebagai pendekatan, Scott mengusulkan suatu definisi untuk perlawanan kelas di pedesaan:

"Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya, tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini". (Scott, 1993:302; Scott, 1985:289-290).

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dengan definisi ini menurut Scott, pertama, tak ada keharusan bagi perlawanan untuk mengambil bentuk aksi bersama. Kedua, tujuan-tujuan dibentuk ke dalam definisi itu. Dan ketiga, dengan definisi itu mengakui apa yang dapat dinamakan perlawanan simbolis atau ideologis (misalnya gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perlawanan berdasarkan kelas.

Juga tak boleh dilupakan, bentuk-bentuk perlawanan petani bukan sekadar produk dari ekologi sosial kaum tani. Parameter perlawanan untuk sebagian juga dirakit oleh lembaga-lembaga penindasan. Sejauh lembaga-lembaga itu menunaikan tugasnya dengan efektif, mereka boleh berbuat apa saja kecuali menghalangi bentuk-bentuk perlawanan yang bagaimanapun, asal tak bersifat perorangan, informal, dan *klandestin*. Dengan demikian sudah sepenuhnya sah --bahkan penting-- untuk membuat perbedaan antara berbagai tingkat dan bentuk perlawanan: formal, informal, perorangan-kolektif, terbuka-anonim, mereka yang menentang sistem dominasi,

mereka yang mengincar keuntungan-keuntungan marginal. Tapi harus pula dijelaskan (sejelas-jelasnya), apa yang sebenarnya sedang diukur dalam usaha ini adalah tingkat penindasan yang menyusun pilihan yang tersedia. Tergantung pada keadaan yang dihadapi, para petani mungkin berpaling dari kegiatan elektoral yang terorganisasi ke konfrontasi keras, ke tindakan diam-diam, dan anonim berupa penghambatan dan pencurian. Keberpalingan ini dalam beberapa hal mungkin disebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam organisasi sosial kaum tani, tapi bisa juga --malah barangkali lebih besar kemungkinannya-- disebabkan perubahan-perubahan pada tingkat penindasan. Banyak dari bentuk perlawanan yang telah dipelajari itu mungkin aksi-aksi "perorangan", tapi itu tak berarti aksi itu tidak terkoordinasi.

Scott mengutip Marc Bloch yang mengatakan, "hampir selalu ditakdirkan kalah dan dibasmi, pemberontakan-pemberontakan besar terlalu kacau untuk bisa mencapai hasil-hasil yang berarti. Perlawanan yang sabar dan diam-diam seperti yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan selama bertahun-tahun mencapai hasil yang lebih banyak daripada gemuruh luapan senjata. Maka hampir dapat dipastikan, keterlibatan petani dalam suatu gerakan sosial terjadi hanya melalui perantara kelas-kelas bukan tani. Dilihat pada dirinya sendiri, senjata kaum tani yang paling umum dan tahan ialah perlawanan sehari-hari yang belum sampai menjadi bentuk-bentuk protes atau konfrontasi yang lebih berbahaya. Di situ, kaum tani tidak terlalu memperhitungkan perubahan-perubahan formal dan legal dalam aturan-aturan, katakanlah mengenai hak milik dan perpajakan, dibanding dengan usaha untuk mengatasi, menghalangi, menghindari, dan mengurangi dampak-dampak paling menyakitkan dari aturan-aturan itu (Scott, 1993:323-326).

Seolah ada kiasan yang dapat dipercaya, kelompok ekonomi lemah boleh menolak kondisi-kondisi yang dijatuhkan oleh kelompok-kelompok do-

minan secara sama kasarnya tergantung dari beberapa segi. Untuk masyarakat yang secara struktural posisinya tidak menguntungkan, *everyday form of resistance* mungkin lebih berhasil dalam jangka pendek dan jangka panjang daripada merumuskan protes-protes secara umum yang hanya layak dilakukan apabila risiko penyelesaiannya besar. Perlawanan kaum lemah hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa koordinasi sama sekali, dan mereka menentang secara langsung norma-norma dan dominasi kaum elite yang dapat saja menurunkan kewibawaan dan produktivitas pemerintah ke titik di mana elite politik dan elite ekonomi mereka perlu mengadakan perubahan-perubahan yang berarti (Eckstein, 1989:8).

Meski tidak harus melalui cara-cara yang revolusioner sebagaimana dikemukakan oleh Paige:

"Di antara tipe-tipe organisasi agraris, sistem bagi hasil yang tidak terpusatkan paling cenderung ke arah revolusi agraris, karena adanya konflik antar-kelas atas yang tak mudah menyesuaikan kepentingannya dengan kelas penanam yang sangat tergantung pada penggarapan tanah. Sedangkan kelas atas penghasilannya tergantung pula pada pengolahan tanah. Seandainya golongan penanam dapat diorganisasikan menurut pengelompokan kelas, kelas itu akan mudah digerakkan untuk gerakan revolusioner." (Paige, 1975:21-29).

Terutama untuk daerah pertanian yang telah dikomersialkan, khususnya di kalangan petani penggarap yang mengalami tekanan tanah, penduduk pedesaan akan lebih kritis untuk berevolusi (Zagoria, 1974:29). Dan sasaran revolusi sedemikian itu adalah para tuan tanah, sebagaimana dikemukakan oleh Moore, bila dalam revolusi borjuis, elite bertanah dihapuskan kemudian dalam revolusi dari atas, sewaktu elite bertanah bertanah kemudian menaklukkan revolusi rakyat, maka dalam tipe ketiga "revolusi petani" elite bertanah dapat ditundukkan oleh kaum tani. Kaum tani lah pembuka jalan ke arah modernisasi. Faktor ideologi, politik masyarakat dan kebudayaan, kesemuanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan berfungsi sebagai mekanisme bagi golongan penguasa untuk mem-

bela kepentingannya. Konflik kelas adalah salah satu faktor penentu perkembangan sejarah dengan pengertian bahwa kelas adalah pelbagai mekanisme yang dipergunakan elite untuk mengambil surplus ekonomis dari golongan masyarakat di bawahnya (Moore, 1966:3-39).

Meskipun kehidupan petani di pedesaan dalam beberapa hal tidak dapat melepaskan diri dari hubungannya dengan dunia luar seperti dalam hal ekonomi, sosial, budaya, tradisi, namun kehidupan desa tidak tertutup sama sekali dari pengaruh luar, misalnya dalam partisipasi politik. Faktor yang mendorong partisipasi politik petani ini, antara lain buruh upahan dari luar, mekanisme pemasaran barang serta keterlibatannya dalam ekonomi uang. Hubungan keluar memperluas ikatan-ikatan dengan lembaga-lembaga di lingkungan supradesa, sehingga mereka dapat membebaskan diri dari kekuasaan kontrol-kekuatan yang terarah ke dalam (Migdal, 1979:233-236).

Menurut Gary Hawes dalam tulisannya, *Theories of Peasant Revolution* (1978), sekalipun terlihat pertentangan diametral antara dataran berpikir moral ekonomi Scott dan dataran berpikir *political economy* Popkin, namun kalau dicermati, sebenarnya perbedaan pendapat antara Scott dan Paige lebih menimbulkan rangsangan akademis, terutama karena pada dasarnya Scott tidak melakukan analisis pada revolusi petani, tapi lebih pada konteks *rebellion*, pemberontakan petani di dalam konteks logika mempertahankan batas keamanan subsistensi, termasuk perlawanan terhadap kolaborasi inter-kelas, di mana perlawanan yang demikian itu terjadi terutama pada saat kegagalan panen atau perang, ketika tuntutan petani akan subsistensi berlawanan langsung dengan upaya elite untuk menarik pajak/pemasukan dan tenaga kerja. Dalam keadaan sedemikian itu, reaksi petani, mengingat situasinya, sering terbatas pada perlawanan keras kepala tapi pasif, membuat petisi, melarikan diri, atau menjadi penyamun dan melakukan pembakaran.

Berbeda dengan Scott, sebagaimana telah dijelaskan di depan, Paige

melihat struktur desa sebagai variabel kausal dari perlawanan petani, sebab pusat perhatiannya pada bentuk-bentuk konflik kelas, terutama struktur kelas yang bersumber dari pendapatan petani kelas bawah dan buruh tani dengan petani kelas atas yang tidak ikut mengolah tanah. Paige menyodorkan bentuk-bentuk organisasi pertanian komersial yang masing-masing memiliki pola bentuk hubungan kelas tersendiri di pedesaan. Paige tak percaya suatu organisasi politik yang kuat akan dapat dibentuk di dalam suatu kondisi ekonomi subsisten yang kompetitif, sebab organisasi politik tergantung pada diferensiasi organisasi ekonomi atau pada kelompok kepentingan yang berada di luar ekonomi petani (Paige, 1975:24).

Perbedaan antara Scott dan Paige ini dikemukakan oleh Hawes:

"Paige brings to his model an analysis of the other classes and the state, which Scott does not undertake because his focus is rebellion, not revolution. Nevertheless, they both predict violent, armed struggle by peasants in rice-producing vilages. Scott hypothesizes that the rebellions emerge there because these vilages have the strongest traditions of solidarity and because the villagers confront common threats and enemies. Paige proposes that these vilages will become the locus of revolution because sharecroppers who live there suffer, along with their colleagues in surrounding vilages, from identical grievances at the hands of the landowning class". (Hawes, 1978:267).

Bagaimana menempatkan dataran berpikir model pilihan rasional Popkin, model moral ekonomi Scott dan model struktur kelas Paige dalam memahami bentuk-bentuk pembangkangan terselubung yang dilakukan petani TRI dalam studi ini, senyatanya membutuhkan penjelasan dan aplikasi teoritis yang lebih dalam lagi, terutama bagaimana faktor eksploitasi bisa menjadi katalisator bagi perlawanan petani tersebut --sebagaimana Moore mengungkapkan, para petani akan menyediakan dinamit untuk menghancurkan bangunan lama. Pemberontakan mereka telah menghancurkan hubungan-hubungan kelas agraris yang lama dan merusakkan dukungan politik dan militer bagi liberalisme ataupun gerakan kontra-revolusi (Moore, 1966:480).

1.3.3 Protes Sosial Petani di Jawa dan Gerakan Ratu Adil

Dominasi penjajahan terhadap kehidupan petani, selain menimbulkan gerakan atau protes sosial yang bersifat keagamaan, juga menimbulkan protes sosial berupa kerusuhan, sebagaimana diungkapkan Suhartono dalam bukunya *Apanage dan Bekel*, di mana dominasi Barat menciptakan desintegrasi yang meliputi dominasi ekonomi, politik dan kultural. Dominasi ekonomi yang berupa perluasan monetisasi faktor-faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, komoditas ekspor, dan pengenalan pajak baru jelas memperberat beban. Kehidupan petani menjadi sangat tergantung pada perusahaan perkebunan maupun penguasa kolonial.

Akibat perluasan agroindustri dan birokrasi timbullah diferensiasi struktural yang menciptakan peran baru dalam masyarakat. Dominasi politik membuahkan hubungan yang tak wajar sehingga terjadi ketegangan dan ketidakserasian. Perluasan administrasi kolonial yang legal-rasional menempatkan penguasa kerajaan di bawah kekuasaannya, dan mendesak lembaga-lembaga tradisonal. Dominasi kultural Barat mendesak norma-norma yang ada sehingga masyarakat kehilangan orientasi. Dalam keadaan seperti itu diperlukan pegangan hidup yang menuntun ke arah orientasi baru yang menenteramkan, yang didapat dengan menggali nilai-nilai tradisional.

Protes sosial dan kerusuhan merupakan jalan keluar yang ditempuh oleh pimpinan gerakan untuk mengembalikan situasi lama yang aman. Beberapa bentuk kerusuhan sebagai bentuk protes sosial petani itu adalah *perkecuan*, di mana istilah *kecu* digunakan untuk menyebut sekelompok orang bersenjata yang meminta paksa harta korban pada malam hari, dan tak jarang disertai tindakan nekat dengan menyiksa atau membunuh korban. *Kecu* termasuk perbanditan sosial dalam pergerakan sosial. (Suhartono, 1991:153-154).

Selain *perkecuan*, *pembegalan* juga dianggap sebagai gangguan keamanan di pedesaan oleh pemerintah kolonial. Biasanya *begal* terdiri dari

kelompok kecil, kurang dari lima orang yang memaksa korbannya menyerahkan barang-barangnya. Korban dicegat di tengah jalan pada waktu siang atau malam hari, dan barang-barang yang diminati biasanya tak terlalu tinggi harganya. Bentuk lain dari protes sosial petani adalah kebakaran. Di pedesaan, khususnya di perkebunan tebu, tembakau dan kopi sering terjadi kebakaran. Tindakan ini merupakan protes petani terhadap perusahaan perkebunan yang banyak merugikan petani (Suhartono, 1991:158-159).

Bentuk lain yang dapat dikategorikan sebagai gerakan protes petani adalah perbanditan, suatu istilah yang sangat subjektif, dari sudut pandang istilah itu diberikan. Biasanya terminologi itu muncul di kalangan penguasa, dalam hal ini penguasa kolonial. Di dalam bukunya *Bandit-bandit Pedesaan Jawa*, Suhartono mengutip pendapat Hobsbawm yang mengatakan, bandit adalah seseorang dari anggota kelompok yang menyerang dan merampok dengan kekerasan. Namun bandit ini dibedakan bandit biasa (*ordinary bandit*) dan bandit sosial (*social bandit*). Gerakan perbanditan itu dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi, khususnya untuk perbanditan pedesaan di Jawa belum mengarah pada gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dilakukan di tempat lain. Tapi perbanditan itu baru merupakan tipe protes petani dan belum sampai pada tingkat pemberontakan (Suhartono, 1995:94).

Menurut Suhartono, perbanditan pedesaan yang merupakan manifestasi protes sosial terjadi di tanah partikelir, tanah kerajaan, dan tanah gubernemen maupun yang disewa. Di tiap tanah yang disewa perkebunan itu timbul perbanditan pedesaan dengan istilah yang berbeda-beda. Di tanah partikelir Banten-Batavia disebut rampok, perusuh, di *Vorstenlanden* dikenal dengan istilah *kecu*, dan kampak. Sedang di Pasuruan-Probolinggo disebut rampok, dan untuk kelompok bandit dalam jumlah kecil disebut *koyok*. Pemerintah kolonial menyebutnya *kecupartij*, *roofpartij*, dan *roverbende*, yang pada dasarnya mengganggu *rust en orde* (ketenangan dan ketertiban)

pemerintah kolonial (Suhartono, 1995:95-96)

Lebih lanjut Suhartono mengemukakan, di Jawa, bandit dapat disamakan dengan durjana, *lun*, *bajingan*, dan lain-lain. Perbanditan itu merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib, dan tekanan sosio-politik. Berdasarkan kesadaran politik, resistensi petani berupa perbanditan dapat dibedakan menjadi gerakan yang belum sadar politik (resistensi prapolitik), setengah sadar (resistensi *quasi*-politik), dan sadar sepenuhnya (resistensi sadar politik).

Gerakan atau resistensi yang tidak sadar lebih didominasi oleh tindakan kejahatan semata-mata yang diwujudkan dalam pencurian, *begal*, dan sejenisnya. Resistensi setengah sadar dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diwujudkan dalam perampokan dan *perkecuan*, sedangkan resistensi yang sadar politik sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk gerilya, pemberontakan, dan sejenisnya. Perbanditan itu sendiri dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu a) kriminalitas (*criminal bandit*); b) perbanditan (*banditry*); dan c) pemberontakan (*rebellion*). Di Jawa, bentuk resistensi berupa pembakaran kebun tebu, los tembakau, perusakan saluran irigasi, perusakan gudang dan bangunan lain, pencurian, pembegalan, dan lain-lain. Di dalam *Kolonial Verslag* dilaporkan, perbanditan terjadi hampir setiap hari dan dalam frekuensi yang cukup besar (Suhartono, 1995:130-131).

Protes sosial petani di Indonesia, khususnya di Jawa yang dikategorikan sebagai radikalisme petani di dalam sejarah sering didasarkan pada gerakan-gerakan yang bercorak keagamaan. Prof. Sartono, dalam bukunya, *Ratu Adil* menyebutkan, gerakan-gerakan keagamaan itu diberi nama dengan berbagai cara, yaitu gerakan juru selamat (mesianisme), ratu adil (millenarianisme), pribumi (nativisme), kenabian (prophetisme), penghidupan kembali (revivalisme). Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala-gejala tersebut pada umumnya cenderung berhubung-

an dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama, atau menggunakan cara-cara agama untuk mewujudkan tujuan-tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi-segi yang bercorak keagamaan (Sartono, 1984:10).

Menurut Sartono, unsur pokok gerakan keagamaan adalah seorang pemimpin keagamaan yang merupakan seorang *prophet*, atau guru, atau dukun, atau tukang sihir, atau utusan mesias. Pemimpin-pemimpin ini mengaku diilhami oleh wahyu. Sudah diketahui secara umum dalam alam kebudayaan Jawa, harapan-harapan *millenarian* yang tersembunyi sangat mendorong ke arah munculnya tokoh-tokoh *prophetic*. Mereka itu kebanyakan adalah orang terkenal sebagai guru ilmu, kiai, atau orang-orang suci yang pada umumnya memiliki daya kharisma. Elite keagamaan ini dapat mengutarakan dengan kata-kata harapan-harapan rakyat biasa, karena mereka kebanyakan merupakan pewaris tradisi-tradisi lisan atau tertulis (*millenarian*). Dengan meningkatnya dampak kekuasaan asing dalam zaman kolonial, ada kecenderungan gerakan-gerakan keagamaan digunakan sebagai jubah bagi oposisi politik. Kecenderungan mendasar lainnya dari gerakan-gerakan keagamaan ini adalah mendorong gerakan-gerakan tersebut untuk mengembangkan orientasi politik yang lebih ekstrim, dan muncul sebagai gerakan politik yang radikal (Sartono, 1984:13-14).

Pemberontakan agraria yang terpencar-pencar selama dua abad lalu, apa pun tujuan yang mereka nyatakan, semuanya mengungkapkan suatu protes mendasar terhadap keadaan hidup yang tengah berlangsung di pedesaan. Di hampir semua contoh, protes ini menyatakan dirinya dalam radikalisme ratu adil (Sartono, 1984:37). Selanjutnya, menurut Sartono, semua fakta yang sangat penting muncul secara jelas dari suatu gambaran umum tentang gerakan-gerakan sosial, seperti manifestasi radikalisme agraria; bentuk-bentuk simbolik yang khas tak dapat dibentuk oleh keadaan budaya masyarakat. Dalam hubungan antara radikalisme petani

dan gerakan keagamaan ini, Sartono menyimpulkan:

"Salah satu aspek yang paling menarik tentang gerakan-gerakansosial di Jawa adalah merupakan ekspresi akan protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasan dan penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan. Namun ideologi mereka itu diliputi oleh lambang keagamaan, karena pandangan dunia tentang rakyat pedesaan yang masih terlalu dipengaruhi agama. Para pemimpin yang memiliki kharisma keagamaan yang mampu menggerakkan aksi politik kaum tani dengan propaganda utopis, senantiasa merupakan bahaya terpendam bagi para pemegang kekuasaan birokratis. Di bawah kekuasaan Belanda yang sering melakukan penindasan, oposisi dan agitasi politik dapat bertahan dan menyebar hanya jika disertai oleh hal-hal yang bersifat keagamaan. Dalam pesan keagamaan millenaristis, kaum tani melihat kunci penyelamatan dari penindasan penjajah." (Sartono, 1984:83).

Studi ini akan melihat sejauh mana bentuk-bentuk gerakan protes sosial petani TRI berada dalam kerangka teoritik sebagaimana diuraikan di atas.

1.4 Hipotesis

Dengan keseluruhan konseptualisasi teoritik sebagaimana dikemukakan di atas, studi ini mengajukan hipotesis sebagaimana dirumuskan berikut:

1. *Pembangkangan terselubung yang dilakukan oleh petani dalam program TRI adalah sebagai reaksi yang rasional guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi dalam program TRI.*
2. *Pembangkangan terselubung yang dilakukan petani muncul di dalam tata hubungan produksi antara petani miskin dan petani kaya dan antara petani dengan berbagai institusi yang mendominasi tata hubungan produksi tersebut lewat aplikasi program TRI.*

3. *Dominasi jaringan birokrasi pemerintah di dalam program TRI, yang gagal mengartikulasikan kepentingan petani, merupakan faktor paling menentukan melahirkan realitas pembangkangan terselubung tersebut.*
4. *Pembangkangan terselubung yang dilakukan oleh para petani di dalam program TRI adalah sebagai upaya untuk mempertahankan batas keamanan subsistensi dengan menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi diri para petani tersebut.*

1.5 Metodologi

Penelitian ini diselenggarakan dalam sifatnya yang deskriptif dalam suatu *field research*. Pertama-tama dikumpulkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena sosial yang menyangkut realitas pembangkangan terselubung dalam program TRI, terutama dalam kasus-kasus yang muncul di lapangan, kemudian dari fenomena-fenomena tersebut ditelusuri kaitan antar-fenomena tersebut dengan fakta-fakta dari program pembangunan yang terjadi di daerah (desa) penelitian. Kemudian fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dalam maknanya sebagai realitas pembangkangan terselubung untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan.

1.5.1 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Adapun operasionalisasi dan variabel penelitian ini meliputi:

- a. *Pembangkangan terselubung*, yakni suatu bentuk perlawanan petani terhadap program TRI, di mana perlawanan tersebut berupa penolakan diam-diam, tidak terbuka, tidak konfrontatif, namun pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk tidak mau ikut dalam program TRI.

Pembangkangan terselubung tersebut dilihat dalam berbagai indikator:

- tidak bersedia terlibat atau ikut dalam proses produksi mulai dari pra-tanam sampai pasca-panen.
- menyerahkan seluruh tanggung jawab proses produksi kepada ketua kelompok.
- menyiasati tanah *glebagan* dengan memindahkannya ke wilayah tanah yang kurang subur.
- membiarkan tebu telantar, sehingga terlambat ditebang atau diangkut.
- membiarkan tebu terbakar, atau membakarnya sendiri.
- menyiasati penggilingan ke pabrik gula lain.

Indikator lain yang dilihat adalah:

- sejak kapan ikut serta dalam program TRI: kontinyu atau tidak kontinyu; jabatan dalam kelompok TRI (kooperatif atau kolektif) sebagai ketua, anggota aktif, anggota pasif; keikutsertaan dalam rapat kelompok; keterlibatan dalam tebang-angkut, perhitungan rendemen, giling, dan perhitungan bagi hasil.
- b. *Program pembangunan masyarakat desa*, meliputi: aplikasi program pembangunan masyarakat desa terutama di bidang pertanian, padi, palawija, dan TRI; Keseluruhan organisasi pembangunan pedesaan yang meliputi, lembaga-lembaga birokrasi pedesaan; struktur pemerintah desa; Aplikasi program pembangunan.
- c. *Mekanisme mobilisasi program pemerintah*, meliputi: Cara-cara yang dilakukan oleh aparat pemerintah (desa) dalam melaksanakan program pembangunan desa, apakah melalui partisipasi, mobilisasi atau koersi.

- d. *Respons masyarakat terhadap birokrasi pembangunan desa*, meliputi: tindakan-tindakan yang ditempuh petani di dalam menanggapi program pembangunan melaksanakan, menolak, melaksanakan dengan terpaksa, masa bodoh, dan lain-lain.
- e. *Organisasi produksi*, meliputi: Struktur pemilikan dan penguasaan tanah, hubungan sewa, sistem bagi hasil tanah, cara-cara pemilikan dan penguasaan tanah, hubungan-hubungan komersial, organisasi pengelolaan tanah.
- f. *Sosio-ekonomi*, meliputi: umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, bentuk keluarga, besar keluarga, pendidikan, kekayaan, pendapatan.
- g. *Mobilitas*, yang meliputi: hubungan dengan dunia luar kosmopolitanisme); *inovativeness*, *mass media exposure*, derajat empati, hubungan desa-kota, mobilitas pekerjaan, keanggotaan dalam organisasi sosial.
- h. *Sosio-kultural*, yang meliputi: tradisi-tradisi, ritus-ritus sosio-religius, kepercayaan, fatalisme, paternalisme, hubungan patron-klien, dan orientasi sosial budaya.

1.5.2 Daerah/Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di daerah pedesaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan:

- a. Daerah tersebut merupakan daerah pertanian yang memiliki program pertanian yang intensif, baik intensifikasi padi, palawija terutama program intensifikasi tebu rakyat.
- b. Di daerah tersebut ditemukan berbagai kasus sebagai respons petani terhadap program pembangunan terutama dalam program TRI. Atas dasar pertimbangan tersebut, daerah penelitian yang dipilih

adalah wilayah Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang meliputi 17 desa. Kecamatan Papar terletak 12 km sebelah utara Kota Kediri. Kecamatan Papar berada di antara jalan raya Kertosono-Kediri, dan masuk ke dalam wilayah daerah TRI PG Lestari yang berada di Kecamatan Kertosono. KUD yang mengelola Program TRI di Kecamatan Papar adalah KUD Sri Gati.

Data untuk ini diperoleh dari dokumen KUD Sri Gati, KUD yang membawahi program TRI di Kecamatan Papar. Dari data yang dapat ditemukan, lokasi penelitian ditentukan di empat desa dari 17 desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Papar. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* sesuai dengan kelengkapan data statistik yang ada.

1.5.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah masyarakat desa yang terlibat di dalam program TRI. Mengingat program TRI di tiap-tiap desa pada dasarnya sama, maka berdasarkan pertimbangan homogenitas ini, analisis dilakukan untuk satuan wilayah kecamatan, bukan pada tiap-tiap desa. Sampel di masing-masing desa dipilih secara *purposive*, yaitu mereka yang pada saat penelitian ini berlangsung menjadi petani tebu, TRIS I maupun TRIS II, maupun mereka yang menjadi petani TRB (Tebu Rakyat Bebas). Jumlah sampel di masing-masing desa tidak sama disesuaikan jumlah petani TRI yang ada, serta luas areal yang ditanami tebu di masing-masing desa. Jumlah sampel keseluruhan meliputi 130 orang responden.

Secara rinci, sampel di masing-masing desa (Jambangan, Papar, Ngampel, dan Maduretno) dalam penelitian ini, sebagai berikut:

TABEL 1.3
SAMPEL PETANI TRI DI KECAMATAN PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR

Luas tanah	Desa				Total
	Jambangan	Papar	Ngampel	Maduretno	
≤ 1 ha	11	12	18	25	66
1,1 ha- 2 ha	12	10	7	7	36
> 2 ha	2	5	17	4	28
Total	25	27	42	36	130

Catatan: Luas tanah bukan milik pribadi, melainkan luas unit usaha kelompok TRI, yang disebut dengan "hamparan". Sampel meliputi ketua kelompok dan anggota.

Sumber: Statistik TRI KUD Sri Gati, Kec. Papar, 1993.

1.5.4 Teknik Koleksi Data

Data penelitian ini terdiri data sekunder dan data primer. Mengingat sifat dan jenis data sedemikian itu, data dicari melalui dua cara: Pertama, berupa data statistik tentang demografi, statistik pembangunan, dokumen-dokumen, surat-surat keputusan yang menyangkut program TRI, instruksi-instruksi, dan dokumentasi tertulis lainnya.

Kedua, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman interview yang dilakukan melalui *depth interview*. Data ini akan diperoleh dari *key person*, tokoh-tokoh masyarakat, para rumah tangga petani yang dipilih sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh dari *depth interview* ini dideskripsikan secara kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang ada, untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan.

1.6 Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, mengumpulkan data statistik pemilikan tanah, berupa *Letter C*, dari kecamatan

dan desa. Data ini untuk mengetahui luas pemilikan dan penguasaan tanah. Data berikutnya dicari melalui data statistik keanggotaan TRI di Kantor KUD. Dari data ini diperoleh siapa saja petani yang menjadi peserta program TRI. Data *Letter C* dikoreksi silang dengan data dari keanggotaan KUD. Hasilnya, petani yang secara formal ikut dalam program TRI.

Tahap kedua, setelah diperoleh data petani, baik luas tanah maupun keanggotaannya dalam TRI, maka diperoleh jumlah informan yang akan diwawancarai, baik melalui wawancara berstruktur maupun *indepth interview*. Wawancara dilakukan di rumah maupun di tempat bekerja. Beberapa wawancara dilakukan berulang-ulang bila ditemukan kekurangan data atau informasi. Setiap hasil wawancara dilakukan editing pada hari itu juga.

Berbagai kesulitan muncul karena responden tidak berani mengemukakan pendapatnya secara terbuka, khususnya beberapa pertanyaan yang dianggap peka dan "tidak aman". Untuk itu dilakukan berbagai pendekatan dengan mengajukan *probing*, dan wawancara berulang-ulang. Data dari wawancara berstruktur ini pada dasarnya bersifat deskriptif dan kualitatif. Setelah dilakukan editing dan proses tabulasi, hasilnya berupa kategori-kategori. Namun, sepanjang data tersebut berupa data diskret kuantitatif, terutama data statistik, dilakukan interpretasi kuantitatif dalam upaya mendeskripsikannya melalui skala, baik skala nominal, interval maupun skala ordinal. Untuk beberapa data kuantitatif dilakukan analisis melalui tabulasi silang sederhana untuk menunjukkan hubungan beberapa variabel pembangkangan terselubung petani.

Tahap ketiga, setelah data dan fenomena dikumpulkan dilakukan interpretasi secara *hermenetik* untuk memahami makna fenomena tersebut sebagai upaya membuktikan hipotesis penelitian.



BAB 2

PROGRAM TRI DI KECAMATAN PAPAR

2.1 Papar, Kecamatan Terbuka

Wilayah Kecamatan Papar berada di sisi jalan raya yang menghubungkan Kertosono dan Kota Kediri. Jarak antara ibukota kecamatan dan kota Kabupaten Kediri, 18 km, sedangkan jarak dengan ibukota propinsi, Surabaya, 124 km. Ke arah timur dihubungkan oleh jalan propinsi menuju ke Kecamatan Boggo dan Kecamatan Pare, ke arah selatan menuju Kota Kediri, ke utara menuju Surabaya, ke barat dipisahkan Kali Berantas, menuju ke arah wilayah Kabupaten Nganjuk. Dengan letak seperti ini, Kecamatan Papar merupakan wilayah yang terbuka, dan mudah dijangkau. Apalagi kecamatan ini dibelah oleh lintasan rel kereta api, dan juga memiliki satu stasiun kereta api.

Kecamatan Papar berada 52 m di atas permukaan laut. Namun ada beberapa desa yang rawan banjir --terutama Desa Srikaton, Tanon, dan Maduretno-- karena letaknya lebih rendah daripada tanggul Kali Brantas. Luas wilayah kecamatan ini 2.543,372 ha, meliputi 2.468 ha sawah, terdiri dari 2.264 ha sawah irigasi teknis, dan 204 ha sawah irigasi setengah teknis. Prasarana pengairan di kecamatan ini terdiri dari 6 buah dam, dan 5 buah pompa air yang mengatur arus air dari empat buah sungai kecil anak Kali Brantas. Selain itu terdapat 10 ha tanah kering, 21,372 ha tanah untuk fasilitas umum, dan lain-lain (tanah tandus, tanah pasir) 44 ha.

Kecamatan Papar meliputi 17 buah desa swasembada dan 59 dusun. Desa-desa tersebut adalah: desa Papar (ibukota kecamatan), Janti, Ming-

giran, Kwaron, Purwo Tengah, Peh Kulon, Peh Wetan, Dawuhan Kidul, Maduretno, Ngampel, Kedung Malang, Jambangan, Srikaton, Kepuh, Sukomoro, Tanon, dan Puh Jajar. Empat desa di antaranya, Maduretno, Jambangan, Papar, dan Ngampel, menjadi lokasi penelitian ini. (Peta wilayah Kecamatan lihat lampiran).

Secara umum, hampir tak ada perbedaan di antara ketujuhbelas desa tersebut, baik dalam hal jenis tanaman, sistem pertanian, bentuk perumahan, maupun lainnya, sehingga dapat dikatakan keseluruhan desa di wilayah ini relatif homogen, kecuali jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Desa terjauh dari ibukota kecamatan adalah 7 km. Sarana transportasi yang dimiliki penduduk Kecamatan Papar cukup banyak dan beragam, antara lain, mobil pribadi 65 buah, mobil dinas 3 buah, mikrolet 8 buah, sepeda motor 1.343 buah, becak 88 buah, gerobak/cikar 41 buah, dan sepeda 7.075 buah.

Beberapa desa di kecamatan ini juga mempunyai sarana fasilitas air bersih PDAM, dan seluruh desa sudah memiliki prasarana listrik. Antara desa yang satu dan lainnya dihubungkan dengan jalan aspal yang baik, berupa jalan propinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Bahkan Desa Papar, sebagai ibukota kecamatan, karena dilalui arus lalu lintas yang ramai antara Jombang-Kediri, membuat desa ini pun ramai siang malam, ditandai oleh banyaknya pengemudi ojek yang mangkal di sebuah terminal kecil tak jauh dari stasiun kereta api. Menurut data statistik Kecamatan Papar, Juni 1995, panjang jalan di seluruh wilayah Papar adalah 98 km, yang terdiri dari jalan kelas II 3 km, jalan kelas III 12 km, jalan kelas IV 14 km, dan jalan kelas desa 64 km.

Jumlah penduduk Kecamatan Papar, 46.848 jiwa, 22.789 orang di antaranya laki-laki, dan 24.059 orang perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga sebanyak 11.337, dengan kepadatan penduduk 1,275 km/jiwa. Dilihat dari mata pencaharian, sebanyak 22.477 orang bekerja sebagai petani, 2.644 orang di antaranya merupakan petani pemilik tanah, 1.141 bekerja

sebagai petani penggarap, 642 orang sebagai petani penggarap dan penyakap, dan sisanya, 18.050 orang sebagai buruh tani. Data ini menunjukkan betapa jumlah buruh tani jauh lebih banyak dibanding petani pemilik tanah.

Selain yang bekerja sebagai petani, terdapat 2 orang sebagai pengusaha, 58 orang bekerja sebagai perajin/industri kecil, 288 orang sebagai buruh industri, 152 orang sebagai buruh bangunan, dan 552 orang pedagang. Juga terdapat 27 orang bekerja di sektor angkutan, 577 orang sebagai pegawai negeri, 64 orang anggota ABRI, dan 129 orang lainnya adalah pensiunan. Namun demikian, di dalam statistik Kecamatan Papar tercatat pula, terdapat 1.145 orang laki-laki dan 1.260 orang perempuan yang berstatus sebagai pencari kerja.

Sebuah pasar yang berada di ibukota kecamatan, yang juga bernama Papar, membuat prasarana ekonomi di kecamatan ini cukup memadai. Sebuah kantor bank BRI, kantor pos, kantor pegadaian, koperasi, fasilitas kredit candak kulak, dan 171 buah toko kecil menandai pasar Kecamatan Papar. Juga tercatat beberapa perusahaan/jasa berupa 9 perusahaan dagang, 11 buah perusahaan angkutan, dan kantor telepon. Semua ini menjadi indikator makin terbukanya hubungan Papar dengan dunia luar. Tercatat empat buah telepon dimiliki penduduk Papar.

Di Papar terdapat 20 buah sekolah taman kanak-kanak dengan 38 lokal dan 40 orang guru dengan murid sebanyak 675 orang. Sedangkan untuk sekolah dasar, terdapat 21 buah dengan fasilitas 118 lokal, jumlah murid SD mencapai 2.717 murid dengan 161 guru. Selain itu juga terdapat 17 SD Inpres dengan 2.412 murid, 127 guru. Juga terdapat 7 buah madrasah ibtidaiyah negeri yang memiliki fasilitas 39 lokal, dengan 654 murid dan 33 orang guru. Juga ada satu sekolah luar biasa (SLB) dengan 19 murid dan 3 orang guru.

Untuk tingkat SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) terdapat 2

buah dengan 39 lokal, jumlah muridnya 1.711 dan 103 guru. Juga terdapat satu SMTP swasta umum dengan 214 murid dan 18 orang guru. 2 buah SMTP swasta Islam dengan 731 murid dan 45 guru, dengan 17 lokal. Sedangkan, tingkat SLTA, terdapat 1 SMTA negeri dengan 555 murid, 49 guru, dengan 15 lokal; 1 SMTA swasta umum dengan 131 murid dan 21 guru; 2 SMTA swasta Islam dengan 245 murid dan 33 guru; dan 1 SMTA kejuruan swasta (SMEA) dengan 240 murid dan 23 guru.

Sementara itu dari segi pendidikan penduduknya, tercatat sebanyak 254 orang berpendidikan akademi/ sederajat, dan 61 orang berpendidikan perguruan tinggi (sarjana). Jumlah terbesar adalah tak tamat sekolah, yakni 22.191 orang. Disusul kemudian oleh mereka yang hanya berpendidikan sekolah dasar, 12.921 orang. Sedangkan prasarana kesehatan di Kecamatan ini terdiri dari satu Puskesmas dengan 2 orang dokter, 4 perawat dan 1 bidan, sementara itu ada satu Puskesmas pembantu dengan 1 dokter, 2 orang perawat dan 2 orang bidan. Selain itu ada dua dokter yang membuka praktek umum. Jumlah pos/klinik Keluarga Berencana (KB) terdapat 3 buah, dengan jumlah akseptor KB 7.111 orang. Jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Papar 8.205, 7.111 di antaranya masuk KB. Sedangkan posyandu terdapat 61 buah.

Di bidang keagamaan, 45.500 orang penduduk Kecamatan Papar menganut agama Islam, 326 orang beragama Katolik, 316 orang beragama Protestan, 586 orang beragama Hindu, dan 8 orang beragama Budha. Kecamatan ini memiliki 41 buah masjid, 101 buah musola, gereja 2 buah, dan 1 buah kuil/pura. Selain itu, terdapat pula 2 buah pondok pesantren, dengan jumlah kiai 5 orang, dan 151 orang santri.

Dengan data statistik sedemikian itu, wilayah Kecamatan Papar sesungguhnya merupakan suatu wilayah terbuka, hampir menyerupai kota kecil dengan berbagai prasarana yang ada. Heterogenitas pekerjaan penduduk yang tak hanya di sektor pertanian juga menunjukkan hal itu. Beberapa perusahaan industri kecil membuat terjadinya pergeseran baru di desa-

desa wilayah Kecamatan Papar, terutama industri pertukangan/kerajinan.

Pergeseran ini juga menunjukkan tingginya mobilitas penduduk. Bahkan di Desa Srikaton dan Maduretno, sebagian besar penduduk melakukan migrasi kerja sebagai buruh atau tukang di luar kecamatan, bahkan ke Surabaya. Kaum pekerja migran ini pada umumnya penduduk yang tak mempunyai tanah garapan, dan biasanya mereka pulang sebulan sekali ke desa. Ekonomi desa di topang oleh heterogenitas pekerjaan tersebut, yang menunjukkan penduduk Kecamatan Papar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor agraris.

Melihat wilayah Kecamatan Papar yang terbuka itu, hubungan-hubungan sosial ekonomi agraris juga mengalami perubahan. Komersialisasi pertanian ditunjukkan dengan banyaknya jenis sistem persewaan tanah, sewa tahunan maupun tidak. Salah satu sistem sewa tanah itu disebut sistem *mendak*, yang lebih merupakan suatu sistem penggadaian tanah yang berlangsung tahunan. Cara perhitungan *mendak* ini: harga sewa untuk tahun kedua setengah dari jumlah tahun pertama, sedangkan harga sewa tahun ketiga, setengah dari harga sewa tahun kedua. Bila seorang petani *memendakkan* tanahnya kepada orang lain untuk jangka waktu tiga tahun, dengan harga sewa tahun pertama Rp 100.000,- misalnya, ini disebut *mendak telu*. Si pemilik tanah menerima Rp 100.000,- + Rp 50.000,- + Rp 25.000,- = Rp 175.000,- sebagai imbalan melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain selama tiga tahun.

Sistem *mendak* ini pada kenyataannya membuat banyak petani di wilayah Kecamatan Papar yang mulanya memiliki tanah luas, mengalami marginalisasi akibat kehilangan tanahnya, karena mereka tak dapat mengembalikan uang *pendak*, sehingga banyak petani (dan juga para pamong desa) yang terdaftar sebagai pemilik tanah luas, namun pada kenyataannya tidak lagi menguasai tanah tersebut.

Dalam suatu studi yang dilakukan pada 1979 di desa Ngampel dan

Maduretno, sebanyak 28,12% petani di Desa Ngampel, dan 30,52% di Desa Maduretno terlibat sistem *mendak/mbacok*. Dalam studi itu juga ada perkara, di mana sebagian besar tanah bengkok desa *dipendakkan* oleh para pamong (Siahaan, 1979). Ketika studi ini dilakukan, 16 tahun kemudian, perkara tanah bengkok tersebut masih belum terselesaikan. Sebagian besar tanah bengkok di Desa Ngampel masih digadaikan (*pendak*) oleh para pamong.

Dengan sistem *mendak* ini, seorang penduduk Desa Ngampel yang dikenal dengan Mbah Welas, berhasil menguasai tanah ratusan hektare di wilayah Kecamatan Papar yang didaftarkan sebagai areal TRI. Nama Mbah Welas terkenal di seantero Kecamatan, bahkan di wilayah kerja dua pabrik gula, PG Lestari di Kertosono, dan PG Mrican Baru di Kecamatan Ngadi-rejo Kediri, sebagai seorang petani TRB yang paling besar pengaruhnya.

Sistem yang sama dengan *mendak* ini disebut *mbacok*, namun hanya berlangsung hanya tiga bulan. Sistem sewa tanah lainnya disebut *baskup*, akronim dari "tebas dan kup", yakni sistem bagi hasil di mana si pemilik tanah menerima sejumlah tertentu hasil panen yang disepakati semula, misalnya 2-2,5 ton per hektare, tak peduli apakah dalam menggarap tanah itu si penggarap tidak mencapai hasil sebesar itu, akibat gagalnya panen misalnya. Apabila hasil panen yang diperoleh lebih dari jumlah yang harus diserahkan kepada si pemilik menurut perjanjian, maka menjadi milik si penggarap. Namun bila yang terjadi adalah sebaliknya, si penggarap harus menanggung kerugian (*nombok*) kepada pemilik tanah.

Selain itu masih terdapat sistem sewa tahunan, terutama tanah yang disewa para petani kaya dari para pemilik tanah sempit yang terkena *glebagan* TRI. Hampir tak ditemukan sistem bagi hasil natura di kalangan petani di wilayah Kecamatan Papar. Ini menunjukkan hubungan sosial agraris di Papar cenderung bersifat komersial.

Kekayaan tanaman agraris Kecamatan Papar selain padi adalah palawija, terutama kedelai, di samping jagung, ketela pohon, kacang tanah,

dan lainnya. Khusus untuk kedelai, kebanyakan petani memilih tanaman ini selain padi, sebab nilainya lebih tinggi. Selain berbagai jenis tanaman itu, tebu juga merupakan tanaman utama, bahkan arealnya lebih luas daripada tanaman lainnya di seantero desa, baik tebu TRI maupun TRB.

2.2 TRI di Wilayah Papar

Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai realisasi Inpres No. 9/1975, tanggal 22 April 1975, dilaksanakan pertama kali di wilayah Kecamatan Papar pada 1984. Untuk pelaksanaan program TRI MTT 1991/1992, program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, No. 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1990, tanggal 28 Desember 1990, dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, No. 49/1991, tanggal 13 Februari 1991, serta SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Kediri, No. 184/1991. (Gubernur Jatim, *Pedoman Pembinaan Pelaksanaan TRI/1991/92*).

Selanjutnya dengan program TRI yang berpedoman pada SK Bupati dibentuk tim pemasukan atau pengaturan lahan TRI dengan tujuan menetapkan penyediaan lahan bagi TRI, yang terdiri camat, muspika, sinder, mabun, dan lainnya. Tim ini dikenal dengan nama Satuan Pelaksana Bimas (Satpel Bimas), yang kemudian menugaskan kepala desa beserta perangkatnya untuk menyediakan areal perkebunan tebu, sepertiga dari seluruh lahan pertanian/perkebunan yang ada di tiap-tiap desa di Kecamatan Papar. Bagi para pemilik lahan yang terkena program TRI diwajibkan mengikuti program tersebut dengan sistem kerja kelompok, baik kolektif maupun kooperatif.

Secara skematis pelaksanaan program TRI di Kecamatan Papar ini dapat digambarkan sebagai berikut, dimulai dari landasan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Kediri, No. 184/1991, hingga ke kelompok kebun.

**SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri
No. 184/1991**



**Satuan Pelaksana (Satpel)
(camat, muspika, sinder tebu, mabun, dan lainnya)**



**Kepala Desa
beserta perangkatnya**



Kelompok Kebun (KK)

Di Kecamatan Papar, TRI di lahan sawah terdiri dari tanaman pertama yang selanjutnya disebut TRISSUS I, dan TRIS; serta tanaman kedua (*keprasan I*) yang selanjutnya disebut TRISSUS II. TRI di lahan tegalan terdiri tanaman pertama yang disebut TRIT I; tanaman kedua (*keprasan I*) yang disebut TRIT II; tanaman ketiga (*keprasan II*) yang selanjutnya disebut TRIT III; dan tanaman keempat (*keprasan III*) yang selanjutnya disebut TRIT IV (Bupati Tk. II Kediri, *Juklak TRI 1991/1992*).

Sasaran areal TRI untuk musim tanam 1991/1992 masing-masing desa dalam wilayah kerja pabrik gula (PG) adalah sebagaimana Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri, Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Kediri, No. 525.24/3624/421/21/1990.

TRIS ditanam pada masa optimal, yaitu bulan Mei-Juni. Lahan sawah yang terkena *glebagan* bagi calon TRIS I yang panen padinya dilakukan setelah bulan Pebruari harus segera dialihtanamkan ke tebu, agar masa tanam dapat optimal. TRIS II di-*kepras* pada bulan optimal, yaitu sampai dengan bulan Agustus.

Dari data "Laporan Pemasukan Areal TRI Musim Tanam 1995/1996", areal TRI di Kecamatan Papar adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1
LAPORAN PEMASUKAN AREAL TRI MUSIM TANAM 1995/1996
WILAYAH KUD SRI GATI, PAPAR
SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 APRIL 1995

No.	Desa	TRIS I-C		TRIS II-C		TRIS I-B		TRIS II-B		TRIS I		TRIS II		TRI-P/N		TRI	
		SK	Realisasi	SK	Realisasi	SK	Realisasi	SK	Realisasi	SK	Realisasi	SK	Realisasi	SK	Realisasi	SK	Realisasi
1.	Maduretno	5	-	5	14,200	13	5,800	13	14,200	18	5,800	18	14,200	11	-	47	20,000
2.	Srikaton	5	1,500	5	-	13	13,700	13	2,500	18	15,200	18	2,500	11	-	47	17,700
3.	Puhjajar	5	-	5	-	5	-	5	-	10	-	10	-	9	-	29	-
4.	Kepuh	15	10,000	15	-	20	3,750	20	2,000	35	23,750	35	2,000	9	-	79	15,750
5.	Ngampel	10	-	10	-	21	8,000	15	-	31	8,000	25	-	15	-	71	8,000
6.	Papar	10	1,935	10	-	20	9,980	20	10,000	30	11,915	30	10,000	18	-	78	21,915
7.	Kedungmalang	10	-	10	-	10	12,230	10	11,050	20	12,260	20	11,050	9	-	49	23,280
8.	Tanon	6	1,032	6	-	12	3,490	10	5,300	18	4,522	16	5,300	17	-	51	9,822
9.	Jambangan	6	1,000	6	-	6	-	5	3,000	12	1,000	11	3,000	11	-	34	4,000
	Jumlah	72	15,467	72	-	120	56,620	111	48,050	192	72,417	183	42,750	110	-	485	120,467

Sumber: SKW, Ir. Budiarto, KUD Sri Gati Kecamatan Papar, 1995.

Catatan: Untuk Musim Tanam 1995/1996, hanya 9 dari 17 desa yang terkena Glebagan.

2.3 "Glebagan", Pola Tanam Bergantian

Glebagan merupakan sistem pergantian pola tanam secara bergantian sehingga tanaman tebu tidak tetap di satu tempat dalam satu desa. Sistem *glebagan* ini berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 53/1988. Untuk Kabupaten Kediri dalam musim tanam 1991/1992, sasaran areal TRI didasarkan pada Surat Edaran Bupati Kepala Dati II Kediri, No. 525.24/3624/421/21/1990, yang mengatur sistem *glebagan* bertujuan untuk mencegah penanaman tebu yang terus-menerus, atau dalam hal petani tidak mau menanam tebu, jika terkena jadwal *glebagan* diwajibkan menanam tebu.

Pola *glebagan* ini diatur sebagai berikut:

1	6
2	5
3	4

Keterangan: Setiap lahan yang sudah ditanami tebu di satu desa (Papar) harus dibagi dalam 6 bagian (untuk memudahkan pengertian, yaitu lahan 1, lahan 2 dan seterusnya sampai lahan 6).

Lahan pertama digunakan sebagai lahan TRI I dengan jumlah seperenam dari bagian lahan yang ada. Kemudian setelah TRI I ditebang, maka lahan TRI I ini menjadi TRI II, dan kemudian dibuka lahan baru seluas seperenam dari lahan yang ada. Demikian seterusnya, sehingga di satu desa sepertiga bagian harus ditanami tebu.

2.3.1 Maduretno, Ekstensifikasi Areal

Contoh *glebagan* sedemikian ini sebagaimana yang terjadi di desa Maduretno, *glebagan* dibagi menjadi tiga wilayah dari 109 hektare sawah yang ada. Untuk setiap wilayah terdapat sejumlah kelompok yang menanam te-

bu TRIS I dan TRIS II, yang besarnya masing-masing setengah dari sepertiga luas areal sawah, hingga luas areal TRIS I sebesar kurang lebih 16 hektare. Begitu juga untuk TRIS II.

Penetapan *glebagan* ini diputuskan dalam suatu rapat desa (LMD) dengan mengumpulkan para petani pemilik lahan sawah, dan kemudian lahan yang ada tersebut dibuat gambarnya (*plotting*) oleh pabrik gula. Berdasarkan inilah *glebagan* dilaksanakan. Di dalam kenyataan, sistem *glebagan* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sebab ternyata petani tetap saja diwajibkan menanam tebu sekalipun "wajib" tanamnya sudah berakhir. Hasilnya, duapertiga dari lahan sawah yang ada ditanami tebu. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka ekstensifikasi areal demi meningkatkan produksi. Berikut ini adalah contoh pola *glebagan* di salah satu desa penelitian, Maduretno.

TABEL 2.2
GLEBAGAN DI DESA MADURETNO
KECAMATAN PAPAR, KABUPATEN KEDIRI

Musim Tanam	Wilayah					
	A		B		C	
	16	16	16	16	16	16
I	TRIS II	TRIS I	Padi	Padi	Padi	Padi
II	Padi	TRIS II	TRIS I	Padi	Padi	Padi
III	Padi	Padi	TRIS II	TRIS I	Padi	Padi
IV	Padi	Padi	Padi	TRIS II	TRIS I	Padi
V	Padi	Padi	Padi	Padi	TRIS II	TRIS I
VI	TRIS I	Padi	Padi	Padi	Padi	TRIS II

Sumber: Statistik KUD Sri Gati 1993

Luas areal TRI ditetapkan sebesar sepertiga dari lahan sawah yang ada di desa Maduretno, dari areal sawah seluas 109 ha, yaitu seluas 30-34 hektare. Dari areal TRI tersebut dibuat sebuah peta lokasi tanah yang dikerjakan oleh pabrik gula, yang disebut *plotting*. Hasil *plotting* ini dijadikan pedoman KUD untuk menetapkan Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang besarnya Rp 300.000,-/ha, di samping sebagai pedoman kepala desa untuk membagi wilayah desa menjadi tiga bagian areal TRI guna kepentingan pengaturan *glebagan* yang mengatur giliran wilayah untuk penanaman tebu. Areal TRI desa Maduretno adalah sebagai berikut:

1. TRIS I seluas 7 hektare, dimiliki oleh:

- 1. H. Riyono = 5 ha
- 2. Kundari = 2 ha

2. TRIS II seluas 22,448 hektare, dimiliki oleh:

- 1. A. Wachid = 3,500 ha
- 2. Mayul Bari = 3,668 ha
- 3. Podoreso = 5,000 ha
- 4. Muhadi = 1,665 ha
- 5. H. Kasni = 6,665 ha
- 6. Yabidi = 2,000 ha

3. Yang direncanakan dalam *glebagan* mendatang seluas 14 hektare, yaitu:

- 1. Suhadi = 2,600 ha
- 2. Ridwan = 2,000 ha
- 3. A. Wachid = 5,600 ha
- 4. Gimah = 3,800 ha

Dari areal yang ada itu disisakan sebagai lahan KBD sebesar sepersepuluh dari luas areal.

2.3.2 Ngampel, Sistem Kooperatif

Sedangkan program TRI di desa Ngampel dalam musim tanam 1993/1994 ditargetkan seluas 243 hektare, sementara yang sudah terealisasi meliputi, TRI K1 seluas 37,187 ha, dan TRI K2, 27,597 ha, sehingga total 65.144 ha.

Luas lahan TRI yang terealisasi tersebut terdiri atas 16 kelompok tani hamparan yang anggotanya bekerja sama sehamparan dengan sistem kooperatif. Sesuai dengan ketentuan, kepala desa beserta perangkatnya, petugas pabrik gula ataupun Satpel Bimas tidak dapat duduk di dalam kepengurusan kelompok. Dalam hal bersifat khusus karena lahan TRI seluruhnya adalah milik pamong desa, maka ketua kelompok dijabat oleh perangkat desa atas izin khusus dari bupati selaku ketua Satpel Bimas daerah kabupaten.

Di desa Ngampel terdapat 42 orang pemilik tanah yang terkena *glebagan* (TRI K1 dan TRI K2). Di antara mereka 16 orang sebagai kepala kelompok merangkap anggota, sedangkan 26 orang sebagai anggota kelompok. Tabel 2.3 menunjukkan klasifikasi 42 orang peserta TRI tersebut, menurut susunan keanggotaannya dan jumlah luas tanahnya.

Pengaturan pelaksanaan sistem *glebagan* di wilayah desa Ngampel dilaksanakan oleh kepala desa sebagai ketua, sedangkan perangkat desa, LKMD, dan ketua kelompok tani sebagai anggota. Setiap keputusan *rembug desa* tersebut dilaporkan kepada camat yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan *glebagan* di wilayahnya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

TABEL 2.3
KLASIFIKASI KELOMPOK TRI K1 DAN K2
MENURUT SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN LUAS TANAH
DESA NGAMPEL, KECAMATAN PAPAR, KABUPATEN KEDIRI

Ketua Kelompok (KK)	Banyaknya Anggota	Luas Tanah (hektare)
1. Ngateman	2	4,001
2. Darsono	2	4,005
3. Kastubi	2	4,008
4. Tukiran	3	3,444
5. Mujiono	1	2,500
6. Traju Trisno	5	6,146
7. Suparman	3	2,975
8. Kasdi	3	4,044
9. Suyadi	2	3,453
10. Atmodiharjo	5	5,634
11. Enik R.	7	11,500
12. Moch. Maksum	2	2,850
13. Achmad Sholeh	1	2,000
14. Saeroji	1	2,500
15. Sutrisno	1	2,088
16. Sutrisno	2	4,000
Jumlah	42	65,144

Sumber : Statistik KUD Srigati 1993

2.3.3 Jambangan, "Glebagan Pola Enam"

Hal yang sama juga terjadi di desa Jambangan, yang umumnya menggunakan pola tiga tempat. Namun, di desa ini, pembagian lahan untuk *glebagan* tak dilakukan secara kaku atau mutlak berdasarkan peraturan dari "atas". Perbedaannya, pembagian wilayah *glebagan* disesuaikan kondisi desa dan kebijakan pemimpin desa yang bersangkutan.

"Glebagan tiga" yang umumnya dipergunakan ternyata tidak diterap-

kan di desa Jambangan, karena desa ini mempunyai kebijaksanaan khusus dengan menerapkan sistem "glebagan pola enam" dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi lahan desa yang subur dan potensial untuk tanaman palawija dan padi, sehingga untuk panen lahan dipilih berdasarkan sifat tanah. Tanah yang subur ditanami palawija/padi, dan yang kurang subur ditanami tebu.
2. Pendapatan petani yang menanam tebu relatif lebih rendah dibanding menanam palawija/padi.
3. Pemilikan lahan penduduk desa rata-rata sempit (menurut data resmi sebesar 0,216 ha per pemilik lahan).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penanaman hanya dilaksanakan pada sebagian atau separo lahan pada tiap-tiap blok yang terkena *glebagan*. Lahan yang terkena *glebagan* biasanya dipilih lahan yang relatif kurang subur dan *sawah bengkok* (karena umumnya cukup luas). Sedangkan lahan yang diusahakan tak terkena *glebagan* biasanya merupakan lahan yang sangat subur/potensial untuk tanaman palawija dan lahan yang sangat sempit (tapi dalam prakteknya sulit dihindarkan).

Selain menerapkan sistem "glebagan pola enam" (hanya menanam setengah wilayah *glebagan* dengan tanaman tebu), jika tak ada kemungkinan baginya untuk menolak sistem penanaman petani di desa Jambangan menyiasatinya dengan alternatif (yang sudah biasa dilakukan) antara lain:

1. Menanami sebagian lahannya (setengah, sepertiga, dan sebagainya) dengan tebu. Dalam hal ini petani dapat bertukar lahan garapan dengan petani lain (yang lahannya tidak terkena *glebagan*) dengan luas lahan yang sama.
2. Tidak menanam lahannya dengan tebu sama sekali. Dalam hal ini, petani dapat bertukar lahan dengan petani pemilik lain seluas lahan miliknya yang terkena *glebagan*. Petani yang diajak bertukar lahan itu biasanya merupakan petani pemilik yang mau, dan

merasa diuntungkan dengan adanya pertukaran lahan garapan.

Pada musim tanam 1993/1994, petani desa Jambangan yang lahannya terkena *glebagan* yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

TABEL 2.4
SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK TANI TRI MTT 1993-1994
DESA JAMBANGAN, KECAMATAN PAPAR, KABUPATEN KEDIRI

No.	Nama	Luas Lahan (hektare)	Keterangan
1.	Paesan	0,210	-
2.	Sukarman	0,210	-
3.	Sugiono	0,420	-
4.	Imam Ajis	0,210	-
5.	Sadunem	0,210	-
6.	Iskandar	1,261	-
7.	Sudjono	0,140	-
8.	Rasiman	0,140	-
9.	Paeso	0,420	-
10.	Samidin	0,210	-
11.	Rumini	0,210	-
12.	Sunarti Bai Santoso	0,210	Ketua Kelompok
13.	B. Sutardjo	0,210	-
14.	Baenah	0,210	-
15.	B. Rono Karso	0,210	-
16.	Baiwar	0,70	-
17.	Ngatemi	0,20	-
18.	Salamun	0,210	-
19.	Saleh	0,210	-
20.	Saleh Karpan	0,210	-
21.	B. Pardjo	0,210	-
22.	Salman	0,210	-
23.	Kamsinem	0,210	-
24.	Kartini	0,210	-
25.	Sasar	0,210	-
26.	Abdul Rosyid	0,210	-
27.	Sutadji	0,210	Ketua Sub-Kelompok
28.	Bugedi	0,210	-

Sumber: Kepala Dusun Jambangan, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Dusun ini memiliki areal sawah yang cukup luas (lebih dari separo seluruh areal sawah di desa). Sistem TRI dalam musim tanam 1993-1994 adalah TRIS I. Pemilikan lahan pada daftar (Tabel 2.4) merupakan pemilikan lahan di wilayah yang terkena *glebagan*. Beberapa nama dalam daftar tersebut ternyata juga memiliki lahan di wilayah lain, baik di dalam maupun di luar desa.

Luas tanah tersebut terbagi dalam petak-petak yang masing-masing seluas 0,216 hektare. Para petani tergabung dalam suatu kelompok tani yang bersifat kooperatif, di mana ketua kelompok dipilih berdasarkan pemilikan tanah terluas. Ketua kelompok bertugas mengurus masalah-masalah prosedural pengajuan kredit TRI, sekaligus mengkoordinir proses penggarapan lahan (bersama ketua sub-kelompok). Sementara itu ketua sub-kelompok bertugas menerima uang kredit, dan mengolahnya, serta mengkoordinir proses penggarapan. Kedua koordinator tersebut diberi kepercayaan oleh anggota kelompok untuk mengatur sistem pengolahan lahan.

Pada umumnya luas lahan dalam kelompok di desa Jambangan dibagi dalam sub-sub kelompok seluas kurang lebih 3 hektare. Dengan demikian, jumlah sub-kelompok tergantung pada total luas lahan yang terkena *glebagan*.

2.3.4 Papar, Antara TRI dan Digarap Sendiri

Di desa Papar, *glebagan* diwujudkan dalam kelompok program TRI secara kooperatif, di mana ketua kelompok bersama-sama anggota TRI mengerjakan lahan secara terkoordinir, tapi tak menutup kemungkinan anggota kelompok mengusahakan tanahnya secara koordinatif yang diolahnya sendiri. Hal ini cukup memungkinkan karena beberapa dari anggota kelompok memiliki lahan yang cukup luas, sehingga dia dapat membagi tanahnya untuk pelaksanaan program TRI dan untuk digarap sendiri.

Susunan anggota kelompok peserta TRI di Desa Papar yang dipilih se-

bagai sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Susunan Anggota Kelompok Tani TRI MTT 1993-1994
Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri

No.	Nama	Luas Lahan (hektare)	Keterangan
1.	Mukri	1	Ketua Kelompok
2.	Suwito	0,50	-
3.	Urip Sutanto	1,13	-
4.	Supardi	0,5	-
5.	Ahmad	0,5	-
6.	Muntayib	0,5	-
7.	Kasiman	0,05	-
8.	Sukimin	0,05	-
9.	Rokhim	0,05	-
10.	Ikrah	0,05	-
11.	Supero	0,05	-
12.	Nyono	0,05	-
13.	Mualim	0,05	-
14.	Lasiman	0,05	-
15.	Saekun	0,05	-
16.	Urip	0,05	-
17.	Podo	0,05	-

Sumber: KUD Sri Gati Kec.Papar 1993

2.4 Organisasi dan Tata Kerja

2.4.1 Gugus Kerja

Organisasi dan Tata Kerja dalam program TRI di Kecamatan Papar dilakukan oleh Satuan Gugus Kerja yang dibentuk pada tingkat kabupaten Kediri. Adapun instansi yang terkait pada organisasi Gugus Kerja ini adalah :

1. Bagian Perekonomian Kabupaten.
2. Cabang Dinas Perkebunan Daerah.
3. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten.
4. Departemen Koperasi Kabupaten.
5. Bank Rakyat Indonesia.
6. Seksi Pengairan Brantas.

Adapun fungsi Satuan Gugus Kerja adalah sebagai motor penggerak atau dinamisator upaya khusus peningkatan produksi gula dengan tugas antara lain:

1. Agar masing-masing instansi dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. memantau secara dini permasalahan yang ada di lapangan dan mengupayakan pemecahannya.

2.4.2 Forum Musyawarah Pabrik Gula (FMPG)

Selain itu, untuk memperlancar program, juga dibentuk satu forum yang disebut Forum Musyawarah Pabrik Gula (FMPG) yang susunan anggotanya terdiri dari:

1. Administrator pabrik gula.
2. Kepala Unit Pelaksana Proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (KAUPP TRI) Dinas Perkebunan Daerah.
3. Wakil dari Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
4. Wakil BRI.
5. Pimpinan BPP setempat.
6. Pengurus KUD yang membidangi TRI.
7. UP TRI Puskud di setiap pabrik gula.
8. Wakil peserta TRI sebanyak dua orang dari setiap FMPW.

Sedangkan tugas FMPG meliputi:

1. Menyusun rencana operasional tentang areal, jadwal tebang dan pengangkutan serta pengolahan dan pemasaran.
2. Menyusun rencana pembinaan kelompok tani, sehingga menjadi pasangan pabrik gula.
3. memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan merumuskan tindakan lebih lanjut termasuk masalah pengembalian kredit.
4. Menyusun bahan-bahan yang diperlukan untuk :
 - a. Perencanaan kegiatan latihan petugas dan pembinaan kelompok tani.
 - b. Pertimbangan bagi Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya dalam menggerakkan pelaksanaan program TRI.
 - c. Konsultasi antar-kelompok.
 - d. Menyusun rencana pembinaan KUD, agar KUD lebih dapat meningkatkan kemampuannya dalam fungsi pelayanan program TRI.

Keputusan FMPG mengikat semua pihak yang terkait dalam program TRI.

2.4.3 Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW)

Di setiap kecamatan atau wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW) dibentuk FMPW dengan anggota sebagai berikut:

1. Sinder Kebun Wilayah.
2. Mantri Perkebunan Kecamatan yang ditunjuk oleh cabang Dinas Perkebunan Daerah.
3. Wakil Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.
4. Penyuluh Pertanian Lapangan.
5. Wakil-wakil ketua kelompok tani peserta TRI dari setiap desa wila-

- yah kerja KUD.
6. Pengurus KUD yang membidangi.
 7. Petugas pengairan.

Organisasi ini mempunyai tugas lebih lanjut pelaksanaan terhadap keputusan yang telah disepakati di FMPPG yang meliputi:

1. Menyusun perincian pelaksanaan teknis.
2. Mengamankan dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan.
3. Membuat laporan hasil musyawarah ke FMPPG.

2.4.4 Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (K2P2G)

Dalam hal ini wakil kelompok tani atau KUD berkewajiban mengikuti dan menyaksikan proses analisis kemasakan tebu. Untuk mengikuti dan menyaksikan perhitungan rendemen dan penimbangan tebu harus dibentuk K2P2G dengan tugas mengawasi/menyaksikan secara aktif perhitungan rendemen dan timbangan tebu di masing-masing pabrik gula.

Satuan ini beranggotakan petugas KUD, yang telah mendapatkan kursus rendemen di P3GI Pasuruan. Satuan ini dibentuk dengan SK Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. Tim ini bertugas selama pabrik gula giling dan bekerja mengikuti pola giliran kerja pabrik gula. Setelah itu ia diwajibkan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada satuan Pelaksana harian Bimas Bidang Perkebunan.

Pembentukan K2P2G, dan dasar pembinaannya sesuai dengan Keputusan Mentan No. 881/Kep./OT.210/12/1988. Untuk biaya operasional tim menjadi beban petani yang dikoordinir oleh KUD pelaksana, di mana pengaturannya ditetapkan oleh Satpel Bimas Kabupaten/Kotamadya.

2.4.5 Kelompok Tani

Kelompok tani peserta TRI adalah bagian dari kelompok tani hamparan yang anggotanya para petani penanam tebu yang mengusahakan kerja sama usaha tani sehamparan dengan sistem kooperatif maupun kolektif dalam rangka intensifikasi tebu rakyat. Dalam usaha meningkatkan produksi sekaligus pendapatan anggotanya, setiap kelompok dilengkapi kepengurusan kelompok kegiatan yang meliputi ketua, sekretaris dan bendahara.

Di dalam kepengurusan ini, kepala desa dan aparat desa, petugas pabrik gula ataupun anggota Satpel Bimas dilarang duduk sebagai pengurus kelompok, tapi harus bertindak sebagai pembimbing dan pengendali kelompok.

Apabila dalam keadaan yang sangat bersifat khusus, karena lahan TRI seluruhnya adalah milik pamong desa, maka apabila terpaksa ketua kelompok tani dijabat oleh perangkat desa, sebelumnya harus izin khusus dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kediri.

Biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompok tani termasuk balas jasa para petugas kelompok, ditanggung bersama oleh para anggota. Besarnya biaya dan sumber dana serta ketentuan penggunaan biaya ditetapkan secara musyawarah oleh petani anggota kelompok. Satpel Bimas Kecamatan setempat berkewajiban mengesahkan hasil musyawarah dan mengawasi pelaksanaan anggaran kelompok tani.

Kepala desa selaku pelaksana program TRI setelah mendapat instruksi dari kecamatan, mengadakan rapat bersama LKMD untuk menentukan areal dengan mengumpulkan para petani dalam musyawarah desa (LMD) untuk membentuk kelompok-kelompok tani TRI dan memilih ketua kelompok (KK).

Syarat menjadi ketua kelompok adalah: (1) Memiliki lahan sawah yang luas; (2) Mengerti benar tentang seluk beluk penanaman tebu; Dan (3) bukan pegawai negeri.

2.4.6 Pola Penggarapan Penanaman

Penggarapan penanaman tebu TRI dilakukan dengan dua cara kerja kelompok yaitu:

- a. *Kelompok kooperatif*, yaitu penggarapan lahan dikerjakan sendiri oleh masing-masing anggota kelompok. Pembagian hasilnya berdasarkan kesuburan tanah dan rendemen. Dengan demikian anggota yang memiliki sawah yang subur dan hasil rendemennya baik akan memperoleh bagian lebih besar dari anggota lainnya yang kualitas tanahnya kurang subur dan rendemennya jelek.
- b. *Kelompok kolektif*, yaitu penggarapan lahan yang dikelola secara kolektif, namun penggarapannya diserahkan pada para buruh tani yang dibayar borongan (untuk TRI) dan harian (untuk TRB). Pembagian hasilnya berdasarkan luas lahan yang dipilih, sehingga anggota yang memiliki lahan tebu yang luas akan memperoleh bagian yang lebih besar dari anggota lain yang luas lahannya lebih kecil. Dengan demikian cara seperti ini tidak membedakan kesuburan tanah dari masing-masing anggota kelompok. Sementara KK memperoleh 2% dari hasil panen tebu.

Di Kecamatan Papar, cara penggarapan lebih banyak dilakukan secara kolektif, lahan sawah digarap oleh buruh penggarap sawah. Dengan demikian, ketua kelompok harus memiliki modal lebih dahulu untuk penggarapan awal.

2.4.7 Kredit

Kredit yang disediakan untuk petani peserta TRI sesuai dengan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. SES.34-DIR/KPK/2/1991, dan pelaksanaannya dilaksanakan secara murni KUD yang memenuhi syarat/-ditunjuk. Untuk dapat mengajukan kredit syaratnya adalah:

- a. Areal TRI minimal 2 hektare.
- b. Ada jaminan kredit:
 - Fidusia atas hasil gula petani yang dikuasai oleh petani yang dikuasai oleh KUD.
 - Perum PKK 90 % dari plafon kredit.

Bentuk paket kredit dapat berupa :

- a. BBH (Bantuan Biaya Hidup) didasarkan pada luas tanah. Besarnya Rp 300.000,-/ha diberikan melalui tiga tahap:

Tahap 0 Rp 100.000,-

Tahap I Rp 100.000,-

Tahap II Rp 100.000,-

- b. Komponen Saprodi (sarana produksi) misalnya biaya pengadaan bibit, pupuk, pestisida, penggarapan tanah, dan penebangan, sekaligus pengangkutan.
- c. BBH II bila terjadi paceklik (musim panen hanya sekali). Kredit yang diberikan bisa mencapai:

TRISSUS I Rp 1.983.500,-/ha

TRISSUS II Rp 1.327.000,-/ha

TRIS I Rp 1.646.000,-/ha

TRIS II Rp 1.146.000,-/ha

TRIT I Rp 1.404.500,-/ha

TRIT II Rp 1.042.000,-/ha

TRIT III Rp 1.042.000,-/ha

TRIT IV Rp 932.000,-/ha

Perincian biaya persiapan lahan:

1. *Cemplong* Rp 115,- ukuran 10 x 1,08 m

2. *Got besar* Rp 35,- ukuran 70 x 15 cm

3. *Cumel* Rp 40,-

4. <i>Tanja/tanem</i>	Rp 1.000,- (harian)
5. <i>Rabuk I</i>	Rp 1.000,- (harian)
6. <i>Bubut</i>	Rp 1.000,- (harian)
7. <i>Rabuk II</i>	Rp 1.000,- (harian)
8. <i>Jegol</i>	Rp 15,- per leng (borongan)
9. <i>Kebruk/walit gulut</i>	Rp 25,- (borongan)
10. <i>Kebruk rata</i>	Rp 25,- (borongan)
11. <i>Gumbeng/ipuk</i>	Rp 25,- (borongan)
12. <i>Pra gulut</i>	Rp 25,- (borongan)
13. <i>Korah got</i>	Rp 10,- per leng
14. <i>Gulut dan klentek</i>	Rp 50,- per leng (borongan)
15. <i>Klentek I</i>	Rp 25,- per leng
16. <i>Klentek II</i>	Rp 25,- per leng
17. <i>Klentek III</i>	Rp 25,- per leng

Pengembalian kredit dilakukan dengan pemotongan hasil panen tebu sesuai dengan besar kredit yang diambil. Setelah dipotong kredit tersebut, kemudian dikembalikan kepada ketua KK lewat KUD untuk dibagikan kepada para anggota. Jangka waktu pengembalian kredit TRI ditetapkan paling lambat dua bulan setelah *copy* DO dari pabrik gula diterima (bilamana gula diterima dari perhitungan yang terakhir).

Pada Tabel 2.6 dan 2.7 diuraikan secara rinci biaya kredit TRI bagi lahan sawah (TRISSUS I dan II, serta TRIS I dan II), dan lahan tegal (TRIT I, II, III dan IV) yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri. Rincian biaya kredit ini meliputi biaya bantuan hidup (BBH), biaya garapan, pupuk, tebang angkut, paket tambahan pemberantasan hama/penyakit. Untuk lahan sawah, kredit biaya garapan I sampai dengan VII, sedangkan untuk lahan tegal hanya biaya garapan I hingga V. Rincian ini sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program TRI musim tanam 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

TABEL 2.6 BIAYA KREDIT TRI DI LAHAN SAWAH

No.	Uraian	TRISSUS I (Rp/ha)	TRISSUS I (Rp/ha)	TRIS I (Rp/ha)	TRIS II (Rp/ha)
0.	BBH Tahap 0	100.000,-	-	100.000,-	-
1.	BBH Tahap I	100.000,-	110.000,-	100.000,-	110.000,-
2.	Biaya Garapan I	225.000,-	150.000,-	175.000,-	120.000,-
3.	Pupuk Tahap I - TSP - ZA - KCL	52.000,- 84.000,- 52.000,-	39.000,- 105.000,- 52.000,-	52.000,- 80.000,- 52.000,-	39.000,- 84.000,- 52.000,-
4.	Bibit	260.000,-	26.000,-	260.000,-	26.000,-
5.	Biaya Garapan II	80.000,-	60.000,-	75.000,-	50.000,-
6.	Pupuk Tahap II - ZA	84.000,-	84.000,-	63.000,-	63.000,-
7.	Biaya Garapan III	80.000,-	80.000,-	65.000,-	50.000,-
8.	Biaya Garapan IV	56.000,-	45.000,-	50.000,-	30.000,-
9.	Biaya Garapan V	75.000,-	35.000,-	35.000,-	25.000,-
10.	Biaya Tebang dan Angkut	350.000,-	270.000,-	325.000,-	50.000,-
11.	BBH Tahap II	100.000,-	110.000,-	100.000,-	110.000,-
12.	Biaya Garapan VI	85.000,-	50.000,-	25.000,-	20.000,-
13.	Biaya Garapan VII	99.000,-	50.000,-	25.000,-	20.000,-
	Jumlah Kredit	882.000,-	1.266.000,-	1.586.000,-	1.049.000,-
	Paket Tambahan Pemberantasan Hama/Penyakit	101.500,-	61.000,-	60.000,-	99.000,-
	Total	1.983.500,-	1.327.000,-	1.646.000,-	1.148.000,-

TABEL 2.7
BIAYA KREDIT TRI DI LAHAN TEGAL (TRIT)

No.	Uraian	TRIT I (Rp/ha)	TRIT II/III (Rp/ha)	TRIT IV (Rp/ha)
0.	BBH Tahap 0	-	-	-
1.	BBH Tahap I	100.000,-	100.000,-	100.000,-
2.	Biaya Garapan I	130.000,-	110.000,-	110.000,-
3.	Pupuk Tahap I-TSP	52.000,-	39.000,-	39.000,-
	-ZA	84.000,-	84.000,-	84.000,-
	-KC	52.000,-	52.000,-	52.000,-
4.	Bibit	325.000,-	65.000,-	65.000,-
5.	Biaya Garapan II	50.000,-	35.000,-	35.000,-
6.	Pupuk Tahap II-ZA	84.000,-	84.000,-	84.000,-
7.	Biaya Garapan III	50.000,-	35.000,-	35.000,-
8.	Biaya Garapan IV	50.000,-	35.000,-	35.000,-
9.	Biaya Garapan V	25.000,-	35.000,-	35.000,-
10.	Tebang Angkutan	200.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	BBH Tahap II	60.000,-	60.000,-	-
Jumlah Kredit		1.262.000,-	934.000,-	824.000,-
12.	Paket Tambahan Pemberantasan Hama/Penyakit	140.000,-	108.000,-	932.000,-
Total		1.404.000,-	1.042.000,-	932.000,-

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program TRI musim tanam tahun 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

2.4.8 Tebang dan Angkut

Penentuan waktu tebang berdasarkan atas hasil analisis kemasakan tebu optimal pada saat itu dengan memperhatikan kondisi-kondisi teknis yang perlu dipertimbangkan. Dalam kenyataan hasil analisis kemasakan tebu tidak sama, disebabkan antara lain, waktu penebangan dilakukan, tebu tidak langsung diproses di PG tapi menunggu jadwal penimbangan di

PG, sehingga mengakibatkan rendemen tebu turun. Sebab lain, tanaman tebu tidak masak serempak sehingga rendemennya rendah.

Penentuan jadwal tebang direncanakan oleh FMPW di tingkat kecamatan, untuk kemudian dibahas dan ditetapkan oleh FMPG. Pengawasan terhadap jadwal tebang tebu dilakukan oleh K2P2G, mereka ini wakil kelompok tani atau KUD. K2P2G ini berkewajiban mengikuti dan menyaksikan proses analisis kematangan tebu di masing-masing pabrik gula. Keanggotaan K2P2G diprioritaskan dari petugas KUD yang sudah mendapatkan kursus rendemen di P3GI Pasuruan.

Apabila jadwal tebang sudah ditentukan, kegiatan penebangan dan pengangkutan dari kebun tebu ke tempat timbangan PG dapat dilakukan oleh KUD, dan kelompok petani atau pabrik gula. Apabila dilaksanakan oleh KUD, kelompok wajib membuat surat kuasa kepada KUD. Sedang apabila kelompok menginginkan untuk tebang angkut sendiri, kelompok harus membuat pernyataan yang disampaikan ke KUD, tembusan ke pabrik gula, dan harus bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program TRI.

Untuk angkutan tebu KUD diwajibkan menyediakan sarana armada angkut tebu milik KUD sendiri dan anggota KUD menurut kebutuhan dan situasi/kondisi wilayah. Sarana angkut tebu yang dikontrak KUD diperhitungkan dengan jatah harian yang harus dilaksanakan oleh KUD.

Ada beberapa masalah yang muncul dalam tebang angkut ini yaitu:

a. Jadwal tebang.

Petani berebut minta ditebang pada rendemen optimal, yang membuat PG kewalahan, sehingga terjadi konflik antara petani dan petani, maupun petani dan PG, seperti, pembakaran tebu, perkelahian, dan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibentuklah FMPW.

b. Angkutan

Pengangkutan terlambat datang, sehingga tebu yang sudah ditebang terlambat digiling yang mengakibatkan rendemen turun. Atau sebaliknya angkutan sudah datang, tapi tebu belum ditebang.

2.4.9 Bagi Hasil

Ketentuan bagi hasil gula dan tetes bagian petani TRI ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, No. 03/SK/Mentan/Bimas/VI/1987, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Rendemen sampai dengan 8. Bagi hasil: 62% untuk petani, dan 38% untuk pabrik gula.
- b. Rendemen lebih dari 8 - 8,50. Bagi hasil: 70% untuk petani, dan 30% untuk pabrik gula.
- c. Rendemen lebih dari 8,50 - 9,50. Bagi hasil: 75% untuk petani, 25% untuk pabrik gula.
- d. Rendemen lebih dari 9,50 - 10,50. Bagi hasil: 80% untuk petani, 20% untuk pabrik gula.
- e. Rendemen lebih dari 10,50 - 11,50. Bagi hasil: 85% untuk petani, 15% untuk pabrik gula.
- f. Rendemen lebih dari 11,50. Bagi hasil: 90% untuk petani, 10% untuk pabrik gula.
- g. Di samping ketentuan ini, kepada petani diberikan pula nilai rupiah dari 1,85 kilogram tetes untuk setiap kuintal tebu sesuai harga yang ditetapkan Menteri Pertanian.

Dalam kenyataannya, di Kecamatan Papar, sistem bagi hasil ini tak diketahui dengan persis oleh petani, karena untuk segala urusannya diwakilkan pada ketua kelompok. Anggota kelompok hanya menerima hasil bersih dari panen, sehingga sering terjadi penyimpangan dalam proses bagi hasil ini.

2.5 TRI sebagai Usaha Tani Kontrak (*Contract Farming*)

Dengan gambaran sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat program TRI di wilayah Kecamatan Papar, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai institusi negara dalam seluruh mekanisme program. Besarnya campur tangan negara menempatkan program TRI sebagai suatu usaha tani berdasarkan kontrak atau *contract farming*, yang merupakan suatu bentuk organisasi produksi yang sangat unik, dan memiliki dimensi politik-ekonomi yang luas daripada hanya sekadar satu model interaksi dalam produksi pertanian. Selain itu, *contract farming* adalah suatu model yang menunjukkan adanya suatu proses transformasi pengorganisasian alat-alat produksi pada proses produksi pertanian sebagai akibat penetrasi modal sekaligus tekanan persaingan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi.

Secara definitif *contract farming* dapat diartikan sebagai usaha tani yang didasari kontrak antara satu lembaga atau firma yang berperan sebagai pengolah dan/atau pemasar hasil-hasil pertanian, dan petani berperan sebagai produsen primer hasil pertanian tersebut. Dalam hubungan ini petani yang berperan sebagai produsen primer akan menjual/menyediakan sejumlah hasil produksinya kepada lembaga atau firma-firma. Lembaga ini kemudian mengolah dan/atau menjual kembali hasil produksi tadi melalui sejumlah ketentuan pengikat hubungan ini yang disepakati kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, lembaga atau perusahaan yang membeli produk pertanian dapat juga menyediakan nasihat-nasihat teknis, kredit, serta sarana produksi lainnya secara langsung atau bekerja sama dengan pihak lain.

Sistem sedemikian ini menurut Collin Kirk sebagai *core-satelite model*, atau model inti-satelit. Lembaga atau firma pembeli menjadi inti, dan petani-petani produsen primer menjadi satelitnya. Pihak inti dibentuk sebagai *nucleus estate*, yang mencakup sebuah perkebunan kecil dikelola sendiri, dan sebuah unit pengelolaan di mana sejumlah petani di sekitarnya (*out-*

growers) menjanjikan akan menyediakan hasil pertanian mereka kepada inti.

"Contract farming is a way of organising agricultural production whereby small farmers of 'outgrowers' are contracted by a central agency to supply produce in accordance with conditions specified in a contract or agreement. The agency purchasing the produce may supply technical advice, credit and other inputs, and undertakes processing and marketing. This system has also been designated the 'core-satellite' model with the central core unit purchasing the produce of contracted 'satellite' outgrowers. In a particular variant fostered by the Commonwealth Development Corporation (CDC), the core is generally constituted by a 'nucleus estate' a small estate and central processing unit to which a number of smallholders are contracted to supply produce". (Kirk, 1987:46-47)

Di dalam model *contract farming*, pihak yang menjadi inti dapat berbentuk badan-badan usaha milik negara atau lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk kepentingan ini, perusahaan-perusahaan swasta, atau koperasi. Sedangkan kontrak yang terjalin antara pihak inti atau pihak pemberi kontrak dan petani-petani kecil satelitnya (plasma) dapat tertulis atau hanya berbentuk kesepakatan lisan. Pada dasarnya, kontrak ini merupakan suatu cara untuk mengalokasikan distribusi risiko antara perusahaan dan petani di sekitarnya sebagaimana dikatakan Glover:

"The contract also provides certain advantages for the grower. He has an assured market for his crop, access to the company's services, and easier access to credit. Even in cases when the firm itself does not provide loans to its growers, banks will generally accept a contract as collateral. In fact, the credit facilitating aspect of the contract is often the farmer's principal motive for signing up. Contracting is fundamentally a way out allocating the distribution of risk between the firm and its growers". (Glover, 1983:1145).

Namun dalam pelaksanaannya, *contract farming* lebih kompleks dibandingkan definisinya. Ada banyak variasi yang berkembang, kasus per kasus, pada aspek-aspek tertentu yang terkandung di dalam hubungan kontrak ini (Glover, 1992:3). Bahkan menurut David J. Clapp, *contract farming* tergantung pada dominasi perusahaan terhadap petani, khususnya kontrol

tak langsung perusahaan terhadap proses kerja pertanian yang dilakukan oleh para petani (Clapp, 1988:6).

Sementara Wilson (1986) mengemukakan ada bentuk-bentuk hubungan dalam *contract farming* yang perlu dicermati, yaitu hubungan kontrak pemasaran, hubungan kontrak produksi dan integrasi vertikal. Pada bentuk kontrak pemasaran (*marketing contract*), pihak inti (pemberi kontrak) hanya menentukan jenis dan jumlah produksi pertanian yang akan diserahkan petani produsen. Biasanya dalam kontrak model ini pihak inti tidak mengintrodusir metode-metode atau langkah-langkah yang harus diambil petani produsen dalam proses produksi. Pihak inti juga tak harus menyediakan sarana-sarana penunjang produksi, seperti bibit, pakan, pupuk, pencegah hama, peralatan dan mesin, dan sebagainya.

Pada bentuk kontrak produksi (*production contract*) pihak inti (pemberi kontrak) terlibat penuh dalam penentuan jenis varietas, penyediaan bibit, penyediaan sarana-sarana produksi, dan penentuan metode proses produksi --di samping menentukan jumlah dan kualitas hasil produksi yang harus disediakan pihak petani produsen. Sementara pada bentuk integrasi vertikal (*vertical integration*), semua tahapan proses produksi berada dalam kendali pihak pemberi kontrak. Di tingkat awal, pihak pemberi kontrak menguasai seluruh alat produksi kecuali tenaga kerja, sementara petani produsen menguasai tenaga dan keterampilannya. Melalui kontrak ini petani-petani menjual tenaga dan keterampilan mereka secara individual ataupun kolektif, langsung maupun tidak langsung, untuk ditukar dengan hasil produksi yang saat itu juga kembali mereka jual kepada pemberi kontrak. Dalam model kontrak ini petani-petani tak lebih dari buruh upahan --meski pihak inti (pemberi kontrak) tidak membayar tenaga yang dikeluarkan/digunakan oleh petani-petani tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Pihak pemberi kontrak hanya memborongkan "pembelian" sejumlah hasil yang telah ditetapkan, dan harus disediakan petani, terlepas dari seberapa banyak dan cara mereka menggunakan tenaga untuk memenuhi ke-

wajiban tersebut.

Dengan kata lain, dalam model *contract farming* terdapat hubungan produksi yang mengikat petani untuk menyediakan/menjual sejumlah hasil pertaniannya dalam batasan-batasan tertentu (harga, mutu, dan jumlah), yang kerap tak bisa disetarakan dengan jumlah tenaga yang harus mereka keluarkan. Dalam kenyataannya, petani tak dapat terlibat di dalam pasar bebas untuk kelebihan-kelebihan komoditas yang mereka miliki, karena mereka tak memiliki akses untuk terlibat dalam pasar bebas tersebut, sebagaimana kata Wilson (1986:49): "*The contract in contract farming is an agreement between the farmer and input supplier or a processor which takes the place of exchange on the open market*". Dengan kata lain, *contract farming* sebagai mekanisme yang direkayasa untuk menggantikan peran pertukaran di pasar bebas.

Hubungan antara inti dengan satelit dalam *contract farming* juga sering melibatkan aktor-aktor lain yang berfungsi sebagai katalis dan/atau *partner* bagi pihak inti. Negara sebagai sebuah institusi juga kerap pula melibatkan diri secara aktif, tak hanya melalui badan-badan usahanya yang menjadi inti, tapi juga melalui perangkat-perangkat lainnya untuk mendukung pelaksanaan hubungan produksi yang akan dijalin. Kalau melihat kepentingan setiap aktor dalam usaha tani kontrak, tampak para petani berada dalam posisi terjepit di tengah struktur hubungan produksi yang berlangsung. Para petani yang hanya memiliki kepentingan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan klasik mereka harus berhadapan dengan sejumlah kepentingan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih besar dari sekadar sebuah usaha produksi.

Menurut Bachriadi, di tingkat mikro, *contract farming* membuat petani berada dalam situasi tergantung kepada pihak inti. Ketergantungan ini terjadi akibat situasi dan struktur pasar yang menekan mereka. Tanpa "bantuan" pihak pemberi kontrak, petani-petani tersebut sulit untuk masuk dan menembus pasar global. Namun dengan "bantuan" yang diterima-

nya, umumnya mereka akan terjebak di dalam pasar yang monopsonis dan monopolis. Kedua bentuk pasar ini sangat mungkin terjadi dalam *contract farming*, karena sifat dominan pihak pemberi kontrak. Sifat dominan ini kemudian akan menciptakan ketergantungan petani, yang pada gilirannya malah akan memperkokoh dominasi pihak pemberi kontrak. Akhirnya pihak pemberi kontrak semakin bertambah kuat, dan terus menerus mendominasi petani dengan menciptakan beberapa sistem yang bisa memperkokoh posisinya. Diciptakanlah sistem-sistem yang membuat petani terus menerus tergantung secara teknologi, finansial, dan pasar terhadap mereka. Bahkan jika diperlukan metode dan sistem kekerasan juga diterapkan agar sistem dominasi ini tetap terwujud. Dengan demikian, dalam hubungan kontrak ini yang sesungguhnya terjadi kemudian adalah suatu model penguasaan ekonomi bahkan juga sosial budaya, yang dapat memberikan jaminan atau peningkatan keuntungan bagi pihak yang lebih memiliki kekuasaan (Bachriadi, 1995:15). Pendeknya, kondisi ketidaksetaraan hubungan, ketergantungan, dan dominasi menjadi suatu fenomena penting dalam *contract farming*.

Selanjutnya menurut Bachriadi, dengan demikian melalui hubungan produksi *contract farming*, peluang penetrasi kapital ke pedesaan semakin terbuka. Artinya, peluang untuk proses akumulasi kapital tanpa batas di pedesaan kembali terbuka lebar lewat konsep usaha tani kontrak ini. Melalui jalinan hubungan produksi yang tidak sederhana, petani-petani pemilik lahan digeser menjadi buruh-buruh upahan di atas lahan-lahan mereka sendiri, meski tanah sebagai alat produksi masih tetap mereka kuasai. Demikian pula pengendalian proses produksi dan pengendalian pasar secara otomatis membuat petani, khususnya petani peserta, berada dalam situasi dan posisi tergantung (Bachriadi, 1995:175).

Bagi petani sendiri, menurut Bachriadi, hubungan produksi *contract farming* memang masih memberikan satu kesempatan dan ruang untuk berkembang. Namun perkembangan yang bisa mereka nikmati kemudian

bersifat tergantung. Artinya, petani memasuki suatu situasi di mana perkembangan banyak aspek dan potensi yang mereka miliki sangat ditentukan pihak lain, baik arah, orientasi, bentuk, maupun wataknya. Dengan kata lain, untuk tumbuh dan bisa berkembang melalui hubungan produksi ini, petani tergantung secara teknologi dan pembiayaan kepada pihak inti. Mereka tidak mandiri dalam berorganisasi, bahkan keputusan-keputusan di setiap tahapan produksi juga distribusi hasil produksi tergantung pada keputusan yang dibuat atau diterapkan pihak inti. Bahkan, sebagai produsen mereka tak bisa menentukan berapa besar keuntungan atau nilai jual produknya harus ditetapkan. Pihak pembeli (pihak inti) yang menentukan harga jual/beli.

Eksplorasi yang melekat di dalam hubungan produksi *contract farming* akan bersifat tetap, baik pada saat hubungan produksi tersebut bisa berkembang dan turut mengembangkan kehidupan ekonomi petani pesertanya, maupun pada saat hubungan produksi itu hanya memberi ruang perkembangan untuk pihak inti. Dalam kerangka penetrasi kapital dan proses akumulasinya yang tanpa batas, eksploitasi memang merupakan salah satu cirinya. Dalam ungkapan yang lebih meluas maknanya, bisa dikatakan *contract farming* mencerminkan satu bentuk hubungan produksi yang berkembang dalam cara produksi kapitalis yang bercirikan hubungan penguasaan disertai eksploitasi (Bachriadi, 1995:176-178).

Sebagai bentuk usaha tani kontrak, program TRI terkesan mengalihkan risiko yang ditanggung pihak perkebunan sebagai inti, kepada petani TRI sebagai plasma. Penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Program TRI tak terlepas dari dicanangkannya swasembada gula oleh pemerintah Indonesia. Tujuan politik ini membuat kebijaksanaan gula, dan karenanya kebijaksanaan penanaman tebu, memasuki era baru melalui Inpres No. 9/1975. Inpres tersebut selain bertujuan mengalihkan sepenuhnya dan dalam waktu singkat, produksi tebu ke petani-petani yang sebelumnya menyewakan lahan kepada Perseroan Terbatas Perkebunan

(PTP), diam-diam diasumsikan, bagi petani adalah lebih menguntungkan untuk menjadi petani tebu daripada menerima sewa tanah. "Menjadi tuan di atas tanah sendiri" barangkali memang mempunyai nilai ekonomis tersendiri, karena mendorong maksimalisasi keluaran, tapi sebaliknya dapat saja justru menjadi sesuatu yang malang, tergantung dari lingkungan spesifik yang dihadapi. Sebaliknya, pabrik gula (PG) menarik diri dari bisnis tebu, terlepas dari peran residualnya sebagai sumber pengetahuan dan teknologi bagi petani tebu. Yang tinggal dikerjakan PG adalah penggilingan tebu, karena distribusi dan harga juga urusan orang lain, yaitu Bulog. Dengan kata lain, Inpres No. 9/1975 antara lain, berarti desintegrasi vertikal antara produksi tebu dan produksi gula (Simandjuntak, 1985).

TRI sudah berusia 20 tahun. Tingkat swasembada gula Indonesia memang meningkat dan bahkan diperkirakan akan melebihi 100%, sehingga kerinduan untuk kembali sebagai eksportir dapat lepas. Tetapi kenaikan tingkat swasembada ini lebih banyak adalah hasil ekstensifikasi yang menunjukkan pertumbuhan sekitar 12% per tahun, daripada hasil intensifikasi. Dalam kenyataan laju ekstensifikasi adalah sekitar dua kali lebih cepat dari laju pertumbuhan produksi, artinya produktivitas tanah menurun. Menurut Menteri Pertanian, hasil gula rata-rata dalam tahun 1976-1982 adalah 7,2 ton/hektare, atau 24% lebih rendah dibanding hasil rata-rata tahun 1930-1940. Sepanjang menyangkut peningkatan pendapatan petani, indikator produktivitas tersebut sedikit banyak telah mengungkap apakah terjadi kenaikan atau tidak. Dan berbagai laporan memang menunjukkan, banyak di antara kelompok TRI yang bahkan menderita rugi, dan memerlukan tunjangan pendapatan. Beberapa pabrik gula juga melaporkan kerugian, sebagian bahkan diancam oleh kebangkrutan, meskipun statistik industri memberi kesan industri gula secara keseluruhan dapat meraih laba yang cukup besar dan menaik di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh budi daya tebu.

Mengemukakan kekurangan-kekurangan atau bahkan kegagalan

tersebut adalah mudah, tapi yang sulit adalah penjelasannya. Yang muncul adalah saling melempar kesalahan antara pabrik gula, KUD dan petani. Tentu saja pihak-pihak lain yang terlibat dalam TRI mempunyai alasan masing-masing untuk menggeser sebagian atau seluruh kesalahan ke pundak pihak lain, sementara ahli-ahli pertanian dapat mengalamatkan kritiknya pada semua pelaku dalam TRI. Perlu dicatat, di antara para ahli ada yang menekankan ketidaksiapan petani peserta TRI untuk menyerap pengetahuan dan teknologi budi daya tebu. Penggarapan tanah, pemilihan bibit, waktu dan metode penanaman, pengairan, pembesaran termasuk pembatasan populasi tebu, waktu dan metode panen, dan pengangkutan yang mempengaruhi kandungan gula, karenanya juga rendemen merupakan bagian-bagian penting yang mendapat kritik. Karena itu, pendekatan pemecahan masalah pun ditekankan pada segi teknis. Ini layak dikemukakan sehubungan dengan kenyataan petani-petani yang sebelumnya menyewakan lahannya memasuki TRI dengan bekal teknis yang inferior dibanding bekal teknis PTP. Namun, argumen-argumen teknis ini tak cukup untuk menjelaskan kemunduran kronis yang terjadi dalam budi daya tebu di Indonesia.

Penjelasan lain dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang. Adalah menarik, berlawanan dengan kecenderungan integrasi usaha-usaha pertanian di negeri-negeri lain yang bertujuan mendorong kenaikan produktivitas tanah dan petani, Indonesia dengan TRI yang sekarang justru beralih dari perusahaan tebu dalam skala besar ke perusahaan yang terpecah-pecah dalam lahan-lahan kecil. Menurut data statistik, dalam tahun 1993, areal TRI di Jawa Timur seluas kira-kira 112 ribu hektare dan kepemilikan rata-rata sepertiga hektare, sehingga produksi tebu TRI Jawa Timur saja melibatkan lebih dari 300.000 petani, termasuk petani di luar TRI dan petani-petani sambilan. Data lain dari BP3G menunjukkan, hasil rata-rata per hektare menurun secara konsisten 6,7% setiap tahun, walaupun produksi total gula naik sebesar 3% per tahun yang semata-mata karena perluasan

areal tanaman tebu yang naik secara konsisten sebesar 12,2% setiap tahun selama periode 1975-1980. Perluasan areal tanaman tebu seluas itu mencakup tanah-tanah kering dan tanah-tanah tegalan yang mutunya semakin rendah (Mubyarto, 1987:80).

Di dalam praktek, organisasi TRI melibatkan sangat banyak pihak dengan instruksi-instruksi yang parsial. Setiap pembuatan keputusan dalam TRI didahului oleh perundingan berbelit-belit. Seandainya dalam perundingan tersebut tidak seorang pun yang berniat korup, ia tetap akan menimbulkan biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan dengan prestasi. Di berbagai tempat, program TRI dihambat oleh berbagai permasalahan teknis. Banyak indikasi menunjukkan munculnya masalah hampir selalu disebabkan adanya konflik kepentingan antar-lembaga yang terkait dalam program TRI, yang mengakibatkan tidak terwujudnya kenyataan petani menjadi "tuan di lahannya sendiri", bahkan sebaliknya petani lebih sebagai penonton.

Relevansi penjelasan ini akan semakin tampak kalau diingat, regulasi yang tinggi adalah ladang yang subur bagi kegiatan pencarian rente (*rent seeking activities*). Semakin banyak regulasi, semakin besar kecenderungan dari masing-masing peserta TRI untuk lolos dari regulasi ini dengan membayar upeti kepada mereka yang berusaha menarik manfaat sebesar-sebarnya dari kekuasaan yang bersumber dari regulasi tersebut. Jika pengurus KUD dan buruh pabrik gula mengetahui, untuk mendapat rendemen yang setinggi mungkin masing-masing petani berusaha untuk didahulukan, maka adalah logis kalau pengurus KUD atau buruh pabrik gula berusaha menarik upeti dari perlombaan ini. Selanjutnya, upeti ini dapat menjadi prohibitif bagi petani-petani marginal. Tak mengherankan kalau bagian terbesar dari peserta TRI kewalahan menghadapi berbagai instruksi, dan karena itu menyerahkan perusahaan lahan tebunya kepada yang disebut pemimpin kelompok TRI di masing-masing wilayah (Simanjuntak, 1985).

Masalah nilai tukar komoditas tebu yang tak seimbang dengan nilai

tukar beras juga merupakan salah satu kendala. Pada saat harga *provenue* gula (harga jual yang diterima petani) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 51.425,- per kuintal, harga ini jelas tak layak bila dibandingkan dengan harga gabah. Mengingat selama tiga tahun terakhir ini sasaran produksi gula tak pernah tercapai, karenanya pemerintah perlu merangsang gairah petani dalam memproduksi gula dengan cara menaikkan *provenue* gula satu banding dua dengan harga beras. Artinya, 1 kg gula = 2 kg beras (*Surabaya Post*, 12 Desember 1989). Namun kenyataannya, penetapan harga gula yang lebih tinggi dibanding harga gabah itu sama sekali tidak terjadi. Hal tersebut terbukti dalam sepuluh tahun terakhir (1979/1980-1988/1989), perbandingan tertinggi *provenue* harga gula sebesar 3,3 kali harga dasar gabah kering giling (1980/1981), dan terendah 2,03 kali harga dasar gabah kering giling (1988/1989).

Kesulitan lain yang dialami petani adalah berbagai pungutan yang dikenakan terhadap gula, mulai dari cukai gula sebesar 4% dari harga *provenue*, PPN karung (10%), PPN gula (sekitar Rp 1.200,- per kuintal), *management fee* KUD (Rp 500,- per kuintal), pungutan Bulog (Rp 150,- per kuintal), pungutan proyek khusus pemerintah (Rp 100,- per kuintal), dan Dana Pusat Penelitian Produksi Gula (P3GI) sebesar Rp 200,- per kuintal. Selain itu petani juga masih menanggung pungutan Rp 1.000,- per kuintal tebu. Pungutan tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Koperasi No. 03/INST/M, tanggal 9 Juni 1988, yang isinya, sejak musim tanam 1987, setiap kilogram gula hasil dari tebu petani yang dibeli Bulog melalui KUD dikenai pungutan sebesar Rp 10,-. Dalam instruksi Menteri itu disebut sebagai uang "penyisihan", yang apabila berhasil dikumpulkan dari petani tebu seluruh Indonesia, uang itu akan direncanakan untuk membangun pabrik gula di luar Jawa yang kelak saham-sahamnya dimiliki petani.

Dalam musim tanam (1987-1988), Dolog Jatim berhasil membeli gula sebanyak 10.137.412 kuintal dari 10.190.970 kuintal yang ditargetkan. Sekitar 60% dari jumlah itu dibeli dari petani, sedang sisanya dibeli dari pa-

brik gula sendiri. Tahun 1988, uang yang berhasil disisihkan dari Rp 10,- tiap kilogram, berjumlah Rp 5,4 miliar. Sedangkan untuk musim tanam 1988, Dolog berhasil membeli 1.058.437 kuintal gula, yang artinya jumlah uang petani yang telah disisihkan sekitar Rp 600 juta. Untuk musim tanam ini perkiraan pembelian gula yang ditargetkan Dolog sebesar 10.730.397 kuintal. Dan kalau target ini terealisasi, maka untuk musim tanam 1988 akan berkumpul uang sebesar Rp 5,5 miliar. Kalau jumlah ini dikumpulkan dengan hasil penyisihan tahun 1987, maka uang petani Jatim yang terkumpul selama dua tahun mencapai sekitar Rp 11 miliar. Meskipun pelaksanaan pungutan itu juga berdasarkan SK Gubernur Jatim No. 525/2070/023, tanggal 14 September 1988, yang isinya, pungutan itu harus berdasarkan kesepakatan antar-petani, kelompok tani, serta KUD, dan karenanya apabila kelompok tani yang atas nama petani tersebut menolak, maka pungutan itu tidak dilaksanakan, tapi di berbagai tempat pelaksanaannya sangat menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur tadi. Karenanya, tak mengherankan bila di berbagai tempat, seperti di Kediri, Tulungagung, Ponorogo, para petani TRI menyatakan keberatan terhadap penyisihan uang saham yang dilakukan oleh KUD, dengan alasan uang penyisihan itu lebih bersifat memaksa dengan cara langsung memotong uang yang dicairkan dari BRI (*Surabaya Post*, 7 Juli 1989).

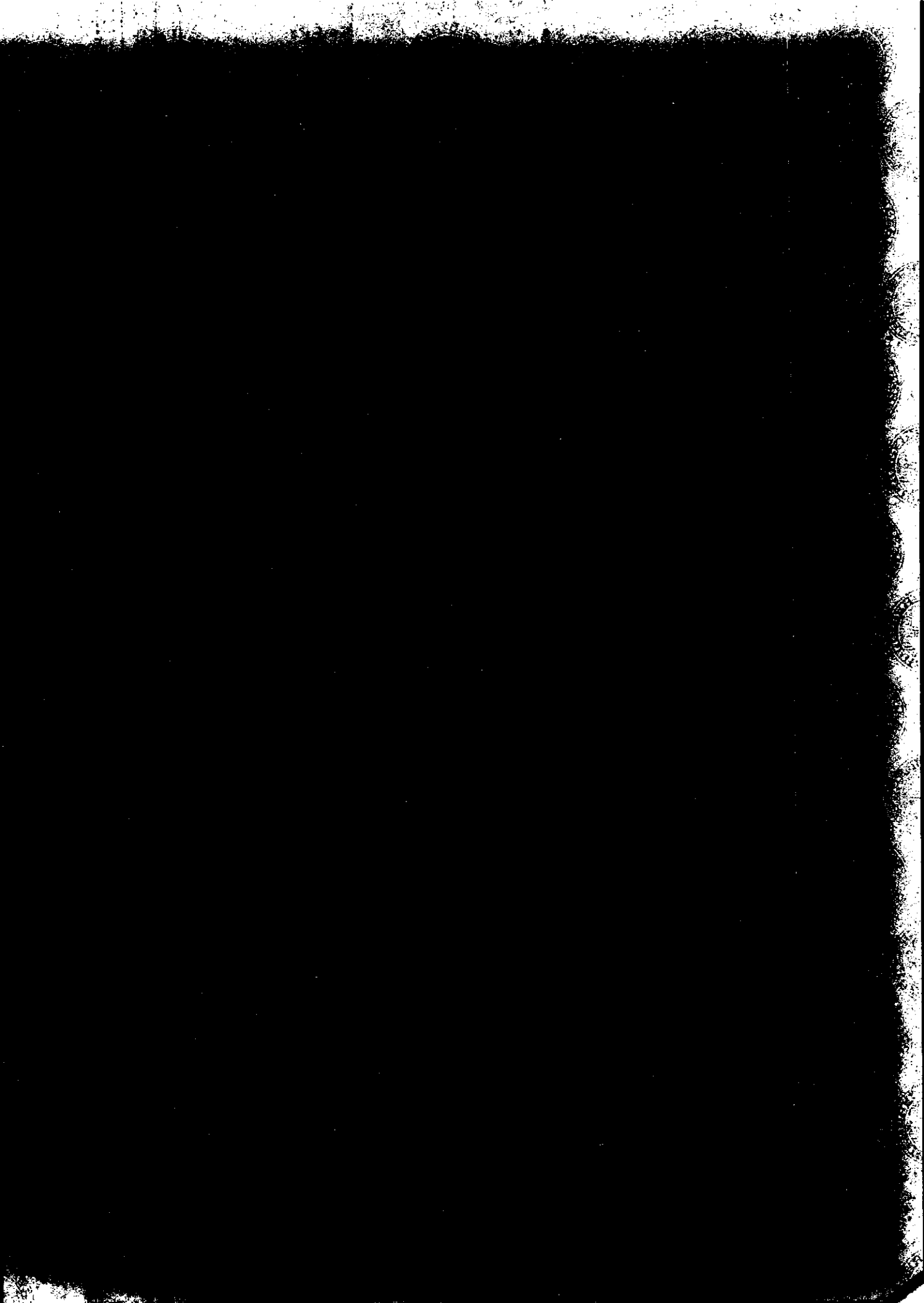
Pungutan lain muncul dalam penentuan waktu giling demi mendapatkan rendemen yang tinggi bila digiling. Tak mengherankan bila saat pertengahan giling sampai menjelang penutupan giling, terlihat deretan panjang antrean truk penuh tebu, yang kadang tanpa disertai Surat Perintah Angkut (SPA). Pada saat demikian itulah, sering oknum KUD, pedagang, dan antar-petani TRI sendiri sebagai "calo SPA", menawarkan SPA entah dari mana, yang biasanya seharga Rp 10.000,- sampai dengan Rp 12.500,-. Akibatnya banyak petani terpaksa memilih melepas tebunya ke tengkulak pemegang SPA dengan harga murah. Satu truk berisi 5-6 ton yang dibeli pabrik seharga Rp 20.000,- akhirnya dilepaskan ke tengkulak Rp

15.000,- sampai dengan Rp 17.500,- Bahkan ada yang membawa pulang tebunya hingga kering dan menjadi kayu bakar (*Surabaya Post*, 19 Agustus 1989).

Dari kenyataan ini, program TRI senyatanya lebih mengisyaratkan suatu upaya untuk mencapai secepat-cepatnya, dan sedapat mungkin secara berperikemanusiaan penggabungan tanah-tanah pertanian keluarga menjadi satu unit pertanian raksasa yang dijalankan, seperti pabrik, dan mempercepat pengurangan penduduk yang bekerja di bidang pertanian (Schumacher, 1987:104).

Dengan kata lain, skema TRI adalah sama seperti yang dinyatakan oleh Geertz, yang berlangsung di dalam kondisi fragmentasi tanah yang tak sesuai dengan intensifikasi, lebih-lebih kalau luas lahan yang bersangkutan sudah sedemikian kecil hingga tidak mungkin lagi menjadi sumber pendapatan utama bagi pemiliknya, hingga kesempatan untuk menikmati *economic scales* pun menjadi hilang. (Geertz, 1976:87).

Di dalam kondisi sosial sedemikian itulah TRI pada dasarnya sebagai usaha tani kontrak, dan di dalam konteks itu potensi pembangkangan terselubung petani berlangsung, terutama di wilayah Kecamatan Papar, yang menjadi lokasi studi ini.



BAB 3

PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG, UPAYA MEMPERTAHANKAN SUBSISTENSI

"Sistem (tanam paksa) mendorong petani dari kedudukan yang hampir muncul ke permukaan, kembali pada kedudukan perbudakan. (Bangsa) Belanda tidak memerdekakan petani; mereka menguncinya pada kedudukan terikat. Mereka tidak hanya menunda pembebasan, tetapi mereka membuatnya menjadi jauh lebih sukar untuk mencapai kebebasan pada saat ikatan-ikatan mereka dikendorkan" (Geertz).

Keterlibatan berbagai institusi birokrasi pemerintah di dalam TRI memungkinkan program ini dijalankan melalui praktek mobilisasi bahkan koersi, daripada partisipasi petani sebagaimana yang dikehendaki kebijakan Inpres No. 9/1975 yang menempatkan petani sebagai "tuan" di atas tanah sendiri. Kerugian yang muncul dari status "tuan" tersebut tak memungkinkan petani keluar dari program, kecuali pilihan menyerahkan tanah tanpa terlibat dalam proses pengolahan. Dalam Tabel 3.1 berikut ini dikemukakan bagaimana keterlibatan petani terhadap program TRI, dan berbagai program pembangunan lain yang ada di dalam masyarakat desa Kecamatan Papar.

Sebanyak 59% petani ikut dalam TRI karena faktor mobilisasi perangkat desa, dan yang menyatakan ikut karena koersi melalui berbagai ancaman perangkat desa sebanyak 24%. Hanya 17% yang menyatakan, cara yang digunakan perangkat desa dalam menggerakkan program TRI dilakukan dengan partisipatif tanpa ancaman apa pun. Hal yang sama juga terjadi dengan cara yang digunakan perangkat desa dalam menggerakkan program pemerintah lainnya, cara-cara mobilisasi dan koersi lebih banyak dilakukan dibanding partisipatif.

TABEL 3.1
CARA PERANGKAT DESA MENGERAKKAN PETANI
UNTUK PROGRAM TRI DAN PROGRAM LAINNYA
(N=130)

Program TRI			Program Lainnya		
Cara Menggerakkan					
Mobilisasi	Koersi	Partisipatif	Mobilisasi	Koersi	Partisipatif
77 (59%)	31 (24%)	22 (17%)	53 (40%)	38 (29%)	39 (31%)
130 (100%)			130 (100%)		

Sumber: Data Primer

Keterangan: Mobilisasi (yang harus dilaksanakan); Koersi (yang mengandung ancaman); Partisipatif (yang tidak mengandung apa-apa)

Kenyataan sedemikian itu barangkali cukup membenarkan pernyataan Boeke:

"Inilah sistem (pertanian yang terkenal itu), yang walaupun berjasa mendekatkan secara fisik petani dengan orang-orang Barat, tetapi telah merampas tingkat kebebasan petani." (Mubyarto, 1987:30)

Praktek-praktek sedemikian itu menghasilkan konsep tertentu terhadap hak dan kewajiban petani dalam melihat program TRI yang menyangkut apa sesungguhnya yang menjadi hak, dan apa kewajiban petani sesuai persepsi mereka yang berbeda dengan ketentuan Inpres. Persepsi para petani peserta TRI di Kecamatan Papar dalam melihat hak dan kewajiban mereka, digambarkan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Dari tabel tersebut, mereka yang menyatakan, kewajiban petani hanya menyerahkan tanah untuk program TRI sebesar 62%, sedangkan yang menyatakan kewajiban petani selain menyerahkan tanah juga ikut terlibat dalam pengelolaannya hanya sebesar 38%. Sementara pendapat yang menyangkut hak-hak petani TRI, 49% menyatakan hak yang harus diperoleh petani TRI adalah uang sisa hasil usaha, uang *cost of living* (COL), dan mendapatkan gula sebesar 2%. Sedangkan yang menyatakan yang menjadi hak

petani TRI memperoleh uang sisa hasil usaha, uang COL, gula 2 %, dan juga mendapatkan uang penjualan tetes sebesar 43%.

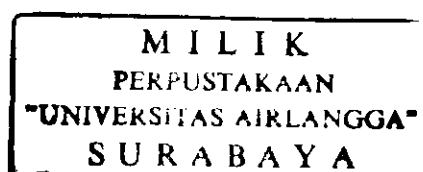
TABEL 3.2
PERSEPSI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
PETANI PESERTA TRI
(N=130)

Hak dan Kewajiban	Frekuensi	%
Kewajiban Petani		
Menyerahkan tanah	81	62
Menyerahkan tanah dan ikut terlibat menggarap	49	38
Jumlah	130	100
Hak Petani		
Menerima Uang Sisa Hasil Usaha + COL	10	8
Uang Sisa Hasil Usaha + COL + Gula 2%	57	43
Uang Sisa Hasil Usaha + COL + Gula 2% + Tetes	63	49
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

Sumadi, petani di desa Maduretno yang memiliki lahan seluas 1,4 hektare, ikut TRI karena keharusan *glebagan* dari desa. Sekalipun ia mengaku rugi ikut TRI, sebab hasil padi bisa 2-3 kali lipat dibanding tebu, bahkan jika ia menanam tebu sendiri, hasilnya bisa lebih banyak daripada *glebagan*, namun Sumadi "takut gontok-gontokan" dengan aparat bila menolak ikut serta. "Saya sudah tidak mau ribut-ribut, *lha wong* sudah tahu begini, percuma saja menolak," katanya.

Sumadi bukan sekadar tak mau ribut-ribut, ia juga *miris* melihat pengalaman tetangganya, Darmaji, seorang tokoh PNI, yang berani membantah aparat desa untuk ikut *glebagan*. Akibatnya, Darmaji susah mengurus surat-surat, bahkan dicap PKI --di desa ini namanya dicap "merah". "Itu



namanya yang atas 'nyemes' yang bawah, tapi mana bisa yang bawah 'nyemes' yang atas," ujar Sumadi setengah bertanya.

Tapi Sumadi tak kehilangan akal, sebagai bentuk pembangkangan, ia menyerahkan semua urusan mulai dari tanam sampai panen kepada ketua kelompok, termasuk perhitungan rendemen dan total hasil penjualan tebu. Ia hanya mengurus hasil bagiannya saja. Sumadi mengetahui banyak penyelewengan pembagian hasil, bahkan sering ketua kelompok mempermainkan penjualan tebu. Tebu kelompok yang berkualitas baik dijual secara bebas ke pabrik lain, bahkan sampai ke Madiun dengan harga tinggi. Istilahnya "dioper-alihkan". Pihak pabrik gula (PG), sinder TRI, maupun Satpel Bimas pura-pura tak tahu, asal mendapat bagian. Kontrak giling dengan PG pun bisa dilangkahi. Bahkan banyak orang menitipkan tebunya untuk digilingkan ke PG, meski mereka tak mempunyai kontrak dengan PG tersebut, dengan cara memberi "persenan" kepada oknum PG.

Hal yang sama juga dialami Roseno, petani di desa Papar yang memiliki lahan 0,4 hektare. Ia menghitung, bila lahannya dipaksakan ditanami tebu, ia akan rugi. Namun ia tak ingin dianggap menentang program pemerintah, dan menimbulkan persoalan. Lahannya ia serahkan kepada ketua kelompok, meski menurut ketentuan, petani harus ikut dalam proses pengolahan tebu dalam kelompok kooperatif. Tapi Roseno memilih lebih baik ikut dalam kelompok kolektif, karena ia masih bisa mencari alternatif pekerjaan lain.

"Yang memerintahkan supaya lahan saya ditanami tebu adalah aparat KUD, serta pamong desa, dengan alasan perintah dari pusat," ujar Roseno. Pemberitahuan mengenai hal tersebut dilakukan di Balai Desa. Dalam pertemuan itu, Roseno sempat menentangnya, namun ia hanya didukung oleh beberapa petani, sementara yang lain tak berani menolak. Akhirnya, Roseno terpaksa menyetujuinya, karena ia kalah saat penghitungan suara. Ia juga pernah membangkang tak menanam tebu, tapi akibatnya Roseno dianggap menentang pemerintah, dan ketika salah seorang

anaknya ingin mengurus surat untuk mencari pekerjaan dipersulit aparat desa.

Sedangkan di desa Maduretno, Slamet yang memiliki lahan 0,28 hektare juga menyatakan, mereka hanya menyerahkan lahan, segala urusan dikerjakan ketua kelompok. Para petani tinggal menunggu menerima hasilnya saja. Semua kegiatan dan urusan yang menyangkut pengolahan pra-panen sampai giling, ketua kelompok tak pernah mengajak anggotanya untuk musyawarah.

Bukan pekerjaan mudah melakukan koordinasi di antara petani pemilik tanah sempit. Dalam ketentuan TRI, koordinasi itu dilakukan oleh KUD, namun keterlibatan KUD tak terlepas dari kelemahan. Begitu petani terdaftar sebagai peserta TRI, dan mendapatkan tunjangan bantuan biaya hidup (BBH), maka sarana produksi pertanian yang disediakan dalam bentuk paket kredit disalurkan kepada ketua kelompok oleh KUD, sehingga petani pemilik selaku anggota kelompok tak perlu lagi mengurus segala sesuatunya. Mulai dari pembibitan, pembukaan lahan, perawatan, semuanya dilakukan atau diurus oleh ketua kelompok dengan dana dari paket kredit. Sementara tenaga penggarap lahan lebih banyak dilakukan oleh buruh upahan yang dicari sendiri oleh ketua kelompok.

Kenyataan ini ditemukan di Kecamatan Papar. Salah satu indikatornya adalah dengan melihat bagaimana peran petani di dalam proses pengelolaan tanaman, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.3. Dari tabel tersebut, hanya 37% petani yang terlibat dalam pengelolaan TRI, sementara yang menyatakan tidak ikut dalam proses pengelolaan sebanyak 63%. Kenyataan ini menggambarkan, petani TRI lebih mencerminkan sebagai penonton daripada "tuan" di atas tanah sendiri. Gambaran ini juga dapat diartikan, menjadi "tuan" di atas tanah sendiri memiliki nilai ekonomis tersendiri. Dengan mengelola sendiri, petani bisa meminimalisasi pengeluarannya.

sebagainya, karena TRIS II merupakan bekas *keprasan* pertama dari TRIS I. Dengan demikian pengelolaan tanaman TRIS II ini lebih mudah dibanding pengelolaan TRIS I. Alasan mengapa pilihan lebih pada TRIS II, seorang ketua kelompok menjelaskan:

"Dalam pengelolaan TRI, petani banyak yang tak terlibat, karena yang punya tanah TRI banyak juga yang pekerjaan utamanya bukan petani, tapi pegawai negeri, dan sebagainya. Mereka tidak mungkin terlibat dalam kegiatan seperti, cemplong, sirat, dan lainnya. Tapi kalau dalam TRIS II, mereka banyak yang mengolah sendiri, karena paling-paling hanya merabuk."

Pemberitahuan giliran tanam (*glebagan*) dilakukan oleh aparat desa berdasar Surat Keputusan Bupati mengenai *glebagan*. Dalam proses ini petani yang lahannya kena *glebagan* dipanggil ke Balai Desa untuk memperoleh pengarahan dan penjelasan, tanah mereka terkena giliran tanam tebu. Sesuai ketentuan, *glebagan* ditentukan melalui forum musyawarah yang diketahui oleh Pemda. Sekalipun ada petani yang berani menolak, terutama mereka yang lahannya ada di tengah-tengah *plotting*, namun sering kalah suara dengan mayoritas yang merasa takut. Akhirnya mereka pun harus merelakan lahannya daripada terjepit di tengah tanaman tebu, karena akan kesulitan memperoleh pengairan.

Saat dikumpulkan di Balai Desa untuk pemberitahuan *glebagan*, sekaligus juga ditunjuk ketua kelompok, dan para petani menyerahkan seluruh kegiatan di lapangan kepada ketua kelompok. Bagaimana cara petani mengawasi dan merawat perkembangan tanaman tebu TRI-nya sehari-hari, digambarkan pada Tabel 3.5.

Hanya 30 % dari petani kelompok TRI yang menyatakan sering mengunjungi kebun, sementara 62% lainnya menyatakan tak terlibat dalam pengelolaan, sehingga pengawasannya pun bukan lagi menjadi kewajiban mereka, karena telah diserahkan kepada ketua kelompok.

Di desa Papar, pada musim tanam 1991, petani membangkang tak mau menanam di areal yang sudah ditentukan untuk TRI. Bahkan ada

kepercayaan, tahun ganjil baik untuk menanam nanas. Akibatnya, sekalipun tebu sudah ditanam, dan sudah tumbuh, dicabut. Lahan tersebut kemudian ditanami nanas. Tapi, tanaman nanas akhirnya diperintahkan dibongkar, dan petani yang menolak mendapat ancaman dari camat.

TABEL 3.5
PENGAWASAN DAN PERAWATAN TERHADAP
PERKEMBANGAN TRI SEHARI-HARI
(N=130)

Pengawasan	Frekuensi	%
Sering Mengunjungi Kebun	39	30
Diserahkan ke Mandor	10	8
Diserahkan Ketua Kelompok Tani	81	62
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Indikator lain dari ketidakterlibatan itu dapat dilihat pula dari seluruh proses dan mekanisme yang ada dalam program TRI, kelembagaan maupun berbagai aktivitas lainnya. Kecuali keterlibatan dalam TRI dengan kredit (TRI-K) --dengan seluruh institusinya, yakni KUD dan KUT-- sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.6-- kebanyakan para petani tak terlibat dalam mekanisme dan kelembagaan TRI.

Ketidakterlibatan ini dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat betapa dalam semua institusi yang menurut Inpres No. 9/1975, seharusnya para petani tersebut terlibat, namun dalam kenyataannya terjadi proses *alienasi* dari institusi-institusi yang melandasi Inpres tersebut.

Semua institusi TRI ini merupakan bagian untuk menjadikan petani sebagai "tuan", yang mengisyaratkan petani adalah subjek utama program TRI, namun data pada Tabel 3.6 ini justru menunjukkan mereka lebih sebagai objek, bukannya sebagai subjek, program TRI.

TABEL 3.6
KETERLIBATAN PETANI DALAM LEMBAGA-LEMBAGA TRI
(N=130)

Jenis Lembaga	Keterlibatan		
	Terlibat	Tak Terlibat	Jumlah
TRI-K	130 (100%)	0 (0%)	130 (100%)
TRI-N	25 (19%)	95 (81%)	130 (100%)
TRIS	130 (100%)	0 (0%)	130 (100%)
TRIT	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
Tim Rendemen	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
UPP-TRI	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
Pabrik Gula	76 (58%)	54 (42%)	130 (100%)
PPL	49 (37%)	81 (63%)	130 (100%)
PLPT	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
KUD	130 (100%)	0 (0%)	130 (100%)
KUT	130 (100%)	0 (0%)	130 (100%)
KMK	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
Dolog	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
HIPPA	82 (63%)	48 (37%)	130 (100%)
HKTI	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
KBD	16 (12%)	114 (88%)	130 (100%)
KBI	21 (16%)	109 (84%)	130 (100%)
KBN	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
KBP	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
Bulog	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
BRI	17 (13%)	113 (87%)	130 (100%)
BPP	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
BP3G	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
FMPG	13 (10%)	117 (90%)	130 (100%)
FMPG	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
FKPP	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)
UP-TRI Puskud	0 (0%)	130 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Keterangan:

TRI-K	= TRI dengan kredit
TRI-N	= TRI tanpa kredit
TRIS	= TRI pada lahan sawah
TRIT	= TRI pada lahan tegalan
Tim Rendemen	= Tim yang dibentuk Satpel Bimas untuk penyaksian perhitungan rendemen.
UPP-TRI	= Unit Pelaksana Proyek TRI
Pabrik Gula	= Pabrik Gula
PPL	= Penyuluh Pertanian Lapangan
PLPT	= Penyuluh Lapangan Proyek Terpadu
KUD	= Koperasi Unit Desa
KUT	= Kredit Usaha Tani
KMK	= Kredit Modal Kerja
Dolog	= Depot Logistik
HIPPA	= Himpunan Petani Pemakai Air
HKTI	= Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
KBD	= Kebun Bibit Dasar
KBI	= Kebun Bibit Induk
KBN	= Kebun Bibit Nenek
KBP	= Kebun Bibit Pokok
Bulog	= Badan Urusan Logistik
BRI	= Bank Rakyat Indonesia
BPP	= Balai Penyuluhan Pertanian
BP3G	= Balai Penelitian Perusahaan Perkebunan Gula
FMPW	= Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah
FMPG	= Forum Musyawarah Produksi Gula
FKPP	= Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian
UP-TRI Puskud	= Unit Pelayanan TRI Pusat Koperasi Unit Desa

3.1 Menyasati "Glebagan"

Jika ada petani yang tak mau menanam tebu atau menolak *glebagan*, lahannya dapat ditukar atau diganti dengan lahan orang lain. Biasanya orang yang mempunyai lahan yang luas mau melakukan penukaran tersebut untuk "menolong" petani yang berlahan sempit, seperti yang terjadi pada pada musim tanam 1992/1993 di desa Maduretno, ada beberapa petani yang menolak menanam kemudian digantikan oleh beberapa orang yang mempunyai lahan luas.

Berbagai cara dilakukan petani untuk menghindari risiko TRI demi mempertahankan subsistensi. Salah satu cara yang ditempuh, menyasati ikut *glebagan* dengan menukar tanahnya kepada petani yang lebih kaya -- untuk disewa maupun ditukar lahan di tempat lain, meski lahan tersebut

kurang subur, namun lahan kurang subur ini masih lebih menguntungkan daripada harus ikut TRI.

Sedangkan para petani di desa Jambangan punya cara lain untuk mensiasati *glebagan*. Desa Jambangan terdiri atas dua dusun dengan areal persawahan seluas 69 hektare, 49 hektare di antaranya berada di dusun Jambangan, dan 20 hektare sisanya di dusun Plosokuning. Sawah *bengkok* untuk semua pamong desa seluas 21,885 hektare, dan tanah pekarangan 20 hektare. Lahan di desa ini ada yang tergolong subur, terutama yang letaknya di DAS Brantas, namun ada sebagian yang tidak subur. Budi daya utama di desa ini padi dan palawija. Pemilikan lahan di desa ini sempit, rata-rata 0,216 hektare.

Ketika instruksi *glebagan* turun berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Bupati, pamong dan warga desa, khususnya yang terkena *glebagan*, sepakat menyiasati wilayah *glebagan* dengan mengatur agar wilayah lahan yang subur tak dikenakan *glebagan*, wilayah *glebagan* dipindahkan ke lahan yang kurang subur. Kesepakatan ini tak tertulis, dan tak disampaikan kepada Satpel Bimas. Yang penting luas wilayah *glebagan* menurut ketentuan bisa dipenuhi desa.

Wilayah yang subur di desa Jambangan umumnya sudah menggunakan irigasi teknis, sehingga seluruh lahan mendapat pengairan yang memadai. Pola tanam "padi-palawija-palawija", memungkinkan lahan sawah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sawah dan ladang. Berkaitan dengan hal ini, program TRI yang dilaksanakan di desa Jambangan adalah TRIT (di lahan tegalan). Saat penelitian ini dilakukan, desa Jambangan masih memiliki areal yang ditanami TRIS II (sawah), namun untuk musim tanam tahun berikutnya, warga desa sudah sepakat tidak ikut *glebagan*, dan kalau pun harus ikut, akan diatur seperti semula, *glebagan* di tanah kurang subur dan tegalan (TRIT).

Sesuai ketentuan, sistem *glebagan* diatur sebagai berikut: setiap tujuh tahun sekali, sepertiga sawah petani terkena giliran untuk menanam te-

bu. Pada musim kemarau tahun pertama, sepertiga sawah yang pertama, tebu baru ditanam; sepertiga sawah yang kedua, tebu sudah dapat dipanen; dan sepertiga sawah lainnya ditanami palawija. Musim hujan pertama, sepertiga sawah yang pertama, tumbuh tebu; sepertiga sawah yang kedua, padi; sepertiga sawah yang ketiga, padi. Demikian siklus tanam untuk sawah yang terkena *glebagan* yang wajib dilaksanakan petani sewaktu lahannya terkena giliran.

Glebagan di Jambangan diatur menurut "pola enam", bukan "pola tiga-empat" sesuai ketentuan dari "atas". Pola ini digunakan untuk menyesuaikan kesepakatan menyiasati *glebagan*. Adapun kesepakatan menggunakan "pola enam" ini, lahan yang subur ditanami palawija dan padi, sedangkan tanah yang kurang subur ditanami tebu. Penanaman hanya dilaksanakan pada sebagian atau separo lahan pada tiap-tiap blok yang terkena *glebagan*. Agar tak mencolok sebagai bentuk pembangkangan, selain lahan yang terkena *glebagan* diatur di lahan yang kurang subur, tanah *bengkok* dimasukkan ke dalam *glebagan*, sekalipun termasuk tanah subur. Selain menerapkan sistem "*glebagan* pola enam" (hanya menanam separo wilayah *glebagan* dengan tanaman tebu), petani juga bebas memilih ikut menanam seluruh lahannya dengan tebu atau tidak. Bebas berarti, jika petani pemilik yang lahannya terkena *glebagan* karena alasan tertentu, lebih menginginkan menanam palawija/padi di lahannya. Jika tak ada kemungkinan baginya untuk menolak sistem penanaman, maka ia dapat memilih alternatif (yang sudah biasa dilakukan), antara lain :

1. Menanami sebagian lahannya (separo, sepertiga, dan sebagainya) dengan tebu. Dalam hal ini, petani dapat bertukar lahan garapan dengan petani lain (yang lahannya tak terkena *glebagan*) dengan luas lahan yang sama.
2. Tidak menanam lahannya dengan tebu sama sekali. Dalam hal ini, petani dapat bertukar lahan dengan petani pemilik lainnya seluas lahan miliknya yang terkena *glebagan*.

Petani yang diajak bertukar lahan itu biasanya petani pemilik yang mau dan merasa untung dengan pertukaran lahan garapan. Dengan demikian pelaksanaan program TRI memungkinkan untuk diwakili oleh beberapa orang saja yang mempunyai lahan luas. Kebijakan ini diambil untuk melindungi petani yang memiliki lahan sempit, yang pasti akan rugi bila diserahi kewajiban menanam tebu. Dengan praktek-praktek sedemikian ini, desa Jambangan berhasil menyasati wajib *glebagan*, dan tak melaksanakan TRIS II, bahkan TRIS I dilaksanakan hanya karena sifatnya yang "wajib".

Seorang petani mengemukakan, "seandainya saja tidak ada keharusan, kami sebenarnya enggan menanam tebu. Namun kami trauma sebab di waktu lalu, petani yang menolak untuk ikut serta dalam program TRI berurusan dengan aparat keamanan, polisi". Sedangkan seorang pamong desa Jambangan menuturkan:

"...kalau saya, ya senang *nggak*, *nggak* senang juga *nggak*. Senang saya, program TRI ini sudah diatur pemerintah dan mempunyai tujuan baik. Secara pribadi saya tidak suka karena lahan akan menghasilkan keuntungan lebih jika ditanami palawija. Masyarakat rata-rata tidak suka TRI, sehingga saya mengorbankan *bengkok* saya untuk menutupi jatah, karena lahan yang dimiliki masyarakat rata-rata sempit. Daripada masyarakat menanam tebu dan menjadi buruh tani, lebih baik menanam palawija atau padi sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, lahan dapat dikerjakan sendiri bersama keluarga".

3.2 Konsentrasi Tanah

Para penyewa lahan-lahan sempit yang terkena *glebagan* ini adalah petani kaya, sehingga terdapat sejumlah lahan cukup luas yang memiliki *scale of economic* tinggi untuk penanaman tebu, yang digunakan untuk TRB. Proses ini mengakibatkan di satu pihak terjadi konsentrasi tanah di tangan segelintir petani kaya, di lain pihak terjadi fragmentasi tanah bagi petani miskin. Peluang terjadinya proses konsentrasi tanah adalah dengan mengubah status penguasaan. Contoh demikian ditemukan di desa Ngam-

pel, penguasaan tanah berbeda dengan data resmi di dalam administrasi TRI. Di desa ini ada petani menguasai lahan lebih dari 20 hektare, tapi di dalam catatan data resmi tak terdapat data pemilik tanah seluas itu. Itu terjadi karena petani tersebut mengumpulkan tanah dari petani lain yang menolak ikut TRI.

Di desa Ngampel terdapat dua orang petani TRI yang memiliki tanah dan menguasai lahan lebih dari 20 hektare, tidak termasuk yang ada di luar wilayah Kecamatan Papar. Kedua petani tersebut bertempat tinggal di dukuh Mediunan. Penguasaan tanah tersebut diperoleh dengan menyewa atas tanah orang lain, sedangkan luas tanah yang dimiliki atas namanya sendiri hanya 3 hektare. Tabel 3.7 berikut ini memaparkan penguasaan tanah tersebut, beberapa nama yang tertera di dalam tabel ini tidak menguasai tanah tersebut, tapi dikuasai oleh Sastro, yang lebih dikenal dengan "Mbah Welas", seorang pengusaha tebu paling terkenal untuk beberapa wilayah pabrik gula.

TABEL 3.7
KELUARGA PEMILIK TANAH LUAS
DI DESA NGAMPEL, KECAMATAN PAPAR,
KABUPATEN KEDIRI

Nama Kepala Keluarga	Nama Pemilik di Atas Data Resmi	Luas (ha)	Kedudukan dalam Kelompok
Sastro	Sastro	5,50	KK + Anggota
	Sumiati	3,50	Anggota
	Ratno	3,27	KK + Anggota
	Legowo	2,86	Anggota
	Darso	2,00	Anggota
	Indro	1,50	Anggota
	Mangkuprojo	2,00	KK + Anggota
Jumlah		20,634	3 KK

Sumber: Hasil Wawancara

Mangkuprojo, sebagai ketua kelompok adalah nama dewasa Sastro. Sesuai ketentuan, seseorang tidak dapat menjabat ketua di dua kelompok TRI, maka di dalam daftar resmi ditulis nama dewasa Sastro. Sementara Ratno yang juga tercatat sebagai ketua kelompok, selama masa tanam 1992/1993 tak berada di desa Ngampel. Untuk lebih memperjelas permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.8
DAFTAR KELOMPOK DAN LUAS TANAH

Nama KK	Nama Anggota	Luas Tanah (ha)
Sastro	Sastro	2,00
	Nurahman	1,453
Mangkuprojo	Mangkuprojo	2,00
	Sumiati	1,50
	Ratno	1,27
	Legowo	0,864
Ratno	Ratno	2,00
	Sastro	2,00
	Sumiati	2,00
	Legowo	2,00
	Darso	2,00
	Indro	1,50
Kardi	Kardi	1,50
	Sastro	1,50
	Marjan	1,044
Jumlah		24,631

Sumber: Hasil Wawancara

Dalam tabel di atas, jumlah luas tanah yang dikuasai Sastro 20,634 hektare. Dengan mengubah nama, "Mbah Welas" mengumpulkan lahan di atas penguasaannya sendiri, sementara nama-nama yang tertera sebagai anggota kelompok pada kenyataannya tidak menguasai tanah tersebut. Contoh ini menunjukkan bagaimana terjadinya kecenderungan pemusatan

pemilikan tanah pada petani kaya.

Tapi masalahnya tidak berhenti pada pelepasan tanah yang di-TRI-kan dalam rangka menjadi "tuan" di atas tanah sendiri. Peningkatan produktivitas gula, proses penelitian, dan pengembangan untuk mendapatkan varietas unggul, teknik pemupukan, dan teknik budi daya merupakan proses yang juga inheren. Dalam hal ini, petani tidak terlepas dari perannya sebagai penyedia lahan, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan tebu, penyediaan lahannya ditempuh melalui kerja sama antara pabrik gula dan petani (SK Gubernur Jatim tentang TRI, MT 1991/1992).

Penyediaan lahan percobaan TRI berbeda dengan sistem sewa, sesuai keputusan Gubernur yang mencantumkan ketentuan yang mengatur imbalan yang diterima petani bila lahannya digunakan untuk tanaman tebu percobaan. Hasil wawancara dengan 50 petani yang terlibat dalam "tebu percobaan" ini, ternyata sebagian besar tidak mengetahui adanya ketentuan imbalan tersebut, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3.9.

Hanya 10 orang (20%) petani yang mengetahui mengenai ketentuan imbalan pendapatan untuk tanah sawah berpengairan, tapi mereka tidak tahu apakah yang diterimanya sesuai atau tidak dengan ketentuan, sedangkan yang 40 orang (80%) lainnya tidak mengetahui bagaimana ketentuan imbalan pendapatan untuk tanah berpengairan. Semua petani tersebut (50 orang) tak mengetahui ketentuan imbalan, baik pada tanah tadah hujan maupun tanah berpengairan. Sepuluh orang dari 50 petani yang terlibat tanaman percobaan ini semuanya adalah perangkat desa.

Kenyataan ini menunjukkan, ketentuan yang ada tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Bahkan seorang petani yang memperoleh imbalan pendapatan dari tebu percobaan ini mengatakan, imbalan yang pernah diterimanya sekitar dua tahun lalu, sejak itu ia tak pernah menerima imbalan lagi.

TABEL 3.9
PENGETAHUAN PETANI TRI TENTANG
KETENTUAN JUMLAH IMBALAN PENDAPATAN DARI TANAMAN PERCOBAAN DAN
PEROLEHAN IMBALAN YANG DITERIMA
(N=50)

Pengetahuan dan Perolehan			Ketentuan Jumlah Imbalan		
			20 kw Kristal Gula untuk Lahan Berpengairan	17,5 kw Kristal Gula untuk Lahan Tadah Hujan	14 Kw Kristal Gula untuk Lahan Tegalan
MENGETAHUI	Perolehan	Sesuai	0	0	0
		Tak Sesuai	0	0	0
		Tak Tahu	10 (20 %)	0	0
TAK MENGETAHUI			40 (80 %)	50 (100 %)	50 (100 %)
Jumlah			50 (100 %)	50 (100 %)	50 (100 %)

Sumber: Data Primer

Dalam SK Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Program TRI juga dijelaskan, setelah tebu percobaan digiling dan diketahui rendemen akhir, kepada petani diberikan kelebihan dari hasil minimal sebanyak 25% apabila produksinya melebihi hasil minimal, ditambah dengan nilai 1,5 kg (sejak 1991 naik menjadi 1,86 kg) tetes setiap tebu yang dihasilkan.

Sebagian besar petani yang ikut dalam kebun percobaan itu menyatakan tidak pernah memperoleh hasil gula dari hasil minimal sebesar 25%, sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 3.10. Demikian juga tambahan hasil dari nilai harga setiap tetes per kuintal tebu sebesar 1,8 kg. Tidak diketahui apakah hasil produksi tebu percobaan ini di bawah hasil minimal, ataukah karena hal lain. Para petani itu, pada saat melepas tanahnya, ti-

dak tahu dan tidak pernah diberitahu untuk apa tanah tersebut digunakan. Mereka baru mengetahui setelah tanahnya ditanami tebu dan diberi papan nama yang bertuliskan "Tebu Percobaan".

TABEL 3.10
PEROLEHAN TAMBAHAN HASIL PADA TEBU PERCOBAAN
(N=50)

Perolehan	Tambahan Hasil	
	Hasil Gula dari Hasil Minimal (25 %)	Nilai Harga Tetes dari Setiap kw Tebu (1,86 Kg)
Memperoleh	5 (10 %)	5 (10 %)
Tidak Memperoleh	45 (90 %)	45 (90 %)
Jumlah	50 (100 %)	50 (100 %)

Sumber: Data Primer

Dalam program TRI diperlukan pengadaan kebun bibit, karena dari kebun bibit inilah benih diperoleh. Ada empat jenis kebun bibit yang dikembangkan, yaitu Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI), dan Kebun Bibit Desa/Dasar (KBD). Sama halnya seperti pada tebu percobaan, dalam tebu bibit ini petani harus ikut sebagai penyediaan lahan. Tentang ini diuraikan dalam Tabel 3.11, yang menunjukkan selama 10 tahun musim tanam terhitung mulai musim tanam 1984/1985 sampai 1993/1994, tak ada petani yang menyatakan tanahnya digunakan sebagai KBP.

Demikian juga yang digunakan untuk KBN. Sementara untuk kategori KBI selama 10 musim tanam, penanaman tebu hanya pernah terjadi dua kali, yakni pada musim tanam 1986/1987, dan musim tanam 1989/1990. Pada musim tanam 1986/1987 hanya 9% yang menyatakan tanahnya digunakan untuk KBI dengan kategori luas tanah sedang. Kemudian dengan

porsi yang hampir sama, pada musim tanam 1989/1990, petani yang tanahnya diusahakan untuk KBI sebesar 10%. Kemudian untuk kategori KBD, penggunaan lahan paling banyak dalam kategori sempit, dan selama 10 tahun musim tanam, petani yang menyatakan tanahnya digunakan untuk pengolahan kebun bibit itu rata-rata per tahunnya tidak lebih dari 15%. Ada yang menyatakan tanahnya digunakan untuk kebun bibit, tapi tidak tahu termasuk kategori apa kebun bibit tersebut.

TABEL 3.11
KATEGORI KEBUN BIBIT DAN PROPORSI LUAS TANAH YANG DITANAMI SELAMA 10 MUSIM
(N=130)

Kategori Kebun Bibit dan Proporsi Luas Tanah yang Ditanami		Tahun Musim Tanam										
		84/85	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91	91/92	92/93	93/94	
MENGELOLA	KBP	Luas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sempit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KBN	Luas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sempit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KBI	Luas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sedang	0	0	12 (9%)	0	0	13 (10%)	0	0	0	0
		Sempit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KBD	Luas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sedang	0	10 (7%)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sempit	20 (15%)	0	20 (15%)	10 (7%)	20 (15%)	0	30 (23%)	10 (7%)	0	20 (15%)
	Kebun Bibit	Luas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sedang	0	1 (1%)	2 (2%)	0	0	0	0	0	0	0
		Sempit	13 (10%)	14 (11%)	18 (14%)	12 (9%)	13 (10%)	16 (12%)	14 (11%)	13 (10%)	15 (12%)	4 (3%)
TIDAK MENGELOLA		97 (75%)	105(81%)	78(60%)	108 (84%)	97 (75%)	101(78%)	86 (66%)	107 (83%)	115 (88%)	106 (82%)	
Jumlah		130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	100 100%	

Sumber: Data Primer.

Keterangan: KBP (kebun bibit pokok); KBN (kebun bibit nenek); KBI (kebun bibit induk); KBD (kebun bibit dasar).

Penggunaan lahan untuk kebun bibit ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara petani dan pabrik gula yang memuat besarnya imbalan yang diberikan kepada petani yang tanahnya digunakan. Bagaimana proses pencarian lahan untuk kebun bibit ini, seorang staf pabrik gula bagian tanaman mengemukakan:

"Proses pencarian lahan untuk kebun bibit sama dengan proses pencarian lahan untuk TRI, yang oleh desa biasanya sudah disiapkan. Setelah proses pengukuran berapa luas yang akan digunakan untuk kebun bibit itu di ACC oleh PG, baru diadakan pembayaran imbalan kepada petani. Besarnya imbalan yang diberikan ke petani itu 20 kuintal gula dikalikan harga gula yang berlaku pada saat ini untuk setiap hektarenya".

Ternyata, hanya sebagian kecil petani yang tak mengetahui mengenai ketentuan jumlah imbalan yang harus mereka terima dari penggunaan lahan untuk kebun bibit, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3.12. Sebagian besar petani mengetahui apa yang menjadi haknya, yaitu menerima imbalan penggunaan lahannya untuk kebun bibit sesuai dengan ketentuan.

TABEL 3.12
PENGETAHUAN PETANI TENTANG KETENTUAN
JUMLAH IMBALAN PENGGUNAAN LAHAN
UNTUK KEBUN BIBIT
(N=70)

Pengetahuan	Frekuensi	%
Mengetahui	61	87
Tak Mengetahui	9	13
Jumlah	70	100

Sumber: Data Primer

Penggunaan lahan untuk kebun bibit ini berlangsung pada saat umur tebu bibit siap ditebang, dan dijadikan bibit TRI. Namun tak jarang terjadi tebu bibit ini dibiarkan sampai tua dan digiling, seperti yang dikatakan oleh salah seorang Ketua Kelompok TRI:

"Sering jumlah tebu yang ditanam untuk bibit melebihi areal TRI yang tersedia. Biasanya tebu bibit ini harus ditebang dalam usia 10 bulan, kalau ternyata areal TRI tak bisa menampung, terpaksa harus dibiarkan sampai saatnya nanti siap untuk ditebang dan digiling".

Tindakan yang diambil petani bila penggunaan lahan untuk tebu bibit ini melebihi waktu yang telah disepakati, diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.13
TINDAKAN PETANI BILA TERJADI KETERLAMBATAN
TEBANG PADA TANAMAN TEBU BIBIT
(N=70)

Tindakan	Frekuensi	%
Mebiarkan Tebu Sampai Dipanen	46	65
Memberitahu kepada Pihak yang Berwenang untuk Menebang	10	14
Langsung Menebang Tanpa Memberitahu Pihak yang Berwenang	15	21
Jumlah	70	100

Sumber: Data Primer.

Tabel di atas menunjukkan, 65% petani membiarkan tebu bibit yang tak bisa ditebang itu hingga berumur siap giling, membiarkan penggunaan lahan dari 10 bulan *molor* menjadi sekitar 16 bulan. Sedangkan yang langsung menebang tanpa memberitahu pihak yang berwenang sebesar 21%. Membiarkan tebu sampai ditebang sendiri oleh pihak yang berwenang (KUD dan pabrik gula), atau langsung menebang tanpa memberitahu pihak yang berwenang itu, pada dasarnya merupakan "pembangkangan" terhadap ketentuan yang ada. Sikap demikian ini yang ditempuh sebagian besar petani tersebut.

Dalam program TRI, pabrik gula berperan membimbing petani dalam hal teknis, mulai pembinaan, pengawasan dan persetujuan terhadap penggunaan biaya garap, sampai sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, baik dalam jumlah maupun jadwal. Namun peran ini tak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sebab banyak petani yang mencari bimbingan dan informasi kepada pihak lain, sebagaimana digambarkan tabel berikut:

TABEL 3.14
SUMBER INFORMASI TEKNIK
PENANAMAN TEBU TRIS I DAN II
(N=130)

Sumber Informasi	Frekuensi	%
Sinder Pabrik Gula	29	22
PPL / KUD	13	10
Tetangga/Sesama Petani	36	28
Baca Buku/Majalah/Koran	3	2,5
Siaran TV/Radio	2	1,5
Sinder dan PPL	19	15
Sinder dan Tetangga Petani	16	12
Sinder dan Siaran TV/Radio	12	9
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

Ada aturan yang harus dipenuhi, jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk ZA, TSP, dan KCL. Komposisi pupuk yang digunakan itu harus seimbang, sebagaimana penjelasan Kabag KUD Sri Gati, Kecamatan Papar:

"Jenis pupuk yang digunakan dalam TRI adalah ZA, TSP, KCL, dengan komposisi untuk per hektarnya ZA 7 kuintal, TSP 2 kuintal, dan KCL 2 kuintal. Harga masing-masing pupuk tersebut, untuk ZA 7 kuintal Rp 147.000,-; TSP 2 kuintal Rp 52.000,-; dan KCL 2 kuintal Rp 52.000,-".

Sumber informasi para petani yang paling dominan mengenai teknik pemupukan pada TRIS I dan II, diperoleh dari sinder PG, sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 3.15 berikut ini. Pada urutan kedua (20%) adalah sesama petani, dan gabungan antara sinder PG dan sesama petani (19%) menempati urutan ketiga. Hanya 11% yang mengaku informasi teknik pemupukan diperoleh dari PPL/KUD.

TABEL 3.15
SUMBER INFORMASI TEKNIK
PEMUPUKAN TEBU TRIS I DAN II
(N=130)

Sumber Informasi	Frekuensi	%
Sinder Pabrik Gula	39	30
PPL / KUD	15	11
Sesama Petani	26	20
Baca Buku/Majalah/Koran	1	1
Siaran TV/Radio	4	3
Sinder dan PPL	20	16
Sinder dan Sesama Petani	25	19
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

Padahal peran itu seharusnya dijalankan juga oleh KUD --yang menurut ketentuan, peran dan aktivitas KUD dalam program TRI adalah:

1. Perencanaan, pengusulan serta penentuan areal TRI.
2. Pendaftaran peserta TRI.
 - a. Daftar Nominatif
 - b. Daftar 89 B (pemilik dan tanggungannya)
3. Membina kelompok tani TRI.
4. Pelayanan kredit produksi kepada petani.
5. Penyaluran sarana produksi.
 - a. Pupuk
 - b. Pestisida
6. Pengadaan Bibit (KBD) dan penyaluran Bibit.
7. Penebangan dan pengangkutan tebu.
8. Penyaksian dalam penentuan rendemen dan penimbangan tebu di PG.

9. Pengadaan tebu setara gula dari petani yang dijual kepada Dolog.
10. Pelaksanaan perjanjian kerja pengolahan di PG.
11. Pengolahan teknis budidaya tanaman tebu:
 - a. Pengolahan tanah.
 - b. Penanaman.
 - c. Pemeliharaan.
 - d. Pemupukan.
 - e. Penebangan.
 - f. Pengangkutan.

Besarnya peran KUD dalam membina dan mengelola program TRI ini menggantikan peran PG. Namun bagaimana peran itu dijalankan, seorang ketua kelompok tani mengungkapkan:

"Bagaimana mungkin petani menuruti mandor KUD, ijazahnya saja mereka itu paling-paling SMA yang sama sekali kurang paham tentang tebu, sedangkan para sinder PG ijasahnya insinyur pertanian. Bahkan pernah mandor dari KUD berkunjung ke kebun desa, yang pada saat itu kebun baru disebari pupuk dan dialiri air, lalu air itu *dibebeki* (dibendung agar air yang telah bercampur pupuk itu meresap ke tanah), tapi anehnya oleh mandor KUD, *bebekan* itu disuruh membongkar agar tidak menyebabkan long-sornya *galengan* akibat genangan air, itu berarti membuang pupuk. Akhirnya mandor KUD itu hanya jadi bahan olok-olokan petani".

Kelemahan KUD secara teknis ini bukan tidak disadari, sebagaimana dikemukakan oleh Kabag TRI di KUD Sri Gati:

"Secara teknis dalam budi daya tebu, KUD memang kurang mampu, sehingga peran KUD hanya terbatas pada bidang penyaluran sarana produksi/kredit, sedangkan yang menyangkut teknis budi daya tebu sepenuhnya ditangani PG. Misalnya, dalam hal penentuan areal TRI, tugas ini sebenarnya menjadi tanggung jawab KUD. Namun karena KUD tak ta-hu banyak tentang tanah, dalam kenyataan biasanya pihak desa langsung mendaftar ke PG dan mengukur, sebab hanya PG yang bisa mengukur dan mengetahui tanah-tanah yang bisa ditanami tebu. Setelah penentuan dan pengukuran tanah itu di ACC oleh Kecamatan dan PG, baru daftar nomina-tifnya diserahkan ke KUD untuk memperoleh pinjaman kredit".

Lemahnya peran KUD dibarengi pula keterbatasan peran PG, akibat ketentuan yang ada sebagaimana dikemukakan Staf Bagian Tanaman di Pabrik Gula Mrican Baru:

"Apa yang dilaksanakan PG di lapangan belum berjalan sesuai yang diharapkan karena adanya beberapa pihak yang turut serta di dalamnya. Dulu ketika sistem sewa masih berlaku, PG bisa membiarkan berbagai aturan yang sifatnya harus dilaksanakan dalam rangka memperoleh hasil semaksimal mungkin. Dan hasilnya ternyata memang melegakan.

Setelah itu keluar Inpres No. 9/1975 yang memutuskan sistem sewa diganti dengan TRI, di sini PG lebih enak karena yang terlibat hanya PG, BRI, dan petani. Semula KUD belum terlibat, baru setelah beberapa tahun kemudian KUD muncul, sehingga yang terlibat dalam pengelolaan tebu TRI menjadi PG, BRI, KUD, dan petani.

Sebenarnya dengan kemunculan KUD ini tugas PG menjadi agak ringan, karena hanya menyangkut masalah teknis saja. Tapi dalam kenyataan tugas yang seharusnya dijalankan KUD itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti masalah tenaga penggarapan dan juga pembinaan kelompok tani, sebenarnya menjadi tugas KUD, tapi ternyata sampai saat ini penanganannya masih di bawah PG. Jadi PG tidak hanya menangani masalah teknis saja, tapi juga masalah-masalah lain yang sebenarnya bukan tanggung jawab PG.

Tapi secara keseluruhan peningkatan hasil akan sangat tergantung pada apakah petani mematuhi aturan-aturan teknik budi daya tebu atau tidak. Kalau dulu PG bisa instruktif karena semua biaya memang PG yang punya. Tapi sekarang PG hanya bersifat persuasif, karena semua biaya ditanggung petani, sehingga kalau ternyata apa yang dikatakan PG tak dilaksanakan dan hasil yang diterima petani rendah, sudah tentu PG tidak bisa berbuat apa-apa".

Prosedur menanam tebu tak sesederhana penanaman padi atau palawija, sebab secara teknis semua prosedur harus dilaksanakan secara benar. Seorang staf bagian tanaman PG Mrican Baru menjelaskan mengenai prosedur teknis tersebut:

1. Persiapan pembukaan kebun.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam persiapan ini:

- a. *Babat damen*, kalau lahan yang mau digunakan tersebut masih ada *damen*-nya, tapi biasanya *damen* itu sudah dibabati oleh

petani.

- b. Pasang *anjir/acir* untuk melihat kemiringan, karena dengan kemiringan itu dapat ditentukan *sikon* (persikuan arah *got malang*). Persikuan tersebut dengan tujuan agar arah atau *meteran* dari got bisa sejajar.

2. Pembukaan tanah.

Dalam pembukaan tanah ini yang dilakukan adalah membuat beberapa got yang antara lain:

- a. *Got keliling*, yaitu got yang mengelilingi got-got yang lain, lebarnya 50 cm, dan dalam 80 cm.
- b. *Got mujur* dengan lebar 60cm, dalam 70 cm.
- c. *Got malang* dengan lebar 50 cm, dalam 60 cm.
- d. *Got pecahan*, got ini sifatnya insidental, yaitu pemotongan got karena tidak bisa dibuat *got malang*.

Setelah pembuatan got selesai, pada *got malang* dipasang *acir* untuk menentukan mana yang termasuk *petakan*, dan mana yang termasuk *glebagan*. Pada *got-got malang* itu nanti akan diberi *got mujur*, yang jaraknya tidak ada ketentuan pasti (tergantung tanah). Untuk tanah berat setiap 60 *got malang*, baru diberi *got mujur*. Sedangkan pada tanah yang tidak berat, setiap 100 *got malang* diberi *got mujur*.

3. Penanaman.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum bibit ditanam yakni:

- a. *Jugrug*, yaitu melongsorkan tanah di atas got dengan tujuan mempercepat pertumbuhan akar pada bibit setelah ditanam.
- b. Meratakan tanah yang di *jugrug*.
- c. Menanam bibit dengan posisi tebu datar atau agak miring.

Bibit yang diperlukan untuk got sepanjang 10 m sebanyak 26 biji, tiap bijinya ada 2 mata. Biasanya untuk tiap hektare diperlukan bibit ini sebanyak 24.310 biji/batang.

4. Pemupukan.

Pemupukan dilakukan sebanyak 2-3 kali.

- a. Pemupukan I dilakukan pada saat tebu berumur satu bulan, menggunakan pupuk TSP dan ZA, komposisinya 2 kuintal pupuk TSP dan 3 kuintal pupuk ZA/ha.
- b. Pemupukan II dilakukan pada saat tebu berumur 40-70 hari, menggunakan pupuk KCL dan ZA, komposisinya 2 kuintal KCL, dan 4 kuintal pupuk ZA/ha.

5. Pemberian air

Dalam pemberian air ini ada 2 macam:

a. *Ebor*.

Yang dimaksud dengan *ebor* adalah *ebor gadangan*, yakni memberikan air pada tanah *gadangan* pada saat persiapan tanam.

b. *Sirat*.

Yang dimaksud dengan *sirat* ada 2 macam:

1. *Sirat patri*, yakni memberikan air pada saat tebu berumur 3 hari setelah tanam, agar bibit yang baru ditanam lebih lekat atau terpatri dengan tanah, dan juga untuk mengurangi kemasan tanah.
2. *Sirat pupuk*, yakni pemberian air pada saat tebu selesai dipupuk. Pada *sirat* ini juga dilakukan 2 kali seperti pada pemupukan, yaitu *sirat pupuk I* dan *sirat pupuk II*. Tujuan *sirat pupuk* ini, agar pupuk yang baru diberikan cepat diserap dan dicerna oleh akar tebu.

6. *Pembumbunan*.

Yang dimaksudkan dengan *pembumbunan* adalah penurunan tanah.

Pembumbunan ini dilakukan 3 kali.

- a. *Pembumbunan I* atau disebut *sisir*, yaitu penurunan tanah pada saat tebu berumur 30-40 hari. Tujuan *pembumbunan* ini untuk mem-

beri makanan pada tanaman, juga untuk menutupi seandainya ada bibit *bagal* (mata pada bibit) yang masih kelihatan biar tidak kering akibat sinar matahari.

- b. *Pembumbunan II* atau disebut *gobeng*, yaitu penurunan tanah pada saat tebu berumur sekita 60 hari. Tujuan pembumbunan ini selain untuk memberi makanan juga untuk "mengurangi" anakan (semaian di mata bibit).
- c. *Pembumbunan III* atau disebut *lipur*, yaitu penurunan tanah pada saat tebu berumur 90 hari. Tujuan pembumbunan ini selain untuk memberi makanan, juga untuk "membunuh" anakan.

Gulut akhir atau disebut *ipuk*, yaitu membuat/memberi *gulutan* di pangkal tebu, pada saat tebu berumur 5 bulan atau pada saat tebu sudah keluar ruasnya antara 2-3 ruas. Dalam membuat *gulut akhir* ini harus ada air untuk memberi makanan pada tanaman. Tujuan pembuatan *gulut akhir* ini agar tebu tidak roboh, mengurangi hama, dan mempercepat pertumbuhan vegetatif.

7. Penyiangan.

Yang dimaksud penyiangan di sini adalah menghilangkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Ada dua macam penyiangan, yaitu *bubut* dan *besik*. *Bubut* adalah menghilangkan rumput yang ada di permukaan tanah dengan tangan (*mbubuti*/mencabuti rumput). Sedangkan *besik* adalah menghilangkan rumput di sisi-sisi got dan *tangkil* (sejenis cangkul tapi kecil). *Bubut* dilakukan saat tanah mau ditanami, tebu akan dipupuk I, tebu akan dipupuk II, atau melihat situasi, saat ada rumput yang harus *dibubut*.

8. Pemeliharaan saluran.

Yang dimaksud adalah memperbaiki saluran-saluran air karena long-sornya tanah, atau hal-hal lain. Tujuan pemeliharaan ini agar aliran air bisa lancar dan tidak menggenang. Saluran-saluran yang perlu diperbaiki ini adalah di *got keliling*, *got mujur*, *got malang*, dan *got pecahan*.

9. Lain-lain.

Hal-hal lain yang perlu dilakukan adalah:

a. *Klentek*, yaitu membuang daun tebu yang sudah kering (*daduk*).

Klentek ini dilakukan 2-3 kali.

1. *Klentek I*, dilakukan pada saat tebu berumur sekitar 7 bulan (sekitar 1 bulan setelah *gulut akhir*/kalau sudah ada daun tebu yang kering). Daun kering yang sudah dirontokkan tersebut tidak boleh sembarangan. Pada *klentek I* ini *daduk* ditempatkan di tiap-tiap 3 *petakan* (jarak antara *gulut* satu dan lainnya). Artinya pada petak 1, 2, 3 tidak boleh ditempati *daduk*, baru pada petak ke-4 *daduk* itu ditempatkan. Tujuan penempatan *daduk* ini untuk mengurangi kelembaban, karena *klentek I* ini biasanya dilakukan pada bulan April (masih sering turun hujan), kalau *daduk* itu ditempatkan di tiap-tiap petak, maka tanah akan menjadi lembab dan pangkal tebu membusuk.

2. *Klentek II*, dilakukan pada saat sekitar 1 bulan setelah *klentek I*. Pada *klentek II* ini *daduk* dapat ditempatkan di tiap-tiap petak, karena sudah mendekati musim kemarau, tanah sudah agak kering.

b. *Ikat tebu*, yaitu mengikat tebu yang roboh. Hanya tebu yang roboh searah saja yang diikat, karena pada tebu yang robohnya tidak searah, sulit untuk dilakukan.

Setelah beberapa proses teknik budi daya tebu itu dilalui, maka tinggal menunggu jadwal tebang. Keterlibatan petani terhadap pengolahan tanaman secara teknis sedemikian itu merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur yang menyatakan, petani peserta TRI harus mengetahui perkembangan sehari-hari pelaksanaan pemeliharaan kebun tebunya (SK Gubernur Jatim No. 26 A/1987).

3.3 Menyiasati Tebang Angkut

Ada dua cara pengelolaan kelompok dalam TRI, yaitu sistem kolektif dan sistem kooperatif. Dalam sistem kolektif, petani menyerahkan lahannya untuk dikelola ketua kelompok, anggota hanya menerima hasilnya saja. Sedangkan menurut kebijakan Inpres No. 9/1975, dalam rangka menjadi "tuan" di atas tanah sendiri, seharusnya pengelolaan itu menggunakan sistem kooperatif, semua anggota kelompok ikut serta dalam proses pra hingga pasca-panen.

Keengganan mengelola sistem kooperatif ini merupakan sikap pembangkangan terselubung petani terhadap program TRI, sementara ketua kelompok tidak mau direpotkan soal itu, dan mereka mengurus sendiri mulai pengambilan kredit, pengolahan tanah, tanam, sampai dengan tebang angkut dan giling yang menggunakan buruh upahan. Urusan itu termasuk juga menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit ke BRI melalui KUD.

Proses penanaman TRI menggunakan sistem *Reynoso*. Dalam sistem ini lahan dibuat saluran-saluran sebagai *drainase*, dengan penentuan bibit yang sudah ditentukan PG. Penanaman dilakukan sekitar bulan Mei-Juli, tersedianya air pada bulan-bulan tersebut diperlukan pada masa-masa awal pertumbuhan tebu. Setelah itu dilakukan perawatan, yang meliputi penyirangan, pemupukan, penyiraman, *pembumbunan*, *klentek*, dan pemeliharaan saluran.

Seluruh proses itu dikerjakan sendiri oleh ketua kelompok, sementara anggota kelompok hanya menerima hasil bersih yang sudah dipotong pengembalian pinjaman dari BRI. Itulah alasan sesungguhnya mengapa anggota kelompok tidak mengetahui pasti hasil penjualan tebu, sistem bagi hasil dari PG, dan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan ke BRI, serta jumlah potongan yang dilakukan oleh KUD.

Demikian juga halnya tebang angkut, seharusnya petani berkepentingan mengetahui tingkat kemasakan tebu untuk menentukan kapan tebu harus ditebang, apakah jadwal tebang terhadap tebunya mengalami keterlambatan, atau tepat pada waktunya. Ternyata sebagian besar petani tidak mengetahui kapan tebunya mencapai kemasakan optimal untuk ditebang.

TABEL 3.16
PENGETAHUAN PETANI TERHADAP
KEMASAKAN OPTIMAL DAN JADWAL TEBANG
(N=130)

Pengetahuan	Frekuensi	%
Tahu	37	29
Tak Tahu	93	71
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

Tebu siap tebang setelah berumur 15-18 bulan, Sebelum penentuan jadwal tebang, KUD bersama PG melakukan analisis pendahuluan terhadap tebu, dengan cara mengambil sampel tebu per dua bulan untuk dianalisis di laboratorium PG. Analisis ini untuk mengetahui sejauh mana tebu memenuhi kriteria PG untuk ditebang. Proses ini bertujuan untuk melihat kemungkinan bertambahnya rendemen tebu sampel; mengetahui rendemen tebu yang tertinggi; mencari tebu yang tertua; dan mengetahui ketahanan daya tubuh (KDT) tebu sampel.

Jika tebu bersangkutan berkualitas rendah dan kecil, kemungkinan terjadi peningkatan rendemen atau tebu sudah cukup tua, tebu tersebut mendapat giliran tebang terlebih dahulu. Penjadwalan ini harus dilakukan sebab tebu harus segera digiling, sementara kapasitas PG sangat terbatas. Dalam kasus, di mana rendemen dan kualitas tebu yang sama, harus ada yang "mengalah" untuk ditebang awal atau akhir. Penentuan jadwal ini sering menimbulkan kesalahpahaman antara petani dan KUD. Petani merasa

tebunya belum cukup umur untuk ditebang, sehingga hasil rendemen rendah.

Mendekati waktu tebang (dua minggu sebelumnya) dari tiap lahan tebu diambil lagi sampel (kurang lebih 5 batang) untuk dianalisis kembali. Penentuan jadwal tebang ini dibahas dalam FMPW sampai ke FMFG untuk mengambil "jatah penebangan". Misalnya, jika kapasitas PG dalam menggiling sebesar 30.000 kuintal/hari, kapasitas ini dibagi untuk beberapa KUD yang berada di wilayah PG yang menjadi peminanya. Jika misalnya KUD mendapat jatah tebang 2.500 kuintal/hari, jatah ini akan dibagi lagi untuk TRI sebesar 2.000 kuintal/hari, TRIN dan TRIP 500 kuintal/hari. Penjatahan ini didasarkan pada kesepakatan di tingkat wilayah/kecamatan.

Jadwal tebang ditentukan pabrik berdasarkan tingkat rendemen yang dianalisis sebelumnya dengan mengambil sampel dari tiap-tiap lahan yang digiling dengan gilingan mini di pabrik. Dari sini diketahui tebu di lahan mana yang kadar rendemennya tinggi, dan siap ditebang. Waktu tebang harus dilakukan tepat pada saat kondisi tebu mencapai tingkat kemasakan optimal untuk memperoleh rendemen yang tinggi. Namun dalam kenyataan sering tebu TRI ditebang, dan masuk dalam jadwal pabrik untuk digiling pada masa yang tidak tepat, yaitu saat sebelum dan sesudah bulan 8, 9 dan 10 (masa optimum penggilingan di mana rendemen tinggi).

Pelaksanaan tebang dikoordinir oleh KUD. Permasalahan yang muncul biasanya berkaitan dengan upah tambahan, atau "suap" untuk buruh tebang. Upah tambahan untuk buruh tebang dijadikan alasan oleh petani untuk melimpahkan kesalahan kepada KUD. Masalah lain yang sering timbul dari *tebangan* adalah tenaga kerja borongan, di mana buruh tebang sembarangan menebang tebu. Tak jarang masih tertinggal tebu sepanjang 1 cm, padahal justru di sana kadar rendemen paling banyak, bagian di atas akar. Cara penebangan sedemikian ini akan mengurangi rendemen. Selain itu, buruh tebang masih meminta upah tambahan --yang seharusnya tak dibenarkan-- kepada petani/ketua kelompok, sebab mereka sudah mendapat

upah dari KUD. Besar upah tambahan ("suap") berkisar Rp 4.000,- per orang. Petani tidak mungkin mencari alternatif lain, misalnya mengusahakan penebangan sendiri karena pada akhirnya akan menghasilkan kerugian yang lebih parah (tepat dalam menebang, namun lambat dalam mengangkut).

Bahkan dalam setiap kegiatan angkut petani masih harus memberi *tips* kepada sopir truk sebesar Rp 5.000,- per truk. Dalam proses ini tak jarang muncul para tengkulak yang sering disebut dengan istilah "kerek", dari TRB yang bersedia membeli tebu-tebu petani TRI yang sudah dipanen.

KUD menetapkan tarif tebang angkut menurut kelasnya, makin jauh jarak antara lahan ke KUD lebih mahal. Adapun kelas-kelasnya seperti berikut :

1. Kelas A sampai jarak 5 km, Rp 160,- per 1 kuintal.
2. Kelas B jarak 6-10 km, Rp 170,- per 1 kuintal.
3. Kelas C jarak 11-15 km, Rp 180,- per 1 kuintal.
4. Kelas D jarak 16-20 km, Rp 200,- per 1 kuintal.

Mengenai jadwal tebang ini, seorang Mandor Disbun Kecamatan Pappan menjelaskan:

"Jadwal tebang ditentukan oleh FMPG (Forum Musyawarah Produksi Gula) dan hasil FMPG tersebut dimusyawarahkan lagi di kecamatan oleh FMPW (Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah), yang membicarakan tentang keseluruhan TRI. Dalam FMPW ini musyawarah diikuti oleh sinder PG, Disbun/Camat/Muspika, Dinas Pengairan, KUD, dan para ketua kelompok tani.

Penentuan jadwal tebang tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain, pertama, kapasitas giling pabrik gula per hari. Setelah di-ketahui berapa kapasitas giling tersebut, maka, kedua, ditentukan kebutuhan untuk per kecamatan yang meliputi penebangan kebun TRI, TRIN, dan lainnya. Penentuan jadwal tebang di kecamatan itu berdasarkan tingkat kemasakan tebu menurut analisis rendemen yang dibawa sinder dari FMPG. Namun ada pula tebu yang ternyata belum masak tapi sudah dijadwalkan tebang, karena tebu tersebut dalam kondisi roboh atau terbakar".

Penentuan jadwal tebang angkut dilakukan dengan melewati beberapa tahap dan melibatkan beberapa pihak, namun jadwal tebang angkut ini merupakan sesuatu yang rawan, sebagaimana dikemukakan seorang staf bagian tanaman PG Mrican Baru:

"Kapasitas giling di PG dalam satu musim giling adalah 3,5 juta kuintal tebu dalam waktu 170 hari. Mengingat kapasitas itu PG melalui FMPG membuat 'bola giling' atau jadwal tebang yang memprioritaskan penebangan TRIS lebih dulu, yaitu pada bulan Juni-Oktobre. Hasil dari FMPG itu diajukan ke Satpel, setelah itu FMPW melakukan tebang tanaman TRI berdasarkan urutan yang telah ditentukan, bukan berdasarkan waktu (usia tebu). Sebab kalau berdasarkan waktu, tebu pada saat itu sudah saatnya ditebang semua. Petani biasanya tidak memahami hal-hal demikian, karenanya diadakan penyuluhan dari pihak daerah, Disbun, KUD, dan PG agar petani memahami bila tebunya ditebang paling akhir".

Mengenai jadwal tebang angkut ini seorang Ketua Kelompok mengatakan :

"Jadwal tebang dimusyawarahkan oleh Disbun, KUD, PG, Muspika, dan Ketua Kelompok berdasarkan TRI yang dulu ditanam dan juga berdasarkan rendemen yang telah dilihat PG. Karena TRI ditanam pada waktu yang hampir bersamaan, tidak mungkin ditebang secara bersamaan. Untuk itu dalam musyawarah ditentukan jadwal tebang yang bersifat pemerataan, misalnya TRI terdapat di 20 desa, tiap desa terdapat 2, 3 atau 4 kebun, untuk itu pada periode tebang pertama masing-masing desa diambil satu kebun-satu kebun terutama yang dekat dengan jalan, hingga demikian tak ada yang ditebang lebih awal atau paling akhir. Kebun-kebun yang jauh dari jalan ditebang belakangan.

Namun akibatnya, pernah pada musim tebang 1990/1991, kebun TRIS di satu desa, yaitu kebun kelompok saya ditebang, tapi kurang 20 rit (20 truk) sudah ditinggal pindah ke desa lain. Saya tidak terima dan protes ke PG, dengan ancaman kalau tidak dilanjutkan ditebang, tebu akan saya tebang sendiri dan saya jual, akhirnya PG menebang juga".

Seorang Ketua Kelompok Tani lain mengemukakan ketentuan soal jadwal tebang ini:

"Penentuan jadwal tebang dilakukan melalui musyawarah di FMPG oleh Sinder PG dan Ketua Kelompok Tani. Musyawarah itu dilakukan tiap bulan sekali. Tentang tebu-tebu mana yang harus ditebang didasarkan pa-

da kemasakan tebu yang diperoleh PG dari contoh-contoh tebu yang diambil dari tiap-tiap kebun tiap 2 minggu sekali”.

Sesuai ketentuan, petani perlu mengetahui dan harus diberitahu kapan tebunya akan ditebang, namun di dalam praktek sebagian besar petani tidak diberitahu kapan tebu mereka akan ditebang. Itu terlihat pada Tabel 3.17 berikut ini.

TABEL 3.17
PEMBERITAHUAN KUD TENTANG
JADWAL TEBANG KEPADA PETANI
(N=130)

Pemberitahuan	Frekuensi	%
Diberitahu	15	11
Tak Diberitahu	115	89
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

KUD yang menentukan keputusan jadwal tebang menganggap tidak perlu memberitahu petani kapan tebunya ditebang, hanya 11 % yang menyatakan diberitahu, sementara 89 % lainnya menyatakan tidak pernah diberitahu kapan tebunya ditebang. Petani yang mengetahui tebunya cukup masak, tapi mereka tak punya hak menebang, sebab harus menunggu jadwal tebang, sementara mereka tak diberitahu kapan tebunya ditebang sesuai jadwal tebang.

Tindakan apa yang dilakukan petani bila tebu yang seharusnya sudah ditebang namun tidak ditebang adalah sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 3.18 berikut ini. Sejumlah 38 % menyatakan tindakan yang dilakukan menghadapi keterlambatan tebang adalah membiarkan saja meski mengalami terlambat tebang, sementara 15% lainnya menyatakan tidak tahu apa yang dilakukan. Ada yang menyuap mandor tebang, dan sebanyak 12% yang membakar tebunya.

TABEL 3.18
TINDAKAN PETANI MENGHADAPI TEBU
TERLAMBAT TEBANG
(N=130)

Tindakan	Frekuensi	%
Membiarkan Tebang Terlambat	50	38
Memberitahu Mandor Tebang Agar Segera Menebang	40	30
Menyuap Mandor Tebang	10	8
Membakar Tebu Tersebut	15	12
Tak Tahu Apa yang Dilakukan	15	12
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Tentang keterlambatan tebang ini, seorang petani menjelaskan:

"Pada tahun 1990/1991, petani banyak yang mengalami kerugian, bahkan ada yang sampai tidak menerima uang sisa bagi hasil, karena pada waktu itu TRIS mengalami terlambat tebang akibat pabrik gula lebih mengutamakan tebu-tebu dari luar. Menghadapi hal demikian ini para ketua kelompok tani panik dan sering melakukan rapat, tapi ya *nggak* ada hasilnya. Kerugian petani bertambah karena selain tebunya kering, juga banyak yang dirusak, bahkan dibakar".

Beberapa kali kasus pembakaran yang terjadi pada saat-saat musim giling. Pengusutan atas sebab-sebab maupun pelaku dari pembakaran tebu tersebut tak pernah diketahui, sebab baik aparat keamanan yang berwenang maupun Satpel Bimas, bahkan aparat desa serta para petani pada umumnya merasa tak dirugikan oleh kebakaran tebu tersebut.

Praktek-praktek pembakaran dilakukan selain sebagai bentuk protes terhadap rumitnya prosedur dan tidak konsistennya jadwal tebang angkut, juga dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses penebangan, sebagaimana dikemukakan seorang petani:

"Kebakaran tebu kebanyakan terjadi akibat permainan jadwal tebang yang dilakukan sejumlah oknum mandor tebang. Petani kerap kali dipungut biaya tambahan untuk memperoleh jadwal tebang lebih awal. Akibatnya, petani yang tidak mampu membayar, biasanya membakar tebu di atas lahannya, atau bahkan lahan orang lain untuk menarik perhatian petugas. Biasanya tebu yang habis terbakar langsung ditebang".

Sedangkan seorang Ketua Kelompok menjelaskan:

"Keterlambatan tebang itu terjadi karena pada awal tebang, PG lebih memprioritaskan TRB (tebu bebas), alasannya TRIS harus menunggu karena belum begitu masak. Tapi anehnya setelah petani tahu tebu sudah masak, ternyata juga tidak ditebang-tebang, dan baru ditebang sekitar Juli-Agustus, akhirnya ya terlambat. Ini kan namanya permainan".

Akibat dari keterlambatan tebang adalah turunnya rendemen. Tentang hal ini seorang ketua kelompok tani mengatakan:

"Untuk menanggulangi kekecewaan petani yang tebunya terlambat tebang, PG membuat 'kebijaksanaan' dengan cara pengaturan rendemen. Hal demikian ini terbukti seperti yang terjadi pada tebu milik saya, tebu saya yang ditebang lebih dulu dan dalam kondisi yang baik hanya memperoleh rendemen 8,5, sedangkan tebu yang di sebelah lahan saya yang ditebang lebih akhir, dan dalam kondisi kering serta terbakar, justru rendemennya lebih tinggi, 8,7".

Dalam proses tebang angkut ini petani juga tidak terlibat, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.19 berikut ini, sebanyak 36% petani menyatakan tidak mengetahui siapa yang terlibat dalam penebangan tebu kelompoknya, sementara yang mengetahui tenaga tebang dikelola KUD sebesar 11%. Ada yang menyatakan tenaga tebang adalah orang-orang yang mencari "momol" sebesar 5%.

Yang dimaksud "momol" adalah daun tebu yang dapat digunakan untuk makanan ternak sapi/kerbau. Biasanya pencari "momol" tidak wajib menebang, karena sudah ada tenaga penebang. Namun tak jarang mandor tebang memerintahkan agar setiap pencari "momol" menebang dulu, hasil tebang itu boleh diambil "momol"-nya. Para pencari "momol" menyebut keharusan ini sebagai "momol pahit".

TABEL 3.19
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
KEGIATAN TEBANG
(N=130)

Tenaga Tebang	Frekuensi	%
Buruh Tebang yang Ditunjuk Ketua Kelompok Tani	39	30
Buruh Tebang yang Dikelola PG	13	10
Buruh Tebang yang Dikelola KUD	14	11
Petani yang Terlibat Pengelola TRI	10	8
Pencari "Momol"	6	5
Tidak Tahu	48	36
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Kendala mencari tenaga tebang adalah rendahnya upah. Tenaga tebang umumnya tenaga "borongan", dan upah yang diterima berdasarkan jumlah kuintal tebu yang ditebang dan diangkut.

Mengenai tenaga tebang di Kecamatan Papar ini, Kabag TRI KUD Sri Gati menjelaskan:

"Tenaga tebang sifatnya kontrak. Adapun cara mencari tenaga tebang KUD menunjuk beberapa mandor untuk mencarinya. Setelah diperoleh mereka diberi nomor, tiap-tiap nomor terdiri dari 4 orang tenaga. Setelah itu mereka dikumpulkan di KUD untuk pengarahan sekaligus melakukakan kontrak. Tenaga yang dikontrak diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP, dengan tujuan bila mengalami musibah, KUD dapat mengurus pengobatannya. Imbalan yang diberikan ada dua macam. Pertama, tiap nomor mendapatkan gula dan beras masing-masing 2 kg untuk perolehan tebu 41 kuintal ke atas. Kemudian perolehan tebu 30-40 kuintal mendapatkan gula dan beras masing-masing 1,5 kg. Kedua, untuk uang kontrak mereka, tiap nomor mendapat uang Rp 30.000,-".

Di lain pihak, seorang ketua kelompok menjelaskan:

"Tenaga tebang itu ada yang berasal dari luar desa, namun ada juga yang dari desa setempat. Pengupahan terhadap tenaga tebang sifatnya borongan, untuk per kuintal tebu upahnya Rp 135,- dan untuk tebu *ambrukan* atau *arangan* ada biaya tambahan".

Dalam proses penebangan, alat dan cara yang digunakan akan mempengaruhi timbangan tebu. Kalau semula penebangan menggunakan *gancu*, kini cukup menggunakan sabit. Penebangan dengan cara memotong tebu demikian tak mengikutkan akar (*bonggol*"buntut tikus"), yang berada di tanah sekitar 20-30 cm. yang justru paling banyak mengandung kadar gula, selain akan mengurangi bobot tebu.

Menanggapi penggunaan sabit ini seorang petani menyatakan:

"Apa pun alasannya, menebang tebu dengan sabit tidak dibenarkan. Hal itu terjadi karena *pokal gawene* tukang tebang yang bekerja secara borongan dan mengejar upah. Sejak dulu tatanan menebang tebu yang benar menggunakan *gancu*. Tebu ditebang hingga *bonggol* atau pangkalnya yang lazim disebut 'buntut tikus'. Namun kenyataan kini tebu ditebang dengan sabit. Menurut aturannya alat penebang itu *gancu*, tapi *nggak* tahu penebang itu pakai sabit. Saya sebenarnya protes karena pada waktu menebang tebu KSO (tebu Kerja Sama Operasional) miliknya PG, penebang itu menggunakan *gancu*, tapi mengapa menebang TRIS memakai sabit".

Untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan petani dalam proses penebangan ini dapat dilihat dalam Tabel 3.20, di mana mayoritas petani tak mengetahui besar biaya tebang angkut selama lima musim tanam, termasuk yang menyatakan mengeluarkan biaya selama lima musim tanam berkisar Rp 20.000-Rp 30.000,-. Biaya yang dimaksudkan bukan pengeluaran pribadi, sebab semua biaya pengelolaan mulai dari pembukaan lahan sampai tebang angkut berasal dari paket kredit yang diberikan KUD.

Berdasarkan hasil rapat "Pusat Pelayanan KUD" yang dihadiri oleh PG, KUD, Dinas Perkebunan Kecamatan, dan Satpel Bimas Kabupaten, paket tebang angkut untuk 1992/1993, meliputi biaya tebang Rp 310,-/kw tebu; biaya angkutan Rp 320,-/kw tebu. Secara keseluruhan paket tebang

angkut Rp 639,-/kw tebu.

TABEL 3.20
BIAYA TEBANG TRI SELAMA LIMA TAHUN MUSIM TANAM
(N=130)

Biaya/Kotak (0,143 Ha)	Tahun Musim Tanam				
	88/89	89/90	90/91	91/92	92/93
Rp 20.000-Rp 30.000,-	30 23%	25 19%	41 31%	31 23%	31 23%
Tidak Tahu	100 87%	105 97%	89 69%	99 77%	99 77%
Jumlah	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%

Sumber: Data Primer.

Tentang biaya ini dijelaskan oleh staf Bagian Tanaman PG Mrican Baru sebagai berikut:

"Pengeluaran biaya dikeluarkan melalui proses *cadongan*, yaitu menggunakan buku *cadongan*. Setiap seminggu sekali ketua kelompok mengajukan permintaan biaya garap dengan menggunakan buku *cadongan* ke KUD. Namun sebelum itu buku *cadongan* harus di-acc oleh Sinder Kebun Wilayah (SKW), yang tentu saja sebelum meng-acc, SKW harus melakukan pengecekan kebun untuk melihat biaya dikeluarkan untuk apa, misalnya untuk membiayai tenaga buruh *cemplong*, dan sebagainya.

Setelah dicek permintaan biaya tersebut sesuai yang dibutuhkan, baru di-acc. Setelah di-acc SKW barulah dimintakan acc ke Sinder Kebun Kepala (SKK). Kemudian setelah mendapat acc SKW dan SKK, buku *cadongan* dibawa ke KUD, dan setelah di-acc Manajer KUD, baru diuangkan ke BRI.

Dari rekap buku *cadongan* itu BRI mengeluarkan uang disertai kuitansi yang harus diteken oleh kepala desa. Dengan kuitansi yang telah diteken oleh kepala desa itulah akhirnya ketua kelompok tani mengambil uang ke KUD".

Setelah tebang adalah proses mengangkut tebu ke penimbangan PG. Biasanya alat pengangkut tebu menggunakan lori dan truk. Penggunaan

alat angkut ditentukan berdasarkan jauh-dekatnya kebun dengan jalan. Kebun yang dekat dengan jalan menggunakan lori, sementara kebun yang jauh dengan jalan menggunakan truk.

TABEL 3.21
ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN, PIHAK YANG MENENTUKAN, DAN PROSES PENGADAAN
(N=130)

Pihak Penentu dan Proses Pengadaan	Alat Angkut yang Digunakan			
	Lori	Truk SPA	Truk Non-SPA	Lainnya
□ Pihak Penentu				
KUD	49 (37%)	19 (14%)	0	0
Pabrik Gula	55 (42%)	23 (17%)	0	0
Petani	0	0	0	0
Ketua Kelompok Tani	0	0	0	0
Kontraktor	10 (8%)	0	0	0
Tak Tahu	16 (13%)	67 (69%)	0	0
Tak Menggunakan Alat Tersebut	0	21 (11%)	130 (100%)	130 (100%)
Jumlah	130 (100%)	130 (100%)	130 (100%)	130 (100%)
□ Proses Pengadaan				
Dikelola KUD	14 (10%)	27 (20%)	0	0
Dikelola PG	86 (66%)	0	0	0
Dikelola Satpel Bimas	0	17 (13%)	0	0
Dikelola Petani	0	0	0	0
Dikelola Kontraktor	17 (13%)	14 (10%)	0	0
Tak Mengetahui	13 (11%)	61 (46%)	0	0
Tak Menggunakan Alat Tersebut	0	11 (11%)	130 (100%)	130 (100%)
Jumlah	130 (100%)	130 (100%)	130 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Tabel 3.21 menguraikan alat angkut apa yang digunakan, serta siapa yang menentukan jenis alat angkut, dan bagaimana proses pengadaannya, di mana sebanyak 69% menyatakan alat angkut yang dipakai adalah truk, namun tak diketahui siapa yang menentukan penggunaan alat angkut tersebut. Sedangkan yang menggunakan lori yang ditentukan KUD sebesar 37%. Penggunaan lori yang ditentukan PG sebanyak 42%. Yang memakai truk SPA (truk yang mempunyai Surat Perintah Angkut) dan proses pengadaannya ditentukan PG, sebanyak 17%.

Ada dua pihak yang berhak menentukan alat angkut apa yang digunakan untuk kebun mana, yakni KUD dan PG. Sedangkan proses pengadaan alat angkut tersebut ada empat pihak, yaitu KUD, PG, Satpel Bimas, dan kontraktor. Agar tebu cepat tiba di penimbangan, pabrik harus mengeluarkan ongkos. Berapa besar ongkos untuk mengangkut tebu dari kebun sampai ke PG, diuraikan dalam tabel berikut, biaya angkut selama 5 musim tebang, yang menunjukkan dalam tiap musim tebang sebagian besar petani tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan.

TABEL 3.22
BIAYA ANGKUT TEBU SELAMA SELAMA LIMA TAHUN MUSIM TEBANG
(N=130)

Biaya Angkut	Tahun Musim Tanam				
	88/89	89/90	90/91	91/92	92/93
Tahu	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Tidak Tahu	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%
Jumlah	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%	130 100%

Sumber: Data Primer.

Untuk biaya tenaga, seperti *cemplong*, pengrabuk, *penglente*, penanam, melalui ketua kelompok tani yang dibayarkan langsung di kebun, se-

mentara untuk tenaga tebang angkut ditangani oleh KUD dan PG, dan tempat pembayarannya harus di KUD dan di PG.

Dalam perencanaan dana kredit untuk biaya garapan, pada umumnya diatasi dengan menyusun skala prioritas untuk kebutuhan yang paling penting, dengan membuat perencanaan biaya di buku cadangan, sekalipun hal itu tidak disetujui sinder. Untuk menghindari risiko kerugian dalam tebang angkut, beberapa kelompok tani menggunakan TSAS (tebang sendiri angkut sendiri). Sekalipun keterlambatan tebang angkut ini disebabkan jadwal tebang angkut dilanggar sendiri oleh pabrik --yang lebih mendahulukan tebu rakyat bebas (TRB) daripada TRI-- bagi kebanyakan petani, KUD sering mempersulit daripada mempermudah petani dalam hal tebang angkut, sebab tak jarang KUD justru menjadi makelar antara petani dan penyedia angkutan.

Keterangan ini disampaikan Pak Karmidi, petani berlahan 0,2 hektare di desa Kedung Malang yang terkena *glebagan* TRIS I 1992/1993. Dalam *glebagan* ini, dia termasuk anggota kelompok yang diketuai Tikno. Karmidi semula ikut dalam proses persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, namun perincian tentang potongan untuk KUD, tebang angkut, utang-utang COL, bibit, pupuk, maupun pestisida tidak diterimanya.

Karmidi mempertanyakannya kepada ketua kelompok, namun malah disuruh mengurus sendiri ke KUD. Menurut Karmidi, sering terjadi pemotongan bagi hasil yang diperoleh petani akibat kerumitan dalam tebang angkut dan jadwal giling ini, yang disebut sebagai "tambahan biaya angkut". Pada umumnya biaya angkut satu *rit* truk Rp 20.000,-, namun bisa menjadi Rp 25.000,- yang ditulis sebagai biaya tambahan tebang angkut.

Hal ini terjadi karena tebu Karmidi ditolak di PG Lestari akibat kapasitas giling pabrik sudah melewati batas. Agar rendemen tidak turun, pilihannya digiling ke PG lain, yaitu PG Ngadirejo yang jaraknya lebih jauh dibanding PG Lestari. Ongkos angkut bertambah, dan dibebankan kepada petani.

Padahal menurut ketentuan, bila pabrik tak mampu menampung, maka pihak pabrik akan memindahkannya ke pabrik lain, dan biaya ditanggung oleh pabrik yang mengirim. Karmidi beranggapan kasus ini sebagai permainan antara KUD dan PG. KUD mengambil keuntungan pada alat angkut, atau mungkin PG menerima tebu bebas, sehingga sudah memenuhi target yang ada. Protes Karmidi terhadap kasus ini ke pihak PG tak ditanggapi, sebab menurut pihak pabrik, hal itu harus diurus di KUD.

3.4 Menyiasati Jadwal Giling

Sebelum digiling, tebu harus melalui proses penimbangan, yang didasarkan ketentuan dalam SK Gubernur, meliputi apa yang harus dilakukan PG, KUD, dan petani, yakni:

1. Petani/kelompok tani dan KUD, wajib menyaksikan penimbangan tebu yang diperoleh dari kebun tebu petani/kelompoknya.
2. PG wajib memberitahukan kepada petani/kelompok tani peserta TRI dan KUD tentang jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka segera setelah ditimbang oleh PG.
3. Tebu TRI harus mendapat prioritas penebangan, pengangkutan dan penggilingan, di antara tebu TRI harus diutamakan petani TRI-K.

Sejauh mana keputusan tersebut sesuai dengan kenyataannya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.23
KETERLIBATAN PETANI DALAM
PROSES PENIMBANGAN TEBU
(N=130)

Keterlibatan	Frekuensi	%
Terlibat	13	10
Tak Terlibat	117	90
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

Sebanyak 90% petani tak pernah terlibat dalam proses penimbangan, sedangkan mereka yang ikut terlibat hanya 10%. Padahal menurut ketentuan, petani wajib menyaksikan penimbangan untuk mengetahui apakah tebu tergolong produktif atau tidak. Setidaknya, ketua kelompok dan KUD terlibat dalam proses penimbangan ini. Bagaimana peran KUD dan ketua kelompok dalam proses penimbangan ini, seorang ketua kelompok memaparkan:

"Dalam perjalanan tebu dari kebun sampai penimbangan ketua kelompok mengikutinya, untuk menjaga kalau di tengah jalan tebu menemui hal-hal yang tak diinginkan. Sesampainya di penimbangan, ketua kelompok harus turut menyaksikan timbangan, tapi umumnya hanya sebagian, sebab harus menunggu lama, sedang yang sebagian lagi hasilnya hanya ditanyakan kepada petugas timbang. Penyaksian penimbangan oleh Sinder KUD tidak dilakukan secara rutin, karena tidak mungkin menunggu semua TRI yang jumlahnya cukup banyak".

Karena tidak diawasi, tak jarang terjadi penundaan, atau bahkan penyisihan tebu TRI dalam proses penimbangan, dengan mendahulukan tebu TRB, atau juga manipulasi angka timbangan. Bagaimana sikap petani menghadapi penundaan penimbangan ini, ditunjukkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.24
SIKAP PETANI BILA TERJADI PENUNDAAN
PENIMBANGAN TRI MILIKNYA
(N=130)

Sikap	Frekuensi	%
Menunggu Sampai Ditimbang dengan Risiko Rendemen Turun	24	18
Menyuap Petugas agar Segera Menimbang	25	19
Membawa Tebu ke PG Lain Wilayah	12	9
Tidak Tahu Ada Penundaan	69	54
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Sebanyak 54% menyatakan tidak tahu bagaimana harus bersikap bila tebu mengalami penundaan penimbangan, sementara yang menyatakan menunggu sampai ditimbang meski dengan risiko rendemen turun sebesar 18%. Yang menyatakan menyuap petugas bila terjadi penundaan penimbangan sebanyak 19%, sedangkan 9% lainnya menyatakan membawanya ke PG wilayah lain.

Di dalam tabel berikut ini diuraikan berapa banyak petani yang tidak tahu terjadi penundaan penimbangan tebu miliknya, kemudian diberitahu mengenai hasil timbangan yang dilakukan.

TABEL 3.25
PEMBERITAHUAN HASIL PENIMBANGAN
KEPADA PETANI YANG TAK TAHU TERJADI
PENUNDAAN PENIMBANGAN TEBU MILIKNYA
(N=69)

Pemberitahuan	Frekuensi	%
Diberitahu	5	7
Tak Diberitahu	64	93
Jumlah	69	100

Sumber: Data Primer

Sebanyak 93% tak pernah diberitahu hasil penimbangan TRI miliknya, sedangkan yang diberitahu hanya sebesar 7%. Sesuai ketentuan, TRI yang mendapat prioritas dalam penebangan, pengangkutan, dan penimbangan adalah TRI-K, yaitu TRI yang perolehan modalnya dari paket kredit.

Dengan demikian paket kredit merupakan syarat utama bila petani menginginkan pelayanan dalam penebangan, pengangkutan, maupun penimbangan. Adapun mereka yang mendapat perolehan kredit dalam penelitian ini adalah:

TABEL 3.26
ASAL PEROLEHAN MODAL UNTUK
PROSES PRODUKSI TRI
(N=130)

Asal Modal	Frekuensi	%
Paket Kredit Lengkap	88	67
Sebagian dari Paket Kredit	37	29
Tak Tahu Modal dari Mana	5	4
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Tabel di atas menunjukkan, seharusnya petani TRI di Kecamatan Pa-par memenuhi syarat mendapat prioritas dalam berbagai proses yang menyangkut TRI, di mana 67% petani memperoleh modal dari "Paket Kredit Lengkap", tapi ternyata itu tak cukup untuk bisa mendapatkan prioritas dalam proses tebang angkut dan giling.

Sesuai ketentuan, bila dalam proses penggilingan tebu di PG mengalami penundaan, atau berhenti antara 1-6 jam, akibat kerusakan mesin, akan dilakukan penghentian penebangan. Bila keterlambatan giling sampai 2 hari, tebu diperbolehkan dikirim ke PG alternatif, dengan keharusan mendapatkan rekomendasi dari PG setempat dan PG alternatif. Risiko pembengkakan biaya ditanggung PG bersangkutan.

Untuk menghindari risiko turunnya rendemen, dilakukan tes laboratorium silang rendemen dengan patokan tertinggi. Misalnya, hasil rendemen di PG Mrican mencapai 9,0 namun karena harus dikirim ke PG lain, akibatnya hasil tes rendemen turun misalnya, 7,0, maka PG Mrican harus mengganti kerugian tersebut kepada petani.

Demikian juga halnya bila pabrik tak mampu menampung tebu yang akan digiling --karena telah melewati kapasitas-- maka tebu tersebut diki-

rim ke pabrik lain dengan biaya angkut ditanggung pabrik pengirim sesuai yang telah disepakati.

Dalam penentuan jadwal giling ini, selalu terjadi persaingan tebu TRI dengan non-TRI (TRB-TRP) akibat adanya prioritas giling untuk tebu bebas non-TRI. Apabila hal ini terjadi, protes petani ditujukan kepada KUD, sebab petani mensinyalir pihak KUD terlibat dalam hal ini.

Menurut ketentuan, penjadwalan giling adalah pada awal-awal masa giling (bulan Mei), tebu TRIN (tebu non-kredit) dan TRIP (tebu kredit pabrik) digiling sebagian, kemudian disusul tebu TRI yang dianggap sudah mencapai masa optimal rendemen tinggi. Penggilingan tebu TRI ini dijadwalkan selesai pada saat akhir masa giling, untuk memberikan kesempatan kepada tebu N dan P masuk jadwal giling. Kebijakan ini diambil karena kredit untuk TRIP lebih kecil daripada kredit TRI. Bahkan TRIN tak memperoleh kredit dari bank.

Namun akibatnya, jadwal tebang TRI terganggu, sementara kapasitas giling pabrik harus dipenuhi, peluang itu dimanfaatkan untuk menggiling tebu non-TRI (tebu N maupun P) untuk memenuhi kapasitas giling pabrik. Peluang pada masa optimal giling seperti inilah yang selalu dimanfaatkan, bekerja sama dengan mandor giling yang mengatur jadwal giling.

Masa giling pabrik yang terjadwal sedemikian itu bukan tanpa dasar. Penjelasannya bisa dirunut ke dalam kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut konsumsi gula nasional. Menurut perkiraan, tingkat konsumsi gula pada akhir Repelita IV dan V mencapai masing-masing 2,51 juta ton dan 3,17 juta ton gula pasir, dengan konsumsi per kapita/tahun sebesar 15,07 kg dan 18,92 kg.

Perkiraan konsumsi pemanis seluruhnya (gula pasir dan bahan pemanis lainnya) akan mencapai 3,15 juta ton (akhir Repelita IV) dan 3,91 juta ton (akhir Repelita V) dengan konsumsi per kapita/tahun sebesar 20,33 kg dan 24,68 kg. Untuk mencapai produksi yang seimbang dengan konsumsi tersebut, perlu dilakukan langkah pokok, yaitu optimasi penggunaan la-

han, serta yang erat kaitannya adalah optimalisasi masa giling pabrik gula.

Analisis statistik total produksi gula dari tahun 1974-1983 pada lahan sawah dan lahan kering menunjukkan, batasan luas optimal tanaman tebu di Jawa untuk lahan sawah berkisar 153.000-184.000 hektare, dan lahan kering berkisar 40.000-59.000 hektare. Optimalisasi lahan di Jawa ini juga dikaitkan dengan masa giling dan kemampuan pabrik gula.

Masa giling yang terlalu panjang akan membawa dampak negatif, baik pada segi produksi/produktivitas maupun sosial ekonomi. Namun sebaliknya, masa giling yang terlalu pendek akan menyulitkan pabrik gula, karena jumlah produksi yang tidak mencapai BEP. Untuk pabrik-pabrik gula di Jawa, masa giling dapat berkisar 150-180 hari sesuai kondisi dan musim yang tepat. Untuk luar Jawa, dengan komposisi faktor-faktor produksi yang berbeda, masa giling dapat mencapai 200 hari atau lebih (tidak menggunakan sawah, iklim yang berbeda, tanah sendiri/HGU, dan sebagainya).

Optimalisasi tersebut seharusnya didukung pula dengan optimalisasi manajemen, baik secara teknis (penggunaan varietas yang unggul dan cocok, pupuk optimal, waktu penyediaan lahan tepat, waktu dan mutu penggarapan tepat, pemberantasan hama dan penyakit yang baik, dan sebagainya), maupun secara non-teknis (organisasi, kelembagaan, dan pelayanan), termasuk proses tebang angkut. Diperkirakan, pemakaian lahan seluas batasan optimal mendekati 153.000 hektare (untuk sawah), dan 40.000 hektare (untuk lahan kering) akan lebih menguntungkan, asalkan peluang untuk memperoleh lahan untuk penanaman tebu yang berpotensi lebih baik dapat diperbesar.

Bila dikhawatirkan dalam pelaksanaan produksi tidak dapat diharapkan keadaan ideal seperti yang digambarkan, maka optimalisasi lahan dapat digeser ke areal 184.000 hektare (untuk sawah) dan 59.000 hektare (untuk tegalan). Dalam melakukan pemilihan lahan, seyogyanya dipusatkan perhatian pada lahan-lahan yang berpotensi lebih tinggi (sawah) daripada yang berpotensi lebih rendah, karena risiko produksi pada yang perta-

ma lebih kecil. Selain itu sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk penanaman komoditas lain, seperti jagung, singkong, dan tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pemanis lainnya (BP3G Pasuruan, 1984).

Jadwal tebang sudah diatur sedemikian rupa disesuaikan kapasitas PG, dan waktu yang tersedia untuk menggiling tebu (150 hari). Menurut ketentuan S.K. Mentan/1992, masa giling TRIS harus 150 hari dengan batas maksimal 180 hari, yang hanya dapat diubah dengan pertimbangan khusus. Sistem penggilingan tebu selama 150 hari itu membentuk sistem yang mengharuskan tebu digiling baik pada masa optimum maupun masa tidak optimum. Jika misalnya pada suatu panen dihasilkan tebu yang sebenarnya memiliki rendemen/kualitas relatif sama, bisa jadi rendemen akhir akan berbeda, karena digiling pada waktu berbeda. Jadi harus ada yang dikenai giliran awal dan akhir sebagai konsekuensinya. Petani yang mengajukan protes biasanya petani yang merasa menanam tebu lebih awal, dan mempunyai kadar rendemen yang cukup tinggi, tapi terkena jadwal giliran tebang terakhir.

Sewaktu musim giling tiba, sesuai ketentuan, PG hanya membuka kesempatan giling untuk TRI. Tapi karena TRI terbagi menjadi tebu K (kredit), N (non-kredit), dan P (subsidi PG), biasanya pada waktu sebelum giling masing-masing jenis tebu sudah didaftar dalam jadwal giling. Dalam hal ini, tebu N biasanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Perhitungan rendemen yang berbeda antar PG saja akan membuat pemilik berpikir menghitung kembali keuntungan yang akan diperolehnya jika menggiling pada PG yang berbeda. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan petani tebu K, yang tak mempunyai kebebasan memilih tempat untuk menggiling tebunya.

Persentase dalam penjatahan giling adalah 30 untuk N dan P, dan 70 untuk tebu K. Jika kapasitas giling PG sebesar 30.000 kw/hari, maka jatah untuk tebu N dan P sebesar 9.000 kw/hari, dan tebu K sebesar 21.000 kw/hari. Jadi dalam tiap penggilingan selalu terdapat tebu N, K, dan P. Dengan kata lain, dalam jadwal giling ini tidak terkumpul dalam satu waktu

untuk satu jenis tebu.

Pemisahan penggilingan antara tebu N dan P dengan tebu K, sukar dilakukan, sebab tebu N tidak stabil, tergantung dari pemiliknya yang menyiasati jadwal, dan juga dalam memilih PG yang memiliki kapasitas giling tinggi, serta perhitungan rendemen yang tinggi. Tebu semacam ini ini sulit diatur dan sering mengacaukan jadwal giling TRI.

3.5 Menyiasati Rendemen dan Bagi Hasil

Hasil yang diterima petani tergantung tingkat rendemen. Perhitungan rendemen merupakan proses akhir --yang menurut ketentuan-- petani berhak ikut dalam proses perhitungannya. Berikut ini dalam Tabel 3.27, dikemukakan keterlibatan petani dalam proses perhitungan rendemen, di mana semua petani yang menjadi responden penelitian ini tak terlibat dalam perhitungan rendemen.

TABEL 3.27
KETERLIBATAN PETANI DALAM
PROSES PERHITUNGAN RENDEMEN
(N=130)

Keterlibatan	Frekuensi	%
Terlibat	0	0
Tak Terlibat	130	100
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

SK Gubernur menetapkan, penentuan rendemen yang dilakukan PG harus disaksikan oleh tim rendemen yang dibentuk Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satpel Bimas atau usul FM PG. Demikian juga dengan KUD, harus turut dalam perhitungan rendemen tersebut.

Sejauh mana peranan KUD dalam penentuan rendemen itu. Kabag TRI KUD Sri Gati, menjelaskan:

"Tentang bagaimana KUD sama sekali tidak tahu mengenai perhitungan rendemen, karena dalam penyaksian perhitungan rendemen, pihak KUD hanya tahu di atas meja".

Dengan nada sama seorang Ketua Kelompok mengatakan:

"Saya tak pernah turut campur dalam penentuan rendemen. Tapi saya tahu berapa jumlah gula yang diberikan ke petani berdasarkan angka rendemen itu. Patokan yang digunakan untuk menentukan jumlah gula itu adalah angka rendemen 5% mendapatkan 3 kg gula, dan kenaikan rendemen itu akan diikuti pula dengan penambahan sebesar 6 ons. Angka rendemen 7% dapat gula 3 kg ditambah 2 ons, angka rendemen 8% dapat gula 3 kg ditambah 18 ons, dan seterusnya".

Tabel berikut menunjukkan pemberitahuan hasil perhitungan rendemen kepada petani yang tak terlibat dalam proses perhitungan, 32% petani yang tidak terlibat dalam proses diberitahu hasilnya, sedangkan yang tidak diberitahu hasilnya sebanyak 68%.

TABEL 3.28
PEMBERITAHUAN HASIL RENDEMEN
KEPADA YANG TAK TERLIBAT
DALAM PROSES PERHITUNGAN
(N=130)

Pemberitahuan	Frekuensi	%
Diberitahu	42	32
Tak Diberitahu	88	68
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer

Pabrik gula sangat membebani petani walau sebenarnya menurut ketentuan bagi hasil, petani mendapat 70%, dan pabrik gula mendapat 30%, jika rendemennya 10. Namun kenyataannya, petani dibebani biaya-biaya cukup besar, bahkan hasil ampas pun tak boleh diambil petani, tapi dijual PG ke pabrik kertas.

Hasil yang diterima petani dalam TRI didasarkan pada bagi hasil. Namun dalam hal perhitungan bagi hasil ini tak semua petani memahaminya sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut.

TABEL 3.29
PENGETAHUAN BESARNYA BAGIAN YANG DITERIMA
PG DAN PETANI DALAM BAGI HASIL TRI
(N=130)

Pengetahuan	Frekuensi	%
40% PG - 60% Petani	61	46
38% PG - 62% Petani	46	35
Tak Tahu	23	19
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Ada perbedaan di antara petani mengenai besarnya bagian yang diterima dalam bagi hasil TRI. Sebanyak 46% menyatakan besarnya bagian bagi hasil TRI 40% PG dan 60% petani; 35% lainnya menyatakan bagi hasil tersebut 38% PG dan 62% petani; sedangkan sisanya, 19% menyatakan tidak mengetahui.

Menurut SK Gubernur, selain mendapatkan uang sisa hasil usaha, kepada petani juga diterimakan 2% kristal gula dalam bentuk natura, dan 1,86 kg tetes dalam bentuk uang. Untuk mengetahui apakah bagian-bagian lain di luar sisa hasil usaha tersebut benar-benar diterima petani atau tidak, dikemukakan dalam Tabel 3.30.

Bagian petani sejumlah 2% kristal gula berbentuk natura ternyata tidak diterima. Beberapa petani menyebut bagian ini dengan istilah "gulo incipan" (mencicipi gula). Sementara itu hak petani atas 1,86 kg tetes yang diberikan dalam bentuk uang hanya 48% yang pernah menerimanya, 52% sisanya menyatakan tidak pernah menerimanya. Pada saat penelitian ini,

harga tetes tersebut per kilo Rp 70,- dengan demikian tetes bagian petani adalah $1,86 \times \text{Rp } 70,- = \text{Rp } 130,2,-$ per kg tebu (Penetapan harga tetes ini juga tertuang dalam SK Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas tentang Penetapan Harga Tetes Bagian Petani Tebu Rakyat yang Diolah Di Pabrik Gula).

TABEL 3.30
PEROLEHAN BAGIAN HAK PETANI TRI DI LUAR BAGIAN SISA HASIL USAHA
(N=130)

Perolehan	Bagian Hak Petani TRI	
	2% Kristal Gula (dalam Bentuk Natura)	1,86 kg Tetes (dalam Bentuk Uang)
Memperoleh	130 (100%)	63 (48%)
Tidak Memperoleh	0 (0%)	67 (52%)
Jumlah	130 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Selain pungutan pada proses tebang angkut dan giling, TRI juga melakukan berbagai pungutan lainnya. Selain dibebani kredit uang tunggu, juga sisa bagi hasil usaha dikenai bermacam pungutan, tidak saja pungutan dari desa, tapi juga pungutan dari KUD, PG, BRI, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan program TRI. Juga berbagai macam pungutan, mulai pungutan pada waktu mengurus surat di kantor kepala desa maupun di kecamatan, sampai pungutan untuk penyisihan KUD sebesar Rp 1.000,-/kuintal gula dari tanaman TRI.

Tentang pungutan ini seorang Ketua Kelompok Tani mengungkapkan:

"Saham petani TRI yang berasal dari pungutan gula, per kg Rp 20,- di KUD Maduretno selama tiga tahun ini, kira-kira sebesar Rp 87 juta. Pada tahun 1987 dan 1988, petani mendapat sertifikat, tapi pada tahun 1989 dan 1990 tidak. Tapi apa sih artinya sebuah sertifikat? Tampaknya aneh, petani punya saham banyak namun '*oleh ndaku gak oleh njupuk*'. Ini kan saham yang membingungkan?"

Kenyataan di mana tingkat subsistensi petani yang rendah, sementara harus mengalami banyaknya pungutan, mengakibatkan kecenderungan menuju sebuah benturan. Benturan itu terjadi karena faktor-faktor fluktuasi harga panen, tingginya bunga kredit, yang mempertentangkan banyaknya pungutan dengan tingkat subsistensi keluarga petani.

Hasil usaha penjualan gula diserahkan kepada masing-masing anggota oleh ketua kelompok di kantor Balai desa disaksikan oleh aparat desa. Sebuah daftar diserahkan, yang menjelaskan berapa luas tanah petani, berapa hasil tebu, berapa hasil gula, berapa jumlah potongan, dan berapa hasil bersih yang diterima. Pabrik gula menyerahkan Daftar Nominatif Perhitungan Gula ke KUD, kemudian setelah dihitung biaya kredit, KUD menyerahkan uang petani ke desa, disertai Daftar Nominatif Pembayaran Sisa Hasil TRI, kemudian ketua kelompok membaginya.

Berikut contoh yang diperoleh Sutarno, petani TRI yang berasal dari dukuh Bajulan, Ngampel, yang memiliki 0,13 hektare sawah, pada musim tanam 1992/1993 terkena *glebagan* bersama 9 orang lainnya, masuk dalam satu kelompok hamparan TRI. Penghasilan Sutarno adalah dari tebu per hektare dalam satu kali panen adalah ongkos tunggu Rp 200.000,-; Hasil gula (159,75 kg) Rp 95.560,-; Dan hasil tebu + tetes Rp 2.936.562,- Jumlah keseluruhan, Rp 3.232.122,-

Hasil tersebut dibagikan kepada 10 anggota kelompok atas dasar luas tanah yang dimilikinya, dipotong 2% untuk ketua kelompok (Rp3.232.122,- dikurangi Rp 64.642,- menjadi Rp 3.167.480,-). Sutarno sendiri menerima sebesar Rp 411.772,- untuk masa 16 bulan. Sebelum pengolahan tanah, dia menerima Rp 20.000,-. Sebulan kemudian menerima uang garapan Rp 22.500,- Enam bulan kemudian menerima sebesar Rp 8.000,- (sebagai biaya garapan II). Biaya garapan III diterima sebulan kemudian sebesar Rp 8.000,- Bulan ke-9 menerima sebesar Rp 7.500,- Bulan ke-10 menerima Bantuan Biaya Hidup (BBH) tahap II sebesar Rp 10.000,- Dan untuk biaya garapan ke-2 mendekati masa panen sebesar Rp 8.500,- Sisa uang sebesar Rp

327.272,- diterima sehabis panen.

Berkenaan dengan gula yang menjadi bagian petani dijelaskan dalam SK Gubernur, untuk gula tersebut dibebaskan dari pungutan pemerintah berupa cukai gula, PPN dan sewa gudang. Namun bagaimana realisasi SK Gubernur tersebut dalam praktek dikemukakan pada tabel berikut.

TABEL 3.31
PENGENAAN PUNGUTAN PADA GULA
BAGIAN PETANI TRI
(N=130)

Pengenaan	Frekuensi	%
Dikenai Pungutan	10	9
Tak Dikenai Pungutan	49	37
Tak Tahu	71	54
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang harga dan distribusinya diawasi secara langsung oleh pemerintah, agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat. Meski demikian, pemerintah masih memandang gula sebagai komoditas yang memberikan penghasilan melalui pajak dan cukai, sehingga akhirnya konsumen terpaksa membayar harga gula lebih tinggi.

Sementara itu, nilai tebu yang diterima oleh petani hanya merupakan 37,4% dari harga eceran (1981). Sebagian besar dari harga eceran tersebut merupakan pajak, dana manajemen dan margin distribusi. Yang tampak menyolok, margin distribusi yang mencapai 11,5%. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan penghasilan petani yang 37,4% dari harga eceran.

Dapat disimpulkan, secara relatif penghasilan dari tebu adalah rendah. Inilah salah satu penjelasan mengapa banyak petani masih tertarik

menanam padi, yang memungkinkan cepatnya hasil diperoleh dengan risiko lebih kecil, dan secara langsung mengetahui besarnya hasil yang akan diperoleh.

Hingga sekarang kebijaksanaan harga gula hanya menyangkut gula tebu. Kebijakan harga untuk gula jenis lain, seperti gula kelapa, gula mangkok, gula aren, ataupun bahan pemanis lain, seperti siklamat dan sakarin, tidak jelas.

3.6 Siapa yang Diuntungkan?

Lalu siapa sesungguhnya yang lebih diuntungkan dalam program ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 3.32
PIHAK-PIHAK YANG LEBIH DIUNTUNGAN DALAM PROGRAM TRI
(N=130)

Pihak yang Lebih Diuntungkan	Frekuensi	%
Petani Sendiri	3	2
Ketua Kelompok Tani	14	10
Kepala Desa & Perangkat	3	2
Camat/ Muspika	7	5
KUD	10	8
Pabrik Gula	14	10
Ketua Kelompok Tani + Kades	4	3
Kepala Desa + Camat/Muspika	5	4
Kepala Desa + KUD + PG	33	25
KUD + PG	29	22
Seluruh Satpel Bimas	8	6
Jumlah	130	100

Sumber: Data Primer.

Tabel di atas menunjukkan hanya 2% yang menyatakan petani adalah pihak yang lebih diuntungkan dibanding pihak-pihak di luar petani dalam program TRI tersebut, apakah itu kepala desa, camat, KUD, PG, kelompok tani, sampai Satpel Bimas. TRB (Tebu Rakyat Bebas) tampaknya lebih menjanjikan dibanding TRI. Dalam penelitian ini sebanyak 15 petani juga mengusahakan TRB selain TRI, yang kalau dibandingkan antara keduanya mereka berpendapat ternyata lebih menguntungkan TRB dibanding TRI.

TABEL 3.33
PERBANDINGAN KEUNTUNGAN TRB DAN TRI
(N=15)

Keuntungan	Frekuensi	%
Lebih Untung TRB	14	93
Lebih Untung TRI	1	7
Sama Saja	0	0
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer.

Diungkapkan oleh seorang petani TRB, yang sekaligus pembeli tebu, yang sangat terkenal di Kecamatan Papar:

"Saya menggeluti tebu mulai tahun 70-an. Mulai tahun itu sampai tahun 1989, modal saya peroleh dengan cara patungan. Karena tebu-tebu yang dibeli atau TRB yang dikelola dalam partai besar, yaitu antara 200-500 ha. Sebenarnya tanah saya pribadi sempit, kurang dari 1 hektare. Jadi tanah untuk TRB itu beli dari *keprasan* TRI milik orang lain. Pembelian tidak hanya pada *keprasan*, tapi juga tebu orang lain yang siap panen. Harga *keprasan* per 100 ru sekitar Rp 135.000,- meskipun masih lagi mengeluarkan biaya untuk mengolah *keprasan* yang tidak sedikit jumlahnya."

Masuknya TRB dalam konsolidasi sistem TRI, mulai musim tanam 1984/1985, sekaligus memasukkannya ke dalam lingkup pembinaan sistem TRI dengan sebutan TRI non-kredit (TRI-N) dengan perlakuan sebagai TRI.

Dalam kenyataan, "TRB" masih banyak terdapat terutama pada areal tradisional tebu rakyat. Kehadiran "TRB" ini menimbulkan masalah pada pengaturan gilir tebang TRI.

Petani TRB mendapat bimbingan teknis dari pabrik gula dan PPL, sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ini.

TABEL 3.34
SUMBER INFORMASI TEKNIK BUDI DAYA
TEBU PETANI TRB YANG DIKELOLA SENDIRI
(N=15)

Sumber Informasi	Frekuensi	%
Dibimbing PG/PPL	11	73
Tetangga + Dibimbing PG	4	27
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer

Bagaimana sistem pengelolaan TRB tersebut, digambarkan dalam tabel berikut.

TABEL 3.35
PENGELOLAAN TANAMAN TRB
(N=15)

Pengelolaan	Frekuensi	%
Dikelola Sendiri	12	80
Dikelola Sendiri + Diburuhkan	3	20
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer

Sebanyak 80% menyatakan, TRB dikerjakan sendiri, sementara 20% lainnya mengatakan, dikerjakan sendiri dan diburuhkan ke orang lain. Tentang pengelolaan tenaga buruh dan biaya TRB ini, seorang petani mengatakan:

"Pekerja yang berkaitan dengan pembelian tebu ada 2 macam, pertama, karyawan lapangan, yaitu tenaga yang mencari areal tanah yang akan dibeli. Mereka dibayar per bulan Rp 60.000,- Kedua, pekerja administrasi yang mengurus berbagai administrasi termasuk keluar masuknya uang. Mereka dibayar Rp 125.000,- per bulan. Dulu saya mempunyai pekerja 15 orang, sekarang hanya 3 orang, dulu saya membeli tidak hanya dalam partai kecil seluas 5-20 ha, tapi juga dalam partai besar seluas 75-100 ha. Sekarang mencari areal sangat sulit, karena *keprasan* bekas TRI itu sudah diambil para sinder. *Keprasan* yang ditangani sinder disebut TRI-N Ikatan, maksudnya bekas *keprasan* dipinjamkan uang ke PG oleh sinder sebesar Rp 800.000 per hektare, dan tebu *keprasan* itu terikat, artinya harus dimasukkan ke PG yang memberi pinjaman. Para sinder itu hanya pinjam nama petani untuk mendapatkan pinjaman dari PG, yang digunakan membiayai tebu *keprasan* itu. Makanya sekarang cari areal *keprasan* sulit.

Untuk tenaga pengelola tebu *keprasan* atau TRB, saya serahkan kepada tenaga buruh. Areal bekas TRIS ada yang sudah di-*kepras*, ada yang belum. Kalau belum, harus di-*kepras* dulu. Ongkos *keprasan* Rp 10.000,-/kotak (100 ru). Setelah di-*kepras* lalu dipupuk. Pupukan dilakukan 2 kali. Pupuk I pada saat tebu umur 4 bulan dengan pupuk ZA 0,5 kw/kotak. Pupuk II pada saat tebu umur 7 bulan dengan pupuk ZA 1 kw/kotak. Tenaga yang dibutuhkan untuk pupuk ini 3 orang wanita, modelnya harian, per hari Rp 1.500,-/orang. Setelah dipupuk di-*lipur*, tenaganya borongan Rp 10.000,-/kotak. Setelah tebu 'rumbuk' di-*grosak*/*klentek*. *Grosak* ini dilakukan 3 kali, yaitu setelah *lipur*, dan setelah *ipuk* 2 kali. Tenaga borongan Rp 3.000,-/*grosak*, setelah 1-1,5 tahun tebu ditebang. Tenaga tebang dari luar, dan ada dari desa. Upah tenaga tebang Rp 250,-/kw. Kalau tebunya baik menghasilkan sekitar 125 kw/kotak, kalau jelek hasilnya sekitar 90 kw/kotak."

Hasil TRB itu dijual ke pabrik dan bahkan lebih mendapat prioritas dibanding TRI. Bagaimana perhitungan di PG setelah tebu TRB ini digiling dituturkan oleh seorang petani TRB:

"Setelah jadi gula, bagi hasilnya PG mendapat 38% ,sedangkan bagian petani 62%. Selain bagian tersebut, petani mendapat 2% gula dan uang tetes Rp 13,-/kw tebu, selain itu juga mendapat subsidi untuk kendaraan Rp 300,-/kw tebu. Potongan yang dikenakan hanya potongan karung."

3.7 Alternatif Mempertahankan Subsistensi

Cara untuk mempertahankan subsistensi setelah tidak ikut dalam proses produksi TRI adalah dengan mencari pekerjaan lain. Alternatif ini setidaknya merupakan pilihan para petani, terutama mereka yang memiliki lahan sempit yang karena berbagai alasan tidak lagi dapat menolak *glebagan*.

Dalam tabel berikut diuraikan alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan untuk mempertahankan subsistensi, jenis, tempat, di dalam desa ataukah di luar desa, dan sejak kapan mereka menekuni pekerjaan tersebut,

TABEL 3.36
JENIS, TEMPAT, DAN WAKTU BEKERJA SEBAGAI
SUMBER NAKAH LAIN
(N=102)

Jenis Pekerjaan	Tempat			Waktu		
	Dalam Desa	Luar Desa	Jumlah	Sebelum Ikut TRI	Sesudah Ikut TRI	Jumlah
Buruh Tani	10 (50%)	40 (48%)	50 (49%)	16 (34%)	25 (45%)	41 (40%)
Sektor Dagang	6 (30%)	15 (18%)	21 (20%)	8 (17%)	17 (30%)	25 (24%)
Sektor Industri	3 (15%)	19 (22%)	21 (20%)	13 (27%)	10 (18%)	23(22%)
Sektor Jasa	1 (5%)	8 (12%)	9 (11%)	10 (22%)	3 (7%)	13 (14%)
Jumlah	20 (100%)	82 (100%)	102 (100%)	47 (100%)	55 (100%)	102 (100%)

Sumber: Data Primer

Mereka yang menyatakan bekerja di luar maupun di dalam desa sebagai buruh tani, lebih besar dibanding pekerjaan lainnya. Demikian juga dalam hal waktu, petani yang menyatakan mencari pekerjaan sebagai buruh tani maupun pekerjaan lain setelah tanahnya ikut program TRI lebih ba-

nyak dibanding mereka yang sudah bekerja sampingan sebelum ikut TRI.

Adanya alternatif pilihan kerja ini merupakan upaya mempertahankan batas subsistensi untuk tingkat yang paling aman, dan boleh jadi merupakan faktor yang menopang terjadinya fenomena pembangkangan terselubung terhadap program TRI tersebut.

3.8 Hubungan antara Cara Menggerakkan Program TRI dan Pembangkangan Terselubung

Cara menggerakkan program TRI mempengaruhi pembangkangan terselubung petani yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sebagaimana dikemukakan di dalam Tabel 3.37 berikut, terlihat petani yang digerakkan dengan cara mobilisasi dan koersi lebih banyak memilih untuk tidak terlibat dalam proses produksi daripada petani yang digerakkan dengan cara partisipasi.

Sedangkan 60% petani yang digerakkan karena mobilisasi memilih tidak ikut terlibat dibandingkan dengan 57% yang ikut dalam proses produksi. Sementara itu, 33% petani yang digerakkan karena koersi memilih tidak ikut dalam proses produksi, dibandingkan dengan hanya 8% yang memilih ikut dalam proses produksi. Sedangkan mereka yang dengan alasan partisipasi memilih ikut dalam proses produksi sebesar 35% dibanding 7% yang tidak ikut dalam proses produksi.

Dengan gambaran sedemikian itu, dapat disimpulkan, mobilisasi dan koersi dalam menggerakkan program TRI di kalangan petani merupakan faktor yang mempengaruhi tak terlibatnya petani dalam proses produksi. Makin koersif pendekatannya, maka para petani cenderung makin tidak terlibat dalam proses produksi program TRI.

TABEL 3.37
HUBUNGAN ANTARA CARA MENGERAKKAN PROGRAM TRI
DAN KETERLIBATAN DALAM PROSES PRODUKSI
(N=130)

Cara Menggerakkan	Keterlibatan dalam Proses Produksi		Jumlah
	Terlibat	Tidak Terlibat	
Partisipasi	17 (35%)	5 (7%)	22 (17%)
Mobilisasi	28 (57%)	49 (60%)	77 (59%)
Koersi	4 (8%)	27 (33%)	31 (24%)
Jumlah	49 (100%)	81 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Faktor yang sama mempengaruhi bentuk pembangkangan terselubung dengan menyiasati *glebagan* sebagaimana dikemukakan dalam tabel 3.38 berikut. Terlihat 23% petani yang ikut program TRI karena partisipasi, memilih ikut *glebagan* dibandingkan dengan 12% yang memilih menyiasati *glebagan* dengan menukar lahan *glebagan* ke lahan yang kurang subur, dan 13% lainnya menyiasatinya dengan menyewakan lahannya ke petani lain agar tak ikut wajib *glebagan*.

Sementara petani yang merasa dimobilisasi, sebanyak 66% menyiasati *glebagan* dengan menukar lahan yang kurang subur, dan 56% menyewakan lahannya ke orang lain agar terhindar dari wajib *glebagan*, dibandingkan dengan 57% yang ikut *glebagan*. Sedangkan mereka yang merasa mendapat koersi, sebanyak 22% menyiasati dengan menukar lahan, dan 31% menyewakan lahan ke orang lain, sementara 20% ikut *glebagan*.

TABEL 3.38
HUBUNGAN ANTARA CARA MENGERAKAN PROGRAM TRI
DAN TINDAKAN MENYIASATI GLEBAGAN
(N=130)

Cara Menggerakkan	Tindakan Menyiasati <i>Glebagan</i>			Jumlah
	Mengganti lahan dengan yang kurang subur	Menyewakan ke petani lain sebelum wajib <i>glebagan</i>	Ikut <i>glebagan</i>	
Partisipasi	5 (12%)	5 (13%)	12 (23%)	22 (17%)
Mobilisasi	27 (66%)	20 (56%)	30 (57%)	77 (59%)
Koersi	9 (22%)	11 (31%)	11 (20%)	31 (24%)
Jumlah	41 (100%)	36 (100%)	53 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari kenyataan itu, terdapat hubungan antara cara menggerakkan program TRI dan bentuk pembangkangan terselubung, dalam bentuk menyiasati *glebagan*.

Bentuk pembangkangan terselubung lainnya adalah tindakan yang dilakukan petani bila tebu tanamannya terlambat ditebang. Di dalam Tabel 3.39 terlihat hanya 6% petani yang merasa ikut TRI karena partisipasi, yang membiarkan tebunya terlambat ditebang dibandingkan dengan mereka yang memberitahukan kepada petugas agar segera ditebang (27%), atau menyuap petugas agar ditebang (30%), dan hanya 7% yang mengambil tindakan membakar tebunya bila terlambat ditebang.

Sementara itu, petani yang merasa ikut program TRI karena mobilisasi, sebanyak 56% membiarkan tebu terlambat ditebang, 65% memberitahu kepada petugas, 60% menyuap petugas, dibandingkan dengan 80% yang membakar tebu tersebut. Sedangkan petani yang ikut karena koersi, seba-

nyak 38% membiarkan tebu terlambat ditebang, 8% memberitahu petugas agar segera ditebang, 10% menyuap petugas, dan 13% membakar tebunya.

TABEL 3.39
HUBUNGAN ANTARA CARA MENGGERAKAN PROGRAM TRI
DAN TINDAKAN MENGHADAPI TEBU TERLAMBAT TEBANG
(N=130)

Cara Menggerakkan	Tindakan Menghadapi Keterlambatan Tebang					Jumlah
	Membiarkan	Memberi tahu mandor tebang agar ditebang	Menyuap petugas tebang	Membakar tebu	Tidak tahu	
Partisipasi	3 (6%)	11 (27%)	3 (30%)	1 (7%)	4 (27%)	22 (17%)
Mobilisasi	28 (56%)	26 (65%)	6 (60%)	12 (80%)	5 (33%)	77 (59%)
Koersi	19 (38%)	3 (8%)	1 (10%)	2 (13%)	6 (40%)	31 (24%)
Jumlah	50 (100%)	40 (100%)	10 (100%)	15 (100%)	15 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Dengan kenyataan itu, maka dapat disimpulkan, terdapat hubungan antara bentuk partisipasi, mobilisasi, dan koersi dengan tindakan pembangkangan terselubung petani TRI dalam menghadapi tebu yang terlambat ditebang.

Kenyataan yang sama juga terjadi bila terjadi penundaan timbang dan giling tebu, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.40. Mereka yang ikut program TRI karena alasan partisipasi, bahkan melakukan pembangkangan dengan membawa tebunya untuk digiling ke pabrik gula lain (42%), sementara yang menunggu digiling (dengan risiko rendemen turun) sebesar 21%, dan mereka yang menyuap petugas giling pabrik sebesar 40%. Sedangkan petani yang ikut program TRI karena mobilisasi, lebih banyak memilih menunggu (71%) dibanding dengan menyuap (40%), dan membawa tebu ke pabrik gula lain (50%). Kenyataan yang sama juga terjadi pada petani yang ikut TRI karena koersi. Mereka lebih memilih menyuap petugas (20%)

daripada menunggu (8%), atau membawa tebu ke pabrik gula lain (8%).

TABEL 3.40
HUBUNGAN ANTARA CARA MENGERAKAN PROGRAM TRI
DAN TINDAKAN APABILA PENUNDAAN TIMBANG/GILING TEBU
(N=130)

Cara Menggerakkan	Tindakan Menghadapi Penundaan Timbang/Giling				Jumlah
	Menunggu	Menyuap petugas	Membawa ke PG lain	Tidak tahu	
Partisipasi	5 (21%)	10 (40%)	5 (42%)	2 (7%)	22 (17%)
Mobilisasi	17 (71%)	10 (40%)	6 (50%)	44 (80%)	77 (59%)
Koersi	2 (8%)	5 (20%)	1 (8%)	23 (13%)	31 (24%)
Jumlah	24 (100%)	25 (100%)	12 (100%)	69 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari gambaran dalam Tabel 3.40 tersebut, terdapat hubungan antara faktor mobilisasi, koersi dan partisipasi dengan pembangkangan terselubung yang dilakukan petani dalam menghadapi tebu terlambat timbang/giling. Membawa tebu digiling ke pabrik gula lain tanpa izin adalah terlarang. Namun dalam Tabel 3.40 terlihat, bahkan petani yang ikut TRI dengan alasan partisipasi pun melanggar ketentuan tersebut. Ini menunjukkan kuatnya kecenderungan melakukan pembangkangan terselubung di kalangan petani TRI.

3.9 Hubungan antara Luas Pemilikan Tanah dan Pembangkangan Terselubung

Luas pemilikan tanah juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembangkangan terselubung di dalam program TRI. Di dalam Tabel 3.41 ditunjukkan, makin sempit luas pemilikan tanah, makin terdapat kecenderungan petani untuk tidak terlibat dalam proses produksi tebu. Seba-

nyak 73% petani yang tidak terlibat dalam proses produksi adalah mereka yang memiliki lahan kurang dari 1 hektare, dibanding dengan hanya 14% yang memilih ikut dalam proses produksi budi daya tebu. Sementara itu, hanya 10% petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare yang memilih tidak ikut dalam proses produksi, dibanding dengan 41% yang ikut dalam proses produksi. Dari gambaran ini dapat disimpulkan, terdapat hubungan antara luas pemilikan lahan dan keterlibatan dalam proses produksi program TRI.

TABEL 3.41
HUBUNGAN ANTARA LUAS PEMILIKAN TANAH
DAN KETERLIBATAN DALAM PROSES PRODUKSI
(N=130)

Luas Pemilikan Tanah	Keterlibatan dalam Proses Produksi		Jumlah
	Terlibat	Tidak Terlibat	
< 1 hektare	7 (14%)	59 (73%)	66 (51%)
1,1 ha - 2 ha	22 (45%)	14 (17%)	36 (28%)
> 2 hektare	20 (41%)	8 (10%)	28 (21%)
Jumlah	49 (100%)	81 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Demikian juga dalam hubungannya dengan menyiasati *glebagan*, faktor luas tanah mempengaruhi petani untuk menolak ikut *glebagan* dengan menyiasatinya, menukar lahan yang terkena *glebagan* ke lahan yang kurang subur, atau menyewakannya kepada petani lain sebelum kena wajib *glebagan*. Di dalam Tabel 3.42 terlihat, sebanyak 80% petani berlahan di bawah 1 hektare menyiasati *glebagan*, menukarkan dengan lahan yang kurang subur, dan 78% menyiasatinya dengan menyewakan lahannya ke orang lain, dibanding dengan hanya 10% yang ikut *glebagan*. Sedangkan

petani berlahan lebih dari 2 hektare, hanya 5% yang ikut menyiasati *glebagan*, menukar lahannya dengan lahan yang kurang subur, tak ada yang menyewakannya ke orang lain, tapi sebanyak 49% petani golongan ini ikut *glebagan*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari gambaran ini, makin sempit luas pemilikan tanah, makin besar kecenderungan melakukan pembangkangan terselubung dalam TRI dengan menyiasati *glebagan*.

TABEL 3.42
HUBUNGAN ANTARA LUAS PEMILIKAN TANAH
DAN TINDAKAN MENYIASATI GLEBAGAN
(N=130)

Luas Pemilikan Tanah	Tindakan Menyiasati <i>Glebagan</i>			Jumlah
	Mengganti lahan dengan yang kurang subur	Menyewakan ke petani lain sebe- lum wajib <i>glebagan</i>	Ikut <i>glebagan</i>	
< 1 hektare	33 (80%)	28 (78%)	5 (10%)	66 (51%)
1,1 ha - 2 ha	6 (15%)	8 (22%)	22 (41%)	36 (28%)
> 2 hektare	2 (5%)	0 (0%)	26 (49%)	28 (21%)
Jumlah	41 (100%)	36 (100%)	53 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Kenyataan yang sama juga terjadi dalam hubungan tindakan petani-menghadapi tebu yang terlambat ditebang, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.43. Sebanyak 90% petani yang memiliki lahan di bawah 1 hektare, memilih membiarkan saja tebu terlambat ditebang, tidak ada yang berniat memberitahu kepada petugas tebang, juga tak ada yang menyuap petugas agar tebu segera ditebang, namun sebesar 73% dari petani ini membakar tebunya bila mengalami keterlambatan tebang.

Sedangkan petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare, terlihat hanya 4% yang membiarkan tebu terlambat tebang, 45% berupaya membe-

ritahukannya kepada petugas yang berwenang, 50% berupaya menyuap petugas agar tebu segera ditebang, dan tidak ada petani golongan ini yang membakar tebu meski terlambat ditebang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari gambaran ini, terdapat hubungan antara luas pemilikan tanah dan bentuk pembangkangan terselubung dalam progam TRI bila tebu terlambat ditebang.

TABEL 3.43
HUBUNGAN ANTARA LUAS PEMILIKAN TANAH
DAN TINDAKAN MENGHADAPI TEBU TERLAMBAT TEBANG
(N=130)

Luas Pemilikan Tanah	Tindakan Menghadapi Keterlambatan Tebang					Jumlah
	Mebiarkan	Memberi tahu mandor tebang agar ditebang	Menyuap petugas tebang	Membakar tebu	Tidak tahu	
< 1 hektare	45 (90%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (73%)	10 (67%)	66 (51%)
1,1 ha - 2 ha	3 (6%)	22 (55%)	5 (50%)	4 (27%)	2 (13%)	36 (28%)
> 2 hektare	2 (4%)	18 (45%)	5 (50%)	0 (0%)	3 (20%)	28 (21%)
Jumlah	50 (100%)	40 (100%)	10 (100%)	15 (100%)	15 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Kenyataan yang sama juga terjadi dalam hubungan antara luas pemilikan tanah dan tindakan yang dilakukan petani bila terjadi penundaan timbang dan giling. Di dalam Tabel 3.44 ditunjukkan, sebanyak 95% petani berlahan kurang dari 1 hektare menyatakan, tidak tahu tindakan apa yang dilakukan bila tebunya terlambat timbang dan giling. Tidak satu pun yang melakukan penyuaipan atau membawa tebu ke pabrik lain atau menunggu. Ini terjadi karena senyatanya para petani berlahan sempit memang tak terlibat dalam proses tebang angkut dan timbang/giling tebu.

Sementara itu, bagi petani yang berlahan di atas 2 hektare, sebanyak 75% membawa tebunya ke pabrik gula lain bila menghadapi keterlambatan

timbang/giling, sebanyak 44% menyuap petugas agar segera bisa digiling, dan hanya 29% yang menunggu meski terjadi penundaan timbang/giling. Dengan gambaran ini, pembangkangan terselubung dengan membawa tebu digiling ke pabrik gula lain juga dilakukan oleh petani berlahan luas, bila mereka menghadapi tebunya terlambat digiling.

TABEL 3.44
HUBUNGAN ANTARA LUAS PEMILIKAN TANAH
DAN TINDAKAN APABILA PENUNDAAN TIMBANG/GILING TEBU
(N=130)

Luas Pemilikan Tanah	Tindakan Menghadapi Penundaan Timbang/Giling				Jumlah
	Menunggu	Menyuap petugas	Membawa ke PG lain	Tidak tahu	
< 1 hektare	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	66 (95%)	66 (51%)
1,1 ha - 2 ha	17 (71%)	14 (56%)	3 (25%)	2 (4%)	36 (28%)
> 2 hektare	7 (29%)	11 (44%)	9 (75%)	1 (1%)	28 (21%)
Jumlah	24 (100%)	25 (100%)	12 (100%)	69 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

3.10 Alasan Melakukan Pembangkangan Terselubung

Sejauh mana hubungan antara faktor cara menggerakkan program TRI dan faktor luas pemilikan tanah mempengaruhi alasan untuk melakukan pembangkangan terselubung para petani tersebut diuraikan dalam Tabel 3.45.

Sebanyak 13% petani yang ikut TRI karena partisipasi menyatakan melakukan pembangkangan terselubung karena alasan mempertahankan subsistensi, dibandingkan dengan 4% yang menyatakan, karena menolak birokrasi. Sebanyak 30% dari petani ini tidak memberi jawaban. Sementara itu, petani yang ikut TRI karena alasan mobilisasi, sebanyak 67% menyatakan alasan melakukan pembangkangan terselubung untuk mempertahankan

kan subsistensi, dibandingkan dengan yang menyatakan menolak birokrasi sebanyak 83%, sedangkan 37% tak menjawab. Sementara itu, sebanyak 20% petani yang ikut TRI karena alasan koersi menyatakan, melakukan pembangkangan terselubung dengan alasan mempertahankan subsistensi, dibandingkan dengan 13% yang menyatakan karena alasan menolak birokrasi, sebanyak 33% tidak menjawab.

TABEL 3.45
HUBUNGAN ANTARA CARA MENGGERAKAN PROGRAM TRI
DAN ALASAN MELAKUKAN PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG
(N=130)

Cara Menggerakkan	Alasan Melakukan Pembangkangan			Jumlah
	Mempertahankan subsistensi	Menolak birokrasi	Tidak menjawab	
Partisipasi	7 (13%)	1 (4%)	14 (30%)	22 (17%)
Mobilisasi	39 (67%)	20 (83%)	18 (37%)	77 (59%)
Koersi	12 (20%)	3 (13%)	16 (33%)	31 (24%)
Jumlah	58 (100%)	24 (100%)	48 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Dengan gambaran sedemikian itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah semakin cenderung program TRI digerakkan dengan cara mobilisasi dan koersi (dan bukan partisipasi), maka semakin cenderung pembangkangan terselubung dilakukan petani TRI dengan alasan mempertahankan batas subsistensi dan menolak birokrasi.

Sementara itu, dalam hubungannya dengan luas pemilikan tanah, sebagaimana dikemukakan dalam Tabel 3.46, terlihat 78% petani yang memiliki tanah kurang dari 1 hektare menyatakan mempertahankan subsistensi sebagai alasan melakukan pembangkangan terselubung, sedangkan yang menyatakan alasan menolak birokrasi sebesar 58%, sisanya 15% tidak men-

jawab.

Petani yang memiliki tanah 1,1-2 hektare, sebanyak 20% menyatakan mempertahankan subsistensi, dan 33% karena menolak birokrasi sebagai alasan melakukan pembangkangan terselubung, dan 33% lainnya tidak menjawab. Sedangkan petani yang memiliki luas tanah lebih dari 2 hektare hanya sebesar 2% yang menyatakan mempertahankan subsistensi sebagai alasan melakukan pembangkangan terselubung, dan 9% beralasan menolak birokrasi, sisanya 52% tidak menjawab.

TABEL 3.46
HUBUNGAN ANTARA LUAS PEMILIKAN TANAH
DAN ALASAN MELAKUKAN PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG
(N=130)

Luas Pemilikan Tanah	Alasan Melakukan Pembangkangan			Jumlah
	Mempertahankan subsistensi	Menolak birokrasi	Tidak menjawab	
< 1 hektare	45 (78%)	14 (58%)	7 (15%)	66 (51%)
1,1 ha - 2 ha	12 (20%)	8 (33%)	16 (33%)	36 (28%)
> 2 hektare	1 (2%)	2 (9%)	25 (52%)	28 (21%)
Jumlah	58 (100%)	24 (100%)	48 (100%)	130 (100%)

Sumber: Data Primer.

Dengan gambaran sedemikian itu, kesimpulan yang dapat dirumuskan, makin sempit pemilikan tanah petani TRI, makin besar kecenderungan melakukan pembangkangan terselubung dengan alasan mempertahankan batas keamanan subsistensi dan menolak birokrasi.

3.11 Kesimpulan

Dengan keseluruhan data yang ditemukan melalui studi sebagaimana dipaparkan di atas, kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Program TRI (dan juga program pembangunan lainnya) di Kecamatan Papar dilaksanakan dalam proses yang lebih bersifat mobilisasi bahkan koersi, daripada partisipasi para petani. Tindakan sedemikian itu dalam kenyataannya mengakibatkan para petani, terutama petani yang memiliki lahan sempit, menolak ikut dalam program. Penolakan ini berdasarkan berbagai alasan yang rasional, menanam tebu lebih mengakibatkan kerugian dibanding menanam tanaman subsistensi, padi atau palawija. Berbagai kepentingan petani dalam upaya menjadi "tuan" di atas tanahnya sendiri sebagaimana menjadi kebijakan Inpres No. 9/1975 itu ternyata tak dapat diartikulasi oleh berbagai lembaga yang terlibat di dalamnya.
2. Akibat pendekatan mobilisasi dan koersi sedemikian itu, persepsi petani TRI tentang hak dan kewajibannya dalam program TRI menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh program tersebut, sebab petani merasa wajib untuk menyerahkan tanah daripada ikut terlibat dalam program.
3. Petani lebih banyak yang tak terlibat daripada ikut terlibat di dalam program. Sekalipun mereka terdaftar sebagai petani peserta program TRI, namun dalam praktek, proses produksi lebih banyak diserahkan kepada ketua kelompok.
4. Petani melakukan berbagai penyiasatan dalam *glebagan*, yaitu dengan menukar lahannya yang terkena *glebagan* dengan lahan orang lain, sekalipun dalam proses tukar menukar itu lebih dirugikan, tapi itu dirasakan lebih menguntungkan daripada harus ikut *glebagan*. Selain proses tukar menukar lahan ini, atas kesepakatan masyarakat

kat petani, dilakukan cara menyasati *glebagan* dengan menukar lahan desa yang kurang subur, sementara lahan yang subur tidak didaftarkan dalam lahan TRI.

5. Akibat proses tukar menukar lahan untuk menyasati *glebagan* itu, adalah terjadinya konsentrasi tanah di tangan beberapa petani kaya yang lebih mampu. Proses konsentrasi ini juga terjadi dengan menyasati nama-nama pemilik lahan yang didaftarkan sebagai peserta program TRI, namun di dalam praktek hanya satu orang yang mengelolanya.
6. Kebanyakan para petani tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya dalam program TRI, terutama imbalan untuk kebun tebu percobaan, hasil tetes, dan lainnya.
7. Tindakan petani dalam menghadapi keterlambatan tebang lebih bersifat pasif (mendiamkan saja sampai ditebang), meski hal itu justru menimbulkan kerugian akibat rendemen turun. Tindakan lain adalah menebang tebu untuk mengurangi risiko kerugian, meski itu tak sesuai ketentuan. Hanya sebagian kecil petani yang menghubungi aparat yang berwenang untuk melakukan penebangan sesuai ketentuan. Sebagian besar petani juga tak memahami tahapan proses produksi, terutama kualitas tanaman kapan harus dipanen dan kapan harus ditebang. Proses tebang angkut dalam TRI sangat tergantung dari keputusan KUD dan pabrik gula. Kepentingan petani untuk proses ini sering diabaikan. Pihak KUD dan pabrik gula lebih mengambil kebijakan untuk tak memberitahukan kepada petani kapan tebang angkut dilakukan.
8. Tindakan petani dalam menghadapi keterlambatan tebang adalah membiarkan tebang terlambat dibanding mereka yang memberi tahu mandor agar segera menebang, sekalipun itu tak harus menjadi kenyataan. Sebagian petani melakukan pembakaran atas tebu tersebut, petani yang lainnya tak tahu apa yang harus dilakukan.

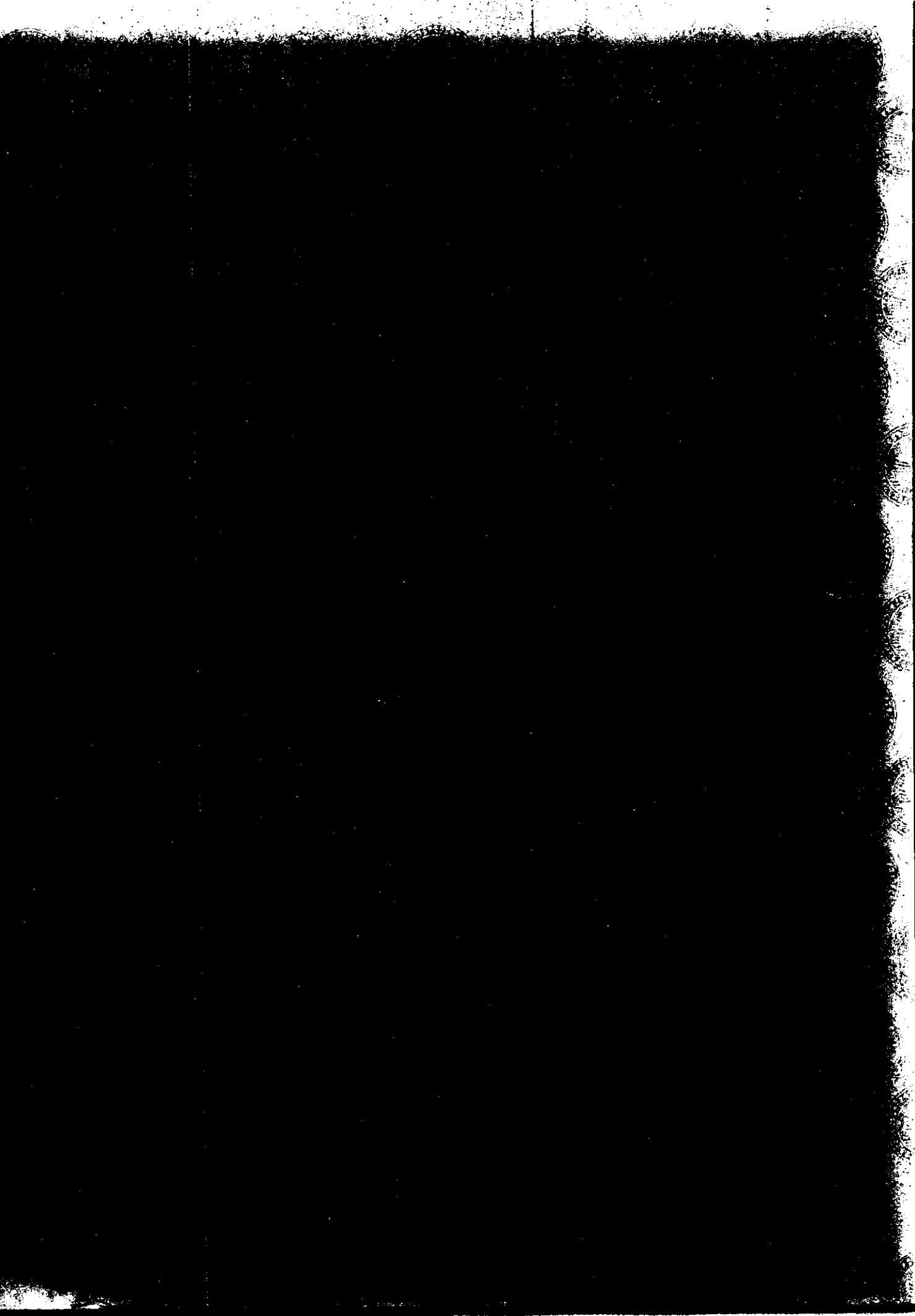
Dalam proses kegiatan tebang angkut para petani juga tak terlibat, sebagian besar proses tebang angkut diserahkan oleh ketua kelompok yang mengupah buruh tebang untuk itu. Alat angkut, serta besarnya biaya angkut ditentukan oleh KUD, dan sebagian besar petani tak mengetahui besarnya biaya angkut tersebut.

9. Demikian juga dalam proses penimbangan dan giling, petani tak terlibat, proses penimbangan dan jadwal giling ditentukan sepenuhnya oleh pabrik gula. Tindakan petani menghadapi keterlambatan giling adalah menunggu jadwal dengan risiko rendemen turun, menyuap petugas, atau membawa tebu ke pabrik gula lain sekalipun hal itu melanggar ketentuan. Petani juga tak terlibat dalam perhitungan rendemen, sebab dalam kenyataan hal itu sepenuhnya menjadi wewenang pabrik gula.
10. Pengetahuan tentang sistem bagi hasil juga tak seragam, bahkan kebanyakan petani tidak tahu bagaimana proporsi sistem bagi hasil tersebut. Demikian juga dengan perolehan hak petani di luar sistem bagi hasil, hanya pada persentase kristal gula secara natura yang diperoleh, sedangkan hasil tetes dalam bentuk uang, sebagian besar tidak memperolehnya.
11. Kepala desa, KUD, pabrik gula, dan aparat pemerintah lainnya lebih mendapat keuntungan dalam program TRI, bukan para petani. Walaupun ada petani yang diuntungkan, adalah mereka yang memilih sebagai petani Tebu Rakyat Bebas (TRB), yaitu para petani kaya.
12. Pilihan untuk menolak TRI mengakibatkan risiko "menentang kebijakan pemerintah". Untuk menghindari risiko tersebut, petani memilih keluar dari sistem produksi, dan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya dengan bekerja di luar usaha tebu di dalam maupun di luar desa.

13. Makin mengutamakan pendekatan yang bersifat mobilisasi dan koersi, bukan partisipatif, dalam menggerakkan petani untuk ikut program TRI, maka makin besar kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk pembangkangan terselubung dengan alasan mempertahankan batas keamanan subsistensi dan menolak birokrasi.
14. Makin sempit pemilikan tanah petani peserta program TRI, makin besar kecenderungan melakukan pembangkangan terselubung dalam berbagai bentuk, dengan alasan mempertahankan batas keamanan subsistensi dan menolak birokrasi.

Dengan keseluruhan fakta yang ditemukan itu, mendukung kebenaran empat hipotesis yang dirumuskan dalam studi ini, yaitu:

1. Pembangkangan terselubung yang dilakukan petani dalam program TRI adalah reaksi yang rasional, guna mengartikulasikan kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi dalam program TRI.
2. Pembangkangan terselubung itu muncul dalam tata hubungan produksi antara petani miskin dan petani kaya, maupun antarpetani dengan berbagai institusi yang mendominasi tata hubungan produksi dalam program TRI.
3. Dominasi jaringan birokrasi pemerintah dalam program TRI yang gagal mengartikulasikan kepentingan petani merupakan faktor yang paling menentukan lahirnya realitas pembangkangan terselubung tersebut.
4. Pembangkangan terselubung para petani TRI tersebut merupakan upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi dengan menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi dirinya sendiri.



BAB 4

KATEGORI TEORI

PEMBANGKANGAN TERSELUBUNG PETANI

(IMPLIKASI TEORITIK)

Studi-studi yang menjelaskan gerakan sosial petani, revolusi, pemberontakan, protes, perlawanan, dan sebagainya, telah banyak diperdebatkan para ahli sebagaimana diuraikan di Bab 1 disertasi ini. Pertanyaan yang hendak dijawab kemudian, bagaimana menempatkan teori pembangkangan terselubung petani TRI dalam konstelasi teori-teori gerakan sosial petani itu? Uraian berikut ini merupakan upaya menempatkan fenomena pembangkangan terselubung petani dalam program TRI sebagaimana ditemukan melalui studi ini, di dalam arus besar pemikiran teoritik yang telah ada tersebut, sebagai upaya --sekecil apa pun-- untuk menyumbang khazanah teoritik yang membicarakan berbagai gerakan petani.

Upaya tersebut adalah merumuskan suatu implikasi teoritik untuk menempatkan posisi teori pembangkangan terselubung petani TRI ke dalam arus besar teori-teori yang sudah ada, sekaligus mereplikasikan beberapa fenomena dan fakta yang ditemukan dalam studi ini, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan teoritik pembangkangan terselubung tersebut.

4.1 Pembangkangan Terselubung dalam Teori Protes Sosial

Persamaan yang dapat dikemukakan di antara teori-teori itu, pembangkangan terselubung merupakan suatu gerakan petani untuk melakukan protes sosial atas perlakuan yang tidak menguntungkan pada tatanan hidupnya. Bahwa pembangkangan terselubung itu bukan merupakan suatu revolusi, merupakan hal yang membuat pembangkangan itu tak dapat dikategorikan begitu saja pada dataran berpikir Wolf, Migdal, Paige, Stinchcombe, atau bahkan Gurr. Kalaupun Wolf mengatakan, para petani menengah merupakan kelas yang paling rawan atas ketergantungannya pada faktor-faktor lain di luar dirinya, seperti ancaman penyitaan tanah, fluktuasi pasar, bunga bank, dan lainnya, maka semua faktor tersebut dapat berlaku pada lapisan petani TRI yang sesungguhnya seluruh tumpuan kehidupan ekonominya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagaimana disebutkan Wolf tersebut. Namun hal itu tidak cukup kuat untuk mendorong para petani TRI melakukan revolusi atau protes yang terorganisir. Yang dilakukan petani TRI itu hanyalah (atau masih sebatas) pembangkangan terselubung.

Demikian juga kalau mengikuti jalan pikiran Paige yang menekankan faktor kelas, maka dalam melakukan pembangkangan terselubung tersebut, petani TRI hampir dapat dikatakan tak didasarkan atas kesadaran kelas, sehingga yang terjadi adalah pilihan rasional dan individual, meski diikat oleh pengalaman yang sama. Dari data yang diperoleh melalui studi ini terlihat, perlawanan para petani TRI tersebut lebih pada bentuk pembangkangan terselubung terhadap keputusan yang merugikan dirinya, tidak sampai menimbulkan protes dalam pengertian gerakan revolusioner sebagaimana dikemukakan Paige. Bentuk-bentuk perlawanan mereka mewujudkan secara terselubung, keluar dari sistem produksi dengan mencari alternatif di luar sistem produksi tebu.

Namun pendapat Paige yang menyatakan, petani kecil cenderung me-

nolak gerakan-gerakan bersama, karena mereka dengan mudah dapat diadu-domba, boleh jadi berlaku untuk para petani TRI ini sehingga mereka lebih memilih pembangkangan secara individual.

Di dalam kerangka teori Paige, bentuk pembangkangan terselubung petani ini dapat dikategorikan ke dalam hipotesisnya yang ke 4, 5, dan 6 pada bagan skematis yang dikemukakannya, yaitu makin penting tanah sebagai sumber pendapatan bagi penggarap tanah, maka mereka semakin menghindari risiko, dan makin menentang gerakan politik revolusioner. Makin penting tanah sebagai sumber pendapatan bagi penggarap tanah, maka semakin intensif kompetisi ekonomi, dan semakin lemah dorongan untuk gerakan/organisasi politik. Makin penting tanah sebagai sumber pendapatan, maka semakin besar isolasi struktural dan ketergantungan penggarap tanah, dan semakin lemah tekanan bagi solidaritas politik.

Sebab itu, dalam beberapa hal, pembangkangan terselubung sesungguhnya memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh teori pilihan rasional yang dikemukakan Olson, dan juga oleh Popkin. Namun sebagaimana telah dikemukakan oleh Eckstein, kelemahan teori pilihan rasional ini tidak menjangkau pembangkangan terselubung sedemikian itu. Dengan kata lain, sekalipun pembangkangan terselubung petani TRI itu merupakan pilihan yang rasional serta individual, tapi bentuk pembangkangan terselubung itu sendiri tak dapat dikategorikan sebagai teori pilihan rasional.

Sifatnya yang individual dan rasional itu juga menunjukkan, sebagai gerakan atau bentuk protes sosial, pembangkangan terselubung ini tak dapat dikategorikan ke dalam radikalisasi petani yang berdasarkan keagamaan sebagaimana dikemukakan Sartono, karena apa yang menjadi unsur pokok dalam gerakan keagamaan --*messianisme, millenarianisme, nativisme, prophetisme*, ataupun *revivalisme*-- yaitu adanya seorang pemimpin keagamaan yang merupakan seorang *prophet* atau guru, atau dukun, atau tukang sihir, atau utusan mesias, tak ditemukan di dalam gerakan pembangkangan terselubung petani TRI ini.

Pembangkangan terselubung petani TRI ini juga tak dapat dikategorikan sebagai bentuk perbanditan sosial dengan semua manifestasinya, sekalipun terdapat unsur protes sosial di dalamnya --hal yang sama, yang menjadi karakteristik perbanditan sosial sebagaimana dikemukakan Suhartono. Sekalipun perbanditan itu merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib, dan tekanan sosio-politik, atau dalam konteks studi ini resistensi terhadap program TRI, namun unsur *perkecuan*, *begal*, tak ditemukan dalam pembangkangan terselubung ini karena sifatnya yang individual. Kalau dapat dikategorikan dalam bentuk pemberontakan (*rebellion*) dengan membakar tebu, namun unsur resistensi sadar politik sebagaimana disyaratkan dalam suatu *rebellion* tak sepenuhnya dapat dipenuhi, karena tidak adanya suatu *political entrepreneur* sebagaimana dikemukakan Popkin.

Sebagai bentuk "kekerasan", pembangkangan terselubung petani TRI tersebut juga sulit dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk kekerasan politik sebagaimana dikemukakan Gurr, sekalipun yang paling mendekati pada tipologi Gurr adalah *Turmoil*, dengan melihat karakteristik yang relatif spontan, tak menggunakan organisasi politik, dan bersifat lokal. Dengan demikian, untuk melihat kemungkinan pembangkangan terselubung petani TRI menjadi revolusioner karena adanya eksploitasi, perlu dicoba pendekatan mengubah sifat-sifat tetap kondisi petani TRI tersebut ke dalam variabel-variabel penjelas. Menurut aturannya, petani, tanpa kecuali, harus tunduk pada klaim-klaim (yang tidak timbal balik) terhadap hasil produksi mereka. Petani pada hakikatnya adalah para penanam yang harus --karena marginalitas politik dan budayanya, serta keadaan sosial ekonomi mereka yang relatif tidak berubah-- menanggung berbagai macam beban pajak, harga sewa, kurva, suku bunga yang amat tinggi, dan harga diskriminasi. Para petani selalu mempunyai landasan untuk melakukan pemberontakan terhadap para tuan tanah, agen-agen negara, dan pedagang yang memeras mereka (Skocpol, 1991:124-125).

Namun pendekatan sedemikian ini dapat menyesatkan pembahasan tentang basis kekuasaan kelas atas pemilik tanah, dengan kurang memperhitungkannya secara tersendiri, yang dalam hal ini kelas-kelas tersebut menambah penghasilannya dari para pemilik lahan kecil melalui berbagai bentuk sumbangan surplus tambahan. Demikian pula banyak analisis yang salah tafsir terhadap tingkat solidaritas petani, karena mereka hanya memperhatikan fakta tentang pemilikan kekayaan perseorangan, dan ketimpangan ekonomi antara petani kaya dan petani miskin. Mereka telah mengabaikan pembahasan ikatan kekerabatan dan institusi-institusi masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi ekonomi kolektif yang dapat mengikat para petani kaya dan petani miskin relatif lebih erat dibandingkan ikatan yang mungkin terjalin akibat kepentingan pemilikan mereka. Paige, misalnya mengatakan, para petani kecil secara *inherent* cenderung menentang aksi-aksi bersama, karena para petani kecil dapat diadu-domba satu sama lainnya. Padahal sebenarnya semuanya ini tergantung pada ada atau tidaknya, dan jenis-jenis pemilikan, serta fungsi masyarakat tertentu, ia juga tergantung pada apakah komunitas petani itu bersaing untuk memperebutkan sumber daya dengan para tuan tanah atau tidak (Skocpol, 1991:168).

Namun bahkan jika tidak terdapat lahan pertanian yang luas, tatanan masyarakat agraris mungkin masih tetap tidak akan mengenal pemberontakan petani, seandainya para tuan tanah melakukan pengawasan langsung terhadap mesin-mesin administratif dan militer (seperti milisia-milisia dan agen-agen pembantunya yang miskin) di tingkat lokal. Hal ini perlu dibahas, walau berada di luar analisis kelas, kalau memang ingin menjelaskan lebih memadai. Struktur-struktur politik dari tatanan masyarakat agraris harus dianalisis, khususnya mengamati sifat-sifat pemerintahan lokal dan hubungannya dengan otoritas politik pusat, monarki, dan para kaki tangannya. Apakah petani, birokrat, atau para tuan tanah yang menguasai pembuatan keputusan politik tingkat lokal? Apakah para tuan tanah bertindak sebagai kaki tangan kerajaan? Tampaknya tatanan masyarakat

agraris yang paling peka terhadap pemberontakan petani yang otonom dan mendadak itu merupakan tatanan yang tidak hanya mempunyai hubungan kelas yang memungkinkan terbentuknya solidaritas dan otonomi petani saja, tapi juga aparat penghukum (*sanctioning machineries*) yang secara terpusat dan birokratis bahkan walaupun masyarakat petani dapat menikmati otonomi politik lokal yang cukup besar (Skocpol, 1991:126).

Dalam kehidupan petani TRI ini, semua keputusan di tingkat lokal pada dasarnya berhubungan dengan otoritas politik pusat melalui Inpres No. 9/1975. Hampir tak ada upaya untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan Inpres tersebut dengan kondisi-kondisi lokal, sekalipun setiap tahun surat keputusan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II membuat penjabaran Inpres No. 9/1975 tersebut dalam tahun musim tanam, namun surat keputusan sedemikian itu dalam banyak hal justru lebih mengamankan Inpres No. 9/1975 itu daripada menyesuainya dengan kondisi-kondisi lokal.

Penjelasan lain tentang teori pembangkangan terselubung petani TRI ini akan dilihat pada dataran berpikir Scott, yang mengatakan, perlawanan petani --bukan revolusi-- yang lebih menekankan pendekatan moral ekonomi dalam memahami gerakan petani. Pendekatan ini berbeda kalau dibandingkan dengan Paige yang lebih melihat pola-pola dan karakterisasi konflik kelas dalam masyarakat agraris, dan juga Popkin dengan pendekatan ekonomi politik yang lebih menaruh perhatian pada kondisi-kondisi yang menyumbang ke arah terjadinya pertumbuhan gerakan revolusioner dan kondisi-kondisi di luar yang memungkinkan lahirnya revolusi tersebut.

Di dalam buku *Moral Ekonomi Petani*, Scott menyatakan:

"Studi ini tidaklah pertama-tama merupakan satu analisis tentang sebab-sebab revolusi petani. Tugas itu telah ditunaikan, dan dengan sukses besar oleh Barrington More Jr. dan Eric R. Wolf. Satu studi mengenai moral ekonomi petani dapat menjelaskan apa yang membuat mereka marah dan dalam hal faktor-faktor lainnya sama, apa yang mungkin dapat menimbul-

kan satu situasi yang eksploif. Akan tetapi, andaikata amarah yang ditimbulkan oleh eksploitasi sudah cukup untuk mencetuskan pemberontakan. maka bagian terbesar Dunia Ketiga (dan bukan hanya Dunia Ketiga saja) tentunya sudah terbakar. Apakah petani-petani yang merasa dirinya dieksploitasi itu benar-benar memberontak, tergantung pada banyak sekali faktor lainnya, seperti, persekutuan-persekutuan dengan kelas-kelas lain, kemampuan represif golongan elite, dan organisasi kaum tani itu sendiri -- yang tidak akan dibahas di sini kecuali secara sambil lalu saja. Yang akan saya bahas adalah sifat eksploitasi yang terdapat dalam masyarakat tani sebagaimana yang kiranya dilihat oleh korban-korbannya sendiri, dan apa yang mungkin bisa disebut penciptaan dinamika sosial dan bukan peledakannya". (Scott, 1981:6)

Argumen Scott sedemikian itu muncul dari dilema ekonomi sentral yang dihadapi oleh kebanyakan rumah tangga petani, yang hidup begitu dekat dengan batas subsistensi, dan menjadi sasaran permainan cuaca, serta tuntutan-tuntutan dari pihak luar yang membuat para petani tak mempunyai banyak peluang untuk menghitung keuntungan maksimal, hingga yang paling khas dilakukan para petani adalah berusaha menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya, dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil risiko. Tingkah laku "enggan risiko" (*risk-averse*) ini prinsipnya meminimumkan kemungkinan subjektif dari kerugian maksimum. Prinsip *safety first* alias "dahulukan selamat" inilah yang melatarbelakangi banyak sekali pengaturan teknis, sosial dan moral dalam suatu tatanan agraris pra-kapitalis (Scott, 1981:7).

Dengan keseluruhan uraian di atas, melalui perbedaan argumen serta upaya penyusunan tipologi revolusi, perlawanan, pemberontakan, pembangkangan, atau apa pun namanya dalam gerakan petani, pada dasarnya semua itu dapat disimpulkan, ada tiga bentuk pergolakan yang berbeda, yang terjadi di masyarakat petani yaitu: Pertama, apa yang dapat dikategorikan sebagai *everyday forms of peasant resistance*. Kedua, apa yang dapat dikategorikan sebagai *unorganized rural protest*. Ketiga, apa yang dapat dikategorikan sebagai *organized peasant rebellion*. (Lichbach, 1994:386).

Namun satu hal yang harus dipahami dalam tiap-tiap bentuk tersebut, petani hanya mau ikut dalam tindakan kolektif perlawanan, atau pemberontakan, atau bahkan revolusi, bila mereka merasa akan mendapatkan janji keuntungan di masa depan, atau "iming-iming", atau apa yang dinamakan *selective incentives*. Lichbach mengutip pendapat Olson, dan juga Popkin dalam *Rational-actors theories* yang menyatakan, pada dasarnya para petani selalu berteori amat rasional dalam memutuskan keterlibatannya pada gerakan kolektif. Adapun *selective incentives* yang didapatkan para petani itu akan menentukan taktik dan strategi mereka dalam melakukan pembangkangan, apakah bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari (*everyday forms of peasant resistance*), atau bentuk-bentuk protes tanpa terorganisir, (*unorganized rural protest*), ataupun pemberontakan yang terorganisir (*organized rural rebellion*).

Bentuk-bentuk dari bagaimana hubungan perjuangan petani dalam hubungannya dengan *selective incentives* yang diterima itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Everyday Forms of Peasant Resistance*

Everyday forms of peasant resistance, or "weapons of the weak" (senjata kaum lemah). Para petani banyak melakukan strategi ini ketika mereka terlibat di dalam konflik dengan para tuan tanah (misalnya menyangkut sistem upah, perlengkapan, kerja, sewa, atau sistem irigasi), atau terhadap negara (contohnya, yang menyangkut pajak, kemampuan sumbangan kekayaan, kemampuan persyaratan kerja) Strategi ini lahir dari anggapan tentang eksploitasi dan ketidakadilan.

Di dalam menggunakan *everyday forms of peasant resistance*, petani berupaya memanipulasi sistem untuk memaksimalkan keuntungan secara material bagi dirinya. Colburn menyebutnya dengan "rasional, tapi dengan kepentingan pribadi untuk memaksi-

mumkan kesejahteraan orang-orang miskin di desa”, dan petani bekerja dengan sistem untuk memaksimalkan keuntungan (atau meminimumkan kerugian, menurut istilah Hobsbawm). ”Senjata” ini dapat bersifat material atau ideologis (Lichbach, 1994:393). Teknik-teknik atau cara-cara apakah yang merupakan tindakan para petani yang termasuk dalam bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari tapi dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan *selective incentives*, adalah sebagai berikut: (Lichbach, 1994:392-397).

1.1 *Oppportunism, atau Moral Hazard*

Teknik-teknik ini mencakup kegiatan bermalas-malasan, menghindari kewajiban, ogah-ogahan, mengendurkan kerja, atau bekerja lamban, menunjukkan keterlambatan, atau memperlama waktu istirahat makan siang. Membuat perizinan palsu, menyembunyikan atau berbohong, berpura-pura tidak tahu, bersikap masa bodoh.

1.2. *Robbery*

Teknik ini diwujudkan dalam bentuk penyelundupan, menunjukkan tanah tidak sah, menyembunyikan laporan tanah, memanipulasi hasil panen; melebih-lebihkan pencurian, membuka tanah yang belum diusahakan atau menduduki tanah tidak sah.

1.3. *Exit*

Melakukan desersi, melakukan pengrusakan, dan melarikan diri.

2. *Unorganized Rural Protest*

2.1 *Peasant Jacqueries*

Serbuan petani, menyamun, menduduki tanah tidak sah bera- mai-ramai.

2.2 *Food Riots*

Antara lain, merampok hasil panen atau makanan, melakukan pemajakan ala rakyat, mengontrol harga tidak resmi melalui tindakan kolektif, mengambil makanan tanpa membayar.

2.3 *Social Banditry*

Perbanditan sosial yang dilakukan dengan merampok yang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin, seperti Robin Hood.

2.4 *Charivari or "Rough Music"*

Contohnya, seperti membuat keributan dengan suara-suara yang kacau.

2.5 *Preindustrial Crowds*

Contohnya, seperti membobol penjara untuk membebaskan para pendukung, para pemimpin, atau teman-temannya.

3. *Organized Rural Rebellion*

Bentuk dari pemberontakan petani yang terorganisir dengan membentuk tentara gerilya, atau tentara gerilya petani.

Kalau semua gerakan petani pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana raihan keuntungan atau "iming-iming" yang akan mereka terima melalui partisipasinya dalam tindakan kolektif pembangkangan tersebut, pertanyaan yang segera muncul:

Pertama, di bawah kondisi apakah *selective incentives* yang bersifat material menjadi sentral dalam perjuangan petani? Kapan dan di mana hal-hal yang bersifat non-material dan altruistik menjadi titik berat yang menonjol? Kedua, di bawah kondisi apakah *selective incentives* yang bersifat material efektif dalam memobilisasi petani untuk melakukan pembaharuan atau revolusi? Kapan dan di mana dia menjadi *counter-productive*, dan merugikan dalam kehidupan para petani?

Level dari *selective incentives* dalam tiap-tiap pergolakan petani adalah

fungsi dari permintaan dan penawaran. Petani membutuhkan *selective incentives*. Pemasok-pemasok yang potensial meliputi satu atau lebih organisasi petani pembangkang, para pemegang otoritas di desa, atau aliansi dari keduanya. Kepentingan petani terhadap *selective incentives* adalah suatu fungsi dari penghasilannya. Petani yang lebih kaya dapat menunjukkan secara lebih baik apa yang memotivasi mereka melalui pertimbangan-pertimbangan mereka yang bersifat non-materialistik. Mereka memperoleh kemewahan dari hal-hal yang berhubungan semata-mata dengan hak-hak politik, keadilan sosial, moralitas umum, dan *economic fairness*. Petani menengah dan petani yang lebih miskin dapat diperkuat posisi ekonomi mereka melalui kebutuhan *selective incentives* yang mereka peroleh dari dukungan mereka terhadap gerakan-gerakan petani pembangkang. Sepanjang mayoritas petani adalah menengah dan miskin, pencarian keuntungan pribadi dalam pertukaran partisipasi berpengaruh pada kebanyakan aktivitas politik petani. Kebutuhan-kebutuhan khusus mereka berdampak terhadap kualitas, kuantitas, waktu, dan arah dari sumbangannya, yang ditentukan oleh beberapa faktor.

Pertama, petani membutuhkan kompensasi untuk sesuatu biaya pribadi yang mereka keluarkan ketika berpartisipasi dalam protes pedesaan. Beberapa petani memberikan pengorbanan yang tulus. Beberapa lainnya rela mengeluarkan biaya pribadi secara cepat tanpa menerima keuntungan pribadi secara cepat pula. Kebanyakan para pembangkang potensial lebih suka memilih: "Saya tidak akan terlibat di dalam politik, kalau saya tak memperoleh sesuatu pun darinya". Kedua, kegunaan *selective incentives* akan menentukan apakah petani akan memutuskan atau tidak untuk ikut dalam protes pedesaan. Petani lebih suka melakukan protes bila keuntungan umum disertai ganjaran pribadi. Ketiga, petani baru akan mau terlibat dalam protes hanya apabila melalui gerakan tersebut dapat memperlihatkan *selective incentives*.

Keempat, para petani memilih untuk berpartisipasi hanya dalam ben-

tuk-bentuk tindakan tertentu, dan tidak dalam bentuk tindakan lainnya, karena kegunaan *selective incentives* secara relatif. Misalnya, beberapa bentuk perlawanan sehari-hari petani tidak merupakan *selective incentives* material. Perlawanan secara simbolis atau ideologis terjadi ketika menolak sebutan-sebutan penghinaan, dan merendahkan derajat kehormatan. Serangan secara verbal kepada para elite desa mencakup gosip, umpatan, menggunakan nama tambahan, dan pembunuhan karakter. Mereka menggunakan kekuatan meliputi serangan kepada elite desa (seperti memukul dan membunuh) maupun serangan pada harta milik kekayaannya (seperti membakar dan menyabot tanaman, persediaan pangan, dan kebutuhan). Petani menggunakan perlawanan simbolis, perang kata-kata, dan menggunakan kekerasan tak berulang-ulang/sering daripada bermalas-malasan, menipu kerja, dan menyamun. Pendeknya, petani dapat merampok daripada menghancurkan harta kekayaan, bentuk perlawanan sehari-hari petani dapat mencakup lebih berupa pencurian daripada pembakaran, lebih memaksa daripada membunuh, lebih ogah-ogahan daripada mengumpat (Lichbach, 1994:400-401).

Lembaga-lembaga yang diatur sendiri oleh petani adalah penting pada masa perlawanan sehari-hari. Institusi sedemikian ini diciptakan guna mengurangi biaya untuk mendapatkan *selective incentives*. Ada lima teknik pengurangan biaya yang digunakan: Pertama, para petani menerima "persekongkolan diam" (*conspiracy of silent*). Scott menyatakan bentuk perlawanan sehari-hari tidak dapat ditumbuhkan tanpa adanya kejujuran yang tinggi dalam kerja sama di antara kelas-kelas yang melakukan perlawanan. Brown menyatakan, "persengkongkolan diam" para petani terdiri dari tiga unsur, menolak melaporkan kejahatan, menolak mengidentifikasi pelaku kejahatan, dan menolak menyatakan yang sebenarnya tentang kejahatan. Kedua, para petani tak menggunakan organisasi formal. Kebanyakan bentuk perlawanan sehari-hari dalam kenyataannya tak terencana dan tidak sistematis. Ketiga, petani tak membuat bentuk perlawanan sehari-hari me-

reka bagian dari suatu deklarasi perjuangan secara terbuka --agaknya mereka menjalankannya secara diam-diam. Mereka tidak mengambil jalan konfrontasi langsung dengan penguasa, juga mereka tidak memperlihatkan lambang tantangan umum terhadap struktur kekuasaan yang ada. Keempat, petani menjalankan bentuk perlawanan sehari-hari dalam skala yang kecil dengan menghindarkan biaya-biaya organisasional dari mobilisasi simultan para simpatisan. Kelima, petani menyamarkan/menyembunyikan bentuk perlawanan sehari-hari dengan melakukan kegiatan *klandestin*, rahasia dan diam-diam. Scott menunjuk beberapa ancaman orang bertopeng di malam hari (*nocturnal threats by masked men*).

Ringkasnya, bentuk perlawanan sehari-hari petani berakar di dalam lembaga yang bersifat kerja sama, informal, tidak dinyatakan, berskala kecil dan rahasia. Persetujuan sedemikian ini memenuhi apa yang dikehendaki petani karena mereka menurunkan biaya untuk *selective incentives*, biaya yang harus dibayar dalam pengertian penindasan ekonomi dan tekanan secara politik (Lichbach, 1994:402-403).

Dua kesimpulan yang dapat ditarik dari hubungan antara *selective incentives* dengan tindakan kolektif petani, adalah: Pertama, kebutuhan pokok (*public good*) sendiri tak pernah cukup untuk memulai suatu pemberontakan petani. Prospek dari *selective incentives* yang bersifat material harus merupakan sesuatu yang masuk di dalam gambaran para petani tersebut. Kedua, *selective incentives* sendiri tak pernah cukup untuk mendorong suatu pemberontakan petani. Agar efektif, *selective incentives* harus dikaitkan dengan imbauan-imbauan yang bersifat ideologis. *selective incentives* tanpa ideologi politik hanya akan bersifat *counter-productive* (Lichbach, 1994:416).

Bagaimana menempatkan teori pembangkangan terselubung petani TRI ini dalam konteks di atas, adalah dengan melihat teori ini tak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria yang diajukan Scott maupun Popkin. Dilihat dari kriteria Scott, pembangkangan terselubung petani

TRI merupakan bentuk dari perlawanan sehari-hari, namun bukan di dalam konteks ideologis sebagaimana digambarkan Scott untuk perlawanan sehari-hari itu. Para petani TRI hampir-hampir tak memiliki serangkaian kesadaran ideologis dalam pengertian melakukan serangan secara verbal, tapi lebih bersifat material demi mempertahankan keamanan subsistensi mereka.

Bahkan tidak sebagaimana dikemukakan Scott, teori pembangkangan terselubung ini hadir di dalam konteks lemahnya komunitas dan tradisi-tradisi sosial desa. Program TRI berjalan dalam konteks ketika kesadaran komunitas itu memudar, bahkan makin tergerusnya ikatan-ikatan patron-klien. Penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah Kecamatan Papar menunjukkan, pada dasarnya masyarakat petani di wilayah ini telah mengalami rasionalisasi dan komersialisasi yang merombak banyak tatanan tradisi pertaniannya, terutama dalam hubungan sistem bagi hasil dan pengolahan tanah (Siahaan, 1980).

Demikian juga dengan teori pilihan rasional Popkin, sebagaimana telah dikemukakan di atas, pembangkangan terselubung tak dapat dijangkau oleh teori ini, tapi juga dalam pembangkangan terselubung ini tak ada keterkaitan secara politis. Para petani TRI itu hanya diikat oleh kesamaan pengalaman kerugian yang dikalkulasi untuk memilih ikut atau tidak ikut dalam program. Dengan kata lain, kalau Popkin menganggap gerakan petani hanya bisa dilakukan dengan bantuan organisasi dari luar desa, namun dalam konteks pembangkangan terselubung petani TRI ini konteks politis sedemikian itu tidak dimungkinkan.

Namun dalam konteks masyarakat petani TRI ini, apa yang dibayangkan Popkin dengan *political entrepreneur*, atau campur tangan organisasi politik dari luar masyarakat petani sebagaimana dikemukakan Race itu hampir-hampir tak mungkin, dengan keputusan tentang *floating mass*, di mana masyarakat desa tak mungkin terlibat dalam organisasi politik.

Kalaupun ada campur tangan politik dari luar desa, itu terjadi dalam

sejarah petani tahun limapuluhan, ketika organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) mendorong petani melakukan radikalisisasi. Sebagaimana kata Gerrit Huizer:

"Pendekatan *betting on the strong* dalam usaha-usaha perkembangan menyebabkan bertambahnya golongan-golongan yang tak mempunyai hak yang penuh dalam masyarakat (*underprivileged classes*), terutama petani-petani, dengan memperkuat sistem perlindungan (*patronage*) dan penguasaan (*domination*) tradisional. Frustrasi ini bisa memberi alasan untuk menciptakan suatu gerakan kontra yang akan mengubah sistem tradisional itu menjadi radikal. Titik-titik pertentangan (*counter points*) yang terdapat dalam sistem tradisional dapat dipakai sebagai titik tolak gerakan kontra yang semakin menjadi kuat kalau semakin ditindas. Gerakan kontra ini akhirnya dapat menjadi suatu konfrontasi yang nyata dan terbuka dengan sistem lama apabila sistem tersebut tidak fleksibel untuk mendengar, serta memperhatikan aliran-aliran yang baru. Semua orang tahu, situasi-situasi konflik sosial lebih baik untuk terciptanya golongan-golongan *cohesive interest* (yang saling berpautan *interest-nya*) daripada situasi-situasi di mana konflik-konflik serupa itu tidak ada. Memiliki suatu "golongan yang bereferensi negatif" bisa membantu menciptakan suatu organisasi yang kuat apabila dilakukan secara sistematis.

Dalam tahun limapuluhan, rasa curiga, serta tidak puas yang terdapat di daerah-daerah di pedalaman Jawa, dapat menjadi titik tolak kegiatan organisasi petani yang paling menyolok dari sejarah modern.

Organisasi itu ialah Barisan Tani Indonesia (BTI). Di beberapa daerah, khususnya di Jawa Tengah, pemimpin-pemimpin BTI atau Partai Komunis Indonesia (PKI) perlahan-lahan mengambil alih posisi-posisi resmi dari golongan elite yang tua (*established*) sesudah kegiatan organisasi mulai berjalan lancar. Kader-kader BTI dan PKI harus menunjukkan, mereka dapat bersaing secara efektif dengan pemimpin-pemimpin tradisional yang ada, yang terlindungi dengan kuat sekali di desa-desa, serta yang diperkuat baik oleh sistem perlindungan (*patronage*) tradisional maupun oleh program-program perkembangan modern." (Huizer, 1971).

Namun trauma politik akibat pemberontakan PKI pada tahun 1965 telah menciptakan regulasi politik baru di pedesaan dengan konsep *floating mass*, sehingga apa yang dibayangkan Popkin dengan *political entrepreneur* di daerah pedesaan Indonesia adalah tidak mungkin.

Semua uraian di atas menunjukkan, perlawanan-perlawanan kaum

tani berlangsung sepanjang sejarah dalam hubungan antara yang kaya dengan yang miskin, dan dalam hubungannya dengan pemerintah. Bahkan di dalam kehidupan petani di masa kolonial, akibat meluasnya perkebunan tebu dan hadirnya pabrik-pabrik gula di Jawa, sebagaimana dilukiskan dengan bagus oleh Breman (1983). Atau sebagaimana studi yang dilakukan Margo Lyon yang menyatakan, dasar-dasar konflik di pedesaan Jawa adalah karena faktor penguasaan tanah, hubungan sewa tanah dan bagi hasil yang semakin tak menguntungkan petani penyakap dengan adanya pengaturan jangka pendek yang tak tertulis, yang memungkinkan tuan tanah membuat perubahan sewenang-wenang, atau bahkan mengakhiri kontrak untuk mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan penyakap lain (Tjondronegoro, 1984:180).

Mengikuti kategori yang diajukan Lichbach, pembangkangan terselubung ini termasuk ke dalam bentuk perlawanan sehari-hari, terutama pada kategori melakukan desersi, keluar dari sistem produksi. Pilihan untuk kategori "exit" ini demi suatu *selective incentives*, sebab dengan pilihan tersebut para petani mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun aman secara politis. Namun justru di sini ironi dari "pembangkangan terselubung" tersebut, para petani melakukannya dari kerugian yang dialaminya. Keluar dari sistem produksi dengan menyerahkan satu-satunya tumpuan hidup yakni tanah, namun masih dianggap lebih menguntungkan daripada ikut dalam proses produksi mengolah tanah tersebut. Pilihan melakukan "exit" dalam *everyday forms of peasant resistance* itu didorong oleh suatu kesadaran mendapatkan *selective incentives*, baik secara ekonomis maupun politis, tidak mendapat stigma menghambat jalannya pembangunan, tidak dipersulit dalam berbagai regulasi perizinan, dan lainnya.

Pilihan atas dasar sedemikian itu dengan *selective incentives* yang diterima petani selayaknya dipahami dalam konteks TRI sebagai program negara melalui Inpres No. 9/1975, yang pada dasarnya membentuk TRI sebagai suatu sistem usaha tani kontrak dengan segala konsekuensi yang tim-

bul daripadanya. Dengan demikian, sekalipun tanpa dukungan ideologis, hingga pembangkangan terselubung sedemikian itu bersifat *counter-productive*, khususnya dalam membangun suatu tindakan kolektif secara terbuka dan terorganisir.

Ironi yang lain dalam pembangkangan terselubung ini, pilihan untuk keluar dari sistem produksi itu justru menghasilkan efisiensi bagi sistem TRI, di mana lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya lebih mudah mengorganisir produksi. KUD lebih mudah berurusan dengan ketua kelompok daripada dengan banyak petani, pihak pabrik gula lebih efisien sebab hanya berhubungan dengan petani-petani yang jumlahnya sedikit. Bahwa efisiensi sedemikian ini bukan merupakan tujuan dari sistem TRI sebagaimana dikehendaki Inpres No. 9/1975, adalah soal lain. Tapi memang di sanalah batas-batas dan konsekuensi yang ditimbulkan pembangkangan terselubung sebagai bentuk perlawanan sehari-hari petani dalam program TRI.

4.2 Pembangkangan Terselubung dalam Konteks Hegemoni Negara

Dalam kepustakaan teoritis tentang revolusi, akan dijumpai berbagai versi gagasan tentang negara dan masyarakat, khususnya di dalam argumen Gurr mengenai deprivasi relatif dan sistem-sistem dari teoritikus Chalmers Johnson. Gurr maupun Johnson menganggap, kekuasaan dan stabilitas pemerintahan tergantung langsung pada kecenderungan kemasyarakatan dan dukungan rakyat. Mereka tidak yakin organisasi-organisasi kekerasan negara dapat secara efektif menekan (untuk jangka waktu lama) sebagian besar rakyat yang kecewa, atau yang tak mendukung pemerintah. Negara dalam teori mereka adalah suatu aspek, konsensus yang bermanfaat atau *utilitarian consensus* (Gurr); atau aspek konsensus nilai (Johnson) dalam masyarakat. Negara dapat menggunakan paksaan dengan mengatasnamakan konsensus dan legitimasi umum. tapi hal seperti ini tak dapat ditemukan dalam paksaan yang diorganisir.

Sebaliknya, teoritis Marxis --dan dalam beberapa hal pada teori konflik politik Tilly-- juga memandang negara pada dasarnya sebagai paksaan yang diorganisir. Bagian penting dari model masyarakat politik Tilly, adalah definisinya tentang pemerintah sebagai "suatu organisasi yang mengendalikan sarana-sarana pemaksaan utama dalam masyarakat" (Scokpol, 1991:22). Negara menjadi alat (pada dasarnya memaksa) yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok "anggota" dari pemerintahan, kelompok-kelompok yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan (Scokpol, 1991:23).

Negara mengembangkan ideologi dominan untuk menekan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pertanyaannya, apakah fungsi ideologi dominan bagi kelas dominan? Marx dan Engels setidaknya secara implisit telah mengembangkan dua teori ideologi. Pertama, rumusan yang menyatakan "kondisi sosial menentukan kesadaran", yang biasa ditafsirkan sebagai "kelas sosial menentukan kesadaran". Setiap kelas, berdasarkan hubungan khususnya dengan alat produksi, dan di luar kondisi eksistensinya yang umum, menghasilkan bagi dirinya sendiri (khususnya melalui media para intelektual kelas) suatu kebudayaan yang mencerminkan kondisi materialnya. Karena kelas-kelas sosial mempunyai kondisi ekonomis yang berbeda, mempunyai kepentingan yang berbeda, maka ide-ide yang digenggam masing-masing kelas mencerminkan dan mengembangkan kepentingan yang terpisah. Singkatnya, masing-masing kelas membentuk sistem kepercayaannya sendiri. Seperti dikatakan Marx dalam *The Eighteenth Brumaire of Louise Bonaparte*:

"Berdasarkan bentuk-bentuk hak-milik yang berbeda, berdasarkan kondisi sosial yang ada, muncul suprastruktur yang sama sekali berbeda dan terutama dalam bentuk sentimen, ilusi, cara berpikir dan pandangan hidup yang berbeda. Semua kelas menciptakan dan membentuk tradisi berpikir dan sistem pendidikan mereka sendiri." (Abercrombie dan Turner. dalam Giddens dan Held. 1982:397).

Teori kedua, juga berasal dari prakata bukunya, menyatakan struktur ekonomi masyarakat adalah fondasi nyata yang menentukan suprastruktur politik dan hukum. Teori yang menyatakan fondasi menentukan suprastruktur ini dapat ditafsirkan menurut hubungan kelas dengan melihat fondasi itu (yakni hubungan-hubungan dan kekuatan-kekuatan produksi) berhubungan dengan kelas dominan dan kelas yang ditundukkan --yang masing-masing melaksanakan fungsi kapital dan fungsi tenaga kerja. Singkatnya, kelas dominan melaksanakan fungsi tenaga kerja. Fondasi menentukan suprastruktur, berarti, setiap cara produksi mempunyai sebuah kelas dominan yang menyebabkan timbulnya suatu ideologi dominan. Pengaruh ideologi dominan itu adalah memudahkan menundukkan kelas pekerja. Versi klasik teori ini terdapat dalam *The German Ideology*, tempat Marx dan Engels menyatakan ide mereka sebagai berikut:

"Kelas yang berkuasa di setiap zaman sekaligus adalah ide yang berkuasa. Artinya, kelas yang menguasai kekuatan material masyarakat, sekaligus menguasai kekuatan-kekuatan intelektual masyarakat bersangkutan".

Karena setiap cara produksi mempunyai sebuah kelas dominan yang mengontrol baik produksi material maupun produksi mental, maka setiap cara produksi mempunyai sebuah ideologi dominan. Kelas dominan mampu memaksakan sistem kepercayaannya kepada semua kelas yang lain. Adopsi ideologi kelas penguasa oleh kelas yang ditundukkan, mencegah perkembangan kesadaran revolusioner, dan dengan demikian membantu reproduksi kondisi penyerahan surplus tenaga kerja yang ada (Abercrombie dan Turner, 1982:398).

Asumsi dasar teori *ruling ideas* --"ide yang berkuasa"-- adalah kelas dominan (karena ide tersebut mengendalikan alat produksi mental) mampu memaksa atau setidaknya menjamin kelas yang ditundukkan akan berpikir menurut konsep-konsep yang ditetapkan oleh sistem keyakinan kelas dominan. Ini juga berarti, pemberontakan dan protes kelas bawah diungkapkan

melalui media ideologi dominan, karena segala pemikiran berbentuk oposisi jelas tak diperkenankan. Paling tidak, teori ini berasumsi, ada semacam kultur umum yang dimiliki bersama setiap kelas, dan isi, serta tema kultur umum itu ditentukan oleh kelas dominan. Dalam kenyataan, biasanya kelas yang ditundukkan tidak mempercayai (menerima atau memiliki bersama) ideologi dominan itu. Ideologi dominan itu lebih banyak bermakna bagi integrasi dan pengendalian kelas dominan itu sendiri.

Pengamatan Marx ini telah dikembangkan oleh kaum Marxis, seperti Althusser dan Poulantzas sehingga menjadi berarti, dasar ekonomi yang menentukan struktur politik (politik, ideologi atau ekonomi) dalam setiap cara produksi itu adalah dasar ekonomi dominan. Singkatnya, pandangan tentang struktur politik dan ideologi ini berarti, cara produksi tertentu membutuhkan dukungan fungsional dari "faktor-faktor non-ekonomis". Dalam feodalisme misalnya, tuan tanah melalui hak-hak adatnya memiliki hak istimewa tertentu dalam penggunaan tanah, masih membutuhkan alat-alat ekstra untuk memaksakan penyediaan tenaga kerja dari kaum tani. Karena itulah Poulantzas ingin menyatakan, agama adalah aspek dominan dari struktur ideologi dalam masyarakat yang ditandai oleh cara produksi feodal. Teori ini secara tersirat hendak menyatakan, menurut model "ide yang berkuasa", petani menganut "agama" tuan tanah feodal, atau dengan memakai istilah yang disukai Poulantzas, petani "dicemarkan" oleh ideologi tuan tanah dengan efeknya kepentingan revolusioner mereka dihambat. (Abercrombie dan Turner, 1982:400-401).

Ideologi dominan ini dalam konsep Gramsci disebut *hegemoni*, yang disebut-sebut juga sebagai revisi terhadap Marxisme ortodoks. Gramsci membagi suprastruktur menjadi dua tingkatan: satu tingkatan yang bisa disebut "masyarakat sipil", yakni kumpulan organisme yang lazim disebut "privat", dan "masyarakat politik" atau "negara". Kedua tingkatan ini berkeseuaian di satu pihak dengan fungsi hegemoni yang dilaksanakan kelompok dominan di seluruh masyarakat, dan di pihak lain, dengan dominasi lang-

sung yang diekspresikan melalui negara dan pemerintah yuridis.

Kedua fungsi ini berhubungan. Perangkat institusi yang pertama memperoleh persetujuan spontan dari massa rakyat terhadap arah umum yang dipaksakan pada kehidupan sosial oleh kelompok fundamental yang dominan. Persetujuan ini mempunyai sumber sejarah dalam prestise (dan kepercayaan diri) yang dimiliki kelompok dominan berkat posisi dan fungsinya dalam dunia produksi. Alat-alat "kekuasaan yang memaksa dari negara" secara legal "memaksakan disiplin" ketika persetujuan tak didapatkan. Hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok, atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kapitalisme masih bertahan karena pekerja menerima keadaan umum ini --dominasi budaya borjuasi membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan-- sehingga, massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara bisa terjadi.

Pentingnya arti faktor-faktor budaya bagi Gramsci menandai suatu perbedaan yang signifikan dengan ekonomisme Marxisme klasik. Kelas-kelas penguasa memaksakan visi hegemoni mereka melalui berbagai institusi suprastruktur, seperti sekolah, media, agama, dan praktek manusia sehari-hari. Hegemoni kelas penguasa dipertahankan melalui anggapan palsu, kebiasaan dan kekuasaan mereka merupakan hal-hal yang tak terhindarkan (Bellamy, 1990:184-185). Namun konsepsi hegemoni Gramsci tak terpisahkan dari interpretasinya terhadap Marx. Hegemoni hanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh kelas "fundamental" yang melakukan fungsi progresif dalam perekonomian, dan mengembangkan hubungan-hubungan yang implisit dalam basis, karena jika hegemoni bersifat *etiko-politik*, ia juga harus bersifat ekonomis, dan harus berdasarkan fungsi menentukan yang dilakukan oleh kelompok utama dan *nucleus* aktivitas ekonomi yang menentukan (Bellamy, 1990:195).

Dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari,

konsep hegemoni Gramsci ini ditolak oleh Scott dengan mengatakan, ternyata para petani dapat melakukan penetrasi terhadap hegemoni tersebut. Sebagaimana dikemukakan Scott, hegemoni adalah istilah yang dinamakan Gramsci untuk terjadinya proses dominasi secara ideologis. Ide pokok di belakang konsep ini adalah klaim, dominasi kelas penguasa tidak hanya meliputi sarana-sarana produksi fisik, tapi juga dominasi atas sarana-sarana produksi simbolik. Penguasaan terhadap kekuatan-kekuatan produksi material direplikasikan pada tingkat idea-idea, di mana hal itu terlihat dalam penguasaan sektor-sektor ideologis masyarakat, seperti budaya, agama, pendidikan, dan media, melalui cara-cara yang diizinkan untuk menanamkan nilai-nilai yang memperkuat posisi para penguasa.

Apa yang dilakukan Gramsci ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar kelembagaan dari kesadaran palsu. Namun konsep hegemoni, dan dalam hubungannya dengan konsep kesadaran palsu, mistifikasi, dan ideologisasi aparatur negara, tak hanya gagal untuk memahami hubungan-hubungan kelas di Sedaka, tapi juga menyesatkan secara serius dalam upaya memahami konflik kelas di dalam banyak situasi. Argumen yang diajukan untuk pernyataan itu adalah:

"First, the concept of hegemony ignores the extent to which most subordinate classes are able, on the basis of their daily material experience, to penetrate and demystify the prevailing ideology.

Second, theories of hegemony frequently confound what is inevitable with what is just, an error that subordinate classes rarely, if ever, make. This conclusion stems from a surface examination of public action in power-laden situations that overlooks both the 'hidden transcript' and the necessity of routine and pragmatic submission to the 'compulsion of economic relations' as well as the realities of coercion.

Third, a hegemonic ideology must, by definition, represent an idealization, which therefore inevitably creates the contradictions that permit it to be criticized in its own terms. The ideological source of mass radicalism is, in this sense, to be sought as much within a prevailing ideological order as outside it.

Fourth, a historical examination of the rank and file nearly any manifestly revolutionary mass movement will show that the objectives sought are

usually limited and even reformist in tone, although the means adopted to achieve them may be revolutionary. Thus, 'trade union consciousness' is not, as Lenin claimed, the major obstacle to revolution, but rather the only plausible basis for it.

Fifth, historically, the breaking of the norms and values of a dominant ideology is typically the work of the bearers of a new mode of production--for example, capitalist--and not of subordinate classes such as peasants and workers. Thus, subordinate classes are often seen as backward looking, inasmuch as they are defending their own interpretation of an earlier dominant ideology against new and painful arrangements imposed by elites and/or the state". (Scott, 1995:315-318).

Scott menunjukkan, konsep hegemoni Gramsci tak dapat berlaku sepenuhnya, para elite bisa saja menguasai perilaku yang tampak dari orang-orang miskin, tapi mereka tak dapat menguasai pikirannya. Namun kritik Scott terhadap konsep hegemoni Gramsci ini mendapat kritikan dari Timothy Mitchell dalam artikelnya "Everyday Metaphors of Power" (1990) yang menyatakan, ada dua kesalahan yang dilakukan Scott dalam memahami konsep hegemoni Gramsci, yaitu: Pertama, Scott membatasi pengertian dominasi pada tingkat ide (*level of ideas*), bukan mengikuti cara Gramsci menjelaskan istilah hegemoni. Hegemoni dalam tulisan Gramsci menunjuk kepada bentuk-bentuk penguasaan tanpa kekerasan (*non-violent*) dari penguasaan melalui keseluruhan rangkaian lembaga-lembaga budaya yang dominan dan praktek-praktek sosial, dari lembaga-lembaga pendidikan, museum-museum, dan partai-partai politik sampai kepada praktek-praktek keagamaan, bentuk-bentuk arsitektur dan media massa. Di dalam kutipannya tentang Gramsci, Scott juga menambahkan, "sudah barang tentu hegemoni dapat digunakan untuk menunjukkan semua kompleks dari dominasi sosial". Namun istilah yang digunakannya di sini adalah dalam pengertian ideologis atau idealis itu. Dengan kata lain, Scott menitikberatkan hanya pada satu aspek dari karya Gramsci di dalam upayanya menjelaskan paham hegemoni dalam terminologi pertanyaan mempertentangkan *behavior* terhadap *consciousness*.

Kedua, makna pengertian simbolis dalam terminologi di sini lebih dekat dengan pengertian konsensus. Asumsi inti dari hegemoni dan kesadaran palsu adalah untuk memperluas kelas dominan dapat menggiring kelas subordinat menerima pandangan mereka sendiri dari kenyataan hubungan-hubungan sosial, hasilnya adalah ideologi konsensus dan harmoni. Tapi konsensus dalam pengertian Scott di sini, sangat berbeda maknanya dengan apa yang dimaksud Gramsci dengan *consenso*, yang menunjuk secara khusus kepada persetujuan yang secara pasif diterima (*consent given*) oleh kelas yang dieksploitasi terhadap eksploitasi yang terjadi di dalam diri mereka. "Persetujuan secara pasif" ini mengurangi tuntutan akan penggunaan kekerasan untuk menentang mereka, tapi bisa atau tidak bisa menghasilkan konsensus di dalam pengertian harmoni. Mendekati makna hegemoni untuk menunjuk kepada produksi harmoni sedemikian itu, *Weapons of The Weak* di Sedaka dengan cukup mudah menunjukkan hal itu tak ditemukan. Kelompok subordinat di desa menggunakan istilah-istilah dari wacana hegemoni, contohnya adalah pemahaman dari karitas dan tolong menolong menjadikannya model, tapi merupakan klaim yang sangat keras untuk melawan semua yang mengeksploitasi mereka.

Semua bentuk perlawanan diam-diam itu, seperti yang ditunjukkan oleh Christin White, trik-trik yang dilakukan dengan menambahkan batu, jerami, dan lainnya, untuk menambah berat bagi hasil dari tuan-tuan tanah atau pengumpul-pengumpul pajak dalam hasil panen, barangkali akan memberikan ilusi bagi para petani, mereka lebih memiliki kekuatan dan kemampuan melakukan manuver daripada yang menjadi kenyataannya. Semua itu memang tak efektif, tapi secara psikologis memuaskan bentuk-bentuk perlawanan yang dalam kenyataannya dapat menyumbang kepada kesadaran palsu, membutakan mata rakyat dari warna-warni kenyataan dari makin luasnya ketidakberdayaan dan eksploitasi terhadap diri mereka (Mitchell, 1990:555).

Tak dapat dipungkiri, TRI sebagai *contract farming* melahirkan pula

suatu hegemoni negara terhadap para petani tersebut. Namun dalam pembangkangan terselubung yang dilakukan petani TRI, sesungguhnya lebih merupakan kesadaran material --untuk mempertahankan batas subsistensi-- daripada kesadaran untuk melawan hegemoni ideologis. Dalam hal ini hegemoni ideologis negara dalam bentuk "partisipasi pembangunan" masih tetap terjadi, dan dalam kondisi sedemikian itu petani lebih memilih keluar dari sistem produksi daripada harus berhadapan dengan hegemoni ideologis yang tak mungkin ditolaknya, sebab bagaimanapun, hegemoni negara adalah "kekuasaan untuk mendefinisikan apa yang realistik" bagi kehidupan petani TRI tersebut, sekalipun apa yang dimaksud dengan yang realistik itu berbeda di dalam kenyataan sehari-hari yang dialami para petani. Apa yang realistik dalam hegemoni negara untuk menjadikan petani sebagai "tuan" di atas tanahnya sendiri, ternyata di dalam kenyataannya, para petani tersebut jauh daripada menjadi "tuan".

4.3 Kesimpulan

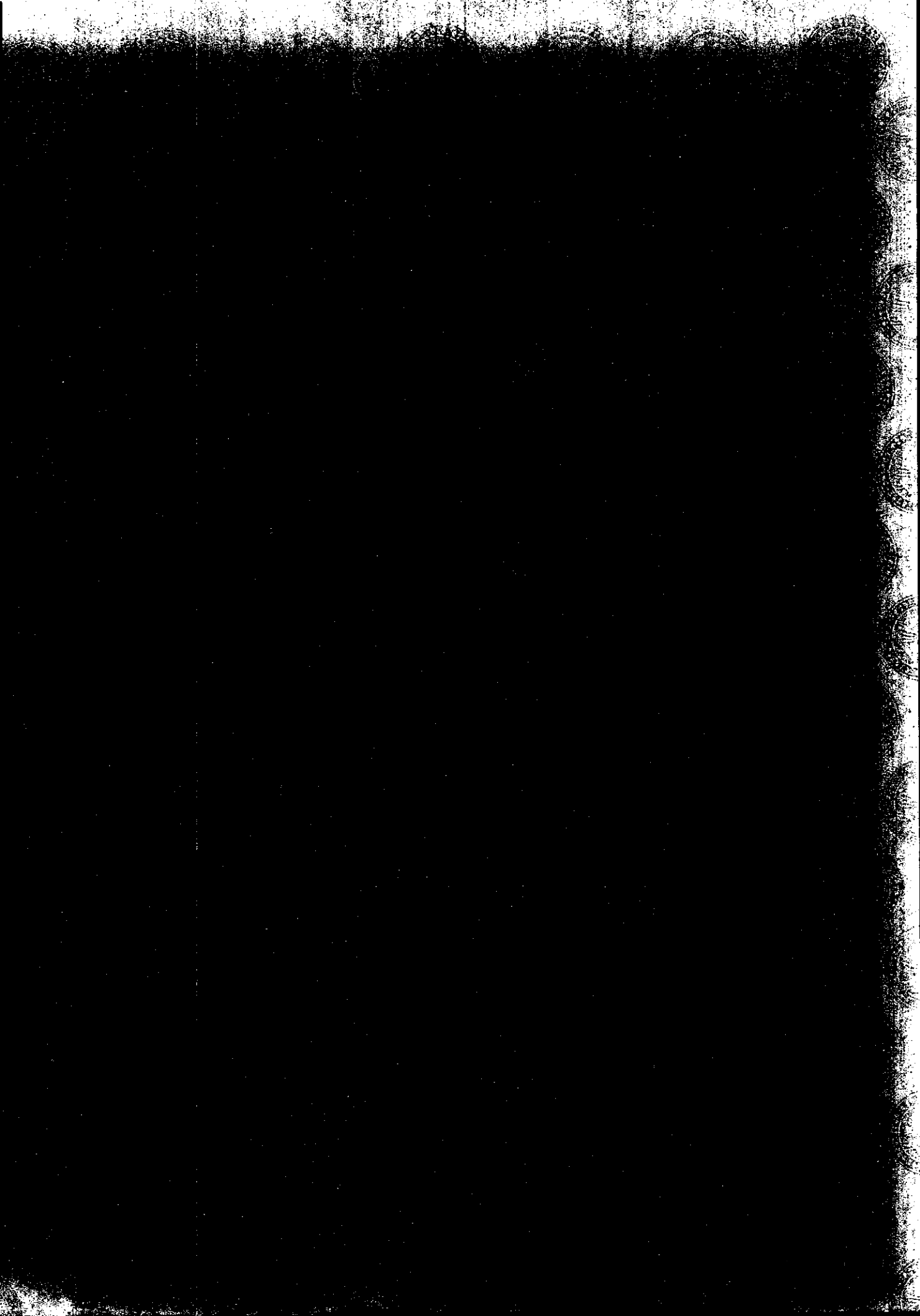
Dengan keseluruhan uraian di atas, kesimpulan yang dapat dirumuskan untuk menjelaskan posisi teoritis pembangkangan terselubung petani TRI di dalam konstelasi teori-teori gerakan sosial petani adalah:

1. Pembangkangan terselubung petani adalah suatu bentuk perlawanan sehari-hari petani di dalam konteks memudarnya ikatan-ikatan komunitas desa, dan menguatnya hegemoni negara dalam menentukan apa yang realistik bagi kehidupan petani.
2. Pembangkangan terselubung petani adalah pembangkangan yang dilakukan secara rasional, individual, namun masing-masing pelaku individual tersebut diikat oleh pengalaman yang sama dalam realitas hubungan-hubungan produksi yang memarginalisasikan tingkat subsistensi mereka.

3. Sebagai bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat rasional, pembangkangan terselubung mewujud terutama dengan keluar dari sistem produksi, sebagai suatu alternatif untuk mendapatkan *selective incentives* bersifat material, namun tidak atas dukungan ideologis.
4. Pembangkangan terselubung tidak didasarkan atas kesadaran kelas, sebab struktur desa dengan dukungan hegemoni negara, tidak memungkinkan terjadinya proses pembentukan kesadaran kelas. Karena itu pembangkangan terselubung bukan merupakan konflik kelas di pedesaan.
5. Pembangkangan terselubung dilakukan dari kondisi yang marginal, dalam pengertian mengurangi kerugian seminimal mungkin dari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh proses produksi. Pembangkangan sedemikian ini justru merupakan keuntungan tersendiri, tidak saja bagi petani yang melakukannya, tapi juga bagi sistem produksi, di mana efisiensi produksi justru diperoleh, sekalipun efisiensi sedemikian itu menyimpang dari idealisasi sistem produksi yang dikehendaki negara melalui Inpres No. 9/1975.
6. Pembangkangan terselubung bersifat *counter-productive* dalam gerakan petani yang bersifat terbuka, terorganisir, dan bersifat politis, karena penetrasi yang dilakukan pembangkangan ini hanyalah dalam konteks hegemoni non-ideologis. Proses pembangkangan itu berlangsung di dalam konteks hegemoni ideologis negara.
7. Pembangkangan terselubung dilakukan di dalam konteks mempertahankan subsistensi, dan peluang pembangkangan itu terbuka dengan adanya pilihan-pilihan untuk mendapatkan subsistensi di luar sistem produksi TRI.
8. Pembangkangan terselubung tak dapat dimasukkan ke dalam teori model Pilihan Rasional, juga teori Mobilisasi Sumber Daya, namun

berada di antara keduanya, yaitu eklektisasi dari model Pilihan Rasional dan model Pilihan Sumber Daya.

9. Pembangkangan terselubung petani dipengaruhi oleh gagalnya lembaga-lembaga yang mengatur sistem produksi untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan petani miskin.
10. Pembangkangan terselubung adalah upaya untuk menempatkan diri petani sebagai "tuan" atas sistem produksi yang dipilihnya, sebagai alternatif, akibat gagalnya organisasi produksi untuk menjadikannya "tuan di atas tanahnya sendiri" sebagaimana dikehendaki oleh sistem produksi dalam TRI.



BAB 5

RANGKUMAN DAN KESIMPULAN UMUM

5.1 Rangkuman

Bentuk-bentuk perlawanan petani di banyak tempat dan masa, pada dasarnya selalu bertumpu pada upaya para petani tersebut untuk mempertahankan batas-batas subsistensi. Ancaman pada batas subsistensi itu disebabkan banyak faktor, demografis, sosial, politis, dan ekonomis. Masuknya program *Revolusi Hijau*, perluasan pasar, di daerah pedesaan, merupakan faktor paling besar dalam mendorong meluasnya komersialisasi dan rasionalitas baru di dalam proses produksi dan hubungan-hubungan sosial pedesaan. Sebagian dari perubahan ini menimbulkan gelombang protes di dalam masyarakat petani miskin yang mengalami marginalisasi dalam hubungan produksi yang baru, sebagian lagi dapat bertahan, dan sebagian lagi bahkan justru memanfaatkan perubahan tersebut untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Namun banyak kehidupan petani yang dilanda perubahan menimbulkan berbagai pergolakan, gelombang protes, dan berbagai bentuk perlawanan. Ketika perubahan itu mengubah bentuk-bentuk produksi mereka, bersamaan dengan itu pula terjadi proses perubahan pada sistem sosial, sistem nilai-nilai, serta ikatan-ikatan komunitas. Pada dasarnya bentuk produksi (*mode of production*) bermacam-macam. Samir Amin dalam bukunya *Unequal Development* mengemukakan lima model bentuk produksi di dalam kehidupan masyarakat, yang pada dasarnya menjelaskan bagaimana status dan peran individu di dalam masyarakat ditentukan oleh model produksi

yang tercipta di dalam masyarakat tersebut. Lima model produksi yang dikemukakan Amin, pertama, model produksi gotong royong (*the primitive-communal mode*). Kedua, model produksi pembayaran (*the tribute-paying mode*). Ketiga, model produksi pemilihan budak (*the "slaveowning" mode of production*). Keempat, model produksi perdagangan sederhana (*the "simple petty-commodity" mode of production*). Dan kelima, model produksi kapitalis (*the "capitalist" mode of production*) (Amin, 1976:13-14).

Masing-masing model produksi tersebut mempengaruhi pola-pola hubungan dan formasi sosial (*social formation*) di dalam masyarakat tersebut. Model produksi gotong royong misalnya, ditandai oleh bagaimana organisasi buruh pekerja lebih ditekankan pada individu atau keluarga batih, tidak adanya pertukaran perdagangan dan pembagian produksi menurut organisasi pertalian keluarga. Sedangkan struktur masyarakat di dalam model produksi pembayaran ditandai oleh pemisahan masyarakat ke dalam dua kelas pokok, yaitu di satu pihak masyarakat petani yang terorganisasi di dalam komunitas, dan di pihak lain golongan penguasa yang memonopoli fungsi organisasi politik masyarakat --di mana golongan ini menerima upeti pembayaran dari golongan yang pertama. Sedangkan di dalam model produksi pemilihan budak, atau lebih tepat disebut model produksi feodal, ditandai oleh pemisahan masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu kelas penguasa-penguasa tanah (yang harta bendanya tak dapat diganggu gugat) dan kelas budak sebagai penyewa. Sementara itu, di dalam masyarakat dengan model produksi perdagangan sederhana, ditandai oleh persamaan di kalangan produsen-produsen kecil yang bebas dan organisasi pertukaran barang dagangan di antara mereka. Model produksi kapitalis ini lebih ditandai oleh munculnya industri-industri, dan kehadiran industri tak dapat dilepaskan dari kondisi perubahan masyarakat yang lebih kapitalistis sifatnya.

Dalam model produksi yang kapitalistis, banyak hal terasa mencolok, sebab di dalam bentuk produksi sedemikian ini, semua hasil produksi dianggap sebagai komoditas sebagai hasil dari perluasan dan perkembangan pa-

sar internal. Perluasan pasar serta komersialisasi itulah yang menurut sebagian ahli menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan, pergolakan, dan tindakan-tindakan kolektif petani ke arah pemberontakan, serta revolusi. Lebih dari itu, model produksi yang kapitalistis juga telah menciptakan ketergantungan baru para petani dalam perekonomian di luar sistem ekonominya sendiri, seperti yang digambarkan oleh Johan Galtung, di mana fungsi produksi tanah telah menjadi alat yang digunakan untuk membuka jalur hubungan ketergantungan antara masyarakat "pinggiran" (baca: petani TRI) dan masyarakat "pusat" (baca: negara), dan di dalam hubungan tersebut harus terdapat disharmoni antara "periferi dari periferi" dengan "periferi dari centrum", dan sesungguhnya itulah yang dimaksud dengan imperialisisme (Galtung, 1975).

Pecahnya tradisi-tradisi dan ikatan-ikatan sosial di dalam komunitas petani itu merupakan faktor yang mendorong lahirnya bentuk-bentuk perlawanan, juga dianut banyak orang. Ketika pasar makin terbuka, penetrasi modal masuk ke dalam desa, ketika itu pula sistem produksi berubah, bahkan mengakibatkan gejala "marginalisasi massa", yaitu munculnya proletarisasi petani di pedesaan dan pengangguran terbuka (Amin, 1974).

Tindakan-tindakan kolektif petani juga mengambil berbagai bentuk, mulai dari yang berupa perlawanan sehari-hari, yang tidak terorganisir, sampai pada perlawanan dengan bentuknya yang terorganisir. Dari tujuannya yang hanya sekadar untuk bertahan demi mempertahankan subsistensi di dalam sistem tanpa ada kemampuan untuk mengubah sistem dominasi yang ada, sampai ke perlawanan terbuka secara revolusioner untuk melakukan pembaharuan dan perubahan. Dari perjuangan atas kesadaran individual sampai perjuangan berdasarkan kesadaran kelas, yang semua itu tergantung dari banyak sekali faktor.

Perlawanan petani terhadap budi daya tebu sendiri di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kolonial. Ketika berakhirnya masa Tanam Paksa, dan berkembangnya pabrik-pabrik gula swasta di Pulau Jawa yang mengguna-

kan berbagai cara untuk menekan para petani Jawa agar bersedia menanam tebu dan bekerja di pabrik gula. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut bahkan bersifat terbuka, selain secara terselubung dengan melakukan pembakaran kebun tebu.

Perlawanan terbuka dan revolusioner membutuhkan hubungan dengan kekuatan atau lingkup kekuasaan yang ada di sekitarnya. Pendapat ini mengatakan, untuk dapat melakukan pemberontakan dalam tindakan kolektif, petani harus mempunyai pengaruh internal, yaitu kemampuan melakukan tindakan kolektif yang terorganisir untuk menentang orang-orang yang memeras mereka. Tapi tidak semua bentuk pemberontakan petani dapat diwujudkan secara terorganisir, dan mendapat bantuan dari kekuatan luar desa. Ada faktor-faktor tertentu yang layak diperhitungkan, yaitu tingkat dan jenis solidaritas masyarakat petani, tingkat otonomi petani terhadap pengawasan dan kontrol sehari-hari dari para elite desa termasuk tuan tanah, dan bagaimana tindakan negara terhadap pemberontakan petani.

Dengan keseluruhan latar belakang dan pemahaman terhadap sebab-sebab perlawanan, pemberontakan, atau revolusi petani, pada dasarnya bentuk-bentuk tindakan kolektif tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, tindakan yang dikategorikan sebagai *everyday forms of peasant resistance*. Kedua, yang dikategorikan sebagai *unorganized rural protest*. Dan ketiga, yang dikategorikan sebagai *organized rural rebellion*. Di dalam studi ini, tindakan petani melakukan pembangkangan dalam program TRI dapat dimasukkan ke dalam kategori yang pertama, yaitu *everyday forms of peasant resistance* (bentuk-bentuk perlawanan petani sehari-hari).

Di dalam realitas yang hegemonik, ternyata pembangkangan tersebut tidak mungkin diorganisir, hingga bentuk pembangkangan hanya terjadi di dalam apa yang dikategorikan sebagai *everyday forms of peasant resistance*, dan dalam studi ini pilihannya adalah keluar dari sistem produksi (*exit*:

desertion-defection) dengan mencari alternatif lain demi mempertahankan batas keamanan subsistensi. Sekalipun ada upaya-upaya untuk melakukan penetrasi menentang hegemoni itu, tapi hal itu sebatas hegemoni pada basisnya yang material, bukan hegemoni pada basisnya yang ideologis, sehingga dia bersifat *counter-productive* pada tindakan kolektif. Hegemoni itu berjalan dengan dukungan aparatur negara, dan bahkan sebagaimana kata Althusser, hegemoni negara dan hegemoni aparatur adalah suatu teori efektivitas kekuasaan dari ideologi dan realitas materialnya (Glucksmann, 1980:49). Hegemoni sesungguhnya adalah kekuasaan untuk mendefinisikan apa yang paling realistik bagi masyarakat petani tersebut.

Hegemoni sedemikian itulah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat petani TRI ini. Sekalipun secara ideal program TRI bertujuan menjadikan para petani tersebut "tuan di atas tanahnya sendiri", tapi ternyata hegemoni aparatur, terutama aparatur negara yang terlibat dalam organisasi TRI membuat para petani justru jauh dari menjadi "tuan", sebab sebenarnya mereka malah menjadi buruh di atas lahannya sendiri. Keluar dari sistem produksi, tidak aktif dalam kelompok kolektif TRI, menyiasati *glebagan*, menyiasati tebang-angkut-giling, membakar kebun, adalah bentuk-bentuk pembangkangan terselubung para petani TRI tersebut, sebagai "bentuk perlawanan petani sehari-hari" --sekalipun bukan dalam konteks mempertahankan tradisi dan nilai-nilai sosial lama, mempertahankan hubungan-hubungan produksi lama. Inilah yang membedakan pembangkangan terselubung petani TRI dengan bentuk perlawanan petani sehari-hari sebagaimana dikemukakan Scott. Persamaannya, keduanya sama-sama merupakan *weapons of the weak* (senjata kaum lemah) di tengah-tengah ketidakberdayaan, *alienasi*, akibat hegemoni negara.

Dengan kata lain, bentuk pembangkangan terselubung itu berlangsung bukan di dalam konteks tergerusnya ikatan-ikatan tradisi dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ada di dalam komunitas, melainkan berada di dalam konteks yang individual dan rasional, sebab nilai-nilai komunitas

dan tradisi-tradisi dalam hubungan produksi (khususnya di desa yang di-studi ini) sesungguhnya telah berubah, sehingga berbeda dengan apa yang dibayangkan Scott, pembangkangan terselubung petani TRI di dalam studi ini adalah pembangkangan yang rasional, bukan emosional, tidak atas dasar kepentingan membela tradisi, tapi tetap dalam konteks mempertahankan batas subsistensi. Sekalipun pembangkangan tersebut rasional dan individual, namun berbeda dengan yang dikemukakan oleh Popkin, pilihan rasional tersebut tetap dalam konteksnya yang terselubung, tak bersifat terbuka. Yang mempersatukan tindakan para petani tersebut adalah kesamaan pengalaman hegemonik yang mengancam batas keamanan subsistensi mereka dalam TRI. Bahwa pilihan terselubung itu tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa dari tekanan hegemoni birokrasi TRI, ternyata merupakan suatu "berkah" tersendiri bagi sistem produksi TRI tersebut. Berkah dalam pengertian, senyatanya sistem yang hegemonik itu diuntungkan oleh pembangkangan terselubung para petani itu. Peluang efisiensi dan efektivitas lebih terbuka, sementara bagi para petani, sekalipun tindakan terselubung itu adalah upaya meminimalkan kerugian yang ada pada diri mereka, tapi itulah pilihan yang paling rasional demi mempertahankan keamanan subsistensinya.

Hegemoni itu dapat berlangsung efektif, sebab senyatanya program TRI berubah bentuk menjadi sebuah usaha tani kontrak (*contract farming*) yang merupakan suatu bentuk organisasi produksi yang sangat unik, dan memiliki dimensi-dimensi politik-ekonomi yang lebih luas daripada sekadar satu model interaksi dalam produksi pertanian. Di samping model *contract farming* ini menunjukkan adanya suatu proses transformasi pengorganisasian alat-alat produksi pada proses produksi pertanian, sebagai akibat penetrasi modal sekaligus tekanan persaingan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi.

Sebagai model *contract farming*, program TRI berlangsung di dalam kondisi fragmentasi tanah, yang sesungguhnya sangat menyulitkan pening-

katan produktivitas. Di dalam kondisi fragmentasi tanah sebenarnya intensifikasi tidak sesuai, lebih-lebih kalau luas lahan sudah sedemikian kecil hingga tidak mungkin lagi menjadi sumber pendapatan utama bagi petani pemiliknya, sebab dengan demikian kesempatan untuk menikmati *economies of scale* menjadi hilang. Namun "berkah" terbukanya peluang efisiensi dan efektivitas tersebut tak berarti keuntungan bagi hegemoni itu tercapai. Efisiensi dan efektivitas itu direduksi pula oleh banyaknya pihak yang terlibat dengan instruksi-instruksi yang parsial. Setiap pembuatan keputusan dalam TRI didahului oleh perundingan yang berbelit-belit. Dan seandainya dalam perundingan ini tidak satu pihak pun yang berniat korup, tetap saja akan terjadi biaya transaksi yang tinggi, yaitu biaya-biaya yang tak berhubungan dengan prestasi. Regulasi yang tinggi adalah lahan subur bagi kegiatan pencarian rente. Semakin banyak regulasi, semakin besar kecenderungan masing-masing pihak yang terlibat dalam TRI untuk menyasiasi regulasi dengan membayar upeti kepada mereka yang berusaha menarik manfaat sebesar-besarnya. Mendahulukan jadwal gilir tebang-angkut-giling bagi mereka yang mampu memberi uang pelicin, misalnya, atau mendahulukan Tebu Rakyat Bebas (TRB) daripada TRI dan sebagainya. Sebaliknya, upeti sedemikian itu menjadi prohibitif bagi petani-petani marginal, sehingga tak mengherankan kalau petani-petani peserta TRI yang seharusnya ikut terlibat dalam proses produksi namun memilih keluar dengan menyerahkan perusahaan lahannya kepada ketua kelompok. Bersamaan dengan itu, kecenderungan yang terjadi adalah masuknya modal dalam pengelolaan tebu rakyat yang dinamakan Tebu Rakyat Bebas, yang justru lebih mendapat keuntungan dari budi daya tebu, dan mendapat kemudahan dalam proses produksi tebu.

Gejala lain yang timbul di dalam kondisi fragmentasi tanah tersebut, adalah terjadi kecenderungan konsentrasi tanah ke tangan segelintir petani yang lebih kaya dan lebih mampu. Sebagian kecenderungan ini terjadi dengan menyasiasi regulasi TRI, sebagian lagi sebagai akibat dari menyasiasi

untuk menolak ikut *glebagan*, hingga lahan miliknya yang subur ditukar dengan lahan milik orang lain yang kurang subur, atau dengan melakukan sistem sewa. Semua bentuk menyiasati sedemikian itu merupakan fenomena pembangkangan terselubung, pilihan yang rasional untuk menghindari hegemoni yang berbasis material.

Dengan demikian, menghubungkan antara dataran berpikir Scott dan Popkin, variabel hegemoni harus diperhitungkan. Bukan sekadar hegemoni ideologis sebagaimana kritik Scott terhadap konsep hegemoni Gramsci, tapi hegemoni yang juga berbasiskan material. Sebab, sebagai-mana ditemukan dalam studi ini, ternyata para petani TRI tak melakukan penetrasi terhadap hegemoni ideologis pembangunan tersebut. Pembangkangan terselubung dalam sistem produksi tersebut dilakukan atas dasar hegemoni non-ideologis, yaitu hegemoni material, hegemoni atas budi daya tanaman produksi, serta pengaturan sistem produksi lainnya. Yang terjadi dalam program TRI adalah hegemoni aparatur negara atas hak penguasaan tanah, serta hak untuk menentukan produksi apa yang harus dihasilkan dari tanah tersebut. Pendeknya, hegemoni sebagai bentuk kekuasaan untuk menentukan apa yang paling realistik di atas tanah para petani tersebut.

Hegemoni aparatur negara itu juga tidak dapat mengartikulasikan kepentingan para petani di dalam sistem produksi. Apa yang dianggap realistik oleh aparatur birokrasi itu ternyata tidak realistik bagi para petani pemilik tanah sempit, sebab senyatanya hasil produksi tebu tak cukup untuk mengamankan batas subsistensi dibanding jenis tanaman subsisten lain. Menolak untuk ikut dalam produksi akan berhadapan dengan hegemoni ideologis, "tidak membantu jalannya pembangunan", "subversif", dan lainnya, bahkan berhadapan dengan hegemoni material, berupa kendala-kendala politis dalam kehidupan sehari-hari, seperti dipersulit mengurus surat-surat izin, kelakuan baik, dan sebagainya.

Di dalam konteks hegemonik sedemikian itu, pembangkangan terselubung merupakan alternatif pilihan yang paling rasional untuk merumus-

kan artikulasi kepentingan atas subsistensi, serta mencari alternatif lain demi mengamankan batas subsistensi para petani. Pilihan atas tindakan perlawanan atau pembangkangan para petani yang rasional itu tak terlepas dari kebutuhan untuk mendapatkan *selective incentives*, yaitu bayangan akan keuntungan yang dapat diraih dari partisipasinya untuk tindakan-tindakan kolektif maupun individual. Dengan kata lain, para petani pada dasarnya menghitung "biaya sosial" yang akan ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan *selective incentives* dalam memilih alternatif bentuk perlawanan atau pembangkangan. *Selective incentives* itu berwujud material maupun non-material. Namun hanya mengandalkan *selective incentives* yang bersifat material tanpa dukungan *selective incentives* yang bersifat ideologis, pada dasarnya tindakan tersebut akan bersifat *counter-productive* bagi tindakan-tindakan kolektif petani.

Pembangkangan terselubung petani TRI di dalam kajian studi ini lebih pada upaya mengurangi biaya sosial demi mendapatkan *selective incentives* yang bersifat material, yaitu mengamankan batas subsistensinya. Tidak terdapat kecenderungan upaya untuk mendapatkan *selective incentives* yang bersifat ideologis, sebab hal itu berhubungan erat dengan konteks hegemoni aparatur negara dalam kehidupan masyarakat petani, dan juga berhubungan dengan faktor-faktor organisasi di luar masyarakat petani tersebut. Tidak terdapat "political entrepreneur" di dalam kehidupan masyarakat petani tersebut sebagaimana dikemukakan Popkin dalam teori pilihan rasionalnya. Dengan kata lain, tak terbuka peluang bagi suatu proses pembentukan kelompok semu menjadi kelompok konflik sebagaimana diteorikan oleh Dahrendorf, akibat kendala-kendala teknis, politis, maupun sosial. (Dahrendorf, 1986; Turner, 1974:97) sekuat apa pun kesadaran para petani tersebut untuk melakukannya.

Hubungan-hubungan kelas juga tak terjadi dalam pembangkangan terselubung tersebut. Pembangkangan terselubung yang terjadi di dalam tata hubungan produksi antara petani kaya dan petani miskin tidak memben-

tuk pertentangan kelas di antara mereka, disadari ataupun tidak disadari. Bahwa petani miskin lebih dirugikan dalam tata hubungan produksi tersebut, dan petani kaya --termasuk para ketua kelompok TRI-- memperoleh keuntungan, namun bagi petani miskin yang memilih keluar dari sistem produksi itu adalah merupakan *selective incentives* tersendiri. Keuntungan minimal dari kerugian yang mereka alami.

5.2 Kesimpulan Umum

1. Program TRI melalui Inpres No. 9/1975 yang bertujuan menjadikan petani "tuan di atas tanahnya sendiri", gagal mengartikulasikan kepentingan para petani, sebab program tersebut pada dasarnya merupakan suatu usaha tani kontrak yang membawa kepentingan ekonomi-politik negara atas kebijakan tujuan industri gula secara nasional.
2. Hegemoni negara dan aparatur dalam program TRI di dalam praktek menjadi kekuasaan untuk menentukan apa yang realistik di dalam hubungan produksi. Kuatnya hegemoni negara dan hegemoni aparatur yang tidak mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan petani, melahirkan kesadaran untuk melakukan tindakan pembangkangan terselubung para petani untuk menolak ikut dalam program TRI.
3. Sebagai reaksi rasional guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi, pembangkangan terselubung para petani tersebut adalah alternatif untuk lebih mendapatkan *selective incentives* material (untuk mempertahankan subsistensi) daripada ideologis.
4. Upaya untuk mendapatkan *selective incentives* yang lebih material

daripada ideologis dalam pembangkangan terselubung petani dalam program TRI bersifat *counter-productive* dalam tindakan kolektif petani yang terbuka, karena tidak dimungkinkannya jaringan dengan kekuatan organisasi politik dari luar desa.

5. Sebagai bentuk perlawanan, pembangkangan terselubung tidak diikat oleh kesadaran kelas, tapi dipersatukan di dalam kesadaran persamaan pengalaman terjadinya proses marginalisasi dalam sistem produksi TRI.
6. Untuk melihat kemungkinan apakah pembangkangan terselubung menjadi lebih terbuka dan revolusioner karena adanya eksploitasi, harus ada perubahan pada sifat-sifat tetap kondisi petani ke dalam variabel yang lebih jelas. Petani TRI pada dasarnya adalah para pe-
nanam yang harus --karena marginalitas politik dan budayanya-- menanggung berbagai macam beban demi tujuan nasional gula, baik target produksi, kualitas, maupun diskriminasi harga. Para petani selalu mempunyai landasan untuk melakukan pemberontakan terhadap para tuan tanah, aparaturnegara, dan para pedagang yang memeras mereka.
7. Sebagai upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi dengan menjalankan kerugian minimal bagi dirinya, pembangkangan terselubung petani tersebut justru membuka peluang efisiensi dan efektivitas proses produksi, sekalipun hal itu bersifat paradoks dengan tujuan ideologis TRI. Namun efisiensi dan efektivitas tersebut direduksi oleh biaya-biaya sosial yang timbul akibat tingginya regulasi dalam birokrasi TRI.
8. Pembangkangan terselubung sebagai upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi berlangsung di dalam konteks cairnya nilai-nilai etika subsistensi dalam komunitas petani, meluasnya komersialisasi dan hubungan rasional dalam proses produksi.

9. Sebagai bentuk perlawanan, pembangkangan terselubung petani TRI dikategorikan ke dalam *everyday forms of peasant resistance*, bukan *unorganized rural protest*, ataupun *organized rural rebellion*. Pembangkangan terselubung sebagai bentuk perlawanan sehari-hari petani merupakan reaksi yang rasional, dan individual, di dalam konteks memudarnya nilai-nilai sosial tradisi desa dalam hubungan produksi.
10. Hegemoni merupakan faktor yang menghubungkan antara bentuk-bentuk perlawanan petani sehari-hari di dalam konteks memudarnya nilai-nilai sosial dalam hubungan produksi dan tindakan petani yang rasional dan individual, sehingga bentuk pembangkangan itu berlangsung secara informal, tidak dinyatakan, dan berskala kecil. Dengan rumusan lain, sebagai teori, pembangkangan terselubung merupakan eklektisasi dari teori *everyday forms of peasant resistance* dan *Rational-actors theory*. Keduanya disatukan oleh variabel hegemoni.

5.3 Rekomendasi

Studi ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan. Tidak saja karena skalanya terbatas pada komunitas desa yang dijadikan ajang studi, tapi juga keterbatasan pada skala teoritik dan metodologis. Secara metodologis, penelitian ini memiliki keterbatasan terutama menyangkut eksplorasi fenomena sosial gerakan petani, aspirasi, protes, adaptasi, dan sikap-sikap mereka dalam mempertahankan subsistensi di tengah perubahan sosial akibat program pembangunan, khususnya di sektor agraris.

Fenomena itu hanya dapat dieksplorasi melalui suatu studi yang panjang, berkesinambungan, dan yang mampu menghilangkan distansi antara masyarakat dan peneliti. Fenomena pembangkangan --apalagi pembangkangan terselubung-- sering tak dapat ditemukan hanya melalui pengamat-

an selintas dan wawancara sedalam apa pun, bila distansi antara peneliti dan objek yang diteliti tak dapat direduksi. Sering fenomena pembangkangan itu hanya dapat dipahami dari fakta-fakta yang muncul dalam berbagai bentuk, yang membutuhkan pemahaman secara *hermenetik*.

Fenomena yang dipelajari dalam studi ini juga dikendala oleh berbagai macam faktor, antara lain, rasa aman masyarakat yang diteliti, dan responden yang diwawancarai tidak saja secara langsung menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tapi juga menimbulkan rasa curiga, karena pembangkangan adalah masalah yang melanggar hukum, dan dianggap sebagai perbanditan, atau kriminalitas, atau lebih dari itu adalah melawan pemerintah, menentang program pembangunan. Konsekuensi atas tuduhan semacam itu sungguh berat, sehingga bisa dimaklumi kalau berbagai pertanyaan tentang hal-hal yang menyangkut pembangkangan terselubung dalam studi ini tak terlampau mudah didapatkan.

Karena itu, secara metodologis, penelitian ini menggabungkan berbagai teknik, dengan beberapa tahapan untuk mengatasi kendala distansi, mengurangi rasa curiga responden, dan juga untuk melakukan pemeriksaan ulang setiap data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dipakai, pertama, menggunakan kuesioner berstruktur yang dipakai dalam suatu *depth interview*. Responden ditemui di rumah, atau di sawah, di warung, ataupun di tengah jalan. Namun diupayakan responden ditemui di rumah, karena wawancara berstruktur ini membutuhkan waktu relatif lama, 2-3 jam. Wawancara yang agak detail dan teknis itu sering membuat responden bosan, dan menjawab secara serampangan hanya untuk menyenangkan tamunya, dan mempercepat wawancara. Karena itu, *open ended question* dan *probing* penting digunakan terus-menerus oleh pewawancara.

Kemudian segera dilakukan editing terhadap hasil wawancara tersebut untuk mengetahui kekurangannya. Kalau perlu wawancara diulang lagi pada waktu berikutnya untuk menyempurnakannya. Selain itu juga dilakukan teknik *snow ball*, yaitu mencari informasi *key person* untuk masalah-

masalah tertentu. Misalnya, mengenai kasus pembakaran tebu, seorang responden ditanyai, apakah dia pernah melakukannya, atau siapa yang dia ketahui pernah melakukannya? Atau di kebun siapa pernah terjadi kebakaran, dan apa yang menjadi penyebabnya? Atau pernahkah ia membiarkan kebakaran yang diketahuinya? Pernahkah ia membawa tebu ke pabrik gula lain?. Kalau ia menunjuk seseorang, maka orang tersebut kemudian didaftar sebagai responden yang akan diwawancarai secara *indepth*. Demikian seterusnya sehingga beberapa informan dapat ditemukan di lapangan, dan akan dianggap cukup jumlahnya ketika informasi yang diberikan sudah "jenuh", yang diketahui dari pengulangan informasi yang diberikan.

Untuk itu, pemahaman lapangan menjadi sangat penting, yakni mengenal seluruh wilayah desa dan kecamatan, mengenal beberapa tokoh penting, para petani kaya, petani miskin, tokoh KUD, aparat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pemahaman itu bisa penulis lakukan, sebab wilayah Kecamatan Papar ini sudah penulis kenal melalui berbagai kegiatan studi lapangan sejak lama. Pengenalan pertama terhadap wilayah kecamatan ini pada 1979, ketika penulis memimpin suatu kuliah lapangan mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dalam mata kuliah *Masyarakat Pedesaan*, di Desa Ngampel, Maduretno, dan Srikaton, selama tiga hari. Laporan kuliah lapangan itu mengumpulkan banyak data statistik desa, luas tanah, hubungan bagi hasil, dan juga pengenalan terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat. Studi kedua pada 1982, ketika penulis memimpin kuliah lapangan mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unair dalam mata kuliah *Masyarakat Desa*, selama 1 minggu, di desa Ngampel, Srikaton, Papar, Kedung Malang, dan Jambangan. Hasil kuliah lapangan ini juga menemukan berbagai dokumen yang kaya tentang fenomena komersialisasi pertanian, pemilikan tanah, termasuk berbagai masalah yang dihadapi petani dalam program TRI.

Studi ketiga penulis lakukan pada 1987, dalam suatu penelitian tentang pemilihan umum, bersama beberapa mahasiswa Jurusan Sosiologi

FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, meski hanya mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, namun juga menemukan banyak fenomena lain yang menyangkut keresahan masyarakat tentang program TRI di Kecamatan Papar. Studi keempat penulis lakukan pada 1992 dalam suatu penelitian bersama PAU-UGM tentang respons kultural dan struktural petani TRI, di desa Ngampel, Papar, Maduretno, dan Kedung Malang. Hasil penelitian ini merupakan dokumen berharga yang sebagian besar digunakan untuk studi ini. Studi kelima (lagi-lagi) ketika penulis memimpin kuliah lapangan mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unair dalam mata kuliah *Masyarakat Desa* pada 1994, yang mengkhususkan pada studi tentang program TRI di desa Ngampel, Kedung Malang, Jambangan, dan Papar. Hasil kuliah lapangan ini makin menambah dokumen, dan kedekatan penulis dengan masyarakat Kecamatan Papar. Studi keenam adalah studi yang khusus penulis lakukan untuk penulisan disertasi ini pada akhir 1994 sampai dengan awal 1995 di desa Ngampel, Papar, Jambangan, dan Maduretno.

Pengenalan wilayah penelitian selama 16 tahun (1979-1995), setidaknya lebih dari cukup untuk memahami berbagai fenomena dan masyarakatnya, serta juga memperpendek distansi antara peneliti dan objek penelitian. Keuntungan yang segera tampak adalah warga masyarakat yang dihubungi/diwawancarai akhirnya terbuka untuk menjelaskan berbagai hal yang menyangkut fenomena pembangkangan, yang tidak berani mereka kemukakan kepada sembarang orang, apalagi perilaku yang dianggap menentang pemerintah itu dilakukan secara terselubung, diam-diam, dan individual.

Meski demikian, satu hal yang tetap penulis pegang teguh --dalam hal ini sebagai peneliti-- adalah menjaga keseimbangan pandangan etik dan emik, sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat:

"Sebagai manusia yang berasal dari suatu masyarakat dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma tertentu, kemungkinan besar seorang peneliti akan membawanya serta pada waktu meneliti suatu masyarakat yang biasanya mempunyai kebudayaan atau sub-kebudayaan lain; tetapi sebagai ahli ilmu sosial ia harus membawa serta nilai-nilai dan norma-norma ilmi-

ah dan juga berbagai macam teori dan kerangka acuan dari disiplin dan bidang ilmu sosial yang dikuasainya. Pandangan yang dikuasai oleh nilai-nilai, dan norma-norma dan teori ilmiah yang sebenarnya merupakan pandangan 'dari luar' itu disebut pandangan etik (*etic view*), sedangkan pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga masyarakat yang bersangkutan, yang sebenarnya merupakan pandangan 'dari dalam', merupakan pandangan emik (*emic view*). mengkombinasikan pandangan etik dan pandangan emik sesempurna mungkin...." (Koentjaraningrat, 1982:xviii-xix).

Dengan demikian, secara metodologis, penulis pada dasarnya mengikuti anjuran Donald K. Emmerson yang menyatakan:

"Metode-metode penelitian sosial bukanlah sederetan aturan seragam yang berlaku di mana-mana, tinggal diterapkan saja mentah-mentah di lapangan. Keberhasilan penelitian sosial memerlukan perkawinan antara sifat manusiawi dengan nilai ilmiah: daya cipta seseorang serta rasanya yang peka terhadap lingkungan hendaknya dipertajam dengan ketelitian serta ketepatan yang mantap." (Koentjaraningrat, 1982:264-265).

Sekalipun demikian, generalisasi hasil penelitian ini harus dipahami dalam konteks keterbatasan wilayah studi dan keterbatasan teoritik. Apa yang ditemukan dalam studi ini pada dasarnya adalah suatu bentuk protes sosial --meski dalam kadarnya yang tidak terbuka dan tidak revolusioner-- yang dilakukan oleh lapisan masyarakat bawah yang mengalami marginalisasi dalam suatu proses perubahan akibat program pembangunan. Marginalisasi itu terjadi karena munculnya ancaman pada batas-batas keamanan subsistensi mereka, dan demi mempertahankan subsistensi tersebut mereka melakukan berbagai upaya termasuk pembangkangan.

Sesungguhnya marginalisasi tidak saja terjadi di kalangan petani TRI, tapi juga di dalam kehidupan masyarakat petani pada umumnya, dan kehidupan masyarakat kota, bahkan di dalam masyarakat politik. Ketika ancaman akan subsistensi itu terjadi, maka masyarakat yang mengalami marginalisasi berpotensi melakukan perlawanan demi mengamankan subsistensi mereka, baik subsistensi dalam pengertian material maupun non-material. Secara material masyarakat yang mengalami marginalisasi akan

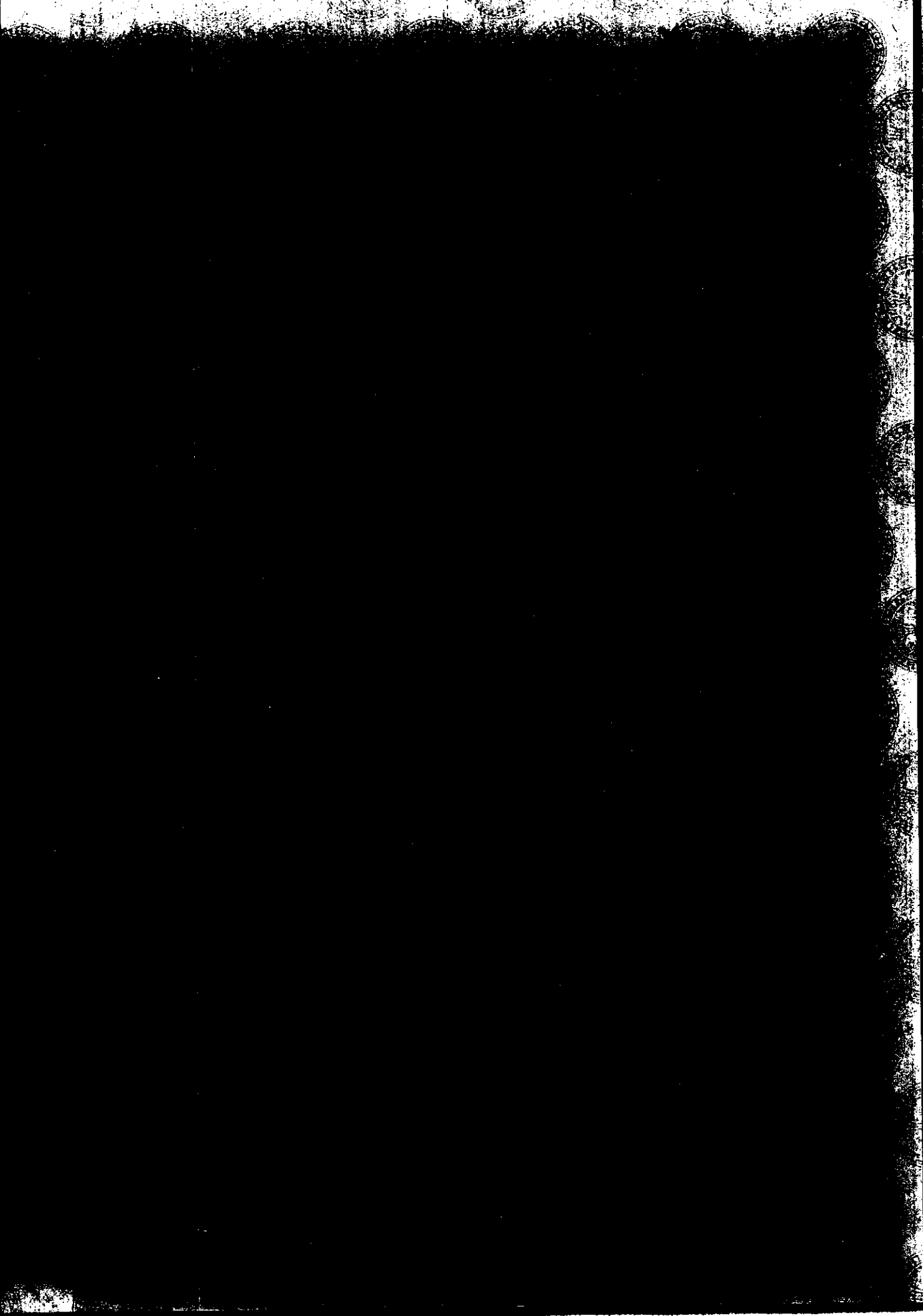
berupaya mencari alternatif subsistensi, mencari peluang yang paling dimungkinkan, meski akibatnya adalah proses migrasi kerja, dan keluar dari sistem produksi yang seharusnya dia ikut terlibat di dalamnya. Secara non-material, mereka akan mencari jalan keluar dengan mengamankan dirinya dari berbagai ancaman birokratis dan politis, bahkan ideologis. Dianggap menentang program pemerintah, menghambat jalannya pembangunan, subversif, mengganggu stabilitas keamanan, adalah beberapa ancaman non-material dan bersifat ideologis.

Dalam tatanan politik yang hegemonik, ancaman ideologis itu membawa risiko besar, sehingga orang memilih melepaskan apa yang seharusnya menjadi haknya, dan mencari pilihan lain, karena jauh lebih menguntungkan dilihat dari konsekuensi rasa aman yang diperolehnya. Tindakan ini bukan hanya dialami masyarakat petani yang mayoritas berlahan kecil yang harus ikut dalam program TRI, tapi juga di dalam masyarakat politik. Banyak orang mencari jalan yang paling aman (*safety first*) dengan mengikuti arus besar pemikiran politik dominan, atau melakukan pembangkangan terselubung yang dirasa kecil risikonya, karena dilakukan secara rasional dan individual.

Meski objek penelitian dalam studi ini hanya masyarakat petani TRI --dilihat dari sisi pandangan petani terhadap program TRI--tapi tak berarti sebagai peneliti, pemahaman penulis tentang marginalisasi yang dialami masyarakat petani TRI ini menimbulkan prasangka keberpihakan terhadap mereka yang tertindas. Sebab masih ada pihak-pihak lain, dalam hal ini aparat pemerintah, yang juga dianggap menjadi variabel penting dalam terjadinya marginalisasi tersebut, namun itu berada di luar studi ini. Di situlah keterbatasan studi ini, sebab tidak secara khusus meneliti aktor-aktor birokrasi pemerintah yang menjadi pelaksana program TRI. Untuk itu, layak dilakukan suatu studi lanjutan lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya program TRI dalam kepentingan pemerintah. Bagaimana sesungguhnya aktor-aktor pemerintah, birokrasi, dan penerapannya dalam

program TRI menurut sisi pandangan pihak birokrasi.

Sekalipun demikian, dalam hal marginalisasi dan respons, berupa pembangkangan terselubung yang dilakukan petani dalam studi ini, perlu mendapat perhatian. Program pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengandalkan partisipasi, tapi lebih mengutamakan mobilisasi bahkan koersi, pada akhirnya akan membawa konsekuensi marginalisasi masyarakat petani. Pembangkangan terselubung akibat marginalisasi merupakan biaya sosial tersendiri bagi pembangunan, yang tidak saja merugikan pemerintah, tapi juga rakyat. Pilihan dilematis itu seharusnya tak terjadi bila pelaksanaan program pembangunan tersebut mendapat koreksi berdasarkan fakta-fakta empiris. Mengubah program pembangunan yang menyimpang dan tidak sesuai adalah kewajiban semua pihak, rakyat maupun pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Amin, Samir, 1974. *Unequal Development; An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism*, Translated by Brian Pearce. New York: Monthly Review Press.

_____, 1974. *Accumulation on The World Scale; A Critique of the Theory of Underdevelopment*. New York: Monthly Review Press.

Arief, Sritua, 1979. "Strategi Industrialisasi dan Implikasi Penyerapan Tenaga Kerja: Kasus Pedesaan". *Wawasan*, No. 2, Th. 1.

Balai Penelitian Perusahaan Perkebunan Gula, 1985. *Himpunan Diktat Latihan Penentuan Rendemen Tebu*. Pasuruan: BP3G.

Breman, Jan, 1983. *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Holland: Foris Publications.

Bellamy, Richard, 1990. *Teori Sosial Modern Perspektif Itali*, Diterjemahkan Vedi R. Hadiz. Jakarta: LP3ES.

Bachriadi, Dianto, 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital; Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming*. Bandung: Akatiga.

Bechtold, Kaarl Heinz W., 1988. *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Brockett, Charles D., 1990. *Land, Power, And Poverty; Agrarian Transformation in Central America*. London: Unwin Hyman.

Boeke, J.H., 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Cahyono, Edi, 1988. "Landasan Agribisnis Kolonial Petani Tebu di Jawa Abad 19". Makalah untuk Seminar Ilmu-ilmu Sosial dalam Perkembangan Masyarakat. Yayasan April '88, Surabaya.

Collier, William L., Jusuf Colter, Chaerul Shaleh, 1972. "Observations on Recent Rice Problems at the Farm Level in Subang Kabupaten". *Agro-Economic Survey-Research Notes*, No. 12.

_____, dan Birowo Ahmad T., 1973. *Comparison of Input Use and Yields of Various Rice Varieties by Large Farmers and Representative Farmers*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

_____, dan Gunawan Wiradi, Soentoro, 1973. "Recent Changes in Rice Harvesting Methods". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. IX, No. 2 July.

_____, 1978, *Agricultural Involution In Java: The Decline of Shared Poverty And Involution*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Clapp, Roger A.J., 1988. "Representing Reciprocity, Reproducing Domination; Ideology and The Labour Process in Latin American Contract Farming". *The Journal of Peasant Studies*, Volume 16, Number 1.

Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta: CV Rajawali.

Dinas Perkebunan Tebu Daerah Propinsi Jawa Timur, 1989. *Latihan Metode Jarak Jauh Penentuan Rendemen dan Tebang Angkut Tebu*. Surabaya: Dinas Perkebunan Jatim.

Eckstein, Susan, (ed.), 1989. *Power and Popular Protest; Latin American Social Movements*. Berkeley: University Of California Press.

Elson, R.E, 1984. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry; Impact and Change in an East Java Residency 1830-1940*. Singapore: Oxford University Press.

Fasseur, C., 1981. *The Cultivation System and Its Impact on The Dutch Colonial Economy and Indegeneus Society in Nineteenth-Century Java*. Mimeograph.

Galtung, Johan, 1975. "A Structural Theory of Imperialism", *Journal of Peace Research*, Vol. 8, No. 2.

Geertz, Clifford, 1976. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Giddens, Anthony, David Held, 1982. *Classes, Power, and Conflict; Classical and Contemporary Debates*. Berkeley: University of California Press.

Glover, David J., 1983. "Contract Farming and Smallholder Outgrower Schemes in Less-developed Countries", *World Development*.

Glucksmann, Christine Buci, 1980. *Gramsci and The State*, Translated by David Fernbach. London: Lawrence and Wishart.

Gurr, Ted Robert, 1970. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press.

Hawes, Gary, 1978. "Theories of Peasant Revolution; A Critique and Contribution from the Philippines". *World Politic*, A Quarterly Journal of International Relation.

Huizer, Gerrit, 1975. "Betting On The Weak". *Agustus Jingga*, The Indonesian Student and Graduate Agency, No. 1.

Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.

Kirk, Colin, 1987. "Contracting Out: Plantations, Smallholders and Transnational Enterprise". *IDS Bulletin*, Volume 16, No. 1.

Knight, G.R. 1988. "Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad Ke-19: Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830-1870", dalam Anne Both dkk (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, 1982. *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor dan PT Gramedia.

Lichbach, Mark I., 1994. "What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dilemma, Paradox, and Irony in Peasant Collective Action". *World Politics* 46.

Mitchell, Timothy, 1990. "Everyday Methapors of Power". *Theory and Society* 19. New York: Kluwer Academic Publishers.

- Migdal, Joel, 1979. *Peasants Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Montgomery, R.D., Sister D.G., 1976, *Labour Absorption in Jogjakarta, Indonesia; An Input-Output Study*. Mimeograph.
- Moore Jr., Barrington, 1966. *Social Origins of Dictatorship And Democracy; Lord and Peasant in The making of The Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Mortimer, Rex, 1984. *Stubborn Survivors*. Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Mubyarto, 1987. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mulyoto Hp., 1984. *Pengantar Dasar-dasar Pabrikasi Gula*. Pasuruan: Balai Penelitian Perusahaan Perkebunan Gula.
- Paige, Jeffery M., 1975. *Agrarian Revolution; Social Movement and Export Agriculture in The Underdeveloped World*. New York: The Free Press.
- Popkin, Samuel L., 1979. *The Rational Peasant; The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Redfield, Robert, 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: CV Rajawali.

Skocpol, Theda, 1991. *Negara Dan Revolusi Sosial; Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*, diterjemahkan Kelompok Mitos. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Schaik, Arthur van, 1986. *Colonial Control and Peasant Resources in Java; Agricultural Involution Reconsidered*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Scheltema, A.M.P.A., 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, diterjemahkan Marwan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Schrieke, B.J.O., 1974. *Penguasa-penguasa Pribumi*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Scott, James C., 1981. *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

_____, 1985. *Weapons of The Weak; Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

_____, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Schumacher, E.F., 1987. *Kecil Itu Indah*. Jakarta: LP3ES.

Siahaan, Hotman M., 1979, "Sistem Penyakapan dan Penguasaan Tanah di Daerah Pedesaan". *Prisma*, No.9.

Simanjuntak, Djisman, 1985. "Tebu Rakyat Intensifikasi Peluang Perbaikan dan Kebijakan Alternatif". Makalah Seminar Peranan Industri Gula dalam Pembangunan Nasional, PMP FE Universitas Airlangga, Surabaya.

Sinaga, Rudolf, 1976. "Rural Institutions Serving Small Farmers in the Village of Sukagalih, Garut Regency, West Java". ESCAP, Expert Group Meeting on Rural Institutions Serving Small Farmers.

Suhartono, 1991. *Apanage dan Bekel; Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

_____, 1995. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa; Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditiya Media.

Sutherland, H., 1979. *The Making of a Bureaucratic Elite; The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapore: Heinemann.

Tilly, Charles, 1978. *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley: Reading Mass.

Tjondronegoro, Sediono MP, dan Wiradi Gunawan, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.

Turner, Jonathan H., 1974. *The Structure of Sociological Theory*. Illinois: The Dorsey Press.

Uemura, Yasuo, 1986. "Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa" dalam Akira Nagazumi dan Taufik Abdullah, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang; Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wolf, Eric, 1969. *Peasant Wars of The Twentieth Century*. New York: Harper & Row Publishers.

_____, 1983. *Petani, Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali Press.

Wilson, John, 1986. "The Political Economy of Contract Farming". *Review of Radical Political Economy*, Vol. 18, No. 4.

Van Niel, R., 1981. "The Effect of Export Cultivations in Nineteenth Century Java". *Modern Asian Studies* 15 (1).

Zagoria, Donald, 1974. "Asian Tenancy Systems and Communist Mobilizations of Peasantry", in Jhon Lewis (ed.), *Peasant and Communist Revolutions in Asia*. California: Stanford University Press.

Surat Keputusan Gubernur Jatim, No. 10 tahun 1984 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program TRI, Pasal 29 ayat 2.

_____, No. 26 A tahun 1987 Tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Program TRI 1987/1988, Pasal 10 ayat 2.

Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kediri No. 184/1991.

Petunjuk Pelaksana Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) Musim Tanam Tahun 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Program TRI Musim Tanam 1991/1992 di Jatim. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Jawa Pos, Harian, 27 September 1988.

_____, 28 September 1988.

_____, 9 Oktober 1989.

Surabaya Post, Harian, 23 September 1980

_____, 12 Desember 1988

_____, 13 Desember 1988

_____, 6 Juli 1989

_____, 7 Juli 1989

_____, 28 Juli 1989

_____, 1 Agustus 1989

_____, 4 Agustus 1989

_____, 12 Agustus 1989

_____, 19 Agustus 1989

_____, 25 September 1989



LAMPIRAN 1

Data Monografi

Kecamatan Papar
Kabupaten Dati II Kediri
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Juni 1995

Data Statis

1. KETERANGAN UMUM

- 1.1 Tinggi pusat pemerintahan wilayah kecamatan dari permukaan laut: 52 m
- 1.2 Suhu maksimum: 27 derajat Celcius
- 1.3 Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan:
 - 1.3.1 Desa/kelurahan terjauh: 7 km (3 jam)
 - 1.3.2 Pusat kedudukan wilayah kerja pembantu bupati: 3 km (2 jam)
 - 1.3.3 Ibukota kabupaten/kotamadya: 18 km (5 jam)
 - 1.3.4 Pusat kedudukan wilayah kerja pembantu gubernur: 13 km (5 jam)
 - 1.3.5 Ibu kota propinsi: 124 km (3 jam)
- 1.4 Curah Hujan
Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak: 1 hari

2. LUAS DAERAH/WILAYAH

- 2.1 Tanah sawah: 2.468 ha
 - 2.1.1 Irigasi teknis: 2.264 ha
 - 2.1.2 Irigasi setengah teknis: 204 ha
- 2.2 Tanah kering: 10 ha
 - 2.2.1 Tegall/kebun: 10 ha
- 2.3 Tanah keperluan fasilitas umum: 21,372 ha
 - 2.3.1 Lapangan olahraga: 8,300 ha
 - 2.3.2 Kuburan: 13,072 ha
- 2.4 Lain-lain tanah (tanah tandus, tanah pasir): 44 ha

LAMPIRAN 1

3. PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

- 3.1 Desa: 17 buah
- 3.2 Lingkungan/Dusun: 59 buah
- 3.3 Rukun Warga (RW): 82 buah
- 3.4 Rukun Tetangga (RT): 328 buah
- 3.5 Desa swasembada: 17 buah

4. PEMERINTAHAN KECAMATAN

- 4.1 Kantor pemerintah wilayah kecamatan
 - 4.1.1 Status kepemilikan: milik pemerintah
 - 4.1.2 Sumber dana pembangunan kantor: APBD Tk. II (Rp 8.000.000,-)
- 4.2 Rumah jabatan camat
 - 4.2.1 Status kepemilikan: milik pemerintah
 - 4.2.2 Luas bangunan: 80 meter persegi
 - 4.2.3 Dibangun tahun: 1980
 - 4.2.4 Sumber dana: APBN (Rp 10.000.000,-)
 - 4.2.5 Kondisi bangunan: baik
- 4.3 Jumlah instansi pemerintah yang ada di wilayah kecamatan
 - 4.3.1 Instansi vertikal: 8 unit
 - a. Depdikbud
 - b. Depag
 - c. Jupen
 - d. Pegadaian
 - e. BRI
 - f. Pos dan Giro
 - g. Telkom
 - h. PLKB
 - 4.3.2 Instansi otonom: 12 unit
 - a. Puskesmas
 - b. Ranting dinas
 - c. Kadin
 - d. Mawil Hansip
 - e. Pengairan
 - f. Dinas Sosial
 - g. PPH
 - h. PPL
 - i. Peternakan
 - j. Mantan
 - k. Mantis
 - l. Manbum
 - 4.3.3 Instansi BUMN/BUMD: 1 unit
 - a. PDAM
- 4.4 Jenis pegawai kantor kecamatan
 - 4.4.1 Pegawai pusat Dpb: 11 orang
 - 4.4.2 Pegawai daerah/otonom: 12 orang

LAMPIRAN 1

4.5 Eselonering jabatan perangkat tingkat kecamatan

4.5.1 Eselon IV a: 1 orang

4.5.2 Eselon V a: 2 orang

4.5.3 Eselon V b: 4 orang

4.6 Tipe kecamatan: B

4.7 Lomba antar-kecamatan yang pernah diadakan: 1 kali

4.8 Kejuaraan lomba antar-kecamatan yang pernah diraih:

4.8.1 Juara I: 1 kali

4.8.2 Juara II: 5 kali

4.8.3 Juara III: 2 kali

5. PRASARANA PENGAIRAN

5.1 Dam: 6 buah

5.2 Pompa air: 5 buah

5.3 Sungai: 4 buah

6. PRASARANA/SARANA PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

6.1 Lalu lintas melalui darat di kecamatan: 100%

6.2 Lalu lintas darat melalui:

6.2.1 Jalan aspal: 13 km (kondisi baik: 13 km)

6.2.2 Jalan tanah: 66 km (kondisi baik: 55 km; kondisi sedang: 11 km)

6.3 Sarana umum yang dapat digunakan oleh penduduk kecamatan:

6.3.1 Sepeda/ojek: 48 buah

6.3.2 Delman: 1 buah

6.3.3 Lain-lain: 27 buah

6.4 Panjang jalan dan jembatan

6.4.1 Jenis jalan (98 km)

a. Jalan propinsi: 8 km

b. Jalan kabupaten/kotamadya: 12 km

c. Jalan desa: 78 km

6.4.2 Kelas jalan (98 km)

a. Jalan kelas II: 3 km

b. Jalan kelas III: 12 km

c. Jalan kelas IV: 14 km

d. Jalan kelas desa: 64 km

LAMPIRAN 1

- 6.4.3 Jembatan: 21 buah (114 m)
 - a. Jembatan beton/batu/bata: 18 buah (190 m)
 - b. Jembatan kayu/bambu: 1 buah (6 m)

7. SARANA PEREKONOMIAN

- 7.1 Koperasi: 5 buah
 - 7.1.1 Koperasi simpan pinjam: 4 buah
 - 7.1.2 Koperasi unit desa/KUD: 1 buah
 - 7.1.3 Badan-badan kredit: 11 buah
 - 7.1.4 Koperasi produksi: 1 buah
- 7.2 Jumlah pasar selapan/umum: 1 buah
 - 7.2.1 Umum: 1 buah
- 7.3 Jumlah toko/kios/warung: 171 buah
- 7.4 Bank: 1 buah
- 7.5 Stasiun kereta api: 1 buah
- 7.6 Jumlah telepon umum: 4 buah

8. JUMLAH PERUSAHAAN/USAHA

- 8.1 Industri
 - 8.1.1 Besar dan sedang: 1 buah; Tenaga kerja: 45 orang
 - 8.1.2 Kecil: 23 buah; Tenaga kerja: 46 orang
 - 8.1.3 Rumah tangga: 172 buah; Tenaga kerja: 344 orang
- 8.2 Rumah makan/warung makan: 116 buah; Tenaga kerja: 232 orang
- 8.3 Perdagangan: 9 buah; Tenaga kerja: 18 orang
- 8.4 Angkutan: 11 buah; Tenaga kerja: 14 orang

9 FASILITAS PERKREDITAN

- 9.1 Kredit CandaK Kulak:
 - 9.1.1 Jumlah yang menerima: 189 orang

10. SARANAN SOSIAL/BUDAYA

- 10.1. Pendidikan
 - 10.1.1 Taman Kanak-Kanak
 - a. Jumlah sekolah: 20 buah
 - b. Jumlah murid: 675 orang

LAMPIRAN 1

- c. Jumlah guru: 40 orang
- d. Prasarana fisik: 38 lokal

10.1.2 Sekolah Dasar

- a. SD Negeri
 - Jumlah sekolah: 21 buah
 - Jumlah murid: 2.717 orang
 - Jumlah guru: 161 orang
 - Prasarana fisik: 118 lokal (118 meter persegi)
 - Perpustakaan: ada
- b. SD Inpres
 - Jumlah sekolah: 17 buah
 - Jumlah murid: 2.412 orang
 - Jumlah guru: 127 orang
 - Prasarana fisik: 102 lokal
 - Perpustakaan: ada
- c. Madrasah/Ibtidaiyah Negeri
 - Jumlah sekolah: 7 buah
 - Jumlah murid: 654 orang
 - Jumlah guru: 33 orang
 - Prasarana fisik: 39 lokal
- d. Sekolah Luar Biasa (SLB)
 - Jumlah sekolah: 1 buah
 - Jumlah murid: 19 orang
 - Jumlah guru: 3 orang
 - Prasarana fisik: 1 lokal

10.1.3 Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)

- a. SMTP Negeri
 - Jumlah sekolah: 2 buah
 - Jumlah murid: 1.711 orang
 - Jumlah guru: 103 orang
 - Prasarana fisik: 39 lokal
 - Perpustakaan: ada
- b. SMTP Swasta Umum
 - Jumlah sekolah: 1 buah
 - Jumlah murid: 214 orang

LAMPIRAN 1

- Jumlah guru: 18 orang
- Prasarana fisik: 4 lokal
- Perpustakaan: ada

c. SMTP Swasta Islam

- Jumlah sekolah: 2 buah
- Jumlah murid: 731 orang
- Jumlah guru: 45 orang
- Prasarana fisik: 17 lokal
- Perpustakaan: ada

10.1.4 Sekolah Menengah Tingkat Atas

a. SMTA Negeri

- Jumlah sekolah: 1 buah
- Jumlah murid: 555 orang
- Jumlah guru: 49 orang
- Prasarana fisik: 15 lokal
- Perpustakaan: ada

b. SMTA Swasta Umum

- Jumlah sekolah: 1 buah
- Jumlah murid: 131 orang
- Jumlah guru: 21 orang
- Prasarana fisik: 4 lokal
- Fasilitas laboratorium: ada
- Perpustakaan: ada

c. SMTA Swasta Islam

- Jumlah sekolah: 2 buah
- Jumlah murid: 245 orang
- Jumlah guru: 33 orang
- Prasarana fisik: 6 lokal

d. SMTA Kejuruan Swasta (SMEA)

- Jumlah sekolah: 1 buah
- Jumlah murid: 240 orang
- Jumlah guru: 23 orang
- Prasarana fisik: 8 lokal (608 meter persegi)

10.2 Jumlah tempat ibadah

10.2.1 Masjid: 41 buah

LAMPIRAN 1

- 10.2.2 Surau/Musola: 101 buah
- 10.2.3 Gereja: 2 buah
- 10.2.4 Kuil/Pura: 1 buah
- 10.3. Banyaknya rumah penduduk
 - 10.3.1 Rumah menurut sifat dan bahannya
 - a. Dinding terbuat dari Batu/Gedung permanen: 7.678 buah
 - b. Dinding terbuat dari sebagian batu/Gedung: 753 buah
 - c. Dinding terbuat dari Kayu/Papan: 3 buah
 - d. Dinding terbuat dari Bambau/lainnya: 1.042 buah
 - 10.3.2 Rumah menurut tipenya
 - a. Tipe A: 7.578 buah
 - b. Tipe B: 861 buah
 - c. Tipe C: 1.058 buah
- 10.4. Kebudayaan/kesenian
 - 10.4.1 Jumlah perkumpulan kebudayaan/sanggar kesenian: 2 buah
 - 10.4.2 Jumlah anggota seniman: 855 orang
- 10.5. Kesehatan
 - 10.5.1 Puskesmas: 1 buah
 - a. Pengunjung yang sakit Januari s/d Juni: 1.425 orang
 - b. Dokter: 2 orang
 - c. Perawat: 4 orang
 - d. Bidan: 1 orang
 - 10.5.2 Puskesmas pembantu: 2 buah
 - a. Dokter : 1 orang
 - b. Perawat: 2 orang
 - c. Bidan : 2 orang
 - 10.5.3 Praktek dokter
 - a. Dokter Umum: 2 orang
- 10.6. Keluarga Berencana (KB)
 - 10.6.1 Jumlah pos/klinik KB: 3 buah
 - 10.6.2 Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur): 8.205 pasang
 - 10.6.3 Jumlah PUS masuk KB: 7.111 orang
 - 10.6.4 Jumlah Posyandu: 61 buah
 - 10.6.5 Jumlah akseptor KB: 7.111 orang
 - a. Pil: 1.064 orang
 - b. IUD: 2.713 orang
 - c. Kondom: 175 orang

LAMPIRAN I

- d. Suntik: 2.654 orang
- e. MOP: 6 orang
- f. MOW: 629 orang
- g. KB Mandiri: 4.118 orang

10.7 Penderita cacat

- 10.7.1 Cacat fisik/fatal: 81 orang
- 10.7.2 Cacat mental (gila): 55 orang

10.8 Pondok Pesantren

- 10.8.1 Jumlah Pondok Pesantren: 2 buah
- 10.8.2 Jumlah Kiai: 5 orang
- 10.8.3 Jumlah Santri: 150 orang

10.9 Majelis Taklim

- 10.9.1 Jumlah Majelis Taklim: 17 buah
- 10.9.2 Jumlah Jamaah: 340 orang
- 10.9.3 Jumlah Muktamin: 360 orang

11. PEMBANGUNAN

11.1 Jumlah proyek fisik yang dibangun di kecamatan:

- 11.1.1 Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebud. Nas. dan Kepercayaan Thd. Tuhan Yang Maha Esa: 4 buah
- 11.1.2 Sektor Kesehatan, Kesejaht. Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana: 2 buah
- 11.1.3 Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman: 15 buah
- 11.1.4 Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional: 6 buah
- 11.1.5 Sektor Pengembangan Dunia Usaha: 3 buah
- 11.1.6 Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup: 17 buah

11.2 Pembiayaan pembangunan proyek di kecamatan: Rp 13.150.000,-

- 11.2.1 Biaya dari Dati II: Rp 50.000.000,-
- 11.2.2 Swadaya penduduk berbentuk barang dan tenaga (dinilai dengan uang): Rp 4.125.000,-
- 11.2.3 Biaya lain-lain: Rp 9.025.000,-

11.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- 11.3.1 Jumlah wajib PBB: 2.6721 orang
- 11.3.2 Target PBB: Rp 187.796.145,-

LAMPIRAN 1

11.4 Tingkat Pendapatan

Sektor	Nilai Tambah Bruto	Depresiasi	Nilai Tambah Netto
Tanaman pangan	21,130	1,357	
Perikanan	2,5	2	
Peternakan	6,421	472	
Industri dan kerajinan rakyat	56	-	
Perdagangan	558	15	
Transportasi dan angkutan	186	-	

Data Dinamis**1. PEMERINTAHAN KECAMATAN**

1.1 Jumlah pegawai kantor kecamatan: 23 orang

1.1.1 Pegawai Golongan III: 7 orang

1.1.2 Pegawai Golongan II: 13 orang

1.1.3 Pegawai Golongan I: 3 orang

1.2 Jumlah pegawai instansi vertikal dan otonom di tingkat kecamatan pegawai kecamatan: 584 pegawai

1.2.1 Pegawai Golongan IV: 1 orang

1.2.2 Pegawai Golongan III: 111 orang

1.2.3 Pegawai Golongan II: 416 orang

1.2.4 Pegawai Golongan I: 57 orang

1.3 Sarana kerja kantor kecamatan

1.3.1 Telepon otomatis/non otomatis: 1 buah

1.3.2 Radio telekomunikasi: 1 buah

1.3.3 Jumlah mesin ketik: 3 buah

1.3.4 Meja kerja: 23 buah

1.3.5 Kursi kerja: 23 buah

1.3.6 Meja kursi tamu: 2 buah

1.3.7 Lemari/kardek: 2 buah

1.3.8 Ruang rapat: 1 buah

1.3.9 Gedung serba guna: 1 buah

1.3.10 Balai pertemuan: 1 buah

1.3.11 Kendaraan dinas roda 2: 2 buah

1.3.12 Kendaraan dinas roda 4: 1 buah

LAMPIRAN 1**2. KEPENDUDUKAN**

- 2.1 Jumlah kepala keluarga: 11.337 KK
- 2.2 Jumlah penduduk: 46.848 orang
- 2.2.1 Jumlah laki-laki: 22.789 orang
- 2.2.2 Jumlah perempuan: 24.059 orang
- 2.3 Penduduk menurut kewarganegaraan
- 2.3.1 WNI: 46.848 orang
- a. Laki-laki: 22.789 orang
- b. Perempuan: 24.059 orang
- 2.3.2. WNA: 9 orang
- a. Laki-laki: 4 orang
- b. Perempuan: 5 orang
- 2.4 Penduduk menurut agama
- 2.4.1 Islam: 45.500 orang
- 2.4.2 Katholik: 326 orang
- 2.4.3 Protestan: 316 orang
- 2.4.4 Hindu: 586 orang
- 2.4.5 Budha: 8 orang
- 2.5 Penduduk menurut usia
- | | | |
|-------|------------------|--------------|
| 2.5.1 | 0-6 tahun | 5.388 orang |
| | 7-12 tahun | 6.319 orang |
| | 13-18 tahun | 7.549 orang |
| | 19-24 tahun | 4.817 orang |
| | 25-55 tahun | 11.645 orang |
| | 56-79 tahun | 10.139 orang |
| | 80 tahun ke atas | 819 orang |
| 2.5.2 | 0-4 tahun | 3.923 orang |
| | 5- 9 tahun | 4.606 orang |
| | 10-14 tahun | 4.885 orang |
| | 15-19 tahun | 4.543 orang |
| | 20-24 tahun | 4.643 orang |
| | 25-29 tahun | 4.728 orang |
| | 30-34 tahun | 3.138 orang |
| | 35-39 tahun | 2.393 orang |
| | 40 tahun ke atas | 13.989 orang |

LAMPIRAN 1

2.5.3	0-5 tahun	4.718 orang
	6-16 tahun	9.128 orang
	17-25 tahun	8.023 orang
	26-55 tahun	14.245 orang
	56 tahun ke atas	10.734 orang

2.6 Mutasi penduduk

2.6.1 Pindah antar kecamatan: 34

- a. Laki-laki: 26
- b. Perempuan: 8

2.6.2 Datang : 224

- a. Laki-laki: 78
- b. Perempuan: 461

2.6.3 Lahir: 120

- a. Laki-laki: 56
- b. Perempuan: 64

2.6.4 Mati: 105

- a. Laki-laki: 56
- b. Perempuan: 49

2.7 Kepadatan penduduk: 1,275 km/jiwa

2.8 Penyebaran penduduk: merata

2.9 Angka NTCR

2.9.1 Nikah: 474 kejadian

2.9.2 Talak: 5 kejadian

2.9.3 Cerai: 8 kejadian

2.9.4 Rujuk: -

2.10 Penduduk menurut mata pencaharian

2.10.1 Petani

- a. Petani pemilik tanah: 2.644 orang
- b. Petani penggarap tanah: 1.141 orang
- c. Petani penggarap/penyakap: 642 orang
- d. Buruh tani: 18.050 orang

2.10.2 Pengusaha sedang/besar: 2 orang

2.10.3 Pengrajin/industri kecil: 58 orang

2.10.4 Buruh Industri: 288 orang

2.10.5 Buruh Bangunan: 152 orang

2.10.6 Pedagang: 552 orang

LAMPIRAN I

- 2.10.7 Pengangkutan: 27 orang
- 2.10.8 Pegawai Negeri Sipil: 577 orang
- 2.10.9 ABRI: 64 orang
- 2.10.10 Pensiun (PNS/ABRI): 129 orang
- 2.10.11 Peternak
 - a. Peternak Sapi perah: 76 orang (191 ekor)
 - b. Peternak Sapi biasa: 1.612 orang (4.697 ekor)
 - c. Peternak kerbau: 26 orang (87 ekor)
 - d. Peternak kambing: 450 orang (1.385 ekor)
 - e. Peternak domba: 364 orang (1.072 ekor)
 - f. Peternak kuda: 2 orang (2 ekor)
 - g. Peternak ayam: 29 orang (29.670 ekor)
 - h. Peternak itik: 21 orang (645 ekor)
- 2.11 Jumlah penduduk menurut pendidikan
 - 2.11.1 Belum sekolah: 4.729 orang
 - 2.11.2 Tak tamat sekolah: 22.191 orang
 - 2.11.3 Tamat SD/ sederajat: 12.921 orang
 - 2.11.4 Tamat SLTP/ sederajat: 5.579 orang
 - 2.11.5 Tamat SLTA/ sederajat: 2.364 orang
 - 2.11.6 Tamat akademi/ sederajat: 254 orang
 - 2.11.7 Tamat perguruan tinggi/ sederajat: 61 orang
- 2.12 Jumlah pencari kerja
 - 2.12.1 Laki-laki: 1.145 orang
 - 2.12.2 Perempuan: 1.260 orang
- 2.13 Rata-rata luas tanah pertanian yang diusahakan penduduk: 0,976 ha
- 2.14 Transmigrasi
 - 2.14.1 Jumlah jiwa yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi: 5 jiwa
 - 2.14.2 Daerah/Lokasi tujuan transmigrasi: 4 lokasi

3. KEAGRARIAAN

- 3.1 Status tanah
 - 3.1.1 Tanah milik bersertifikat: 43,610 ha
 - 3.1.2 Tanah milik belum bersertifikat: 98,441 ha
 - 3.1.3 Tanah hak pengelolaan: 40,520 ha
 - 3.1.4 Tanah negara: 49,410 ha
 - 3.1.5 Tanah bebas: 32,166 ha
 - 3.1.6 Tanah hak pakai: 116,816 ha

LAMPIRAN 1

- 3.1.7 Tanah hak guna bangunan: 73,822 ha
- 3.1.8 Tanah hak guna usaha: 0,252 ha
- 3.1.9 Tanah adat: 57,604 ha
- 3.2 Luas tanah yang belum bersertifikat: 6.633 bidang/3.181,605 ha
- 3.3 Jumlah tanah yang sudah bersertifikat
 - 3.3.1 Tanah sawah : 277 sertifikat (263,533 ha)
 - 3.3.2 Tanah kering: 411 sertifikat (194,559 ha)
- 3.4 Jumlah sertifikat tanah yang diperoleh melalui Prona
 - 3.4.1 Tanah sawah: 286 sertifikat (132,345 ha)
 - 3.4.2 Tanah kering: 411 sertifikat (194,559 ha)
- 3.5 Jumlah sertifikat tanah yang diperoleh melalui biasa/non-Prona
 - 3.5.1 Tanah sawah: 29 sertifikat (1.993 ha)
 - 3.5.2 Tanah kering: 19 sertifikat (2,489 ha)
- 3.6 Perubahan penggunaan tanah
 - 3.6.1 Sawah berubah menjadi industri: 87 ha
 - 3.6.2 Tegalan berubah menjadi jasa: 27 ha

4. TANAM-TANAMAN

Luas dan produksi tanaman utama dan perdagangan

4.1 Luas dan produksi tanaman utama

Jenis	Luas Tanaman per Ha	Luas yang dipanen per Ha	Rata-rata produksi/ton	Jumlah
Padi	913	913	5,9	5386,7
Jagung	1.708	600	6,3	3,780
Ketela pohon	6	-	-	-
Ketela rambat	31	12	16,4	196,8
Kacang tanah	47	34	2,4	81,6
Kedelai	379	10	1,05	106,05
Sayur-sayuran	69	8	11	88
Buah-buahan	14.689	-	-	-

4.2 Tanaman perdagangan/komoditas

4.2.1 Kelapa Sawit

- a. Belum Diproduksi: 7.768 pohon
- b. Berproduksi: 27.959 pohon

LAMPIRAN I

5. DATA PANGAN KECAMATAN

- 5.1 Luas Tambah Tanam Inmas Padi Insus: 88 ha
- 5.2 Penyalur Urea Lini IV dalam Minggu Pelaporan: 830 ton
- 5.3 Penyalur TSP Lini IV dalam Minggu Pelaporan: 125 ton

6. TRANSPORTASI

- 6.1 Jenis alat angkutan lokal yang digunakan di kecamatan
 - 6.1.1 Sepeda 7.075 buah
 - 6.1.2 Dokar/Delman 2 buah
 - 6.1.3 Gerobak/Cikar 41 buah
 - 6.1.4 Becak 88 buah
 - 6.1.5 Sepeda motor 1.343 buah
 - 6.1.6 Oplet/Mikrolet 8 buah
 - 6.1.7 Mobil dinas 3 buah
 - 6.1.8 Mobil pribadi 65 buah
 - 6.1.9 Truk 12 buah
- 6.2 Komunikasi
 - 6.2.1 TV umum: 9 buah
 - 6.2.2 Telepon umum: 4 buah
 - 6.2.3 Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu: 1 buah
 - 6.2.4 Orari/Krap: 25 buah
 - 6.2.5 Penduduk Kecamatan yang menggunakan fasilitas listrik PLN: 17 desa
 - 6.2.6 Penduduk Kecamatan yang memakai air minum:
 - a. PAM: 194 orang
 - b. Badan Pengelola Air: 1 orang
 - c. Pompa Jet/Pompa Tangan: 577 orang
 - d. Sumur : 9.269 orang

7. BIDANG POLKAM

- 7.1 Pembinaan ketentraman dan pertahanan sipil
 - 7.1.1 Jumlah anggota Hansip se-kecamatan: 1.640 orang
 - 7.1.2 Jumlah anggota Kamra se-kecamatan: 103 orang
 - 7.1.3 Jumlah pos kamling/pos ronda: 149 buah
- 7.2 Pembinaan kesatuan bangsa
 - 7.2.1 Jumlah Penduduk WNI
 - a. Yang sudah ditatar P4: 31.903 orang
 - b. Yang belum ditatar P4: 37 orang

LAMPIRAN 1

7.3 Pembinaan masyarakat

7.3.1 Komisaris Orsospol

a. PPP

- Komisaris kecamatan: 1 orang
- Komisaris desa: 10 orang

b. GOLKAR

- Komisaris kecamatan: 1 orang
- Komisaris desa: 17 orang

c. PDI

- Komisaris kecamatan: 1 orang
- Komisaris desa: 4 orang

7.4 Organisasi Kemasyarakatan

7.4.1 Kesamaan kegiatan: 6 buah

7.4.2 Kesamaan profesi: 2 buah

7.4.3 Kesamaan agama: 4 buah

a. Islam: 8 buah

b. Hindu: 1 buah

7.4.4 Kesamaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: 2 buah

7.5 Media Massa

7.5.1 Koran Masuk Desa (KMD): 2 buah

8. PEMILIHAN UMUM

8.1 Jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilu 1992

8.1.1 Pemilih pemula: 4.387 orang

8.1.2 Pemilih non-pemula: 23.220 orang

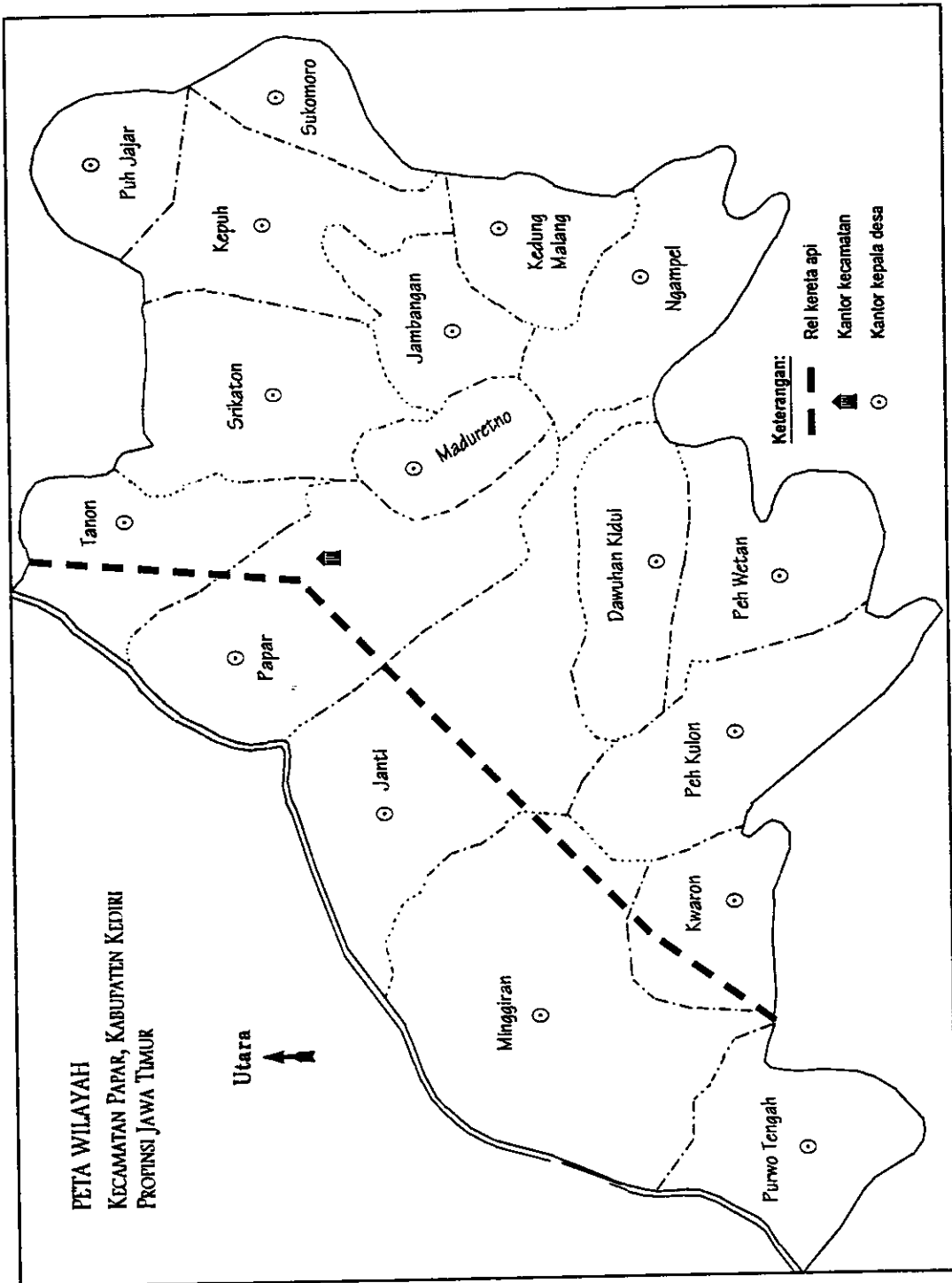
8.2. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1992

8.2.1. Pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya: 4.349 orang

8.2.2. Pemilih non-pemula yang menggunakan hak pilihnya: 21.778 orang

Sumber: Daftar Isian Data Monografi Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Juni 1995.

LAMPIRAN 2



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA